

DESATU

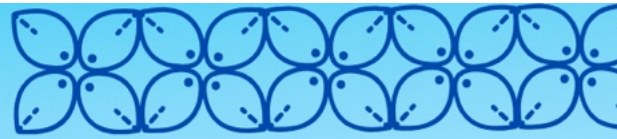
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

GRAND DESIGN

TRAVEL & TOURISM STRATEGIES

Special Case: Improving Indonesia's Creative Economy

20
24



KATA PENGANTAR



S

alam Wonderful Indonesia!


Melesatnya peringkat Indonesia pada Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2024 memberikan gambaran kondisi pembangunan Kepariwisata yang semakin menuju ke arah positif.

Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) tersebut, Indonesia berhasil menempati peringkat ke 22 dari total 119 negara dan menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan berkelanjutan.

Meskipun demikian, Indonesia masih terus berbenah terkait pilar-pilar yang masih harus ditingkatkan dalam menuju daya saing global yang lebih tinggi. Penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat data-data capaian kepariwisataan Indonesia agar mampu memberikan dampak signifikan pada tingkat nasional dan global.


Dalam rangka menuju 15 besar dunia, Kemenparekraf/Baparekraf melalui Deputy Bidang Kebijakan Strategis menginisiasi kebijakan Grand Design Travel & Tourism Strategies (GDTTS) melalui kerangka Penguatan Indikator TTDI Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor; Pengembangan IPKN (Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional) yang berkelanjutan pada tingkat Provinsi; Pembangunan IPKKK (Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota) yang berdaya saing; serta Penguatan pengembangan ekonomi kreatif Indonesia.

*Dessy
Ruhati*



Kerangka pembangunan kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan ini bukanlah hal yang sederhana, melainkan harus melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan terkait dalam mendukung capaian daya saing Indonesia di tingkat global. Selain itu, dibutuhkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang terintegrasi mulai dari level daerah hingga level global. Buku ini membantu dalam mengelaborasi kebijakan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tingkat nasional dalam mendukung capaian di tingkat global, sehingga dapat menghasilkan kolaborasi yang terintegrasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang akan dihadapi.

Semoga *grand design strategy* ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan di tingkat global, dan berperan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif masa depan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi, serta mampu membantu Indonesia mampu keluar dari negara *middle income trap*.



Jakarta, Oktober 2024

**Deputi Bidang Kebijakan Strategis
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif**

RINGKASAN EKSEKUTIF



Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024 merupakan edisi kedua dari index yang dikembangkan dari Seri Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI), yang merupakan index unggulan dari World Economic Forum (WEF) yang telah dipublikasi sejak tahun 2007. Secara khusus, TTDI memberikan tinjauan strategis dan holistik tentang ekonomi pariwisata, termasuk faktor-faktor pendukung internal dan eksternal pengembangan T&T serta sifat saling ketergantungan mereka. Selain itu, indeks ini menyediakan platform yang berharga untuk dialog multistakeholder, memungkinkan para pemangku kepentingan merumuskan kebijakan dan tindakan yang tepat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagai suatu sistem yang memiliki sifat kompleks karena melibatkan berbagai elemen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep multiaspek, multisektor, multiaktor, dan multikoridor, yang menunjukkan bahwa pariwisata bukan hanya berkaitan dengan satu aspek atau sektor tertentu, melainkan merupakan interaksi dari berbagai aspek, sektor, aktor, dan jalur pengembangan yang berbeda. Dengan mengadopsi pendekatan tersebut, pembangunan kepariwisataan Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang terintegrasi, inklusif, dan berdaya saing global, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil perhitungan TTDI 2024 dengan menggunakan Kerangka penilaian yang terbaru yakni 5 Dimensi, 17 Pilar, dan 102 indikator, Indonesia menempati peringkat ke 22 dari 119 negara, yang dimana mengalami peningkatan sebanyak +48 peringkat dari peringkat 70 pada tahun 2013, atau mengalami kenaikan +14 peringkat dari tahun 2019. Berdasarkan performansi pada pilar-pilar TTDI 2024, Indonesia mencatat peningkatan performa signifikan pada 3 pilar, yaitu: Price Competitiveness; Ground & Port Infrastructure; dan Travel & Tourism Demand Sustainability. Namun demikian, kami juga mencatat bahwa terdapat pilar-pilar yang mengalami penurunan diantaranya adalah Safety & Security, Prioritization of T&T, Openness to T&T, Air Transport Infrastructure, Tourist Services & infrastructure, dan Non-Leisure Resources.



Pembangunan sektor kepariwisataan di Indonesia memiliki urgensi yang sangat tinggi, karena pariwisata dan ekonomi kreatif mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, serta pengembangan sosial-budaya dan pelestarian lingkungan. Urgensi pembangunan ini juga meliputi Kontribusi Ekonomi yang Signifikan, Pengembangan Infrastruktur dan Investasi, Peningkatan Daya Saing dan Daya Tarik Global, serta Pengelolaan Pariwisata yang Berkelanjutan dan Berbasis Inovasi. Dengan berbagai urgensi di atas, pembangunan kepariwisataan di Indonesia perlu dilakukan secara strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih luas.

Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia pada tataran global, Indonesia sejatinya diharapkan dapat menyusun roadmap terintegrasi melalui Grand Design Travel & Tourism Strategies. Grand Strategy Kepariwisataan ini akan berperan sebagai kerangka kerja bagi pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai visi dan misi pariwisata serta ekonomi kreatif Indonesia di kancah global. Kerangka kerja tersebut digunakan sebagai langkah strategis dalam menuju peringkat Indonesia 15 besar dunia. Indonesia harus mampu memperkuat daya saing kepariwisataan yang dimiliki, karena negara-negara pesaing tidak akan tidur dan akan melakukan perbaikan secara terstruktur dan terintegrasi dengan baik, seperti halnya yang dilakukan oleh Singapore, Korea Rep., New Zealand, Thailand, Malaysia, dan bahkan India.

Namun demikian, selain penguatan daya saing pariwisata Indonesia, perlu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor Ekonomi Kreatif baik secara Nasional dan Lokal. Melalui penyusunan Grand Design ini, penguatan pertumbuhan Ekraf di Indonesia dapat diperkuat dengan menambah creative city yang tercantum dalam Unesco Creative City Network. Untuk level nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi kreatif juga telah dimasukan indikator pertumbuhan Ekraf seperti Jumlah KaTa Kreatif, dan Jumlah produktivitas tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif dalam penguatan IPKN dan Pembangunan IPKKK yang nantinya akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui program pembangunan yang terintegrasi, diharapkan grand strategy ini dapat menawarkan langkah-langkah strategi pembangunan kepariwisataan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholders. Salah satu strategi yang digunakan adalah memperkuat kolaborasi dengan berbagai K/L maupun berbagai stakeholder terkait. Kolaborasi tersebut dalam rangka memperkuat data-data capaian kepariwisataan Indonesia agar mampu memberikan dampak positif pada tingkat nasional dan global. Kerangka grand strategy ini dibagi kedalam 3 (tiga) fokus, yakni:





1. Penguatan Indikator TTDI Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor berdasarkan roadmap strategis akan mencapai peringkat ke 13-15 di tahun 2030 dengan skor mencapai 4,8-4,9. Adapun strategi penguatan TTDI Indonesia meliputi:

- Menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif.
- Meningkatkan Infrastruktur Pariwisata.
- Meningkatkan Kualitas Layanan.
- Memperkuat Promosi Digital.
- Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.
- Peningkatan Aksesibilitas dan Keterbukaan.
- Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas yang tinggi.
- Memperkuat kondisi Health & Hygiene.
- Mempererat kolaborasi dengan mitra internasional.
- Menerapkan indikator TTDI sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama pada K/L.

2. Pengembangan IPKN (Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional) yang berkelanjutan pada tingkat Provinsi, diharapkan pada tahun 2030 mencapai rata-rata Indonesia dengan skor 3,950 – 4,000, melalui strategi pengembangan IPKN sebagai berikut:

- Menyusun Kembali kerangka perhitungan IPKN berbasis TTDI 2024.
- Menyusun Kebijakan dan Regulasi Pendukung di setiap daerah.
- Memperkuat Peran Pemerintah Daerah.
- Menerapkan Indikator IPKN di Tingkat Daerah.
- Meningkatkan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga.
- Pemanfaatan Teknologi Digital sebagai Platform Digital untuk Pemantauan.
- Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Evaluasi Berkala.

3. Pembangunan IPKKK (Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota) yang berdaya saing pada tingkat Kabupaten/kota, dengan target 38 Provinsi dapat di asistensi pembangunan IPKKK pada tahun 2028 melalui strategi sebagai berikut:

- Membangun Dimensi, Pilar, dan indikator IPKKK.
- Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemda Provinsi.
- Membangun kebijakan dan regulasi terkait IPKKK oleh Pemerintah Daerah.
- Pemanfaatan Teknologi Digital.
- Melaksanakan Asistensi, Pelatihan dan Bimbingan Teknis.
- Membentuk Forum Pariwisata Daerah.
- Menerapkan Indikator IPKKK di Tingkat Daerah.



Selain itu, dalam GDTTS ini juga menyebutkan adanya pengembangan sektor ekonomi kreatif yang berdaya saing melalui roadmap Penguatan pembangunan Ekonomi Kreatif melalui 3 (tiga) indikator pembangunan, yaitu Jumlah Unesco Creative Cities Network (UCCN) sebanyak: 10 Kota pada tahun 2029; Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB sebesar: 8,37% pada Tahun 2029; dan Produktivitas Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Rp. 98,759 Juta /Orang pada tahun 2029. Adapun strategi yang dapat dilaksanakan untuk mencapai target indikator sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. Menyusun program pembangunan KaTa Kreatif berbasis Potensi Lokal yang dapat ditumbuhkembangkan
2. Memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pertumbuhan ekraf nasional
3. Meningkatkan Investasi ekraf untuk menuju kemandirian nasional dalam rangka memperkuat jumlah tenaga kerja Ekraf
4. Memperluas fasilitasi infrastruktur ekraf di berbagai daerah dengan tujuan meningkatkan kreativitas pelaku ekraf yang sejalan dengan menciptakan ekonomi tinggi
5. Memperkuat keterampilan SDM Ekraf
6. Menyusun integrated marketing creative economy system dalam memajukan Kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif

Mendorong keterlibatan Anchor Industry dalam proses hilirisasi produk ekraf yang unggul dan berdaya saing

Untuk menghadapi 3 (tiga) fokus utama diatas, masa depan pembangunan kepariwisataan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan adaptif untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia di masa depan. Dengan target peringkat 15 besar dunia, Kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia diharapkan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
RINGKASAN EKSEKUTIF	<i>iv</i>
DAFTAR ISI	<i>vi</i>
DAFTAR TABEL	<i>viii</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>ix</i>
BAGIAN SATU – KEPARIWISATAAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN	12
PERSPEKTIF PARIWISATA & KEPARIWISATAAN	12
LATAR BELAKANG DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	13
PARTNERSHIP & COLLABORATION DALAM KEPARIWISATAAN	14
TUJUAN PEMBANGUNAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN	16
URGENSI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	17
BAGIAN DUA – PROFIL KEPARIWISATAAN INDONESIA SAAT INI	22
OVERVIEW TRAVEL & TOURISM DEVELOPMENT INDEX (TTDI)	22
PERFORMANSI KEPARIWISATAAN INDONESIA DI KANCAH GLOBAL	28
ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN INDONESIA	30
ANALISIS DEMAND & SUPPLY KEPARIWISATAAN INDONESIA	33
BAGIAN TIGA – SIAPA LAWAN/PESAING INDONESIA	39
KONDISI TRAVEL & TOURISM GLOBAL	40
TREN & ISU PARIWISATA GLOBAL.....	43
BENCHMARKING PERFORMANSI KEPARIWISATAAN DI ASIA PASIFIK	48
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI ASIA PASIFIK	58
ANALISA PESAING POTENSIAL INDONESIA.....	127
BAGIAN EMPAT – STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA	136
INDONESIA GOLDEN TOURISM 2045	136
GRAND STRATEGY KEPARIWISATAAN INDONESIA	144
ROADMAP STRATEGI KEPARIWISATAAN INDONESIA	212
BAGIAN LIMA – MENGUKUR TINGKAT KEBERHASILAN	220
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA	220
STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA	226
KESIMPULAN DAN MASA DEPAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA	229
DAFTAR PUSTAKA.....	234

DAFTAR TABEL

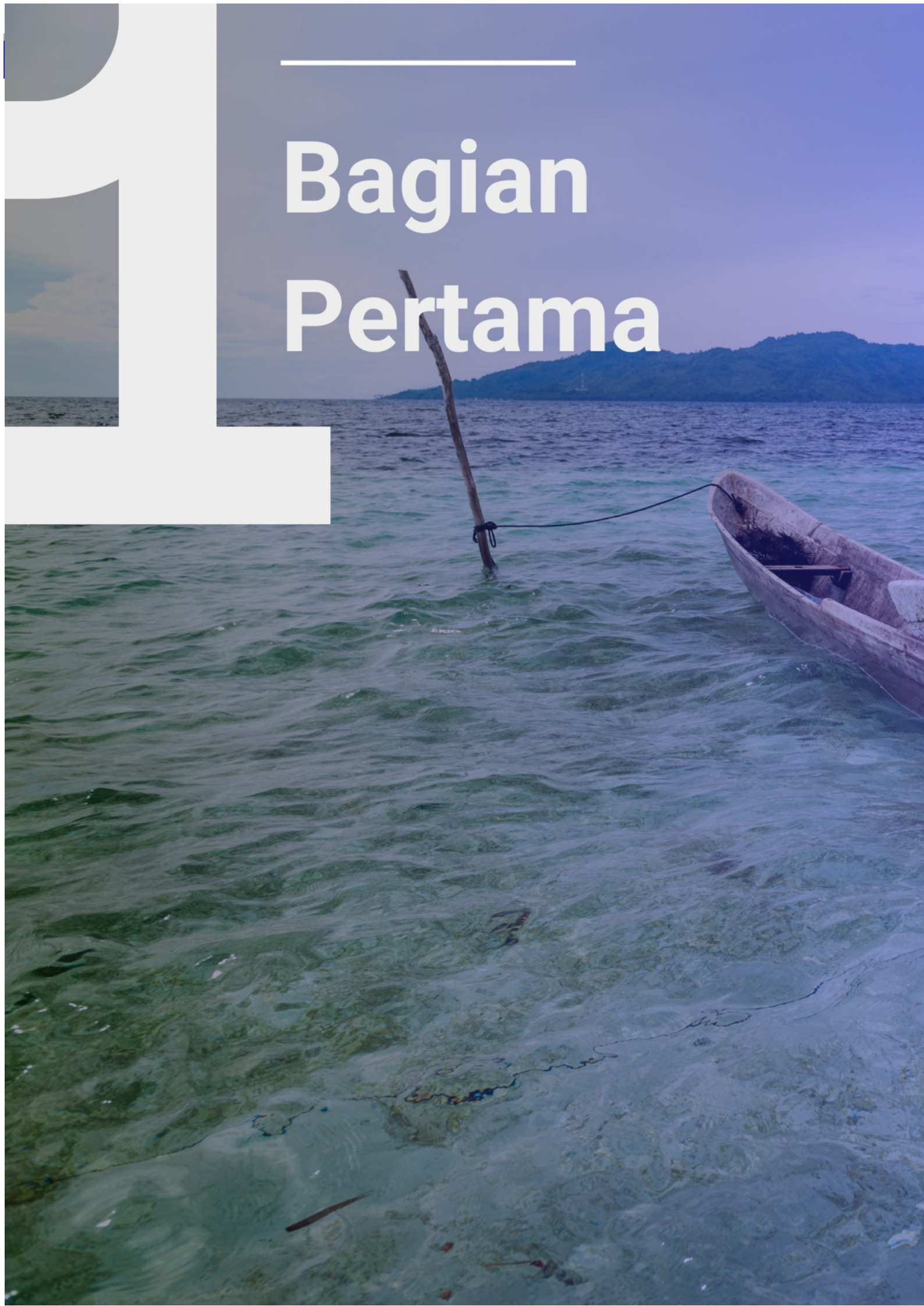
Tabel 1 Benchmarking Analysis antara Indonesia dan Negara-Negara Asia Pasifik.....	51
Tabel 2 Kebijakan Penguatan Dimensi/Pilar/Indikator di Kawasan Asia Pasifik.....	59
Tabel 3 Indikator Capaian Transformasi Ekonomi pada Sektor Pariwisata dalam RPJPN 2025-2045.....	139
Tabel 4 Indikator Program Pembangunan Pariwisata Menuju Tahun 2029.....	143
Tabel 5 Strategi Peluang Perbaikan TTDI Indonesia	146
Tabel 6 Redesign Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional berbasis TTDI 2024.....	179
Tabel 7 Kerangka Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota berbasis IPKN..	198
Tabel 8 Key Success Factor & Key Performance Indicator Pembangunan Kepariwisata Nasional.....	222

DAFTAR GAMBAR

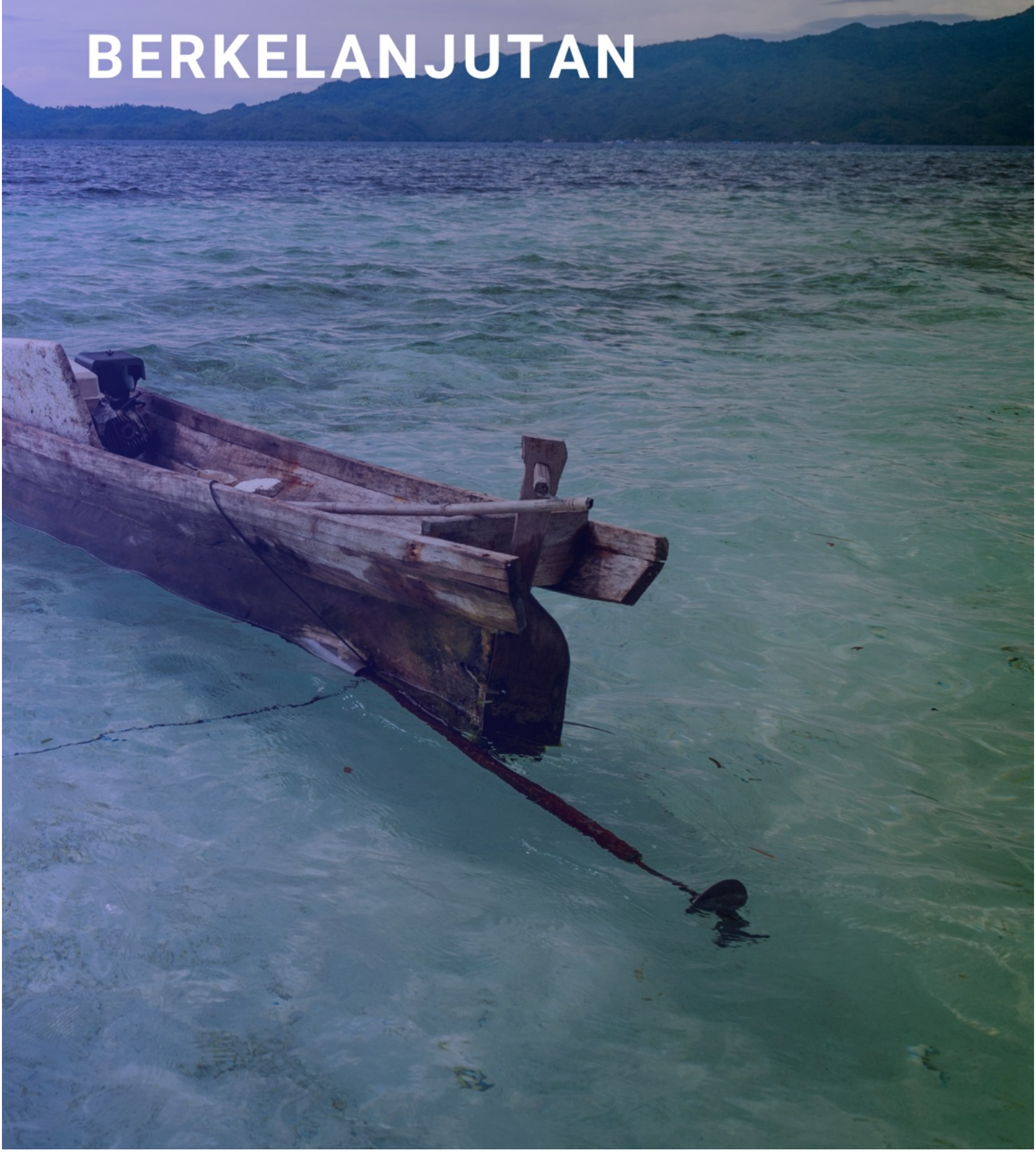
Gambar 1 Analisis pertumbuhan TTDI seluruh Kawasan	23
Gambar 2 Kerangka Kerja TTDI 2024.....	26
Gambar 3 Capaian TTCI/TTDI Indonesia pada tahun 2013 – 2024	28
Gambar 4 Kinerja Pilar TTDI 2024 Indonesia	29
Gambar 5 Top 5 & Bottom 5 Pillar TTDI Indonesia	29
Gambar 6 Kunjungan Wisatawan mancanegara Tahun 2019-2023.....	33
Gambar 7 Negara Asal Kunjungan Wisman Tahun 2023	34
Gambar 8 Pengembangan 10 DPP.....	35
Gambar 9 Total Kedatangan Wisatawan Global dan Tingkat Pertumbuhan pada Tahun 2010-2023	40
Gambar 10 Total Pendapatan dan Laju Pertumbuhan Pariwisata Global pada tahun 2010-2023	41
Gambar 11 Proporsi Total Pendapatan Pariwisata Global terhadap PDB Global pada tahun 2010-2023.....	41
Gambar 12 Jumlah Kedatangan Wisatawan Global dan Tingkat Pertumbuhannya pada Tahun 2010-2023.....	42
Gambar 13 Tren dan Isu Pariwisata Global	44
Gambar 14 Overview Kinerja T&T Kawasan Asia Pacific.....	49
Gambar 15 Perhitungan TTDI untuk Kawasan Asia Pasifik	50
Gambar 16 Pemetaan Visi Indonesia 2045 dengan Sasaran Visi	138
Gambar 17 Arah Kebijakan Pariwisata dalam kerangka pembangunan jangka Panjang.....	140
Gambar 18 Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata	141
Gambar 19 Pemetaan Indikator Pembangunan Pariwisata antara Agenda Pembangunan, Program Pembangunan, dan Kegiatan Pembangunan.	142
Gambar 20 Kerangka Grand Strategy Pembangunan Kepariwisata Indonesia	145



Bagian Pertama



KEPARIWISATAAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN



BAGIAN SATU – KEPARIWISATAAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN


PERSPEKTIF PARIWISATA & KEPARIWISATAAN

Pariwisata dan kepariwisataan sering kali dianggap memiliki makna yang sama oleh banyak orang. Meskipun berkaitan, keduanya memiliki cakupan dan makna yang berbeda. Memahami perbedaan antara kedua istilah ini penting untuk melihat seperti apa industri pariwisata dijalankan dan bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian, budaya, dan lingkungan. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke suatu destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, edukasi, bisnis, atau berbagai alasan lainnya. Pariwisata melibatkan interaksi langsung antara wisatawan dengan destinasi, seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah, menikmati keindahan alam, atau mengikuti acara-acara budaya. Pada intinya, pariwisata lebih berfokus pada pengalaman wisatawan, yang mencakup akomodasi, transportasi, atraksi, dan berbagai layanan pendukung yang mereka gunakan dari daerah asal, selama perjalanan, dan kembali ke daerah asalnya.

Pariwisata dapat dikategorikan menjadi berbagai jenis, seperti pariwisata alam, budaya, petualangan, hingga pariwisata kesehatan. Setiap jenis pariwisata menawarkan pengalaman yang berbeda, yang semuanya bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi wisatawan dan menciptakan memori yang berkesan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut juga mengartikan kepariwisataan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Pariwisata telah menjadi sektor menjanjikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Banyak negara yang melirik pariwisata karena manfaat ekonominya. Akibatnya, industri pariwisata telah berkembang menjadi salah satu industri yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. UN Tourism mendefinisikan pariwisata sebagai suatu kegiatan bagi mereka yang menjelajahi dan tinggal di suatu tempat di luar lingkungan alamnya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun atau lebih dari 24 jam, untuk tujuan hiburan, bisnis, dan tujuan lainnya (UNWTO, 2010). Definisi tersebut ini lebih luas dari yang diketahui kebanyakan orang tentang pariwisata yakni hanya tentang liburan.

Pariwisata secara umum diakui berperan besar dalam pembangunan sosial ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang (Telfer & Sharpley, 2010). Sektor ini mendukung dalam menghasilkan pendapatan, berpeluang menciptakan lapangan kerja, dan memperoleh



devisa (Sinclair, 1998). Beberapa pakar berpendapat bahwa pariwisata tumbuh sebagai hasil dari kemajuan sosial ekonomi, sementara yang lain melihat pariwisata sebagai alat yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan (Karaoulanis & Vasiliki, 2018). Untuk menjamin bahwa manfaatnya menjangkau masyarakat lokal, perluasan sektor ini memerlukan bantuan pemerintah dan penerapan kebijakan (Karaoulanis & Vasiliki, 2018). Lebih jauh lagi, investasi asing langsung sangat penting bagi pertumbuhan sektor pariwisata, yang meningkatkan lapangan kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB) global secara signifikan (Nunkoo & Seetanah, 2018). Secara umum, tempat-tempat tuan rumah memandang pariwisata sebagai sarana untuk melestarikan warisan budaya mereka, mendiversifikasi ekonomi mereka, dan melindungi lingkungan (Nunkoo & Seetanah, 2018).

Kepariwisataan merupakan konsep yang lebih luas daripada pariwisata. Kepariwisataan mencakup seluruh sistem, struktur, dan elemen yang mendukung industri pariwisata. Ini melibatkan perencanaan, kebijakan, pengelolaan, serta pengembangan destinasi pariwisata oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Kepariwisataan berfungsi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kepariwisataan tidak hanya memfasilitasi kegiatan wisata, tetapi juga memastikan bahwa sektor tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Ini melibatkan berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, pengembangan standar kualitas pelayanan, dan promosi destinasi. Kepariwisataan juga mengurus regulasi serta kebijakan yang berhubungan dengan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pariwisata.

Pariwisata berfokus pada aktivitas wisata itu sendiri, yakni perjalanan dan pengalaman yang dirasakan oleh wisatawan yang merupakan hasil dari interaksi langsung antara wisatawan dan destinasi dikunjungi. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan sistem yang memungkinkan pariwisata terjadi dan berkembang. Kepariwisataan mencakup aspek-aspek pendukung, seperti pembangunan hotel, penyediaan transportasi, kebijakan promosi pariwisata, serta regulasi untuk melindungi budaya dan lingkungan lokal. Dengan kata lain, kepariwisataan adalah fondasi yang mendukung aktivitas pariwisata dan memastikan bahwa pariwisata berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh, berkelanjutan dan dilakukan secara inklusif. Diperlukan kebijakan kepariwisataan dalam memadukan infrastruktur yang baik, sumber daya manusia yang berkompetensi, perlindungan budaya dan lingkungan serta promosi yang efektif, sehingga Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di kancah internasional.

LATAR BELAKANG DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pariwisata sangat terkait dengan kepentingan multi aktor, multi sektor dan multi *stakeholder*, sebagaimana diingatkan Aribowo et al., (2018), walaupun menjadi industri potensial sebagai sumber utama devisa negara, seringkali sektor ini kurang optimal dalam mendorong sektor ekonomi lainnya di daerah karena terhambat oleh kurangnya koordinasi antar elemen secara bersama-sama. Sebagai sebuah rantai nilai, Roxas et al. (2020) mengemukakan bahwa

dukungan, komitmen, dan kerja sama para pemangku kepentingan pariwisata sangat penting untuk mempromosikan pariwisata.


Sementara itu, Camilleri (2018) menyatakan bahwa pariwisata adalah industri yang kompleks, terdiri dari banyak perusahaan berbeda dengan tujuan yang sama dalam menawarkan produk, layanan, dan jasa kepada pengunjung. Banyak negara berkembang yang menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan (Ramesh, 2010; Richardson, 2010) dan pertumbuhan ekonomi utama (Khaksar et al., 2023), karena kedatangan wisatawan dapat menghasilkan aktivitas ekonomi lain melalui aktivitas bisnis yang mempengaruhi rantai pasokan ekonomi. Pada negara lainnya, pariwisata merupakan pendorong pendapatan tambahan, yang dampaknya bergantung pada banyak faktor seperti kebijakan lingkungan dan infrastruktur (He & Li, 2021).

Dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) langsung pariwisata (*tourism direct gross domestic product*), pariwisata telah menyumbang USD 3,5 triliun, atau 4% dari PDB global, terhadap ekonomi global pada tahun 2019. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mengurangi PDB langsung dari pariwisata lebih dari setengahnya, yang berjumlah USD 2,0 triliun, atau 1,8% dari PDB global. Pengurangan ini menyumbang hampir 70% dari penurunan PDB global pada tahun 2020. Kedatangan wisatawan internasional anjlok hingga 73% pada tahun 2020, sementara pendapatan ekspor dari pariwisata (penerimaan pariwisata internasional dan transportasi penumpang) menurun hingga 63% secara riil. 42% dari seluruh kerugian dalam perdagangan internasional pada tahun 2020 diharapkan akan diperhitungkan oleh prediksi kerugian USD 1,1 triliun dalam pendapatan ekspor dari pariwisata internasional (UNWTO, 2021).

Pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi salah satu sektor unggulan ekonomi nasional. Keanekaragaman alam, budaya, dan kuliner Indonesia menawarkan pengalaman yang tak tertandingi bagi wisatawan. Namun, tantangan seperti infrastruktur, dampak lingkungan, dan promosi yang kurang efektif harus diatasi melalui upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pengelolaan yang baik dan komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan daya saingnya di pasar pariwisata global dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakatnya.

PARTNERSHIP & COLLABORATION DALAM KEPARIWISATAAN

McNamara (2012) menjabarkan dalam hubungan lintas organisasi, kemitraan merupakan serangkaian interaksi yang terus berkembang, dimulai dari kerja sama pada level terendah, kemudian di tengah terdapat koordinasi, dan kolaborasi ditempatkan pada level tertinggi. Kerja sama didefinisikan oleh McNamara (2012) sebagai interaksi antara para pelaku yang mampu mencapai tujuan organisasi tetapi memilih untuk bekerja sama dalam struktur dan kebijakan yang ada untuk melayani kepentingan individu. Kerja sama menggambarkan hubungan dengan orang lain sehingga mereka dapat mencapai tujuan masing-masing. Selanjutnya, koordinasi ditempatkan pada posisi tengah yang didefinisikan sebagai komunikasi antara para pelaku di mana hubungan formal dimobilisasi karena bantuan pihak lain diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kerja sama lebih mungkin berkembang




ketika cara beroperasinya tetap independen, implementasi kemitraan didasarkan pada koneksi personel pada level terendah organisasi, informasi penting dibagikan melalui saluran informal, dan keputusan dibuat oleh masing-masing personel (McNamara, 2012).

Kolaborasi merupakan rangkaian kemitraan pada level tertinggi setelah kerjasama dan koordinasi. McNamara (2012) mengartikannya sebagai komunikasi antara aktor yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang kompleks berdasarkan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama untuk tugas-tugas yang saling terkait yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Karena membutuhkan sumber daya, hubungan, koneksi yang lebih dekat, bahkan batas antar organisasi akan tidak nampak jelas, kolaborasi tidak sama dengan kerjasama dan koordinasi (McNamara, 2012). Jika metode aksi bersama dikembangkan berdasarkan kebutuhan kelompok, implementasi kemitraan berpusat pada partisipatif, komunikasi terbuka dan teratur digunakan untuk mempromosikan saling pengertian, dan keputusan dibuat melalui proses partisipatif, kolaborasi dapat lebih mungkin dilakukan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang dinamis dan terus berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Keberhasilan dalam industri ini tidak hanya ditentukan oleh potensi alam dan budaya, tetapi juga oleh sinergi dan kerjasama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan dan kolaborasi dalam kepariwisataan menjadi salah satu elemen penting yang dapat meningkatkan daya saing, mempercepat pembangunan, dan memastikan keberlanjutan sektor ini. Perencanaan dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang efektif dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui kolaborasi dan kemitraan. Membangun hubungan multi-pemangku kepentingan melalui kolaborasi dan kemitraan merupakan strategi yang berhasil dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan (Graci, 2013).

Kolaborasi dalam kepariwisataan mencakup keterlibatan berbagai pihak, baik dari sektor publik, swasta, masyarakat lokal, akademisi, maupun organisasi internasional. Masing-masing pihak memainkan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan produktif. Kemitraan dalam kepariwisataan menawarkan berbagai keuntungan yang penting bagi pengembangan sektor ini. Pertama, kemitraan dapat memperkuat *branding* pariwisata suatu destinasi. Misalnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam kampanye pemasaran pariwisata dapat memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan visibilitas destinasi wisata di pasar internasional. Kedua, kemitraan memungkinkan terjadinya aliran sumber daya dan keahlian yang lebih optimal. Misalnya, pemerintah mungkin memiliki kendali atas kebijakan dan regulasi, sementara sektor swasta dapat menyumbang investasi dan teknologi. Sementara itu, masyarakat lokal berkontribusi dalam pelestarian budaya dan menyediakan pengalaman otentik bagi wisatawan. Dengan adanya kemitraan, sumber daya manusia, teknologi, dan modal dapat digerakkan secara lebih efektif.

Ketiga, kolaborasi juga memainkan peran penting dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Keberlanjutan dalam pariwisata tidak hanya berarti menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangan sehingga mereka mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pariwisata. Program wisata berbasis komunitas (*community-based tourism*) merupakan contoh dari kolaborasi yang



sukses di mana masyarakat lokal berperan sebagai pelaku utama dalam pariwisata. Meskipun kemitraan menawarkan banyak manfaat, proses kolaborasi dalam sektor pariwisata juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, sektor swasta mungkin lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, sedangkan pemerintah dan masyarakat lokal mungkin lebih mengutamakan pembangunan jangka panjang dan pelestarian lingkungan.

Selain itu, birokrasi yang kompleks dan regulasi yang tidak jelas sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan kemitraan yang efektif, terutama dalam konteks kerjasama antara sektor publik dan swasta. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan transparansi juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan. Untuk memajukan pariwisata melalui kemitraan dan kolaborasi, diperlukan pendekatan yang inklusif dan fleksibel. Pemerintah perlu memainkan peran fasilitator dengan menciptakan regulasi yang mendukung serta membuka ruang dialog yang transparan antara semua pihak yang terlibat. Di sisi lain, sektor swasta dan masyarakat harus terus berkolaborasi dengan semangat kemitraan untuk menciptakan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.


Kemitraan dan kolaborasi adalah fondasi penting dalam pengembangan kepariwisataan yang sukses dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan aktor internasional, potensi besar pariwisata dapat dioptimalkan, tantangan-tantangan dapat diatasi, serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat terjaga. Dengan pendekatan yang inklusif dan strategi kolaborasi yang kuat, pariwisata di Indonesia dan dunia dapat terus tumbuh dan menjadi sektor yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN

Mengembangkan daya saing industri pariwisata Indonesia merupakan prioritas penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara ini. Sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang signifikan, dengan keindahan alam yang beragam, warisan budaya yang kaya, dan infrastruktur yang terus berkembang (Achmad et al., 2023; Kabu & Tandilino, 2021). Pemerintah dan otoritas pariwisata telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kinerja sektor ini dan membuatnya lebih kompetitif secara global.

Salah satu tujuan utama dalam mengembangkan daya saing pariwisata Indonesia adalah untuk meningkatkan posisi bangsa di pasar pariwisata global. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah membuat langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja sektor pariwisatanya di tingkat global, dengan sektor ini menunjukkan daya saing yang cukup tinggi dan terus meningkat (Haryana, 2020). Sektor pariwisata di Indonesia bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sistem yang kompleks dari komponen yang saling terkait, termasuk infrastruktur, pemangku kepentingan, dan fasilitas pendukung, yang semuanya memainkan peran penting dalam menentukan kinerja industri secara keseluruhan.

Secara makro, pengembangan sektor pariwisata telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, berkontribusi pada peningkatan perolehan devisa dan potensi manfaat bagi perekonomian daerah. Secara mikro, pertumbuhan industri pariwisata



juga telah memengaruhi kesejahteraan badan usaha dan pekerja perorangan yang terlibat di sektor tersebut. Untuk lebih memperkuat daya saing pariwisata Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mempromosikan destinasi wisata, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional, dan meningkatkan daya tarik keseluruhan dari penawaran pariwisata Indonesia.

Pada akhirnya, tujuan pengembangan daya saing pariwisata Indonesia bersifat multifaset, meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan kolaboratif. Dengan menangani prioritas ini, Indonesia bertujuan untuk memposisikan industri pariwisatanya sebagai pendorong utama kemakmuran ekonomi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat sektor tersebut (Ayu & Diswandi, 2023; Kusumawardhana et al., 2021).


Secara keseluruhan, tujuan pengembangan daya saing pariwisata Indonesia di TTDI adalah pendekatan multifaset yang melibatkan peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pariwisata, promosi pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya Indonesia yang beragam untuk menarik semakin banyak pengunjung dan berkontribusi pada kemakmuran ekonomi negara. Pendekatan ini bertujuan untuk semakin memperkuat posisi Indonesia di pasar pariwisata global, memastikan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang industri tersebut. Dengan menangani faktor-faktor utama seperti infrastruktur, kolaborasi pemangku kepentingan, dan keterlibatan masyarakat, Indonesia dapat terus meningkatkan daya tarik dan daya saing penawaran pariwisatanya, yang pada akhirnya mendorong kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi bangsa ini.

Selain itu, Pembangunan kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan ini berperan penting dalam pengembangan ekonomi masa depan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi. Strategi ini juga sebagai suatu cara agar Indonesia mampu keluar dari negara-negara *middle income trap*. Melalui pembangunan kepariwisataan yang terstruktur dan terintegrasi, diharapkan dapat sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu memberikan *multiplier effect* bagi seluruh elemen dan ekosistem kepariwisataan Indonesia.

URGENSI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pengembangan kepariwisataan telah muncul sebagai topik penting dalam diskursus kebijakan, khususnya dalam konteks dinamika ekonomi global, pertukaran budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Seiring dengan semakin diakuinya berbagai manfaat yang dapat diberikan oleh pariwisata, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengayaan budaya, kebutuhan untuk mengembangkan sektor ini menjadi semakin jelas.

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pariwisata sering digembar-gemborkan sebagai landasan pembangunan ekonomi, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) banyak negara. Menurut World Travel and Tourism




Council (WTTC), sektor perjalanan dan pariwisata menyumbang sekitar 10,4% dari PDB global pada tahun 2019, yang menggarisbawahi peran pentingnya dalam mendorong ketahanan ekonomi. Lebih jauh lagi, sektor ini merupakan sumber lapangan kerja yang substansial, yang mendukung jutaan pekerjaan di seluruh dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di banyak negara berkembang, pariwisata berfungsi sebagai sumber pendapatan yang vital, menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat lokal dan mendorong kewirausahaan. Selain itu, manfaat ekonomi dari pariwisata melampaui sekadar pemasukan keuangan.

Kunjungan wisatawan sering kali memacu pembangunan infrastruktur, yang mengarah pada peningkatan transportasi, akses kualitas kesehatan, dan layanan publik. Akibatnya, pembangunan ini dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan, menciptakan hubungan simbiosis antara pariwisata dan masyarakat lokal. Misalnya, pembangunan jalan dan bandara baru tidak hanya memfasilitasi perjalanan tetapi juga meningkatkan akses ke layanan penting bagi penduduk setempat. Akan tetapi, penting untuk menyadari bahwa keuntungan ekonomi dari pariwisata tidak didistribusikan secara merata; kesenjangan sering muncul, sehingga memerlukan pemeriksaan kritis terhadap praktik pengembangan pariwisata yang adil. Selain itu, pariwisata dapat merangsang ekonomi lokal dengan mendorong pertumbuhan usaha kecil, seperti restoran, toko, dan operator tur. Semangat kewirausahaan ini dapat menghasilkan ekonomi lokal yang dinamis yang tidak terlalu bergantung pada perusahaan besar. Lebih jauh, pariwisata dapat mendorong pembangunan regional dengan menarik investasi di berbagai sektor, termasuk perhotelan, hiburan, dan ritel. Akan tetapi, penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi ini berkelanjutan dan tidak mengorbankan budaya lokal atau lingkungan.


Meskipun banyak manfaat yang terkait dengan pengembangan pariwisata, beberapa tantangan harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah dampak krisis global, seperti pandemi atau konflik geopolitik, yang dapat sangat mengganggu pola perjalanan dan stabilitas ekonomi. Pandemi COVID-19, misalnya, telah memberikan dampak yang dapat mematikan industri pariwisata, menyebabkan penurunan perjalanan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi banyak negara. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata sebagai pendorong ekonomi utama dapat membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi permintaan wisatawan.

Ketergantungan ini menggarisbawahi perlunya strategi diversifikasi yang dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kerentanan pariwisata. Dengan mengembangkan kebijakan yang adaptif, kerangka ekonomi yang lebih tangguh, masyarakat dan industri pariwisata dapat lebih tahan terhadap guncangan eksternal dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Misalnya, mengembangkan industri alternatif, seperti pertanian atau teknologi, dapat memberikan sumber pendapatan tambahan dan mengurangi ketergantungan pada pariwisata. Selain itu, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pariwisata massal menimbulkan tantangan yang signifikan. Kepadatan penduduk di destinasi populer dapat menyebabkan menipisnya sumber daya alam, kerusakan habitat, dan peningkatan polusi. Penanganan masalah ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang cermat untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak membahayakan integritas ekosistem lokal. Menerapkan pembatasan pengunjung, mempromosikan perjalanan di luar jam sibuk,



dan mendorong praktik pariwisata yang bertanggung jawab dapat membantu mengurangi sebagian tekanan ini.

Urgensi pembangunan kepariwisataan ditegaskan oleh implikasinya yang beraneka ragam terhadap pertumbuhan ekonomi, kohesi sosial, dan terutama terkait keberlanjutan lingkungan. Ketika negara-negara bergulat dengan kompleksitas dunia yang saling terhubung, kebutuhan akan pendekatan yang bernuansa dan holistik terhadap pembangunan kepariwisataan menjadi semakin jelas. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh sektor ini, para pemangku kepentingan dapat bekerja menuju model pariwisata berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat lokal dan ekonomi global. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kepariwisataan bergantung pada komitmen terhadap praktik etis, keterlibatan pemangku kepentingan, dan visi bersama untuk masa depan yang berkelanjutan. Implikasi dari wacana ini jauh melampaui ranah kepariwisataan, yang mencerminkan nilai-nilai dan prioritas masyarakat yang lebih luas dalam lanskap global yang terus berkembang. Saat kita melangkah maju, penting untuk membina industri pariwisata yang tidak hanya berkembang secara ekonomi tetapi juga menghormati dan melestarikan tatanan budaya dan lingkungan dunia kita.



Bagian Kedua





PROFIL KEPARIWISATAAN INDONESIA SAAT INI

BAGIAN DUA – PROFIL KEPARIWISATAAN INDONESIA SAAT INI

OVERVIEW TRAVEL & TOURISM DEVELOPMENT INDEX (TTDI)

Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024 merupakan edisi kedua dari index yang dikembangkan dari *Seri Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)*, yang merupakan index unggulan dari World Economic Forum (WEF) yang telah dipublikasi sejak tahun 2007. Edisi 2024 dari TTDI diproduksi bekerja sama dengan Universitas Surrey. Sebagai mitra pengetahuan indeks, universitas ini memberikan dukungan teknis dan strategis yang berharga untuk TTDI dan konten terkait. Edisi indeks ini juga mencakup beberapa perbaikan yang dirancang untuk memanfaatkan data baru yang tersedia seperti indikator yang baru dikembangkan oleh World Travel and Tourism Council (WTTC) tentang dampak lingkungan dan sosial T&T, untuk membuat indeks lebih spesifik untuk T&T, ringkas, dan konsisten dalam cakupan negara.

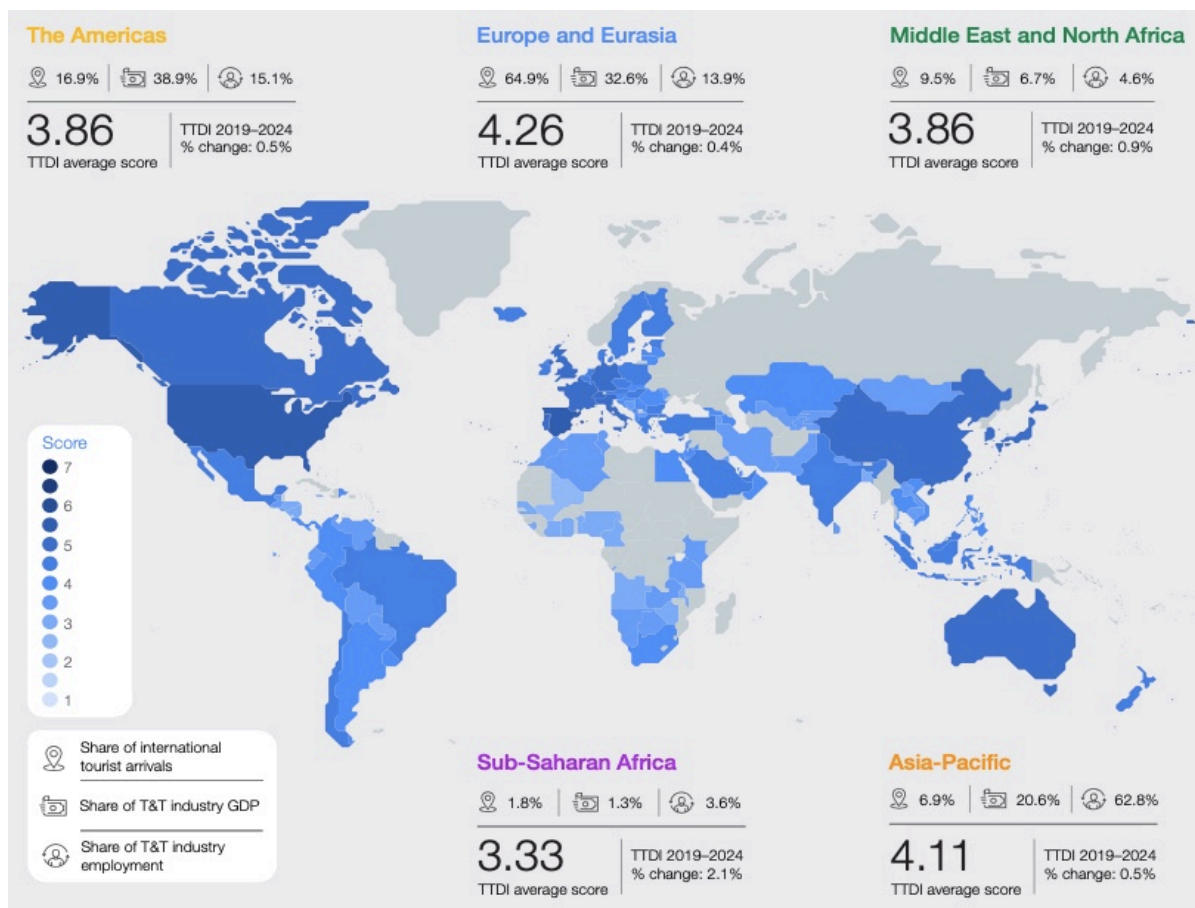
Secara khusus, TTDI memberikan tinjauan strategis dan holistik tentang ekonomi pariwisata, termasuk faktor-faktor pendukung internal dan eksternal pengembangan T&T serta sifat saling ketergantungan mereka. Selain itu, indeks ini menyediakan platform yang berharga untuk dialog multistakeholder, memungkinkan para pemangku kepentingan merumuskan kebijakan dan tindakan yang tepat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Harap dicatat bahwa perubahan yang dilakukan pada indeks membatasi perbandingannya dengan TTDI 2021 yang diterbitkan sebelumnya. Oleh karena itu, rilis indeks ini mencakup hasil tahun 2019 dan 2021 yang dihitung ulang menggunakan penyesuaian baru. Hasil TTDI 2024 mencerminkan data terbaru yang tersedia pada saat pengumpulan (akhir 2023).

Mengingat bahwa T&T secara historis menyumbang sepersepuluh dari PDB dan lapangan kerja global, para pengambil keputusan di sektor ini dan sektor lainnya harus menyadari bahwa dibutuhkan pendekatan strategis dan holistik jika mereka ingin menavigasi dengan baik terkait kondisi ketidakpastian dan membuka potensi besar T&T untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan komunitas kepariwisataan di seluruh dunia. TTDI dirancang untuk memberikan konteks dan memfasilitasi *Stakeholder* multipihak dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami tren dan risiko yang muncul dalam T&T global, memandu perumusan kebijakan, praktik operasional dan strategi investasi.


Banyak perbaikan yang dilakukan pada indeks didasarkan pada umpan balik dari para pemangku kepentingan dan masukan dari Kelompok Penasihat TTDI, yang mencakup perwakilan dari Bloom Consulting, the European Travel Commission (ETC), the Global Sustainable Tourism Council (GSTC), the Hong Kong Polytechnic University, the International Air Transport Association (IATA), JLL Hotels & Hospitality Group, Mastercard, New York

University, the Pacific Asia Travel Association (PATA), Trip.com Group, the United Nations World Tourism Organization (UN Tourism), the University of Surrey, Visa, the World Bank and WTTC. Selain itu, indeks ini mengandalkan kolaborasi erat dengan mitra data berikut: AirDNA, Bloom Consulting, CoStar, Euromonitor International, GlobalPetrolPrices.com, IATA, the International Civil Aviation Organization (ICAO), the International Union for Conservation of Nature (IUCN), MMGY TCI Research, Tripadvisor, UN Tourism and WTTC.

Sektor T&T mengalami kenaikan pascapandemi, namun pemulihannya beragam dan kondisi operasionalnya penuh tantangan. Meskipun 71 dari 119 negara yang masuk dalam peringkat TTDI mengalami peningkatan skor antara tahun 2019 dan 2024, skor indeks rata-rata hanya 0,7% di atas skor sebelum pandemi. Kinerja pilar dalam berbagai perekonomian menyoroti pemulihan permintaan T&T global yang bertepatan dengan peningkatan kapasitas dan konektivitas rute udara global, meningkatnya keterbukaan internasional, serta meningkatnya permintaan dan investasi pada bidang pariwisata berbasis sumber daya alam dan budaya.



Gambar 1 Analisis pertumbuhan TTDI seluruh Kawasan
Sumber: (WEF & University of Surrey, 2024)




Secara umum, kawasan Eropa dan Asia-Pasifik dan negara-negara lain yang berpendapatan tinggi pada khususnya terus memiliki kondisi yang paling menguntungkan untuk pengembangan T&T. Perekonomian dengan peringkat tertinggi pada edisi TTDI 2024 adalah milik Amerika, Spanyol, Jepang, Perancis, Australia, Jerman, Inggris, Cina, Italia, dan Swiss. Berkat keunggulan khususnya mulai dari lingkungan bisnis yang menguntungkan dan perjalanan terbuka kebijakan untuk transportasi, pariwisata dan ICT yang berkembang dengan baik infrastruktur dan alam, budaya dan non-rekreasi atraksi, 30 pencetak gol terbanyak TTDI menyumbang lebih dari 75% PDB industri T&T pada tahun 2022 dan 70% dari Pertumbuhan PDB antara tahun 2020 dan 2022.

Kondisi yang mendukung sektor T&T di negara-negara berkembang terus membaik, tetapi jauh lebih banyak yang diperlukan untuk menutup kesenjangan dalam pengembangan sektor ini. Negara-negara berpendapatan rendah hingga menengah ke atas menyumbang 52 dari 71 negara yang telah meningkatkan skor TTDI mereka sejak tahun 2019. Arab Saudi (+5,7%, dari peringkat ke-50 ke peringkat ke-41) dan Uni Emirat Arab (+4,4%, dari peringkat ke-25 ke peringkat ke-18) adalah satu-satunya negara berpendapatan tinggi yang termasuk di antara 10 negara yang paling meningkat antara tahun 2019 dan 2024, dengan sisanya merupakan negara berkembang seperti Uzbekistan (+7,8%, dari peringkat ke-94 ke peringkat ke-78), Côte d'Ivoire (+6,4%, dari peringkat ke-116 ke peringkat ke-114), Albania (+5,9%, dari peringkat ke-78 ke peringkat ke-66), Tanzania (+4,5%, dari peringkat ke-88 ke peringkat ke-81), Indonesia (+4,5%, dari peringkat ke-36 ke peringkat ke-22), Mesir (+4,3%, dari peringkat ke-66 ke peringkat ke-61), Nigeria (+4,2%, dari peringkat ke-113 ke peringkat ke-112), dan El Salvador (+4,0%, dari peringkat ke-101 ke peringkat ke-97).

Selain itu, ekonomi T&T besar yang sedang berkembang seperti Indonesia, Brasil (+3,3%, dari peringkat ke-34 ke peringkat ke-26) dan Turki (+3,1%, dari peringkat ke-37 ke peringkat ke-29) bergabung dengan China (+1,0%, dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-8) di kuartil teratas TTDI. Meskipun pertumbuhan di atas rata-rata, negara-negara berpendapatan bukan tinggi menyumbang hampir 90% dari skor indeks di bawah rata-rata, yang menunjukkan kebutuhan akan investasi lebih lanjut untuk menutup kesenjangan dalam kondisi yang mendukung jika negara-negara ini ingin meningkatkan pangsa pasar T&T mereka dan meningkatkan kesiapan mereka menghadapi risiko dan peluang di masa depan.

Peningkatan ICT Readiness dan kebijakan bisnis serta ketenagakerjaan di era pandemi menguntungkan T&T, tetapi diperlukan lebih banyak kemajuan di berbagai bidang seperti ketahanan dan kesetaraan tenaga kerja. Didorong oleh perluasan akses daring, jangkauan jaringan seluler, dan penggunaan pembayaran digital, lonjakan skor pilar ICT Readiness sebesar 7,2% mencerminkan digitalisasi layanan T&T lebih lanjut. Sementara itu, kebijakan ekonomi secara luas yang diterapkan selama pandemi mungkin telah mempermudah operator T&T untuk menjalankan bisnis.

Namun, momentum pertumbuhan sektor T&T berada di bawah tekanan dari berbagai tantangan seperti pasar tenaga kerja yang ketat (terutama di negara-negara T&T yang sudah mapan), penurunan peringkat kredit, dan kendala fiskal yang semakin besar, serta kekhawatiran tentang kondisi kesehatan dan keamanan. Ketahanan dan inklusi pasar tenaga kerja juga semakin penting bagi T&T, tetapi hampir 70% tenaga kerja T&T di negara-negara



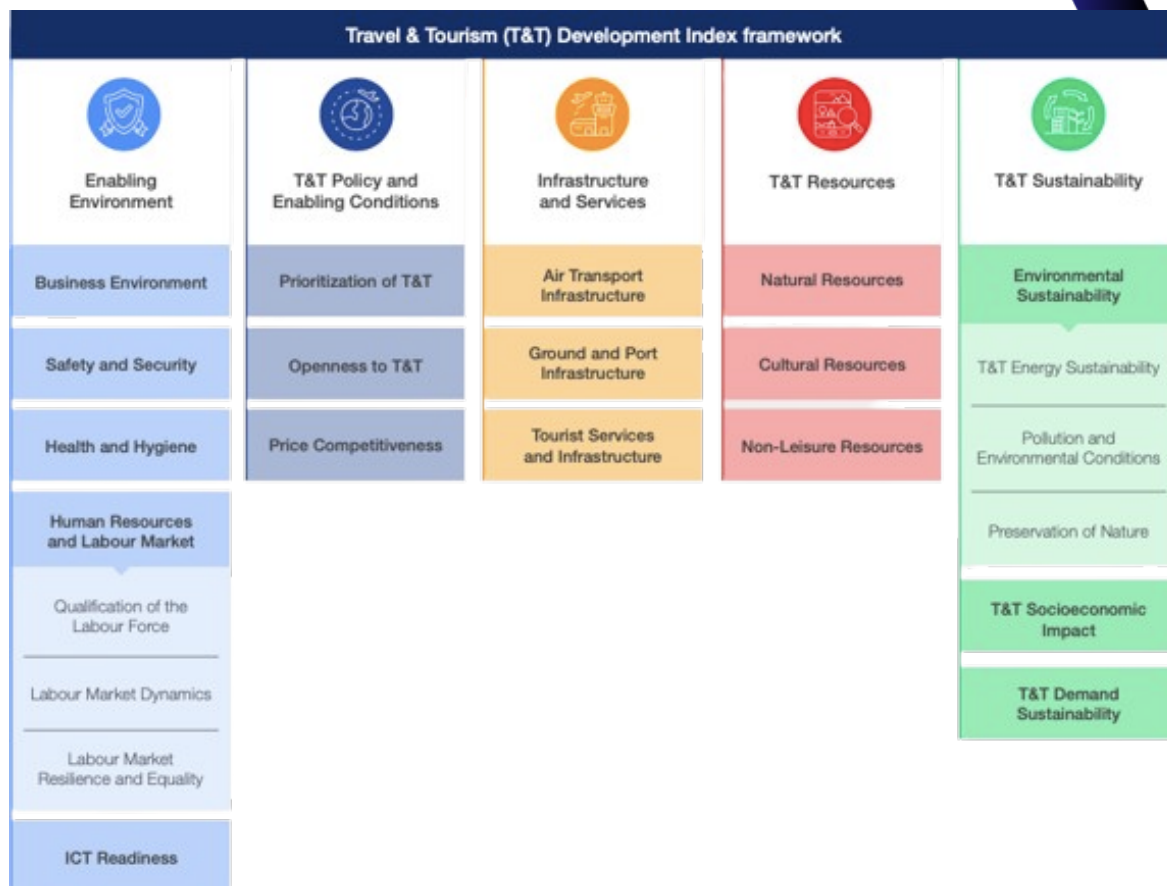
berpendapatan rendah berbasis di negara-negara yang mendapat skor di bawah rata-rata untuk subpilar Ketahanan dan Kesetaraan Pasar Tenaga Kerja baru TTDI, yang mengukur berbagai aspek seperti kesetaraan kesempatan kerja, hak-hak pekerja, dan perlindungan sosial.

Sumber daya T&T, khususnya aset alam dan budaya, menawarkan peluang bagi negara berkembang untuk pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh pariwisata. Distribusi sumber daya alam dan budaya kurang berkorelasi dengan tingkat pendapatan negara dibandingkan dengan faktor pendorong T&T lainnya, dengan banyak negara berkembang dengan portofolio sumber daya alam dan budaya yang kuat mampu menciptakan sektor pariwisata yang berkembang pesat. Namun, memanfaatkan sumber daya ini secara efektif memerlukan strategi manajemen, promosi, dan perlindungan yang komprehensif, di samping investasi dalam infrastruktur yang kuat dan kesiapan TIK. Oleh karena itu, terlepas dari potensinya, banyak negara belum mampu secara efektif memanfaatkan warisan mereka yang kaya untuk pertumbuhan T&T, dengan hanya 20 pelaku dimensi T&T teratas – terutama di Amerika, Asia-Pasifik, dan Eropa – yang melampaui indeks rata-rata sekitar 90% pada tahun 2024.

Meskipun ada kemajuan, menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan tetap menjadi masalah utama bagi sektor T&T. Meningkatnya skor pilar Keberlanjutan Lingkungan dan Dampak Sosial Ekonomi T&T antara tahun 2019 dan 2024 mencerminkan kemajuan luas di berbagai bidang seperti keberlanjutan energi dan kontribusi sektor terhadap lapangan kerja bergaji tinggi. Namun, sebagian dari kemajuan ini, seperti berkurangnya emisi sektor selama pandemi, kemungkinan bersifat sementara, sementara penurunan skor untuk Keberlanjutan Permintaan T&T (sejak 2021) mencerminkan munculnya kembali tantangan keberlanjutan historis seperti musim yang tinggi dan kepadatan penduduk karena permintaan perjalanan terus pulih. Lebih jauh, hasil tersebut mengungkapkan efek ekonomi dan sosial T&T yang bernuansa, dengan sektor tersebut menjadi sumber utama pekerjaan bergaji relatif tinggi di negara-negara berkembang, sementara paritas gender dalam lapangan kerja T&T merupakan masalah utama bagi kawasan seperti MENA dan Asia Selatan.

Kerangka Penilaian TTDI


TTDI adalah alat penting bagi pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam mengembangkan sektor ini. Data yang dihasilkan dari indeks ini memberikan wawasan bagi negara untuk merumuskan strategi kebijakan pariwisata yang lebih baik, meningkatkan kualitas layanan, dan mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti isu kualitas infrastruktur, regulasi yang tidak mendukung investasi, dan yang terpenting adalah akses dari aktivitas wisata yang tidak terkontrol. Secara global, TTDI mendorong praktik-praktik pariwisata berkelanjutan ramah lingkungan dengan mendorong negara untuk tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi timbul.



Gambar 2 Kerangka Kerja TTDI 2024
 Sumber: (WEF & University of Surrey, 2024)

Tujuan dari pengukuran TTDI adalah untuk mengevaluasi kesiapan dan kinerja berbagai negara dalam mendukung pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan berkelanjutan. Indeks ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan sektor pariwisata, antara lain infrastruktur, kebijakan pemerintah, kelestarian lingkungan, dan destinasi pariwisata. Indeks ini terdiri dari 5 dimensi, 17 pilar, dan 102 indikator individual yang didistribusikan ke berbagai pilar. Akan tetapi, kelima dimensi tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan indeks dan hanya digunakan untuk tujuan penyajian dan kategorisasi.

- 1) Dimensi Enabling Environment mencakup kondisi umum yang diperlukan untuk beroperasi dan berinvestasi di suatu negara dan terdiri dari lima pilar:
 - Business Environment: Pilar ini mencakup sejauh mana lingkungan kebijakan suatu negara mendukung perusahaan untuk menjalankan bisnis dan berinvestasi.
 - Safety and Security: Pilar ini mengukur sejauh mana suatu negara mengekspos penduduk lokal, wisatawan, dan bisnis terhadap risiko keamanan.
 - Health and Hygiene: Pilar ini mengukur infrastruktur dan aksesibilitas layanan kesehatan serta keamanan kesehatan.
 - Human Resources and Labour Market: Pilar ini mengukur ketersediaan karyawan yang berkualitas dan dinamisme, ketahanan, dan kesetaraan pasar tenaga kerja, serta

- 
- tingkat perlindungan bagi pekerja. Pilar ini terdiri dari subpilar Kualifikasi Tenaga Kerja, Dinamika Pasar Tenaga Kerja, dan Ketahanan dan Kesetaraan Pasar Tenaga Kerja.
- ICT Readiness: Pilar ini mengukur ketersediaan dan penggunaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta layanan digital.
- 2) Dimensi T&T Policy and Enabling Conditions yang Memungkinkan mencakup kebijakan atau aspek strategis tertentu yang memengaruhi sektor T&T secara lebih langsung dan terdiri dari tiga pilar:
- Prioritization of T&T: Pilar ini mengukur sejauh mana pemerintah secara aktif mempromosikan, melacak, dan berinvestasi dalam pengembangan sektor T&T.
 - Openness to T&T: Pilar ini mengukur seberapa terbukanya suatu negara terhadap pengunjung dan memfasilitasi perjalanan lintas batas.
 - Price Competitiveness: Pilar ini mengukur seberapa mahal biaya bepergian atau beroperasi di suatu negara.
- 3) Dimensi Infrastructure and Services mencakup ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik dan layanan pariwisata dan terdiri dari tiga pilar:
- Air Transport Infrastructure: Pilar ini mengukur sejauh mana infrastruktur suatu negara menawarkan konektivitas udara dan akses yang memadai bagi wisatawan domestik dan internasional.
 - Ground and Port Infrastructure: Pilar ini mengukur ketersediaan layanan dan infrastruktur transportasi darat dan pelabuhan yang efisien dan mudah diakses.
 - Tourist Services and Infrastructure: Pilar ini mengukur investasi dalam, dan ketersediaan serta produktivitas, layanan dan infrastruktur pariwisata.
- 4) Dimensi Travel & Tourism Resources mencakup “alasan utama untuk bepergian” ke suatu destinasi dan terdiri dari tiga pilar:
- Natural Resources: Pilar ini mengukur modal alam yang tersedia serta pengembangan aktivitas pariwisata luar ruangan. Modal alam didefinisikan dalam hal lanskap, taman alam, dan kekayaan fauna. Sampai batas tertentu, pilar ini menangkap bagaimana sumber daya alam dipromosikan, bukan warisan alam yang sebenarnya ada di suatu negara.
 - Cultural Resources: Pilar ini mengukur ketersediaan sumber daya budaya seperti situs arkeologi dan fasilitas hiburan. Sampai batas tertentu, pilar ini menangkap bagaimana sumber daya budaya dipromosikan dan dikembangkan, bukan warisan budaya yang sebenarnya ada di suatu negara.
 - Non-Leisure Resources: Pilar ini mengukur sejauh mana dan daya tarik faktor-faktor yang mendorong bisnis dan perjalanan non-rekreasi lainnya, termasuk keberadaan kota-kota global, perusahaan-perusahaan besar, dan universitas-universitas terkemuka.
- 5) Dimensi Keberlanjutan Perjalanan & Pariwisata menangkap tantangan dan risiko keberlanjutan saat ini atau yang potensial yang dihadapi T&T dan terdiri dari tiga pilar:
- Environmental Sustainability: Pilar ini mengukur keberlanjutan energi sektor perjalanan dan pariwisata dan keberlanjutan umum lingkungan alam suatu ekonomi dan perlindungan sumber daya alam. Pilar ini terdiri dari subpilar Keberlanjutan Energi T&T, Polusi dan Kondisi Lingkungan, dan Pelestarian Alam.

- T&T Socioeconomic Impact: Pilar ini mengukur dampak ekonomi dan sosial T&T, termasuk kontribusi ekonomi yang ditimbulkan, penyediaan pekerjaan bergaji tinggi, dan kesetaraan gender tenaga kerja.
- T&T Demand Sustainability: Pilar ini mengukur faktor-faktor yang dapat mengindikasikan keberadaan, atau risiko yang terkait dengan, kepadatan penduduk, volatilitas permintaan, dan tren permintaan lain yang berpotensi tidak berkelanjutan.

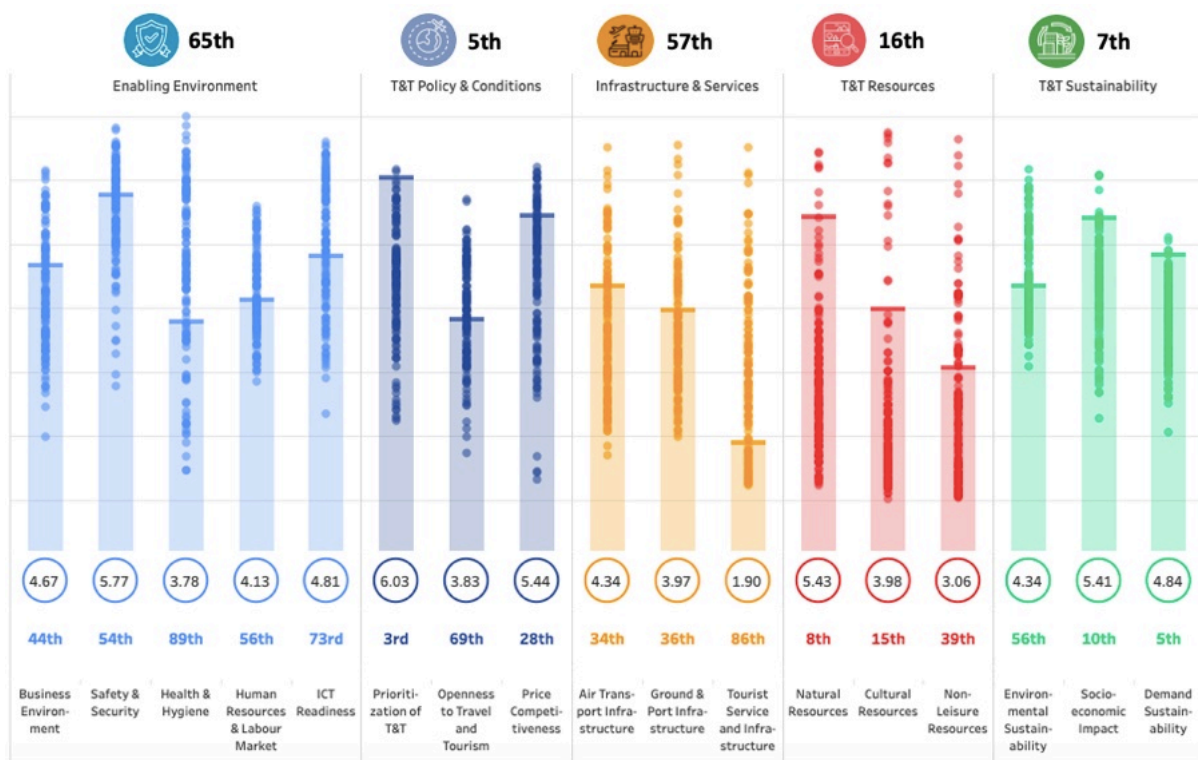
PERFORMANSI KEPARIWISATAAN INDONESIA DI KANCAH GLOBAL

Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan kinerja TTDI paling baik sejak tahun 2019, dengan peningkatan skor sebesar 4,5% antara edisi tahun 2019 dan 2024 (peringkat ke-36 hingga ke-22), menjadikannya salah satu dari empat negara non-berpenghasilan tinggi yang masuk dalam peringkat 30 besar dunia. Meskipun terjadi penurunan skor sebesar 3,8% antara tahun 2021 dan 2024, Prioritization of T&T (peringkat ke-3) tetap menjadi salah satu pilar terkuat di Indonesia, yang menyoroti dukungan pemerintah terhadap sektor ini. Selain itu, Travel & Tourism di Indonesia mendapatkan manfaat yang sangat besar dari Price Competitiveness (2019 hingga 2024 (+7,9%, peringkat 69 ke 28) serta Natural Resources (peringkat ke-8) dan Cultural Resources (+16,2%, tetap berada di peringkat ke-15).



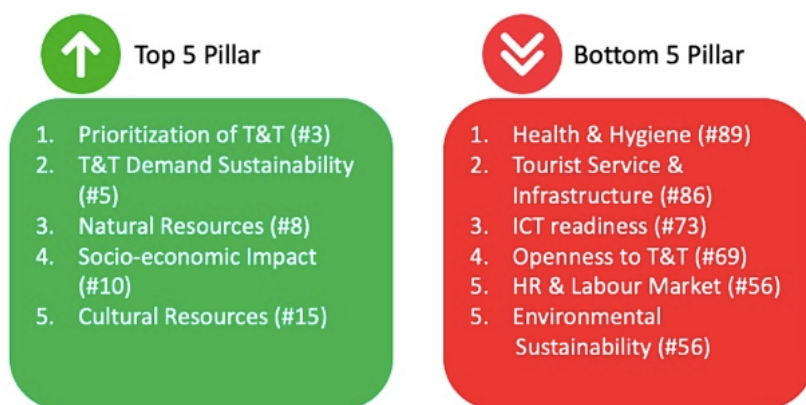
Gambar 3 Capaian TTCI/TTDI Indonesia pada tahun 2013 – 2024

Secara khusus, sejak tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam T&T Socioeconomic Impact (+13%, peringkat 25 ke 10), T&T Demand Sustainability (+20,4%, peringkat 52 hingga 5) dan Ground and Port Infrastructure (+13%, peringkat 52 ke 36). Perkembangan lainnya yang dicapai oleh Indonesia sejak tahun 2019 di antaranya Health and Hygiene (+5,5%, peringkat 91 hingga 89) dan ICT Readiness (+8,3%, tetap di peringkat 73). Meskipun pertumbuhan T&T di atas rata-rata, negara-negara *Low to upper- middle-income economies* seperti negara berkembang lainnya hampir 90% nya berada di bawah rata-rata skor TTDI (yakni 4,0). Hal ini menunjukkan perlunya investasi lebih lanjut untuk menutup kesenjangan dalam rangka peningkatan pangsa pasar T&T, serta kesiapan dalam menghadapi risiko dan peluang di masa depan.



Gambar 4 Kinerja Pilar TTDI 2024 Indonesia
 Sumber: (World Economic Forum, 2024)

Berdasarkan hasil pengukuran TTDI 2024, Dimensi T&T Policy & Conditions dan Dimensi T&T Sustainability masuk kedalam 10 besar dunia yakni, masing-masing peringkat ke-5 dan peringkat ke-7 dunia. Namun demikian Dimensi Infrastructure & Services dan Dimensi Enabling Environment berada diatas peringkat 50 besar dunia, yakni peringkat ke-65 dan peringkat ke-57. Selain itu, pada pilar TTDI terdapat Top 5 Pillar dan Bottom 5 Pillar, yakni:



Gambar 5 Top 5 & Bottom 5 Pillar TTDI Indonesia

Dalam mendukung perbaikan untuk peningkatan pilar TTDI tersebut, dibutuhkan upaya kolaborasi lintas sektor agar dapat memperkuat daya saing kepariwisataan Indonesia kedepan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah saat ini adalah dengan menyusun atau membangun perencanaan yang terintegrasi antara Indikator-indikator TTDI dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga. Hal ini bertujuan agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui pembangunan kepariwisataan Indonesia di kancah global.

Upaya yang akan dibangun tersebut, sejatinya akan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tertuang dalam Misi No. 2 tentang Transformasi Ekonomi serta Arah Pembangunan IE 4 tentang Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, melalui Kebijakan Pariwisata berupa Pariwisata Indonesia sebagai Destinasi unggulan Dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi khususnya di sektor pariwisata. Selanjutnya, Penguatan peringkat TTDI juga akan sejalan dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025 – 2029 melalui Program Pembangunan berupa Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan Sasaran Indikator 2029 yakni Travel and Tourism Development Index (TTDI) yakni 20 besar dunia. Namun demikian, berdasarkan Rapat Koordinasi Penguatan Capaian TTDI dengan Kemenkomarves pada tanggal 11 Juni 2024, TTDI Indonesia dapat menempati peringkat 15 besar dunia.

ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN INDONESIA

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi pariwisata yang sangat besar, memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan yang perlu dianalisis dalam konteks TTDI. Untuk mengoptimalkan potensi yang ada, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkesinambungan guna memperbaiki kelemahan tersebut, serta memastikan bahwa pembangunan pariwisata memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan memperbaiki kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang ada, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisatanya dan menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun internasional.

Analisis Kekuatan Pembangunan Kepariwisata Indonesia

- 1) Keanekaragaman Alam dan Lingkungan yang Kaya
 - Sumber Daya Alam. Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya, dari pegunungan, hutan tropis, pantai berpasir putih, hingga terumbu karang yang beraneka ragam. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Bromo, Danau Toba, dan Pulau Komodo adalah beberapa contoh destinasi wisata alam yang telah dikenal dunia.
 - Keanekaragaman Hayati. Indonesia termasuk salah satu negara megabiodiversity, dengan kekayaan flora dan fauna yang tak tertandingi. Taman nasional seperti Ujung Kulon, Lorentz, dan Way Kambas menjadi daya tarik wisatawan yang tertarik pada ekowisata dan pelestarian alam.

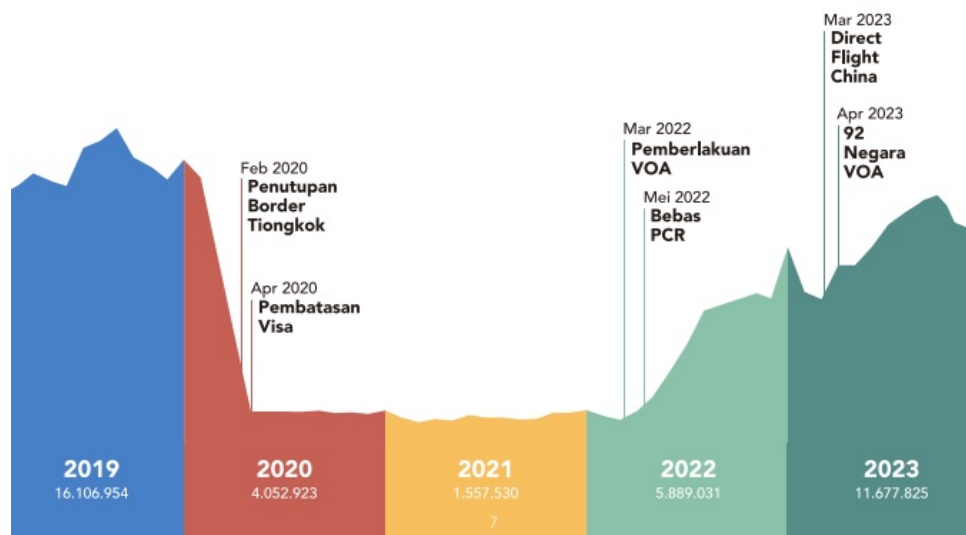
- Keunikan Geografi. Lokasi geografis Indonesia yang terletak di wilayah tropis serta berada di jalur Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) memberikan kekayaan destinasi wisata seperti gunung berapi aktif dan fenomena alam unik lainnya.
- 2) Kekayaan Budaya dan Warisan Sejarah
- Keragaman Etnis dan Budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang masing-masing memiliki tradisi, bahasa, dan kebudayaan unik. Warisan budaya ini mencakup seni tari, musik, pakaian tradisional, upacara adat, dan kuliner khas.
 - Warisan Dunia. Indonesia memiliki sejumlah situs warisan dunia yang diakui oleh UNESCO, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, serta sistem Subak di Bali. Keberadaan situs-situs ini menjadi daya tarik utama wisatawan untuk mempelajari sejarah dan warisan budaya Indonesia.
 - Event dan Festival Budaya. Beragam festival dan acara budaya yang diadakan di berbagai daerah, seperti Festival Danau Toba, Jember Fashion Carnival, serta Bali Art Festival, menjadi daya tarik tambahan yang memperkaya pengalaman wisatawan.
- 3) Kehangatan dan Keramahtamahan Masyarakat Lokal
- Hospitality yang Khas. Keramahan masyarakat Indonesia sudah dikenal di kalangan wisatawan mancanegara. Sikap ramah, toleran, dan keterbukaan masyarakat terhadap wisatawan menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan mendorong kunjungan ulang.
 - Peran Masyarakat Lokal. Banyak destinasi wisata yang dikelola oleh komunitas lokal, sehingga memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi langsung dan belajar tentang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Ini menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan Indonesia dari negara lain.
- 4) Dukungan Kebijakan dan Program Pemerintah
- Program Pariwisata Prioritas. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Program-program seperti "10 Bali Baru", National Tourism Strategic Areas (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN), serta pengembangan tourism villages menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata.
 - Kemudahan Akses Wisatawan. Kebijakan bebas visa bagi beberapa negara serta peningkatan infrastruktur bandara dan pelabuhan memberikan kemudahan akses bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.
- 5) Potensi Pasar Wisata Domestik yang Besar
- Pasar Wisata Domestik. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi pasar wisata domestik yang sangat besar. Perjalanan wisata domestik dapat menjaga stabilitas sektor pariwisata terutama saat terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara, seperti pada masa pandemi.
 - Minat Berwisata Masyarakat. Semakin tingginya minat masyarakat Indonesia untuk mengeksplorasi destinasi dalam negeri menjadi salah satu penggerak utama pariwisata domestik. Kenaikan ini dipicu oleh promosi destinasi lokal yang gencar, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Analisis Kelemahan Pembangunan Kepariwisata Indonesia

- 1) Keterbatasan Infrastruktur di Beberapa Destinasi
 - Aksesibilitas yang Kurang Memadai. Masih ada banyak destinasi wisata di Indonesia yang memiliki aksesibilitas terbatas, baik dari segi infrastruktur jalan, transportasi publik, maupun ketersediaan sarana prasarana seperti listrik, air bersih, dan internet. Hal ini menyulitkan wisatawan untuk menjangkau destinasi-destinasi baru yang memiliki potensi besar.
 - Kualitas Fasilitas Umum. Fasilitas umum seperti toilet, pusat informasi, layanan kesehatan, dan keamanan di beberapa destinasi wisata masih belum memenuhi standar internasional. Keterbatasan fasilitas ini dapat menurunkan kualitas pengalaman wisatawan.
- 2) Promosi dan Pemasaran yang Belum Optimal
 - Kurangnya Promosi Terarah. Promosi pariwisata Indonesia di pasar internasional masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Branding yang belum kuat serta kurangnya kampanye yang terarah menyebabkan daya tarik Indonesia kurang dikenal di pasar global.
 - Kurangnya Pemanfaatan Teknologi. Penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk promosi pariwisata masih belum optimal. Hal ini menyebabkan informasi mengenai destinasi wisata di Indonesia sulit diakses oleh wisatawan potensial yang menggunakan platform digital sebagai acuan utama mereka.
- 3) Kurangnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan
 - Tumpang Tindih Kebijakan. Keterbatasan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, serta masyarakat) sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pariwisata yang telah direncanakan.
 - Kendala Regulasi. Beberapa regulasi yang tumpang tindih serta birokrasi yang kompleks seringkali menjadi hambatan bagi pengembangan pariwisata, terutama terkait dengan perizinan usaha dan investasi di sektor ini.
- 4) Permasalahan Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial
 - Degradasi Lingkungan. Beberapa destinasi wisata di Indonesia mengalami kerusakan lingkungan akibat over-tourism, pengelolaan yang tidak ramah lingkungan, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas wisata. Degradasi lingkungan ini mengancam kelestarian destinasi wisata dan dapat menurunkan daya tarik pariwisata jangka panjang.
 - Ketidaksetaraan Manfaat Pariwisata. Pembangunan pariwisata sering kali belum memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal. Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan masalah sosial seperti ketimpangan pendapatan, serta munculnya konflik antara masyarakat lokal dan pelaku industri pariwisata.
- 5) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas
 - Keterbatasan SDM yang Profesional. Ketersediaan tenaga kerja profesional yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang pariwisata masih terbatas. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan dan pengelolaan destinasi wisata.
 - Perluasan Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata: Pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan SDM yang mampu bersaing secara global dan siap menghadapi tantangan di industri pariwisata.

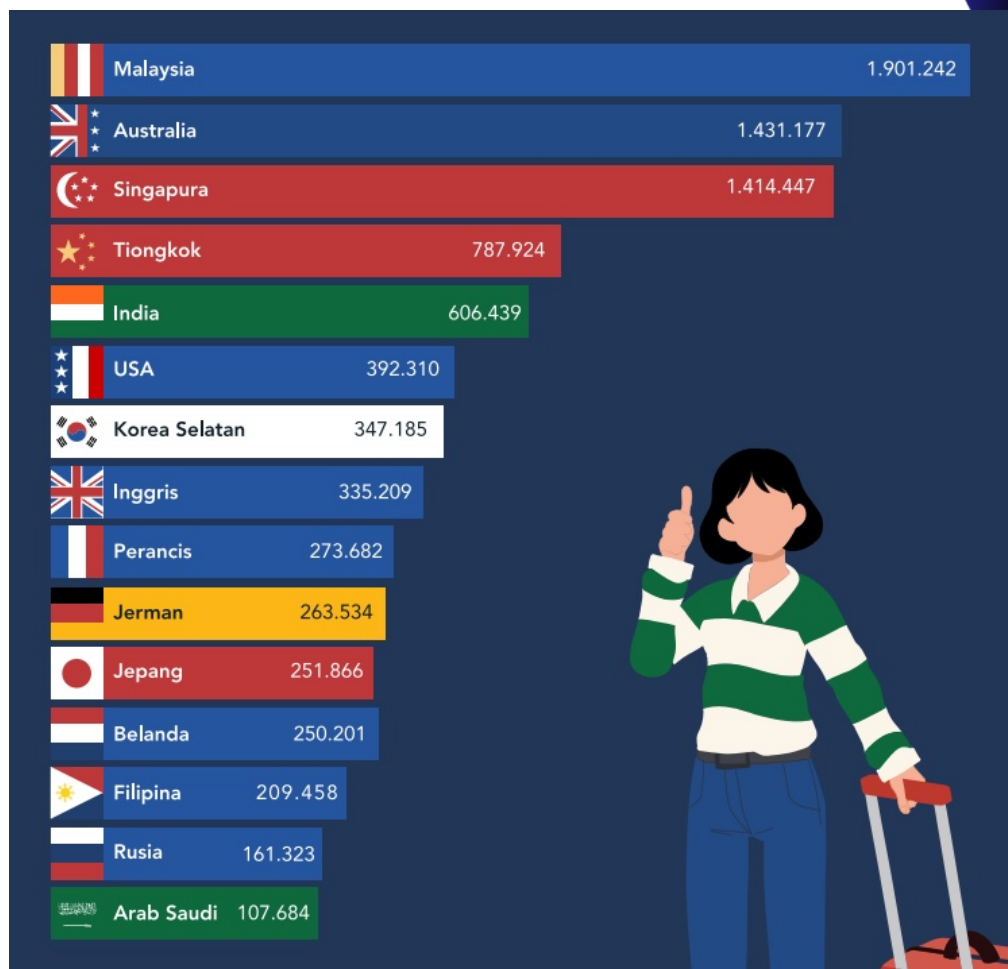
ANALISIS DEMAND & SUPPLY KEPARIWISATAAN INDONESIA

Sektor pariwisata Indonesia telah diakui sebagai salah satu industri dengan kinerja tinggi dalam perekonomian negara ini, dengan daya saingnya yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Haryana, 2020). Kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional dan lokal, serta dampaknya terhadap kesejahteraan bisnis dan pekerja individu, telah menjadi subjek evaluasi dan analisis. Pariwisata merupakan pendorong penting pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara global, berkontribusi terhadap 10,2% dari produk domestik bruto dunia dan menyediakan sekitar 432 juta pekerjaan (Moh. Fadli et al., 2022). Indonesia, dengan sumber daya alam dan atraksi budayanya yang beragam, memiliki potensi untuk memanfaatkan industri pariwisatanya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, perkembangan pariwisata di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut.



Gambar 6 Kunjungan Wisatawan mancanegara Tahun 2019-2023
(Sumber: Kemenparekraf, 2024)

Potensi pariwisata Indonesia yang menjadi daya tarik unggulan, dapat dilihat dari membaiknya angka kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 yang mengindikasikan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan kembalinya pola musiman dan angka kunjungan yang telah mencapai 11,68 juta kunjungan. Peningkatan ini disebabkan oleh pembukaan perbatasan, peningkatan jumlah penerbangan internasional, dan penghapusan persyaratan kesehatan bagi pengunjung asing (Kemenparekraf, 2023). Kunjungan terbesar pada tahun 2023 adalah Malaysia (16,28%), Australia (12,26%), Singapura (12,11%), Tiongkok (6,75%) dan Timor Leste (6,24%)



Gambar 7 Negara Asal Kunjungan Wisman Tahun 2023
(Sumber: Kemenparekraf, 2024)

Meskipun memiliki potensi besar, pariwisata di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur yang belum memadai di banyak destinasi wisata. Di beberapa daerah, akses transportasi masih sulit, jaringan komunikasi terbatas, serta fasilitas pendukung seperti hotel, rumah makan, dan layanan kesehatan masih kurang berkembang. Selain itu, masalah lingkungan juga menjadi perhatian serius. Pertumbuhan pariwisata yang pesat, terutama di destinasi populer seperti Bali, telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi, over-kapasitas, dan kerusakan ekosistem. Pengelolaan yang kurang baik dan kurangnya kesadaran akan pariwisata berkelanjutan menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya promosi yang efektif dan terarah, terutama di pasar internasional. Meskipun Indonesia memiliki banyak potensi, persaingan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam cukup ketat. Promosi yang inovatif, berbasis digital, dan ditargetkan secara spesifik diperlukan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Untuk menghadapi tantangan tersebut dan memanfaatkan potensi besar yang ada, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis.

Salah satunya adalah kebijakan pengembangan pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), yang bertujuan untuk mengembangkan sepuluh destinasi wisata baru di luar Bali, seperti Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang.




Gambar 8 Pengembangan 10 DPP
(Sumber: Kemenparekraf, 2023)

Program ini dirancang untuk mendistribusikan arus wisatawan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, mengurangi tekanan di Bali, dan sekaligus mengembangkan potensi daerah lain sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada. Selain itu, perhatian terhadap pariwisata berkelanjutan menjadi semakin penting. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mulai mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti pembatasan jumlah pengunjung di destinasi sensitif dan kampanye pengurangan sampah plastik.

Analisis permintaan dan penawaran pariwisata Indonesia sangat penting dalam memahami daya saing sektor ini dan mengidentifikasi peluang untuk lebih memperkuat posisinya (Ikasari & Farida, 2020). Pada tingkat makro, sektor pariwisata telah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara ini. Dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah juga terlihat, dengan potensi untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah baik di daerah perkotaan maupun pedesaan (Moh. Fadli et al., 2022). Di tingkat mikro, industri pariwisata terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan badan usaha dan pekerja perorangan. Diversifikasi kegiatan pariwisata dan pengembangan praktik pariwisata berkelanjutan dapat semakin meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, penguatan hubungan antara pariwisata dan sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa, dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan



meningkatkan tingkat pendapatan penduduk setempat. Dengan mendorong pembangunan pariwisata yang inklusif dan bertanggung jawab, industri ini dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong kemajuan sosial ekonomi yang adil dalam masyarakat Indonesia. Namun, analisis permintaan dan penawaran pariwisata di Indonesia juga mengungkap tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat daya saing sektor ini (Antara & Sumarniasih, 2017). Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- a. Penyebaran pembangunan pariwisata yang tidak merata di berbagai daerah: Meskipun destinasi utama seperti Bali, Jakarta, dan Yogyakarta telah mengalami pertumbuhan pariwisata yang signifikan, banyak daerah lain di Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan promosi pariwisata. Pembangunan yang tidak merata ini telah menyebabkan kesenjangan dalam peluang dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
- b. Kurangnya tenaga kerja terampil: Industri pariwisata di Indonesia sering kali menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil, khususnya di bidang-bidang khusus seperti manajemen perhotelan, pemandu wisata, dan perencanaan destinasi. Peningkatan kualitas dan ketersediaan program pendidikan dan pelatihan terkait pariwisata dapat membantu mengatasi kesenjangan ini.
- c. Kekhawatiran keberlanjutan: Pertumbuhan pariwisata yang pesat juga telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan lingkungan dan sosial sektor tersebut. Langkah-langkah untuk mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan, seperti mendorong ekowisata, melestarikan warisan budaya, dan mengurangi dampak negatif dari pariwisata massal, sangat penting untuk daya saing jangka panjang.
- d. Sistem data dan informasi pariwisata yang belum berkembang: Data yang andal dan terkini tentang permintaan, penawaran, dan tren pariwisata sangat penting untuk pembuatan kebijakan dan perencanaan strategis yang efektif. Memperkuat kemampuan pengumpulan dan analisis data pariwisata Indonesia dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan industri membuat keputusan yang lebih tepat.





Bagian Ketiga

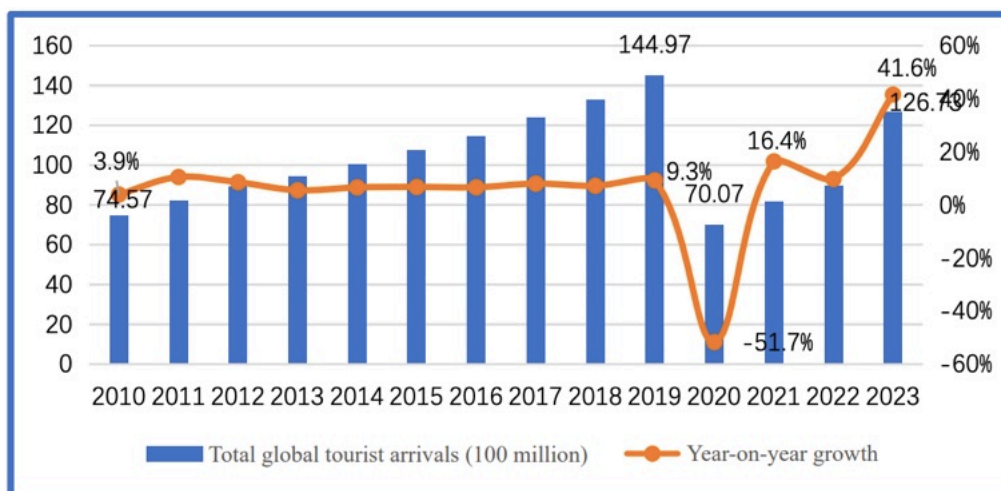


**SIAPA
LAWAN/PESAING
INDONESIA**

BAGIAN TIGA – SIAPA LAWAN/PESAING INDONESIA

KONDISI TRAVEL & TOURISM GLOBAL

Pada tahun 2023, ekonomi global tidak tumbuh pada tingkat yang diharapkan karena faktor-faktor seperti inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan konflik geopolitik. Prospek Ekonomi Dunia terbaru yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% pada tahun 2023, turun dari 3,5% pada tahun sebelumnya. Diperkirakan akan tetap berada di angka 3,2% pada tahun 2024, jauh lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8% dari tahun 2000 hingga 2019. Meskipun prospek ekonomi global relatif suram, dengan upaya bersama dari organisasi internasional, pemerintah, lembaga industri, perusahaan pariwisata, dan ratusan juta pelancong, pemulihan pariwisata global cukup menjanjikan dan berada di jalur yang tepat untuk mencetak rekor baru pada tahun 2024.



Gambar 9 Total Kedatangan Wisatawan Global dan Tingkat Pertumbuhan pada Tahun 2010-2023

Sumber: (WTCF, 2024)

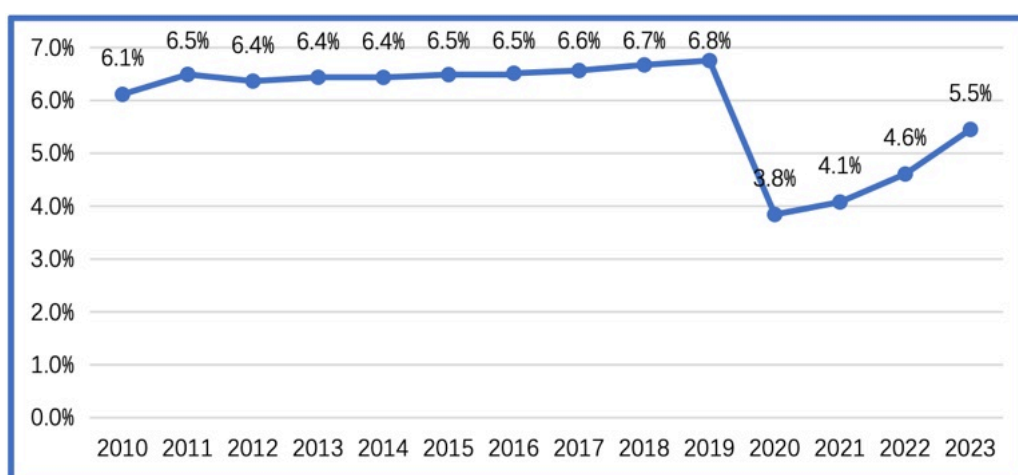
Pada laporan World Tourism Cities Federation (WTCF) menunjukkan bahwa di tahun 2023, total kedatangan wisatawan global (termasuk kedatangan wisatawan domestik dan internasional) mencapai 12,673 miliar, yang mewakili pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 41,6% dan pulih ke sekitar tingkat pra-pandemi sebesar 87,4% pada tahun 2019. Pada tahun 2023, total pendapatan pariwisata global (termasuk pendapatan pariwisata domestik dan internasional) mencapai USD 5,54 triliun, menandai pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 21,5% dan pulih ke sekitar 94,8% dari tingkat pra-pandemi pada tahun 2019 dan akan mencapai sejumlah 139,6% pada tahun 2024.



Gambar 10 Total Pendapatan dan Laju Pertumbuhan Pariwisata Global pada tahun 2010-2023

Sumber: (WTCF, 2024)

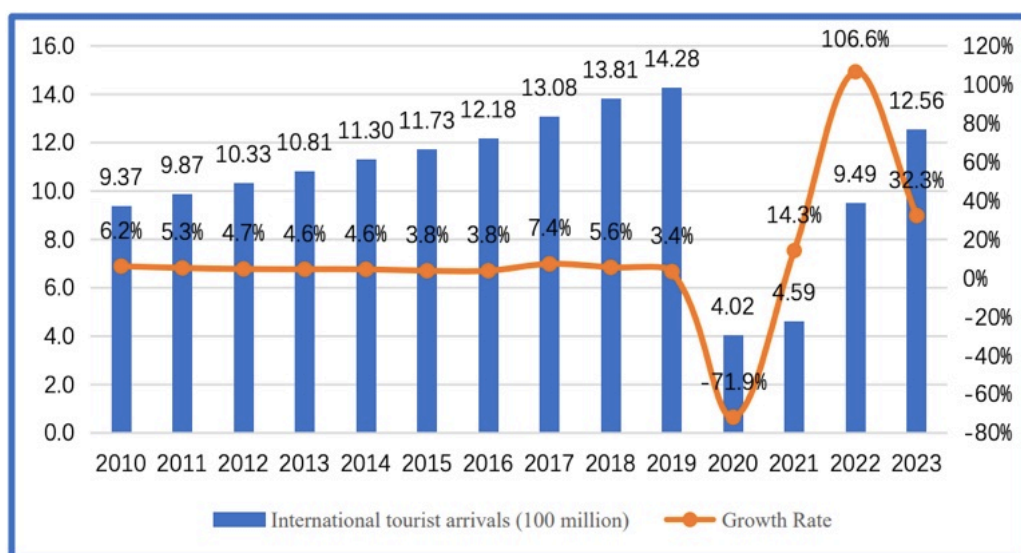
Selama satu dekade terakhir, proporsi total pendapatan pariwisata global terhadap PDB telah berada di atas 6%. Namun, proporsi ini menurun tajam menjadi 3,8% pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 5,5% pada tahun 2023, naik sebesar 0,9 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2022. Meskipun demikian, angka tersebut lebih rendah 1,3 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2019.



Gambar 11 Proporsi Total Pendapatan Pariwisata Global terhadap PDB Global pada tahun 2010-2023

Sumber: (WTCF, 2024)

Namun, jika dilihat berdasarkan Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara secara global yang mencapai 1,256 miliar, mengalami peningkatan sebesar 32,3% secara tahunan dan pulih menjadi 88,0% dari tingkat sebelum pandemi pada tahun 2019. Sedangkan, total pendapatan pariwisata global mencapai USD 1,49 triliun, meningkat 23,1% secara tahunan dan pulih menjadi sekitar 88,7% dari tingkat sebelum pandemi pada tahun 2019. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dari kawasan Asia Pasifik merupakan proporsi tertinggi secara global (65,4%), disusul oleh kawasan Amerika (15,9%), Eropa (14,7%), Timur Tengah (2,4%), dan Afrika (1,6%).



Gambar 12 Jumlah Kedatangan Wisatawan Global dan Tingkat Pertumbuhannya pada Tahun 2010-2023
Sumber: (WTCF, 2024)

Dalam konteks ekonomi global yang sedang tertatih-tatih, pemulihan pariwisata global akan memperlihatkan empat karakteristik. Pada tahun 2024, industri pariwisata global kemungkinan akan mengalami pertumbuhan pariwisata domestik dan internasional secara bersamaan. Total pendapatan diperkirakan akan melampaui level tahun 2019 dan mencapai rekor tertinggi. **Pertama**, Pangsa pariwisata dalam ekonomi global akan semakin meningkat dan menjadi pendorong penting pertumbuhan ekonomi global. **Kedua**, lanskap pembangunan pariwisata dunia akan terus disesuaikan secara cepat dan mendalam. Industri pariwisata global mengharapkan keseimbangan baru. **Ketiga**, restrukturisasi hubungan ekonomi dan perdagangan internasional mengubah aliran dan arah pariwisata global dan berdampak besar pada lanskap pembangunan industri pariwisata. **Keempat**, faktor teknologi seperti kecerdasan buatan, *blockchain* publik, penyimpanan energi, robotika, serta iklim, mendorong perubahan pariwisata global. Industri pariwisata perlu memandang perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi dan iklim sebagai peluang dan tantangan penting serta secara aktif mengintegrasikannya ke dalam proses perubahan tersebut.

TREN & ISU PARIWISATA GLOBAL

Pariwisata adalah industri yang signifikan dan berkembang pesat di seluruh dunia. Industri pariwisata global telah mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir, dengan jutaan orang menjelajahi dunia untuk mencari pengalaman rekreasi, bisnis, dan budaya. Industri pariwisata telah mengalami peningkatan yang stabil dalam pendapatan perjalanan dan pariwisata global selama satu dekade terakhir, didorong oleh faktor-faktor seperti meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan, peningkatan konektivitas, dan meningkatnya minat terhadap pengalaman perjalanan internasional (Alam et al., 2022). Lonjakan perjalanan internasional ini telah memberikan dampak yang besar pada ekonomi global, dan menyumbang triliunan dolar terhadap PDB serta mempekerjakan jutaan orang di seluruh dunia (World Travel & Tourism Council (WTTC), 2022).

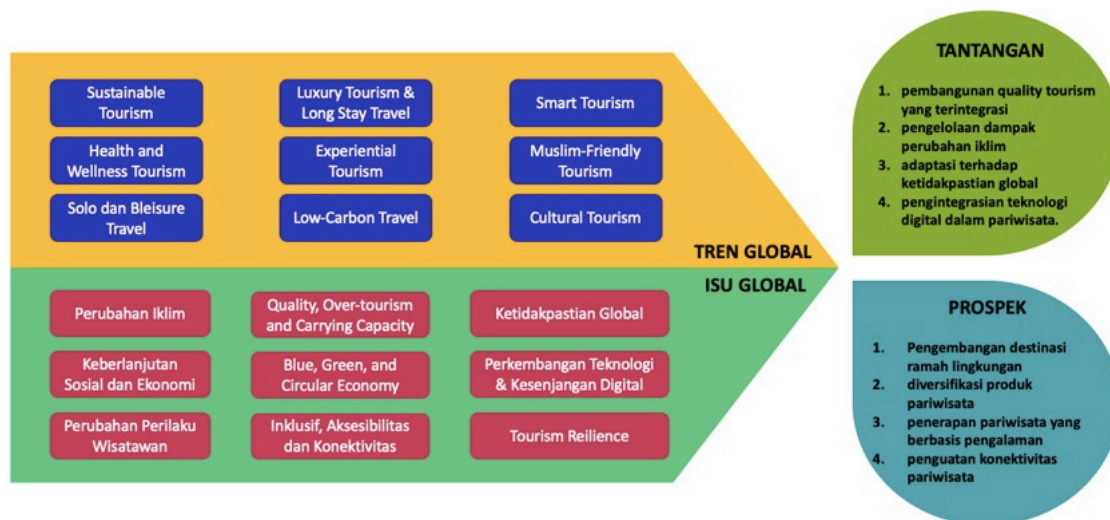
Namun demikian, industri ini juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dampak lingkungan dari pariwisata massal, eksploitasi masyarakat lokal, dan kebutuhan akan praktik pariwisata yang lebih berkelanjutan (McCarroll et al., 2024). Seiring dengan terus berkembangnya industri ini, semakin besar pula kebutuhan untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi pariwisata dengan dampak sosial dan lingkungannya (Alonso-Muñoz et al., 2023). Para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan masyarakat setempat harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan yang melindungi sumber daya alam, mendukung ekonomi lokal, dan menghormati budaya lokal. Hal ini dapat melibatkan inisiatif seperti ekowisata, pariwisata berbasis masyarakat, dan penerapan peraturan serta pedoman yang ketat bagi industri pariwisata (Nie & Tang, 2022). Dengan mengatasi tantangan ini, industri pariwisata global dapat terus berkembang dengan cara yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Selain itu, salah satu tren yang paling signifikan adalah transformasi digital dalam industri perjalanan (Rodrigues et al., 2023). Dominasi platform daring untuk informasi dan pemesanan telah mengubah cara wisatawan merencanakan dan melaksanakan perjalanan mereka secara mendasar. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya persaingan di antara penyedia layanan pariwisata, karena mereka harus menavigasi ekosistem saluran pemasaran, media sosial, dan rekomendasi yang dipersonalisasi yang kompleks untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Meningkatnya kompleksitas akuisisi wisatawan juga telah menjadi tantangan yang signifikan, karena penyedia layanan pariwisata harus beradaptasi dengan preferensi dan perilaku yang terus berkembang dari klien global yang beragam.

Melalui adopsi pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, industri pariwisata global dapat memastikan kelangsungan jangka panjangnya dan dampak positifnya terhadap dunia. Ini akan membutuhkan investasi berkelanjutan, inovasi, dan komitmen untuk menyeimbangkan kebutuhan industri, lingkungan, dan masyarakat lokal (Jiang & Phoong, 2023). Seiring dengan terus berkembangnya pariwisata, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mengembangkan dan menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan yang menciptakan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Dengan upaya kolaboratif dari semua pemangku kepentingan, industri pariwisata dapat

berkembang menjadi kekuatan perubahan positif, mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melestarikan sumber daya alam dan budaya yang menarik pengunjung sejak awal (Baloch et al., 2023).

Tren dan isu pariwisata global selalu berkembang seiring dengan perubahan preferensi wisatawan, dinamika sosial-ekonomi, serta perkembangan teknologi. Dengan memperhatikan tren dan isu-isu ini, para pelaku industri pariwisata, baik pemerintah maupun sektor swasta, dapat merumuskan strategi yang efektif untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan sektor pariwisata di masa depan. Melihat berbagai penjelasan diatas dari berbagai sumber sebagaimana yang telah dituliskan, perlu untuk di jabarkan lebih lanjut terkait tren dan isu pembangunan pariwisata kedepan. Tren dan isu tersebut merupakan yang telah terjadi selama beberapa tahun terkahir dan melihat potensi yang akan terjadi dikemudian hari.



Gambar 13 Tren dan Isu Pariwisata Global

Tren Pariwisata Global

Tren pariwisata global terus berkembang dan berubah seiring dengan dinamika sosial, teknologi, dan lingkungan. Dengan memahami tren-tren ini, para pelaku industri pariwisata dapat menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi perubahan, meningkatkan daya saing, serta mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa tren yang saat ini berpengaruh besar pada perkembangan pariwisata dunia meliputi:

1. Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Wisatawan kini lebih peduli terhadap dampak lingkungan dari perjalanan mereka, mendorong destinasi wisata dan penyedia jasa pariwisata untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Dalam menghadapi kebutuhan tersebut, banyak destinasi menerapkan strategi keberlanjutan seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, serta promosi wisata yang mendukung pelestarian alam dan budaya lokal. Salah satunya dengan peningkatan minat terhadap destinasi alam dan aktivitas wisata

yang memiliki dampak positif bagi lingkungan, seperti *trekking*, *birdwatching*, atau wisata hutan hujan.

2. *Luxury Tourism & Long Stay Travel*

Wisata mewah tetap menjadi segmen penting, terutama bagi destinasi yang menawarkan pengalaman eksklusif, seperti *private island*, *yacht tour*, atau *private jet travel*. Wisatawan di segmen ini mencari kualitas pelayanan, kenyamanan, dan pengalaman personal yang tidak bisa didapatkan di pariwisata massal. Bekerja jarak jauh atau *remote work* telah menciptakan peluang bagi destinasi yang menawarkan fasilitas pendukung seperti *coworking space* dan infrastruktur digital yang kuat. Oleh karena itu, banyak destinasi mengembangkan program visa khusus untuk wisatawan yang ingin tinggal dan bekerja dari jarak jauh, misalnya *Digital Nomad Visa*.

3. *Smart Tourism (Digital Tourism)*

Teknologi memainkan peran penting dalam mengubah pengalaman wisatawan melalui *augmented reality (AR)*, *virtual reality (VR)*, dan *platform online*. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan pengalaman wisata yang lebih personal dan otomatisasi layanan seperti pemesanan dan *check-in online*. *Platform* media sosial menjadi saluran utama untuk promosi destinasi wisata, pengaruh dari *influencer*, serta *platform review* seperti TripAdvisor yang mempengaruhi keputusan wisatawan. Selain itu, kedepannya diperlukan Implementasi IoT untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih interaktif dan terhubung, misalnya penggunaan perangkat *wearable*, *check-in* otomatis, atau *smart tourism signage*.

4. *Health and Wellness Tourism*

Tren ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Destinasi yang menawarkan spa, yoga retreat, dan perjalanan detoks menjadi pilihan populer. Wisata kesehatan meliputi wisata medis (*medical tourism*) dan wisata kebugaran yang sering dikaitkan dengan pengelolaan stres, peremajaan, dan gaya hidup sehat. Pasca-pandemi, ada kecenderungan meningkatnya permintaan untuk destinasi yang menawarkan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang terintegrasi.

5. *Experiential Tourism*

Wisatawan kini mencari pengalaman yang lebih autentik, melibatkan diri secara langsung dengan budaya dan komunitas lokal. Ini termasuk wisata kuliner, wisata seni dan kerajinan, serta kegiatan interaktif seperti memasak atau berpartisipasi dalam festival lokal. Pariwisata berbasis pengalaman ini menciptakan keterlibatan yang lebih mendalam dan memiliki nilai tambah yang lebih besar baik bagi wisatawan maupun komunitas lokal.

6. *Muslim-Friendly Tourism*

Dengan pertumbuhan jumlah wisatawan Muslim, destinasi global semakin beradaptasi dengan menyediakan fasilitas dan layanan ramah Muslim, seperti restoran halal, tempat ibadah, dan lingkungan yang mendukung. Saat ini, potensi kunjungan wisatawan muslim dunia akan terus meningkat

7. *Solo and Bleisure Travel*

Tren ini muncul ketika perjalanan bisnis digabungkan dengan kegiatan rekreasi. Wisatawan memanfaatkan perjalanan bisnis untuk mengeksplorasi destinasi wisata setelah urusan bisnis selesai. *Bleisure travel* memberikan peluang bagi destinasi untuk menarik segmen wisatawan yang lebih lama tinggal dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi lokal. Selain itu, Wisatawan solo semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang mencari fleksibilitas dan pengalaman personal.

8. *Low-Carbon Travel*

Wisatawan semakin sadar tentang jejak karbon perjalanan mereka. Hal ini memicu munculnya tren perjalanan ramah lingkungan, seperti perjalanan menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau jalan kaki, serta mengurangi frekuensi penerbangan.

9. *Cultural Tourism*

Wisata budaya tetap menjadi daya tarik utama, dengan peningkatan minat terhadap warisan budaya dunia, tradisi lokal, dan kesenian. Destinasi seperti museum, galeri seni, situs arkeologi, dan festival budaya menarik wisatawan yang mencari pengalaman otentik dan edukatif.

Isu-isu Pariwisata Global


Isu-isu pariwisata global mencakup berbagai tantangan yang mempengaruhi perkembangan dan keberlanjutan sektor pariwisata di seluruh dunia. Isu-isu ini seringkali berhubungan dengan lingkungan, ekonomi, sosial, dan perubahan kebijakan, serta dapat berdampak pada perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata. Menghadapi isu-isu ini, sektor pariwisata perlu melakukan berbagai upaya untuk beradaptasi, memitigasi risiko, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas negara agar tetap relevan dan berkelanjutan di masa depan. Berikut beberapa isu utama pariwisata global:

1. *Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Pariwisata*

Perubahan iklim berdampak besar pada destinasi wisata, seperti naiknya permukaan laut, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan pencairan gletser. Hal ini mengancam destinasi wisata alam dan mempengaruhi pola perjalanan wisatawan. Emisi Karbon dari Industri Pariwisata seperti Transportasi, khususnya penerbangan dan kapal pesiar, berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon. Ada tekanan global untuk mengurangi jejak karbon dari industri pariwisata dengan menerapkan praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, banyak destinasi saat ini mulai mengadopsi kebijakan pariwisata berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan energi, mengelola sampah secara lebih efektif, dan menerapkan standar lingkungan dalam operasional mereka.

2. *Quality, Over-tourism and Carrying Capacity*

Overtourism terjadi ketika jumlah pengunjung melebihi kapasitas suatu destinasi, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kelebihan infrastruktur, dan menurunnya kualitas hidup penduduk lokal. Destinasi seperti Venesia, Barcelona, dan Bali menghadapi tantangan ini dan mulai menerapkan kebijakan pembatasan pengunjung, manajemen



waktu kunjungan, serta peningkatan tarif masuk untuk mengurangi dampak. Beberapa strategi untuk mengatasi overtourism meliputi pengaturan kuota pengunjung, promosi destinasi alternatif, serta penyesuaian harga masuk dan tarif akomodasi. Selain itu, dengan adanya overtourism ini, dibutuhkan pengembangan *quality tourism*, agar dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan bertanggungjawab.

3. Ketidakpastian Global

Faktor keamanan, seperti ancaman terorisme, ketidakstabilan politik, dan kejahatan, mempengaruhi keputusan wisatawan untuk memilih destinasi. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpastian global mempengaruhi industri pariwisata, dengan penutupan perbatasan, penerapan karantina, dan perubahan regulasi perjalanan internasional.

4. Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi

Keberlanjutan sosial dalam pariwisata melibatkan dampak pariwisata terhadap komunitas lokal, pelestarian budaya, serta pengurangan ketimpangan ekonomi. Diskriminasi, gentrifikasi, dan eksploitasi tenaga kerja di sektor pariwisata menjadi isu yang harus ditangani dengan kebijakan yang inklusif dan adil.

5. *Blue, Green, and Circular Economy*

Konsep *Blue, Green, and Circular Economy* (BGCE), menggabungkan tiga konsep besar, yakni (1) *Blue Economy* (BE) yang mengemukakan pentingnya keseimbangan antara perekonomian dengan konservasi lingkungan dalam konteks maritim dan daerah pesisir, (2) *Green Economy* (GE) yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, dan kepedulian sosial, serta (3) *Circular Economy* (CE) yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui proses dan perputaran material untuk memaksimalkan fungsi ekosistem dan kesejahteraan manusia. Konsep BGCE mendorong penerapan prinsip-prinsip kepedulian terhadap lingkungan dalam konteks BE, GE, dan CE pada aktivitas usaha di bidang pariwisata dan pendukungnya, dengan tetap mengedepankan prinsip ekonomi dan nilai manfaat (*benefit*) secara sosial-ekonomi-lingkungan harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (*cost*).

6. Perubahan Perilaku Wisatawan

Tren perjalanan wisatawan terus berubah seiring berjalannya waktu dan berubahnya kebutuhan wisatawan. Perubahan perilaku tersebut cenderung bersifat dinamis, sehingga dibutuhkan promosi dan strategi yang tepat dalam menjangkau keinginan wisatawan saat ini. Wisatawan kini cenderung memilih perjalanan yang lebih lama dan berkualitas, dengan preferensi pada destinasi yang mudah diakses dan terjangkau.

7. Perkembangan teknologi dan Kesenjangan Digital

Teknologi digital seperti *big data*, *IoT*, dan *AI* mengubah cara industri pariwisata beroperasi. Teknologi ini membantu dalam personalisasi pengalaman wisata, analisis perilaku wisatawan, dan pengembangan *smart tourism*. Namun, adopsi teknologi juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, dan privasi data wisatawan. Tidak semua destinasi atau pelaku usaha pariwisata memiliki akses yang

sama terhadap teknologi digital, menciptakan kesenjangan dalam persaingan global. Pelatihan dan inisiatif digitalisasi untuk UMKM pariwisata di negara berkembang menjadi solusi yang perlu diterapkan.

8. Pariwisata Inklusif, Aksesibilitas dan Konektivitas

Isu pariwisata inklusif berkaitan dengan aksesibilitas bagi semua jenis wisatawan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, disabilitas, atau keterbatasan mobilitas. Banyak destinasi dan fasilitas wisata belum memenuhi standar aksesibilitas, yang mengakibatkan segmen wisatawan ini merasa terpinggirkan. Selain itu, Aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konektivitas antar destinasi pariwisata. Aksesibilitas yang berupa infrastruktur jalan menjadi fasilitas utama yang digunakan oleh wisatawan untuk memudahkan menuju ke destinasi pariwisata. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dan aksesibilitas terhadap wisatawan, diharapkan dapat melambungkan popularitas pariwisata Indonesia hingga di kancah internasional.

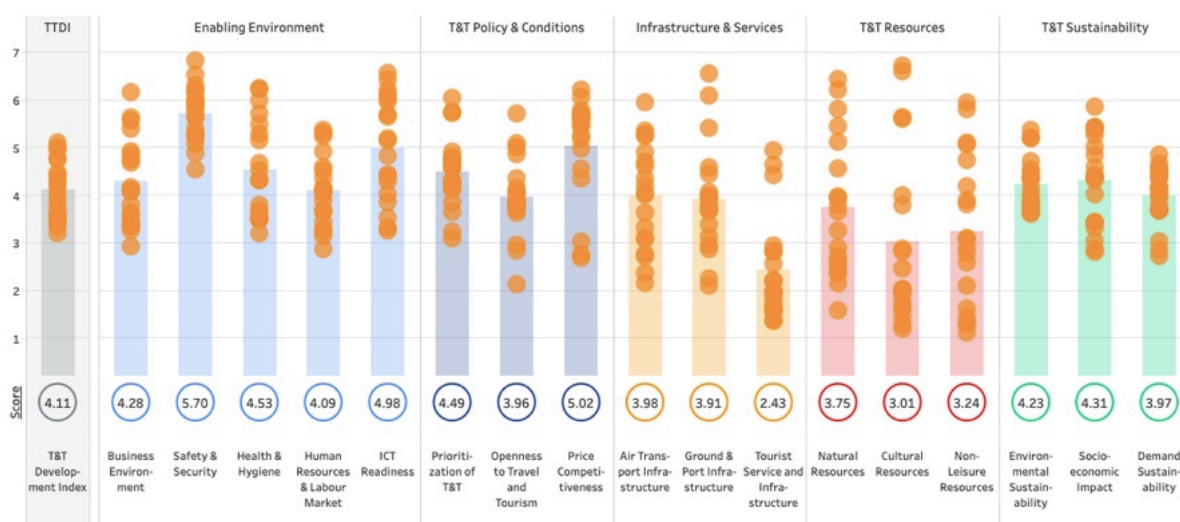
9. *Tourism Resilience*

Pengembangan resiliensi pariwisata untuk menghadapi bencana alam, pandemi, atau ketidakstabilan ekonomi menjadi isu penting untuk menjaga keberlanjutan destinasi. Destinasi perlu mengembangkan strategi mitigasi risiko, sistem pemulihan pascabencana, serta manajemen krisis untuk meminimalkan dampak negatif.

BENCHMARKING PERFORMANSI KEPARIWISATAAN DI ASIA PASIFIK

Performansi kepariwisataan global seluruh negara tergambarkan pada *Travel & Tourism Development Index* (TTDI) yang dipublish oleh World Economic Forum (WEF). TTDI berupaya memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan, perusahaan, dan Stakeholder terkait dengan memberikan wawasan mengenai kekuatan ekonomi T&T dan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, dan dengan mengkaji sifat saling bergantung dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong sektor yang kompleks ini. TTDI dirancang untuk memberikan konteks dan memfasilitasi Stakeholder multipihak, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami tren dan risiko yang muncul dalam T&T global, memandu perumusan kebijakan, praktik operasional dan strategi investasi.

Berdasarkan hasil perhitungan TTDI 2024 dengan menggunakan Kerangka penilaian yang terbaru yakni 5 Dimensi, 17 Pilar, dan 102 indikator, yang dimana terdiri dari 84 indikator Data Sekunder dan 18 indikator data primer, Kawasan Asia-Pasifik menempati peringkat sebagai kawasan dengan kinerja tertinggi kedua (dibawah Kawasan Europe and Eurasia) di antara kawasan lainnya, yakni dengan rerata skor sejumlah 4,11 (WEF & University of Surrey, 2024). Selain itu, terdapat peningkatan perubahan pada Kawasan ini dari TTDI 2019-2024 sebesar 0,5%. Dalam beberapa tahun mendatang, pasar T&T di kawasan ini diperkirakan akan kembali mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi secara historis. Namun, untuk mengembangkan T&T secara berkelanjutan dan tangguh, perhatian yang jauh lebih besar perlu difokuskan pada keberlanjutan lingkungan, terutama jika negara-negara berkembang di Asia Selatan dan Asia Tenggara ingin melestarikan aset alam penghasil pariwisata mereka.



Gambar 14 Overview Kinerja T&T Kawasan Asia Pacific
Sumber: (WEF, 2024)

Pada tahun 2024, Jepang (peringkat ke-3) adalah kinerja terbaik di kawasan APAC, dengan Australia (peringkat ke-5) dan China (peringkat ke-8) menempati peringkat 10 besar dunia. China juga memiliki ekonomi T&T terbesar di kawasan ini dan terbesar kedua di dunia, sementara India (peringkat ke-39) memiliki sektor T&T terbesar di Asia Selatan dan mendapat peringkat sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah terbaik di TTDI. Sementara itu, Filipina (peringkat ke-69) paling mengandalkan T&T untuk PDB-nya pada tahun 2022. Singapura (peringkat ke-13) adalah kinerja terbaik di Asia Tenggara, namun tetangganya, Indonesia, mengalami peningkatan skor terbesar di kawasan ini (+4,5%, dari peringkat ke-36 ke peringkat ke-22).

Kawasan Asia-Pasifik menduduki peringkat kedua dengan kinerja tertinggi di antara kawasan. Dari 19 negara konstituen yang tercakup dalam TTDI, 10 negara melampaui rata-rata indeks, dan 11 negara mengalami peningkatan skor sejak tahun 2019. Meskipun demikian, antara tahun 2021 dan 2024, kawasan ini mengalami penurunan rata-rata skor TTDI terbesar (-0,7 %) karena negara ini tertinggal dalam melonggarkan pembatasan perjalanan dan kesulitan memulihkan kapasitas rute udara dan investasi sektor. Akibatnya, wilayah ini mengalami satu-satunya penurunan skor rata-rata untuk Air Transport Infrastructure (-1,6%) sejak tahun 2021 dan penurunan terbesar dalam Tourist Services and Infrastructure (-4,4%).

Melihat perkembangan kawasan ini sejak tahun 2019, terlihat bahwa kemajuan penting telah dicapai di seluruh kawasan dalam berbagai bidang seperti Ground and Port Infrastructure (+5,1%), ICT Readiness (8,2%), Cultural Resources (5,5%) and T&T Socioeconomic Impact khususnya di Asia Selatan (+30,2%). Selain itu, subkawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan skor indikator perjanjian layanan udara tertinggi sejak tahun 2019 (+6,0%), dikarenakan penandatanganan dan penerapan perjanjian seperti Perjanjian Transportasi Udara Komprehensif ASEAN-UE (CATA) dan Pasar Penerbangan Tunggal ASEAN.

Economy	TTDI rank	Enabling Environment					T&T Policy and Enabling Conditions			Infrastructure and Services			T&T Resources			T&T Sustainability		
		Business Environment	Safety and Security	Health and Hygiene	Human Resources and Labour Market	ICT Readiness	Prioritization of T&T	Openness to T&T	Price Competitiveness	Air Transport Infrastructure	Ground and Port Infrastructure	Tourist Services and Infrastructure	Natural Resources	Cultural Resources	Non-Leisure Resources	Environmental Sustainability	T&T Socioeconomic Impact	T&T Demand Sustainability
Japan	3	5.38	5.98	6.23	4.90	6.03	4.78	4.06	4.34	5.34	6.08	2.93	5.11	6.71	5.93	5.20	4.57	3.02
Australia	5	5.62	5.97	5.98	5.23	6.19	4.90	4.85	2.75	5.23	3.68	4.62	6.42	3.78	5.09	5.18	5.00	4.46
China	8	4.73	6.52	5.27	4.51	6.10	3.84	3.89	5.17	5.26	4.57	1.95	6.20	6.59	5.79	4.46	5.36	3.79
Korea, Rep.	14	4.84	6.29	6.21	4.58	6.55	4.56	3.87	4.55	4.69	5.40	2.82	2.36	5.59	4.72	4.70	5.25	3.67
New Zealand	25	5.55	5.62	5.47	5.29	5.95	4.25	5.07	3.02	3.99	3.73	4.93	3.64	2.02	2.58	5.35	4.36	4.17
Mongolia	85	3.37	5.25	5.70	4.12	5.14	4.65	2.82	5.47	2.14	2.09	2.55	3.25	1.93	1.31	3.74	4.40	2.84
Eastern Asia-Pacific		4.92	5.94	5.81	4.77	5.99	4.50	4.10	4.21	4.44	4.26	3.30	4.50	4.43	4.24	4.77	4.82	3.66
Singapore	13	6.15	6.82	5.14	5.36	6.41	5.71	5.70	2.67	5.94	6.54	4.41	1.57	1.75	3.80	4.37	4.38	4.14
Indonesia	22	4.67	5.77	3.78	4.13	4.81	6.03	3.83	5.44	4.34	3.97	1.90	5.43	3.98	3.06	4.34	5.41	4.84
Malaysia	35	4.91	5.88	4.51	3.88	5.64	4.22	4.99	6.20	4.18	4.05	2.79	3.96	2.45	3.88	4.31	2.80	4.09
Thailand	47	4.15	4.87	4.31	4.06	5.68	4.14	4.34	4.96	4.89	3.76	2.18	4.55	2.86	4.17	4.13	3.30	3.67
Viet Nam	59	4.06	6.19	4.30	4.35	5.18	3.63	3.61	5.68	4.04	3.65	2.20	3.78	2.80	3.09	3.89	2.85	3.96
Philippines	69	4.09	5.27	3.66	4.03	4.38	4.72	4.01	5.59	3.62	3.12	1.55	3.93	2.01	2.89	4.52	3.42	4.52
Cambodia	86	3.62	6.14	3.19	3.64	4.28	5.74	3.75	5.58	2.76	2.85	1.97	2.50	1.60	1.41	3.99	3.03	4.65
Lao PDR	91	3.54	5.90	3.50	3.68	3.51	4.31	3.78	5.62	2.36	2.94	1.77	2.36	1.27	1.11	3.77	5.42	4.37
South-East Asia		4.40	5.85	4.05	4.14	4.99	4.81	4.25	5.22	4.02	3.86	2.35	3.51	2.34	2.93	4.16	3.83	4.28
India	39	3.79	5.06	3.47	2.85	3.84	4.11	4.13	5.66	4.59	4.43	1.60	5.80	5.62	5.05	3.64	4.01	4.55
Sri Lanka	76	3.34	5.21	4.66	3.42	4.43	4.78	3.69	5.69	3.07	3.92	1.58	2.70	1.44	1.61	3.70	5.84	3.70
Pakistan	101	3.41	4.53	3.49	3.24	3.30	3.08	2.95	6.04	3.31	3.37	1.67	2.89	1.97	2.77	3.64	4.31	3.97
Nepal	105	2.91	5.39	3.52	3.27	3.24	4.57	3.74	5.77	2.70	2.24	1.35	2.61	1.18	1.28	3.82	4.83	4.35
Bangladesh	109	3.25	5.67	3.58	3.13	4.02	3.23	2.12	5.25	3.08	3.95	1.37	2.14	1.63	2.09	3.60	3.42	2.71
South Asia		3.34	5.17	3.75	3.18	3.77	3.95	3.33	5.68	3.35	3.58	1.51	3.23	2.37	2.56	3.68	4.48	3.86
Asia-Pacific		4.28	5.70	4.53	4.09	4.98	4.49	3.96	5.02	3.98	3.91	2.43	3.75	3.01	3.24	4.23	4.31	3.97

Gambar 15 Perhitungan TTDI untuk Kawasan Asia Pasifik
 Sumber: (WEF & University of Surrey, 2024)

Pada tahun 2024, Jepang berada di peringkat ke-3 sebagai negara dengan kinerja terbaik di kawasan APAC, dengan Australia (ke-5) dan Tiongkok (ke-8) yang berada di peringkat 10 besar dunia. Tiongkok juga memiliki perekonomian T&T terbesar di kawasan dan terbesar kedua di dunia, sementara India (peringkat ke-39) memiliki sektor T&T terbesar di Asia Selatan dan menduduki peringkat teratas dalam perekonomian berpendapatan menengah ke bawah di TTDI. Sementara itu, Filipina (peringkat ke-69) merupakan negara yang paling mengandalkan T&T untuk PDB-nya pada tahun 2022. Meskipun Singapura (peringkat ke-13) merupakan negara dengan kinerja terbaik di Asia Tenggara, negara tetangga Indonesia mengalami peningkatan skor yang paling besar di kawasan ini (+4,5%, 36 hingga 22).

Tabel 1 Benchmarking Analysis antara Indonesia dan Negara-Negara Asia Pasifik

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Indonesia TTDI 2024			Benchmarking Indicator Asia Pasifik			
		Rank	Value	Score	Negara	Rank	Value	Score
DIMENSION A	ENABLING ENVIRONMENT, 1-7 (best)	65	4.63	4.63	Singapore	5	5.97	5.97
Pillar 1.	Business Environment, 1-7 (best)	44	4.67	4.67	Singapore	1	6.15	6.15
1.01	Rule of law, 0-100 (best)	81	4.70	3.44	New Zealand	7	93.10	6.59
1.02	Burden of government regulation, 1-7 (best)	14	5.01	5.01	Singapore	1	5.87	5.87
1.03	Government ensuring policy stability, 1-7 (best)	13	5.37	5.37	Singapore	1	6.38	6.38
1.04	Country credit rating, 0-100 (best)	45	60.00	4.60	Australia	1	100.00	7.00
1.05	De-jure financial globalization, 0-100 (best)	75	55.68	4.34	Singapore	5	85.51	6.13
1.06	De-jure trade globalization, 0-100 (best)	69	59.19	4.55	Singapore	1	92.96	6.58
1.07	SME access to finance, 1-7 (best)	1	5.37	5.37	Indonesia	1	5.37	5.37
Pillar 2.	Safety and Security, 1-7 (best)	54	5.77	5.77	Singapore	1	6.82	6.82
2.01	Confidence in local police, 0-1 (best)	5	0.88	6.25	Singapore	3	0.91	6.48
2.02	Safety walking alone at night, 1-7 (best)	16	0.80	5.80	Singapore	1	0.94	6.63
2.03	Homicide rate per 100,000 pop	82	4.29	6.14	Singapore	2	0.10	6.99
2.04	Global Terrorism Index, 0-10 (worst)	107	5.50	3.70	Cambodia, China, Korea, Rep. Lao PDR, Mongolia, Singapore	1	0.00	7.00
2.05	Organized violence, deaths per 100,000 pop	84	0.01	6.98	Cambodia, China, Japan, Korea, Rep., Lao PDR, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Singapore, Vietnam	1	0.00	7.00
Pillar 3.	Health and Hygiene, 1-7 (best)	89	3.78	3.78	Japan	12	6.23	6.23
3.01	Number of Physician per 1,000 pop	96	0.70	1.83	Australia	21	4.10	5.92

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Indonesia TTDI 2024			Benchmarking Indicator Asia Pasific			
		Rank	Value	Score	Negara	Rank	Value	Score
3.02	Use of basic sanitation, % of pop	80	88.16	6.21	Australia, Japan, Korea, Rep., New Zealand, Singapore, Thailand	1	100.00	7.00
3.03	Use of basic drinking water, % of pop	85	94.11	6.29	Australia, Japan, Korea, Rep., New Zealand, Singapore, Thailand	1	100.00	7.00
3.04	Hospital beds density per 10,000 pop	98	10.40	1.87	Japan	1	129.80	7.00
3.05	Communicable disease incidence per 100,000 pop	78	28,348.80	5.18	Korea, Rep.	19	13,872.70	6.83
Pillar 4.	Human Resources and Labour Market, 1-7 (best)	56	4.13	4.13	Singapore	7	5.36	5.36
subpillar	Qualification of the Labour Force, 1-7 (best)	61	4.17	4.17	Singapore	5	5.92	5.92
4.01	Labour force with intermediate education, % of total	83	44.25	3.66	Japan	1	100.00	7.00
4.02	Labour force with advanced education, % of total	90	12.55	2.51	Singapore	3	61.93	7.00
4.03	Quality of secondary education, 1-7 (best)	22	4.85	4.85	Singapore	3	5.63	5.63
4.04	Quality of tertiary education, 1-7 (best)	4	5.68	5.68	Indonesia	4	5.68	5.68
subpillar	Labour Market Dynamics, 1-7 (best)	6	4.98	4.98	Vietnam	4	5.08	5.08
4.05	Hiring and firing practices, 1-7 (best)	9	5.16	5.16	Singapore	4	5.33	5.33
4.06	Ease of finding skilled employees in local labour market, 1-7 (best)	8	5.17	5.17	Indonesia	8	5.17	5.17
4.07	Flexible working arrangements, 1-7 (best)	17	5.04	5.04	Singapore	7	5.28	5.28
4.08	Labour force participation, % of adult pop	25	66.61	4.55	Cambodia	5	75.71	5.76
subpillar	Labour Market Resilience and Equality, 1-7 (best)	104	3.24	3.24	New Zealand	9	5.69	5.69
4.09	Equal workforce opportunities, 1-7 (best)	52	4.30	4.30	New Zealand	7	5.26	5.26

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Indonesia TTDI 2024			Benchmarking Indicator Asia Pasific			
		Rank	Value	Score	Negara	Rank	Value	Score
4.10	Workers' rights, 1-5+ (worst)	92	5.00	2.20	Japan, New Zealand, Singapore	9	2.00	5.80
4.11	Female labour force participation, %	87	65.37	4.43	Lao PDR	14	89.06	6.19
4.12	Social protection basic coverage, % of pop	81	27.80	2.67	Australia, Mongolia, New Zealand, Singapore	1	100.00	7.00
4.13	Social protection spending, % of GDP	97	1.66	1.41	Japan	17	16.15	5.04
Pillar 5.	ICT Readiness, 1-7 (best)	73	4.81	4.81	Korea, Rep.	2	6.55	6.55
5.01	Individuals using internet, % of pop	88	66.48	4.99	Malaysia	9	97.40	6.84
5.02	Broadband internet subscribers per 100 pop	90	4.88	1.59	Korea, Rep.	3	45.43	6.45
5.03	Active mobile broadband internet subscription per 100 pop	66	91.11	5.56	Japan	2	234.39	7.00
5.04	3G mobile network coverage rate, % of pop	82	96.97	6.70	Mongolia, Singapore	1	100.00	7.00
5.05	Use of digital payments, % pop 15+	98	37.19	3.23	Australia	7	98.95	6.94
5.06	Use of digital platforms for providing transportation and shipping, 1-7 (best)	12	5.59	5.59	Korea, Rep.	2	6.04	6.04
5.07	Use of digital platform for providing hotels, restaurants and leisure activity services	23	5.58	5.58	Korea, Rep.	8	5.86	5.86
5.08	Power losses, % of domestic supply	53	8.61	5.28	Singapore	3	0.94	6.81
DIMENSION B	T&T POLICY AND ENABLING CONDITIONS, 1-7 (BEST)	4	5.10	5.10	Malaysia	2	5.14	5.14
Pillar 6.	Prioritization of T&T, 1-7 (best)	3	6.03	6.03	Indonesia	3	6.03	6.03
6.01	T&T government expenditure, % of Gov't budget	10	9.50	6.70	Singapore	7	10.38	7.00
6.02	Comprehensiveness of annual T&T data, 0-120 (best)	7	104.00	6.20	Indonesia	7	104.00	6.20
6.03	Timeliness of providing monthly/quarterly T&T data, 0-22.5 (best)	1	22.50	7.00	Australia, Cambodia, India, Indonesia, Japan, Korea, Rep.,	1	22.50	7.00

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Indonesia TTDI 2024			Benchmarking Indicator Asia Pasific			
		Rank	Value	Score	Negara	Rank	Value	Score
					Malaysia, Mongolia, Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam			
6.04	Country Brand Strategy rating, 0-100 (best)	55	63.17	4.79	Australia	19	79.34	5.76
Pillar 7.	Openness to T&T, 1-7 (best)	69	3.83	3.83	Singapore	1	5.70	5.70
7.01	Visa requirements, 0-100 (best)	39	53.16	4.19	Malaysia	3	80.48	5.83
7.02	Number of air service agreements	68	22.25	2.67	China	5	75.50	6.66
7.03	Travelsat Hospitality Reputation Index	39	66.48	5.53	Nepal	8	81.00	6.52
7.04	Passport mobility score	83	73.00	2.93	Singapore	1	193.00	6.10
Pillar 8.	Price Competitiveness, 1-7 (best)	28	5.44	5.44	Malaysia	1	6.20	6.20
8.01	Hotel price index, US\$	1	54.55	7.00	Indonesia	1	54.55	7.00
8.02	Purchasing power parity, PPP\$	18	0.33	6.36	Lao PDR	2	0.22	7.00
8.03	Fuel price levels, US\$/litre	22	0.96	4.72	Malaysia	7	0.46	6.23
8.04	Short-term rental price, USS\$	100	168.53	3.70	Nepal	2	39.18	6.83
DIMENSION C	INFRASTRUCTURES AND SERVICES	57	3.40	3.40	Singapore	1	5.63	5.63
Pillar 9.	Air Transport Infrastructure, 1-7 (best)	34	4.34	4.34	Singapore	4	5.94	5.94
9.01	Efficiency of air transport services, 1-7 (best)	19	5.48	5.48	Singapore	1	6.62	6.62
9.02	Available seat kilometres per week, millions per pop	84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.03	Number of operating airlines	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.04	Airport connectivity score	9	528,997.00	6.62	China	2	3,040,110.00	7.00
Pillar 10.	Ground and Port Infrastructure, 1-7 (best)	36	3.97	3.97	Singapore	1	6.54	6.54
10.01	Quality of roads, 1-7 (best)	25	5.20	5.20	Singapore	1	6.50	6.50
10.02	Road density, km/surface area	70	29.57	1.89	Singapore	4	504.80	7.00
10.03	Efficiency of train services, 1-7 (best)	10	5.26	5.26	Japan	1	6.78	6.78
10.04	Railroad density, km/100 square km surface area	86	0.27	1.18	Singapore	1	36.00	7.00

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Indonesia TTDI 2024			Benchmarking Indicator Asia Pasific			
		Rank	Value	Score	Negara	Rank	Value	Score
10.05	Efficiency of public transport services, 1-7 (best)	18	5.05	5.05	Japan	1	6.55	6.55
10.06	Efficiency of seaport services, 1-7 (best)	14	5.25	5.25	Singapore	2	6.26	6.26
Pillar 11.	Tourist Services and Infrastructure, 1-7 (best)	86	1.90	1.90	New Zealand	11	4.93	4.93
11.01	Hotel rooms, per 100 pop	82	0.26	1.69	New Zealand	11	1.85	5.83
11.02	Number of Short-term rental listing, per 10,000 pop	88	1.50	1.14	New Zealand	10	64.49	6.95
11.03	Labour productivity in hotels and restaurants, US\$ per pop	79	13,317.80	2.00	Singapore	15	55,300.50	5.15
11.04	T&T capital investment intensity, US\$ per emp	68	4.11	2.76	Singapore	3	45.42	7.00
DIMENSION D	T&T RESOURCES, 1-7 (best)	16	4.16	4.16	China	1	6.19	6.19
Pillar 12.	Natural Resources, 1-7 (best)	8	5.43	5.43	Australia	2	6.42	6.42
12.01	Number of World Heritage natural sites	15	4.00	5.00	China	1	16.00	7.00
12.02	Total known species	2	14,948.00	7.00	Indonesia	2	14,948.00	7.00
12.03	Total protected areas, km2	11	413,810.00	6.23	Australia	1	4,867,600.00	7.00
12.04	Natural tourism Digital Demand, 0-100 (best)	46	10.58	1.93	Japan	7	52.90	5.67
12.05	Number of terrestrial and freshwater ecoregions	6	58.00	7.00	China	2	94.00	7.00
Pillar 13.	Cultural Resources, 1-7 (best)	15	3.98	3.98	Japan	2	6.71	6.71
13.01	Number of World Heritage cultural sites	38	6.00	2.20	China	5	41.00	7.00
13.02	Oral and intangible cultural heritage	21	12.00	5.80	China	1	43.00	7.00
13.03	Number of large sports stadiums	10	28.00	6.60	China	2	173.00	7.00
13.04	Cultural and entertainment tourism Digital Demand, 0-100 (best)	49	5.96	1.66	Japan	4	52.40	6.82
13.05	Number of UNESCO Creative Cities	20	4.00	3.67	China	1	15.00	7.00
Pillar 14.	Non-Leisure Resources, 1-7 (best)	39	3.06	3.06	Japan	4	5.93	5.93
14.01	Presence of Forbes Global 2000 HQ locations	50	0.28	2.03	Japan	4	1.99	7.00
14.02	Presence of global cities	30	0.60	3.45	China	2	8.89	7.00


No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Indonesia TTDI 2024			Benchmarking Indicator Asia Pasific			
		Rank	Value	Score	Negara	Rank	Value	Score
14.03	Number of top universities	9	29.94	5.47	China	2	113.50	7.00
14.04	Non-leisure tourism Digital Demand, 0-100 (best)	53	2.05	1.29	China	4	28.50	5.07
DIMENSION E	T&T SUSTAINABILITY, 1-7 (best)	7	4.86	4.86	Australia	4	4.88	4.88
Pillar 15.	Environmental Sustainability, 1-7 (best)	56	4.34	4.34	New Zealand	18	5.35	5.35
subpillar	T&T Energy Sustainability, 1-7 (best)	65	4.15	4.15	New Zealand	19	5.48	5.48
15.01	T&T GHG intensity, Kg of CO2e per USD of T&T GDP	75	0.99	4.63	Japan	14	0.37	6.11
15.02	T&T energy intensity, MJ of energy per Real USD of T&T GDP	63	12.03	5.19	Japan	8	4.67	6.30
15.03	T&T use of low-carbon energy, % of total	36	8.08	3.20	New Zealand	16	15.54	5.24
15.04	Renewable energy regulation, 0-100 (best)	70	53.00	4.18	India	7	88.00	6.28
15.05	Energy efficiency regulation, 0-100 (best)	85	32.00	2.92	Korea, Rep.	1	87.00	6.22
subpillar	Pollution and Environmental Conditions, 1-7 (best)	65	4.56	4.56	New Zealand	23	5.44	5.44
15.06	Particulate matter (2.5) concentration	49	19.40	4.12	New Zealand	5	6.05	6.79
15.07	Level of water stress	77	29.70	5.22	Cambodia	6	1.04	6.94
15.08	Red List Index, 0-1 (best)	97	0.75	4.01	Mongolia	25	0.96	6.49
15.09	Forest cover loss, average % of baseline	66	0.63	5.10	Pakistan	8	0.01	6.98
15.10	Proportion of safely treated domestic wastewater flows, %	54	N/A	N/A	Singapore	1	100.00	7.00
15.11	Clean ocean water, 0-100 (best)	64	56.39	4.38	Australia	5	84.75	6.09
subpillar	Preservation of Nature, 1-7 (best)	62	4.33	4.33	Australia	20	5.28	5.28
15.12	Number of environmental treaty ratifications, 0-29 (best)	69	22.00	5.55	India, Japan, Korea Rep.	22	26.00	6.38
15.13	Adequate protection for nature, 1-7 (best)	19	5.33	5.33	New Zealand	7	5.61	5.61
15.14	Total protected areas, % total area	97	5.27	1.63	Australia	12	32.12	4.85
15.15	Average proportion of all key biodiversity areas covered by protected areas, %	99	25.82	2.52	Thailand	36	67.14	5.03

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Indonesia TTDI 2024			Benchmarking Indicator Asia Pasifik			
		Rank	Value	Score	Negara	Rank	Value	Score
Pillar 16.	T&T Socioeconomic Impact, 1-7 (best)	10	5.41	5.41	Sri Lanka	4	5.84	5.84
16.01	T&T GDP multiplier	5	2.73	6.57	Lao PDR	1	3.21	7.00
16.02	T&T employment multiplier	66	1.79	3.83	Lao PDR	1	3.45	7.00
16.03	T&T high-wage jobs, % of emp in high wage sectors	9	55.40	6.11	India	4	68.21	7.00
16.04	T&T labour gender parity, % of emp	99	31.33	5.12	New Zealand	3	1.37	6.92
Pillar 17.	T&T Demand Sustainability, 1-7 (best)	5	4.84	4.84	Indonesia	5	4.84	4.84
17.01	Inbound length of stay, days	6	17.10	7.00	Australia	1	28.67	7.00
17.02	Seasonality of international tourist arrivals, peak season % of total	28	35.08	5.56	China	1	27.20	6.69
17.03	Concentration of interest in cultural attractions, % of views	81	68.45	2.32	Mongolia	17	43.48	4.32
17.04	Concentration of interest in nature attractions, % of views	116	67.63	1.68	Bangladesh	20	40.26	4.21
17.05	Geographically dispersed tourism, 1-7 (best)	13	4.79	4.79	China	3	5.12	5.12

Sumber: (WEF, 2024)

Singapore memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan pembangunan Kepariwisata di Kawasan Asia Pasifik. Pada dimensi Infrastructure & Services, Singapore mampu menjadi peringkat 1 dunia dan juga peringkat 1 di Kawasan Asia Pasifik, selain itu juga, Negara tersebut mampu unggul dan menjadi peringkat 1 di Kawasan Asia Pasifik pada dimensi Enabling Environment yang juga berhasil menempati peringkat 5 Dunia. Sebenarnya Indonesia patut berbangga pada Dimensi T&T Enabling and Conditions yang mampu menempati peringkat keempat dunia, namun kalah dengan Malaysia yang berhasil menempati peringkat kedua dunia dan menobatkan sebagai yang pertama di Kawasan Asia Pasifik. Pada dimensi T&T Resources, China berhasil menjadi yang terbaik di dunia dan Kawasan Asia Pasifik dengan skor 6,19. Selanjutnya Indonesia berhasil masuk ke dalam 10 Besar dunia pada Dimensi T&T Sustainability, namun Indonesia harus kalah dari Australia yang berhasil menempati peringkat keempat dunia dengan skor 4,88.

Terkait dengan 17 pilar yang menopang TTDI, beberapa negara berhasil menjadi yang terbaik di kawasan Asia Pasifik, seperti Singapore, New Zealand, Japan, Korea Rep., Indonesia, Malaysia, Australia, China, dan juga Sri Lanka. Dengan keberhasilan tersebut, membuat daya saing kepariwisataan di Kawasan tersebut menjadi positif, sehingga mampu mendorong pembangunan konektivitas dan sektor lainnya yang mendukung sektor pariwisata.



Namun demikian, kita patut banyak belajar dari berbagai negara khususnya di Kawasan Asia Pasifik, sehingga dapat memperkuat daya saing kepariwisataan Indonesia di kemudian hari.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI ASIA PASIFIK

Kawasan Asia-Pasifik telah menyaksikan pertumbuhan pariwisata yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir, dengan negara-negara secara aktif mempromosikan warisan budaya unik, keajaiban alam, dan beragam atraksi untuk menarik pengunjung dari seluruh dunia. Namun, perkembangan pesat industri pariwisata ini juga menimbulkan tantangan dalam memastikan praktik berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat (Baloch et al., 2023; Stacchini et al., 2022).

Salah satu pendorong utama pertumbuhan pariwisata di kawasan Asia-Pasifik adalah munculnya kelas menengah yang makmur dan terdidik, khususnya di negara-negara seperti Tiongkok dan India (Frost et al., 2014). Seiring dengan meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan dan semakin banyaknya wisatawan global, permintaan akan wisata alam dan pengalaman budaya pun meningkat. Hal ini menyebabkan maraknya pembangunan infrastruktur, seperti perluasan jaringan transportasi, fasilitas akomodasi, dan layanan terkait pariwisata, untuk memenuhi peningkatan jumlah pengunjung (Liu et al., 2023).

Meskipun memberikan manfaat ekonomi, pembangunan sektor pariwisata yang cepat dan sering kali tidak terkendali juga berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Banyak destinasi wisata populer di kawasan ini menghadapi berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, kerusakan lingkungan, dan penggusuran penduduk asli (McCarroll et al., 2024). Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa negara di Asia-Pasifik telah menerapkan atau sedang menjajaki berbagai kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Alam et al., 2022; Zamora, 2020).

Salah satu pendekatan yang telah mendapatkan perhatian di kawasan ini adalah integrasi pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian dan manufaktur (Hughes & Scheyvens, 2018). Hal ini dapat membantu mendiversifikasi ekonomi lokal, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata. Strategi lainnya adalah promosi pariwisata warisan eko-budaya berbasis masyarakat, yang melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata (Liu et al., 2023).

Selain itu, beberapa negara telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dari industri pariwisata, seperti pengembangan peraturan eko-wisata, sistem pengelolaan limbah, dan inisiatif energi terbarukan. Seiring dengan terus berkembangnya kawasan Asia-Pasifik sebagai pusat pariwisata global, penerapan kebijakan pengembangan pariwisata yang komprehensif dan inovatif yang menyeimbangkan pertimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial akan menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang industri ini (Bhuiyan, 2014; Frost et al., 2014; Moli, 2011; Zamora, 2020).

Berbagai kebijakan sebagaimana disebutkan diatas telah dilakukan oleh negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. Selain itu, kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Asia-Pasifik dibentuk oleh beragam karakteristik ekonomi, sosial, dan lingkungan di negara-negara di kawasan tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memperkuat kerja sama regional.

Meskipun kebijakan pariwisata Asia-Pasifik telah mengalami kemajuan, kawasan ini menghadapi tantangan seperti pariwisata yang berlebihan di beberapa destinasi, sumber daya yang terbatas untuk usaha kecil dan menengah (UKM), dan pembangunan yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Bangkitnya Tiongkok sebagai pasar utama di luar negeri menghadirkan peluang, sementara ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global dapat menimbulkan risiko bagi pertumbuhan jangka panjang. Kawasan Asia-Pasifik terus memosisikan dirinya sebagai destinasi pariwisata yang dinamis dan beragam, dengan kebijakan yang mencerminkan komitmen terhadap inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi.

Terkait dengan pembangunan kepariwisataan global pada TTDI, Kawasan Asia Pasifik dituntut mampu untuk menjadi yang terbaik dalam hal peningkatan performansi setiap periodenya. Oleh karena itu, kebutuhan kebijakan yang dikembangkan oleh negara masing-masing dapat memperkuat kondisi kepariwisataan di Kawasan tersebut. Berbagai kebijakan yang saat ini telah dibangun oleh masing-masing negara, dapat kita lihat berdasarkan performansi dari masing-masing indikator, sehingga Indonesia akan mampu belajar untuk mengembangkan kedepannya. Dengan demikian diharapkan pengukuran pada periode berikutnya dapat memberikan signal positif bagi Indonesia dalam kemajuan daya saing pembangunan kepariwisataan.

Tabel 2 Kebijakan Penguatan Dimensi/Pilar/Indikator di Kawasan Asia Pasifik

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
DIMENSION A	ENABLING ENVIRONMENT, 1-7 (best)	Singapore
<p>Singapura telah mengembangkan lingkungan yang memungkinkan yang kuat untuk pariwisata, dengan fokus pada beberapa strategi utama untuk meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Strategic Partnerships and Campaigns, Singapore Tourism Board (STB) aktif berkolaborasi dengan berbagai mitra, terutama Indonesia untuk mempromosikan Singapura sebagai destinasi wisata utama. Dilakukan dengan cara menandatangani memorandum kerja sama dengan Asosiasi Perwakilan Perjalanan Indonesia (ASTINDO) dan GDP Venture. 2) Financial Support for Media Productions, STB meluncurkan Singapura On-Screen Fund yang mengalokasikan SGD berjumlah 10 juta untuk mendukung produksi acara TV dan film yang menampilkan atraksi Singapura. 3) Sustainable Tourism Goals, Singapura merancang roadmap yang fokus pada membuat industri hotel lebih ramah lingkungan 		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
4)	Infrastructure and Cleanliness , Keberhasilan Singapura dalam pariwisata dapat dipicu oleh infrastruktur yang baik dan standar kebersihan yang ketat. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang menyambut baik bagi wisatawan	
5)	Brand Campaigns , STB berencana untuk memperbaiki kampanye merek "Passion Made Possible" untuk menggantikan kampanye sebelumnya "SingapoReimagine"	
Pillar 1.	Business Environment, 1-7 (best)	Singapore
<p>Kebijakan pengelolaan business environment di Singapura berfokus pada menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dengan pendekatan digital dan regulasi yang inovatif. Beberapa inisiatif utama yang diterapkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Singapura menyediakan layanan digital terintegrasi melalui GoBusiness, yang menawarkan akses ke lebih dari 300 layanan pemerintah untuk bisnis, seperti pengajuan perizinan dan permohonan bantuan pemerintah. 2) Singapura mendorong inovasi dengan menyediakan regulatory sandboxes di sektor fintech, transportasi, energi, dan data. Contohnya, sandbox di bidang telemedicine yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan Singapura memungkinkan lebih dari 800 rumah sakit dan klinik memberikan layanan telemedis di wilayah Singapura dan sekitarnya 3) Singapura sangat dihormati dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dan memiliki sistem yang diakui secara internasional. Dengan perubahan pada Copyright Act 2021 dan Intellectual Property (Amendment) Act 2022, kebijakan ini terus diperbaharui untuk mendukung pertumbuhan bisnis berbasis data dan inovasi teknologi 4) Singapura juga proaktif dalam menjalin perjanjian ekonomi digital dan hijau dengan negara-negara lain seperti Australia, Inggris, dan Korea. Perjanjian ini membantu perusahaan di Singapura terhubung lebih baik dengan mitra internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 		
1.01	Rule of law, 0-100 (best)	New Zealand
<ol style="list-style-type: none"> 1) Judicial Independence, Hakim harus bebas dari pengaruh setiap orang, akan tetapi tidak terbatas pada Gubernur-Jenderal, Anggota Parlemen (termasuk Menteri) dan pejabat pemerintah. Mahkamah Agung New Zealand adalah pengadilan tinggi terakhir. 2) Quality of the Judicial Process, Dalam sistem peradilan di New Zealand, menggunakan sistem hierarki dengan mahkamah agung terletak paling atas, diikuti Mahkamah Tinggi, Mahkamah Banding, dan Pengadilan Distrik. Proses pengangkatan hakimnya diangkat oleh Gubernur Jenderal atas saran Jaksa Agung. 3) Perceptions of the quality of public services and the independence of the civil service, Pengamatan kualitas layanan publik New Zealand sangat beragam, UU Pelayanan Publik 2020 menekankan penyampaian layanan publik yang berkualitas dan efisien, namun dari data terkini layanan publik semakin turun, contoh departemen darurat rumah sakit mengalami waktu menunggu lebih lama dan kemampuan membaca serta menghitung anak menurun. 4) Perception of corruption, Transparency International New Zealand dan Ombudsman melakukan Anti-Korupsi dan Promosi Integritas dengan bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ombudsman Peter Boshier menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dan melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap kasus korupsi 5) Bribery Risk, New Zealand memiliki hukum yang ketat pada korupsi, Crimes Act 1961. Hukuman untuk korupsi dalam lingkungan publik dapat mencapai penjara hingga 14 tahun atau denda tak terbatas. Untuk korupsi terhadap pejabat publik asing hingga 7 tahun. Untuk 		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	mengatasi hal ini New Zealand meningkatkan anti-korupsi dengan alat risiko dan transparansi.	
1.02	Burden of government regulation, 1-7 (best)	Singapore
<p>Singapore telah berhasil meningkatkan kualitas regulasi dan mengurangi beban regulasi pemerintah (burden of government regulation) melalui beberapa strategi yang efektif, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem pelayanan publik yang baik, Sistem ini didukung oleh kebijakan yang baik, terstruktur, dan SDM yang profesional 2) Pengaturan dan Pemeliharaan, Singapore Tourism Board (STB) bertanggung jawab atas pengaturan hotel, agen perjalanan, dan pemandu wisata, serta memastikan kinerja sesuai dengan berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk pemeriksaan reguler untuk mempertahankan standar dan melindungi konsumen. 3) Regulasi Keselamatan dan Lingkungan, Meskipun regulasi ini meningkatkan pengalaman wisatawan secara keseluruhan dan mempertahankan reputasi Singapura sebagai destinasi bersih dan aman, mereka dapat menimbulkan beban operasional yang signifikan pada bisnis, terutama dalam hal biaya dan persyaratan administratif. 		
1.03	Government ensuring policy stability, 1-7 (best)	Singapore
<ol style="list-style-type: none"> 1) Singapore Tourism Board (STB), STB berperan sentral dalam mempertahankan lingkungan kebijakan yang stabil untuk pariwisata. Badan ini mengawasi pengaturan lisensi bagi hotel, agen perjalanan, dan atraksi wisata, memastikan kinerja sesuai dengan peraturan yang mempertahankan standar tinggi keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan. 2) Collaborative Governance, Berbagai lembaga pemerintah, Urban Redevelopment Authority (URA) dan National Environment Agency (NEA), bekerja sama dengan STB untuk menciptakan lingkungan regulasi yang kohesif agar kebijakan dapat diintegrasikan di berbagai sektor. 		
1.04	Country credit rating, 0-100 (best)	Australia
<ol style="list-style-type: none"> 1) Disiplin Fiskal, Sebagian besar peningkatan pendapatan ke anggaran, menghambat pertumbuhan pengeluaran, dan menerapkan reformasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. 2) Pengelolaan Anggaran, Pemerintah telah berhasil mengelola anggaran dengan kembali 99% revisi pajak yang meningkat untuk dua tahun ke depan dan 92% selama perkiraan ke depan. 3) Pengendalian Pengeluaran, Pertumbuhan riil pengeluaran diharapkan rata-rata hanya 0,3% per tahun selama perkiraan ke depan, menunjukkan pendekatan disiplin terhadap pengeluaran publik. 4) Reformasi Ekonomi, Pemerintah telah menerapkan reformasi yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, yang telah diakui oleh lembaga penilaian internasional seperti S&P Global Ratings dan Fitch. 5) Institusi Kuat, Pendapatan per kapita yang tinggi dan institusi yang kuat mendukung peringkat AAA negara, seperti yang dicatat oleh Fitch. 		
1.05	De-jure financial globalization, 0-100 (best)	Singapore
<ol style="list-style-type: none"> 1) Liberalisasi Akun Modal, Singapura telah menerapkan kebijakan untuk liberalisasi akun modal, memungkinkan lebih banyak kebebasan dalam aliran keuangan lintas perbatasan. Ini termasuk penghapusan pembatasan investasi asing dan memfasilitasi perdagangan internasional aset keuangan. 		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>2) Institusi Keuangan, Singapura memiliki sektor keuangan yang berkembang dengan berbagai institusi, termasuk bank komersial, bank investasi, dan perusahaan manajemen aset. Institusi-institusi ini diperingan untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan internasional, memperdalam integrasi keuangan.</p> <p>3) Framework Regulasi, The Monetary Authority of Singapore (MAS) berperan penting dalam mengatur sektor keuangan. MAS menerapkan kerangka regulasi yang kuat yang seimbang antara kebutuhan stabilitas keuangan dengan kebutuhan liberalisasi keuangan.</p> <p>4) Reformasi Institusional, Reformasi ini termasuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab institusi keuangan, memperbaiki pemerintahan korporasi, dan memperkuat pengawasan keuangan.</p> <p>5) Kerja Sama Internasional, Singapura aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk mempromosikan stabilitas keuangan dan memfasilitasi transaksi keuangan lintas perbatasan. Ini termasuk partisipasi dalam forum internasional seperti G20 dan Financial Stability Board (FSB).</p>	
1.06	De-jure trade globalization, 0-100 (best)	Singapore
	<p>1) Free Trade Agreements (FTA), Singapura telah menandatangani banyak FTA dengan berbagai negara dan wilayah, seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Perjanjian Komprehensif dan Progressif untuk Pasar Pasang Surut Trans-Pasifik (CPTPP). Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi tarif dan barrier perdagangan lainnya.</p> <p>2) Perjanjian World Trade Organization (WTO), Singapura adalah anggota WTO dan mengikuti aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh organisasi tersebut, yang memberikan kerangka kerja untuk perdagangan internasional. Perjanjian-perjanjian WTO, seperti Perjanjian Umum tentang Perdagangan Tarif (GATT), membantu menetapkan aturan dan standar umum untuk perdagangan internasional.</p> <p>3) Regulasi Domestik, Singapura telah menerapkan berbagai regulasi domestik untuk mendukung globalisasi perdagangan. Misalnya, negara tersebut telah menetapkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak milik intelektual, yang sangat penting untuk menarik investasi asing dan memfasilitasi perdagangan internasional.</p>	
1.07	SME access to finance, 1-7 (best)	Indonesia
	<p>Kebijakan akses keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia dirancang untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat peran UKM dalam perekonomian nasional, serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. UKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Namun, banyak UKM yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung akses keuangan bagi UKM. Berikut adalah beberapa kebijakan utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2) Program Kredit Ultra Mikro (UMi) 3) Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 4) Program Pembiayaan Syariah 5) Dukungan untuk Digital Financial Services 6) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN 	
Pillar 2.	Safety and Security, 1-7 (best)	Singapore

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Transformasi Industri Keamanan, Kebijakan ini mendorong sektor keamanan beralih dari model yang padat tenaga kerja menjadi model yang lebih terintegrasi dengan teknologi, seperti penggunaan video analytics dan automated visitor registration machines. 2) SG Cyber Safe Programme, Program ini membantu organisasi Singapura meningkatkan keamanan siber dan mengurangi risiko serangan siber. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap organisasi dan membantu mereka dalam menjaga keamanan digital. 3) Safety and Security Watch Group (SSWG), Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di berbagai bangunan di Singapura. Program ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko serangan teroris. 4) Building Trust and Safety, Program ini berfokus pada memperkuat perlindungan digital dan memastikan keamanan ruang, seperti ScamShield dan SMS Sender ID Registry untuk melindungi masyarakat dari penipuan online. 5) Safety & Security, Program ini menggunakan teknologi seperti Internet of Things (IoT) sensors dan video analytics untuk meningkatkan keamanan publik. Program ini melibatkan pengembangan robotik dan drone untuk meningkatkan efisiensi petugas keamanan dan meningkatkan keselamatan publik. 6) SGSecure, Program ini adalah respons komunitas Singapura terhadap ancaman terorisme. Program ini berfokus pada tiga aksi utama: Staying Alert (Vigilance), Staying United (Cohesion), dan Staying Strong (Resilience) untuk membangun ketahanan komunitas dan menghadapi ancaman terorisme. 7) Pendekatan Keselamatan Jalan, Singapura memiliki strategi keselamatan jalan yang mencakup infrastruktur pejalan kaki, penggunaan kamera pemantau, dan skema peningkatan aksesibilitas pejalan kaki dan pengendara sepeda 8) Kebijakan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja terkait peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja di bidang keamanan, termasuk pelatihan untuk mengoperasikan solusi teknologi baru serta mengembangkan keahlian dalam menghadapi tantangan keamanan sehari-hari. 	
2.01	Confidence in local police, 0-1 (best)	Singapore
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Community-Based Policing Strategy, Singapore Police Force (SPF) memperkenalkan strategi polisi berbasis masyarakat melalui sistem Pos Polisi Kawasan (Neighbourhood Police Post) pada tahun 1983. Pendekatan ini mengalihkan fungsi polisi dari tingkat divisi ke tingkat kawasan, memberi kebebasan lebih besar kepada petugas lapangan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Sistem NPP menekankan patroli kaki dan sepeda, kunjungan ke rumah, dan peningkatan visibilitas polisi di kawasan. 2) Pusat Polisi Kawasan (NPCs), Pada tahun 1997, SPF melanjutkan strategi polisi berfokus pada masyarakat melalui pembentukan Pusat Polisi Kawasan (Neighbourhood Police Centres). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kehadiran yang lebih tinggi dan visibilitas polisi, serta memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat untuk mencegah kejahatan. 3) Partisipasi Publik, Inisiatif seperti Dewan Pencegahan Kejahatan Nasional dan Program Pengawas Kawasan (Neighbourhood Watch Scheme) diluncurkan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan kejahatan. Program-program ini mempromosikan kesadaran warga dan tanggung jawab sosial, yang berkontribusi pada keamanan kawasan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
4)	Peningkatan Citra Publik , Dilakukan untuk membuat polisi lebih terlibat dengan masyarakat, menciptakan citra yang dapat diandalkan dan ramah untuk memenangkan kepercayaan dan kepercayaan masyarakat.	
2.02	Safety walking alone at night, 1-7 (best)	Singapore
1)	Pengamanan Komunitas , Singapura menekankan keselamatan dan keamanan komunitas, yang berkontribusi pada tingkat keselamatan yang tinggi. Pasukan polisi sangat proaktif dan didukung oleh warga, sehingga membangun kepercayaan dan keamanan.	
2)	Tingkat Kriminal yang Rendah , Dengan tingkat kriminal yang konsisten rendah, yang secara signifikan mengurangi risiko bertemu dengan kejahatan saat berjalan sendiri di malam hari.	
3)	Daerah yang Terang dan Ramai , Daerah di Singapura, seperti Orchard Road, terang dan ramai dengan orang-orang, sehingga lebih aman untuk berjalan malam.	
4)	Inisiatif Keselamatan Publik , Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif keselamatan publik, termasuk supermarket dan kafe yang buka 24 jam, yang menyediakan tempat yang aman untuk dikunjungi di malam hari.	
5)	Partisipasi Masyarakat , Masyarakat secara umum sadar akan lingkungan sekitar dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan pribadi, seperti berhati-hati dengan barang berharga dan tetap di daerah yang terang.	
6)	Community-Based Policing Strategy , Sistem NPP menekankan patroli kaki dan sepeda, kunjungan ke rumah, dan peningkatan visibilitas polisi di kawasan.	
2.03	Homicide rate per 100,000 pop	Singapore
1)	Pengamanan Komunitas , Pembangunan 91 Pos Polisi Komunitas (NPP) yang menyediakan layanan konter yang mudah diakses, hubungan yang erat dengan masyarakat, patroli yang tinggi visibilitas, kunjungan ke rumah, dan pendidikan pencegahan kejahatan.	
2)	Zona Pengawasan Perumahan , Perluasan Zona Pengawasan Perumahan bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam kesadaran pencegahan kejahatan, membangun konsep bantuan diri dalam pencegahan kejahatan. Inisiatif ini didukung oleh Komite Penduduk dan Organisasi Warga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.	
3)	Aliansi Strategis dengan Kelompok Masyarakat , SPF berusaha untuk memperkuat aliansi strategis dengan kelompok masyarakat dan organisasi sosial untuk meningkatkan kesadaran pencegahan kejahatan. Kolaborasi ini memanfaatkan kekuatan dan keahlian bersama untuk melawan kejahatan.	
4)	Pendidikan Pencegahan Kejahatan , Polisi telah meluncurkan program pendidikan pencegahan kejahatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran pencegahan kejahatan di masyarakat. Ini termasuk mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab pribadi mereka untuk keselamatan dan sifat oportunistik banyak kejahatan.	
2.04	Global Terrorism Index, 0-10 (worst)	Cambodia, China, Korea, Rep. Lao PDR, Mongolia, Singapore
a.	Cambodia	
1)	Pembentukan Sekretariat Komite Nasional Anti-Terorisme (SNCTC) , Kamboja membentuk SNCTC untuk mengkoordinasikan upaya dalam mencegah dan melawan terorisme. SNCTC telah aktif terlibat dalam pelatihan dan berbagi informasi untuk meningkatkan kemampuan negara dalam melawan terorisme.	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	2) Pelatihan dan Workshop , SNCTC telah mengadakan berbagai kursus pelatihan, workshop, dan tur studi untuk mendidik personil dari berbagai otoritas dan lembaga kompeten. 3) Berbagi Informasi dan Latihan , SNCTC juga mengadakan latihan dan berbagi informasi untuk meningkatkan kesiapan dan tanggap terhadap ancaman terorisme potensial. 4) Kolaborasi dengan Mitra Internasional , Kamboja telah berkolaborasi dengan mitra internasional untuk menangkap dan mengadili pemimpin teroris, seperti Hambali pada tahun 2001. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen Kamboja terhadap upaya regional dan global melawan terorisme. 5) Partisipasi dalam Inisiatif Regional dan Global , Kamboja tetap komitmen untuk berpartisipasi dalam inisiatif regional dan global untuk mencegah dan melawan terorisme	
	b. China 1) Establishment of the South-South Cooperation Assistance Fund , China mengumumkan pembentukan dana ini dengan kontribusi awal sebesar USD 2 miliar pada Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015. Dana ini telah membiayai beberapa proyek kerjasama di 166 negara mitra, mendukung upaya pencegahan terorisme dan pemberantasan ekstremisme kekerasan. 2) Belt and Road Initiative , Strategi utama kerja sama pembangunan China yang mencakup investasi di koridor infrastruktur yang melintasi lebih dari 50 negara. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan pemerintahan nasional dan memastikan keadilan dan kesetaraan, yang merupakan fokus untuk menangani terorisme. 3) Kerjasama dengan Negara-negara Regional , China telah berbagi pengetahuan dengan negara-negara di wilayah tersebut, seperti Thailand dan Indonesia, dan telah berpartisipasi dengan negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan untuk meningkatkan upaya pencegahan terorisme. 4) Peningkatan Langkah-Langkah Keamanan , Setelah Olympic 2008, China meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi terhadap potensi ancaman terorisme. Ini termasuk mengakui potensi Beijing menjadi target selama acara tersebut, sehingga meningkatkan perencanaan keamanan dan kerja sama dengan organisasi internasional.	
	c. Korea, Rep. 1) Peningkatan Pengamanan , Korea Selatan telah memperkuat pengamanannya, termasuk peningkatan pengawasan dan pengumpulan intelijen untuk mencegah dan merespons potensi ancaman terorisme. 2) Kolaborasi dengan Mitra Internasional , Korea Selatan bekerja sama erat dengan mitra internasional, termasuk Inggris, untuk berbagi intelijen dan praktik terbaik dalam pencegahan terorisme. 3) Kampanye Kesadaran Masyarakat , Pemerintah meluncurkan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengedukasi warga tentang risiko terorisme dan cara tetap aman. 4) Siap Darurat , Korea Selatan telah mengembangkan sistem siap darurat yang kuat, termasuk aplikasi Siap Darurat, yang menyediakan peringatan dan instruksi selama keadaan darurat sipil dan potensi ancaman terorisme. 5) Framework Hukum , Negara ini memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menangani terorisme, termasuk undang-undang yang ketat terhadap perdagangan dan kebocoran narkoba, yang dapat menghasilkan hukuman yang berat.	
	d. Singapore	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaturan Hukum, Singapura memiliki undang-undang yang memberikan efek pada Konvensi Internasional untuk Penghapusan Pendanaan Terorisme. Undang-undang ini termasuk Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002, yang memberikan kekuatan hukum untuk menghambat pendanaan terorisme. 2) Komite Inter-Ministerial untuk Pengenalan Teroris, Komite ini dibentuk pada tahun 2012 untuk bertindak sebagai otoritas Singapura dalam pengenalan teroris. Komite ini terdiri dari anggota dari Kementerian Dalam Negeri, Departemen Urusan Komersial/Singapura Polisi, Kementerian Luar Negeri, Otoritas Moneter Singapura, dan Kamar Pengacara Agung. 3) Pengawasan dan Pengamanan, Singapura memiliki strategi yang kuat untuk mengawasi dan mengamankan kegiatan keuangan untuk mencegah pendanaan terorisme. Strategi ini didukung oleh jaringan yang terorganisir dengan baik antara lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak swasta. 4) Penggunaan Teknologi, Singapura menggunakan teknologi seperti pengenalan wajah untuk meningkatkan kemampuan investigasi dan pencegahan terorisme. Pelatihan pembangunan kapasitas juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan otoritas terkait. 5) Kerja Sama Internasional, Singapura berpartisipasi aktif dalam kerja sama internasional untuk melawan terorisme. Mereka berpartisipasi dalam konvensi internasional dan kerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB dan INTERPOL untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan penindakan terorisme. 	
2.05	Organized violence, deaths per 100,000 pop	Cambodia, China, Japan, Korea, Rep., Lao PDR, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Singapore, Vietnam
	<p>a. China</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Anti-Kekerasan Terorganisir (AOCL), AOCL bertujuan untuk menghilangkan kejahatan terorganisir dan korupsi resmi yang mengganggu kekuasaan Partai Komunis. Undang-undang ini mendefinisikan "kejahatan terorganisir" secara luas dan mencakup penyidikan atas tindakan kejahatan yang dilakukan secara online. 2) Kampanye Saohei, Diluncurkan pada tahun 2018, kampanye saohei adalah upaya lebih luas untuk "mengusir kegelapan dan menghilangkan kejahatan." Kampanye ini secara inheren politik, bertujuan untuk memperkuat kekuasaan Partai di tingkat pemerintahan yang paling rendah. 3) Kampanye Anti-Korupsi, Presiden Xi Jinping telah memimpin beberapa kampanye anti-korupsi, termasuk kampanye "tindakan keras" anti-kejahatan dan upaya untuk mengincar jaringan korupsi guanxi. Kampanye ini bertujuan untuk mengurangi kekuatan Mafia Merah dan menghancurkan kolusi antara sektor publik dan dunia kejahatan. 4) Yurisdiksi Ekstraterritorial, China telah memperluas yurisdiksi untuk menyidik kejahatan yang dilakukan di luar daratan China, terutama yang mempengaruhi keamanan nasional, ketertiban sosial, dan ketertiban ekonomi. Ini terlihat dalam undang-undang seperti Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. <p>b. Japan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Anti-Kekerasan Terorganisir, Jepang telah mengadopsi undang-undang untuk melawan kejahatan terorganisir, seperti Undang-Undang tentang Hukuman Kekerasan Terorganisir dan Undang-Undang Khusus tentang Narkoba. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>2) Langkah-langkah Anti-Terrorisme, Pembentukan Kepresidenan untuk Mendorong Langkah-langkah Melawan Kekerasan Terorganisir dan Terorisme Internasional. Kepresidenan ini mengkoordinasikan upaya di berbagai departemen untuk menerapkan langkah-langkah anti-terorisme,</p> <p>3) Strategi Pencegahan Kejahatan, Kepolisian Nasional Jepang telah menerapkan berbagai strategi pencegahan kejahatan, termasuk langkah-langkah untuk mencegah pendanaan kelompok kejahatan terorganisir. Strategi ini melibatkan meningkatkan langkah-langkah preventif seperti menghancurkan pisau dan alat pembuka kunci, menghilangkan sepeda yang ditinggalkan ilegal, poster jasa pengawal, dan graffiti, serta mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan.</p> <p>4) Rencana Tindakan untuk Membuat Masyarakat yang Tahan Kekerasan, Rencana ini menekankan promosi partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan, pengembangan lingkungan sosial yang tahan kekerasan, dan mengatasi sectionalisme birokratis. Rencana ini mencakup 148 langkah individu, seperti dukungan untuk sukarelawan anti-kejahatan, memperkuat aktivitas polisi di koban, dan mempromosikan pendidikan remaja di komunitas.</p> <p>5) Melawan Perdagangan Orang, Jepang telah membentuk Komite Koordinasi Inter-Ministerial untuk melawan perdagangan orang, yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah pekerjaan ilegal di bisnis seks dan hiburan, melindungi korban, dan merevisi hukum pidana untuk memperkuat seriusnya kejahatan.</p>	
<p>c. Korea, Rep.</p>	<p>1) Strict Punishment and Confiscation, Yudikatif Korea telah ketat dalam menetapkan hukuman untuk kejahatan yang terorganisir. Misalnya, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa properti yang digunakan dalam pelaksanaan kejahatan, seperti bangunan yang digunakan untuk perdagangan seks, dapat dikonfiskasi.</p> <p>2) Perang Melawan Kriminal, Pada tahun 1990, pemerintah Korea mengumumkan "perang melawan kriminal," yang termasuk penindakan berbagai kejahatan seperti kejahatan narkoba, kekerasan yang terorganisir, dan perdagangan manusia.</p> <p>3) Langkah-Langkah Legislasi, Pemerintah Korea telah menetapkan undang-undang khusus untuk menghukum pemimpin dan anggota kelompok kriminal.</p> <p>4) Kerja Sama Internasional, Korea Selatan telah memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain untuk melawan kejahatan yang terorganisir internasional. Ini termasuk langkah-langkah untuk mengkonfiskasi hasil kriminal, mencegah pencucian uang, dan membantu dalam pelaksanaan permintaan konfiskasi dari negara-negara lain.</p> <p>5) Strategi Jangka Panjang, Pemerintah juga telah fokus pada strategi jangka panjang seperti menangani remaja yang delinquent yang berpotensi menjadi anggota organisasi kriminal.</p>	
<p>d. Malaysia</p>	<p>1) Langkah-Langkah Legislasi, Malaysia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melawan kekerasan yang terorganisir dan terorisme. Ini termasuk Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana 1959, Undang-Undang Kemanan Dalam Negeri 1960, Undang-Undang Tindakan Kemanan (Tindakan Khusus) 2012, dan Undang-Undang Pencegahan Terorisme 2015. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk menekan subversi, kekerasan yang terorganisir, dan tindak pidana terhadap manusia.</p> <p>2) Divisi Pencegahan Terorisme, Polisi Diraja Malaysia memiliki Divisi Pencegahan Terorisme yang melakukan perencanaan, koordinasi, dan pengumpulan intelijen untuk</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>melawan ancaman kekerasan, tindak pidana yang dipersiapkan, dan pencucian uang. Divisi ini sangat proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani aktivitas kelompok seperti Tandzim Al-Qaeda Malaysia (TAQM).</p> <p>3) Kebijakan Publik dan Kesadaran, Malaysia telah mengembangkan kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kekerasan berbasis gender dan meningkatkan kesetaraan gender. Kebijakan ini termasuk Strategi Nasional untuk Meningkatkan Perempuan, yang bertujuan mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan mengurangi insiden kekerasan terhadap perempuan.</p> <p>4) Kerja Sama Internasional, Malaysia bekerja sama dengan organisasi internasional untuk melawan kejahatan yang terorganisir transnasional dan terorisme. Ini termasuk kerja sama dengan PBB dan badan internasional lainnya untuk menangani isu seperti perdagangan manusia dan pencucian uang.</p> <p>5) Kerangka Hukum, Kerangka hukum di Malaysia termasuk ketentuan yang memungkinkan penekanan terhadap tindakan terorisme dan pendanaan terorisme. Kode Tindak Pidana, Bab VIA, menangani tindakan terkait terorisme, dan undang-undang khusus yang ditetapkan di bawah Pasal 149 konstitusi menangani subversi dan kekerasan yang terorganisir.</p>	
	<p>e. New Zealand</p> <p>1) Undang-Undang dan Polisi, New Zealand telah mengeluarkan berbagai undang-undang untuk melawan kekerasan yang terorganisir. Misalnya, Undang-Undang Harassment and Criminal Associations tahun 1997 memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada polisi, dan Undang-Undang Criminal Proceeds (Recovery) tahun 2009 memungkinkan penangkapan hasil dari kejahatan untuk membiayai kegiatan polisi. Selain itu, Undang-Undang Amendemen Proceeds of Crime tahun 2002 dan peraturan pajak telah digunakan untuk mengambil hak-hak yang diperoleh secara ilegal dari kriminal.</p> <p>2) Tim Tugas dan Satuan Khusus, Pembentukan satuan polisi khusus seperti Task Force di Auckland pada tahun 1974 telah membantu melawan kebisingan dan kekerasan yang umumnya terkait dengan kejahatan terorganisir.</p> <p>3) Keamanan Perbatasan dan Pengawasan Imigrasi, New Zealand telah meningkatkan keamanan perbatasan untuk mencegah pengiriman orang dan kejahatan transnasional. Ini termasuk memperluas jaringan Migration Liaison Officers di luar negeri dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengganggu dan menghancurkan jaringan kejahatan terorganisir.</p> <p>4) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan, Meskipun bukan strategi penekanan secara eksklusif, program partisipasi masyarakat dan pendidikan adalah bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk mengatasi penyebab akar kekerasan yang terorganisir. Contohnya, inisiatif He Whenua Taurikura fokus pada penelitian dan solusi berbasis komunitas untuk mencegah ekstremisme yang berdarah.</p> <p>5) Keterlibatan Publik dan Berbagi Informasi, Kampanye informasi publik dan kerja sama antara lembaga pemerintah, seperti National Cyber Security Centre, CERT NZ, New Zealand Police, dan Netsafe, membantu menjaga komunitas terinformasi tentang ancaman dan memberikan saran tentang keselamatan.</p>	
	<p>f. Singapore</p> <p>1) Undang-Undang dan Polisi, Singapura telah mengeluarkan undang-undang yang ketat untuk melawan kejahatan terorganisir. Misalnya, Ordinansi Masyarakat dan Undang-Undang Kriminal Terorganisir tahun 2015 mengenakan hukuman yang berat bagi pelaku,</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>termasuk penjara dan hukuman fisik. Kepolisian memiliki cabang yang spesifik, Cabang Masyarakat Rahasia (SSB), yang berfokus pada menghancurkan masyarakat rahasia dan kelompok gangster melalui serbuan tiba-tiba dan tindakan lainnya.</p> <p>2) Komite Inter-Ministerial untuk Penetapan Teroris (IMC-TD), Komite yang didirikan pada tahun 2012, bertanggung jawab untuk menetapkan teroris dan membekukan aset mereka. Komite ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak komersial untuk mengganggu kegiatan pembiayaan teroris.</p> <p>3) Keterlibatan Publik dan Pendidikan, Inisiatif seperti Grant Pendidikan Publik TIP bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir, meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi publik dalam melawan masalah ini.</p> <p>4) Kerja Sama dan Kerja Sama Internasional, Singapura aktif berpartisipasi dalam platform anti-perdagangan manusia dan anti-terorisme internasional, bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi untuk berbagi intelijen dan praktik terbaik dalam melawan kejahatan terorganisir.</p> <p>5) Penangkapan dan Pengambilan Aset, Undang-Undang Kriminal Terorganisir tahun 2015 memungkinkan pengambilan aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, yang membantu dalam penyelidikan dan penuntutan kasus kejahatan terorganisir.</p> <p>6) Perintah Pemutusan, Undang-Undang tersebut menyediakan perintah pemutusan seperti perintah disqualifikasi, perintah pelaporan keuangan, dan perintah pencegahan kriminal terorganisir, yang membantu dalam memantau dan mengontrol aktivitas pelaku yang diduga.</p>	
Pillar 3.	Health and Hygiene, 1-7 (best)	Japan
	<p>Kebijakan pembangunan Health and Hygiene di Jepang berfokus pada peningkatan standar kesehatan masyarakat, pengelolaan lingkungan yang bersih, serta pengembangan layanan kesehatan yang berkualitas untuk mendukung pariwisata dan kesejahteraan umum. Berikut beberapa kebijakan utama yang diterapkan Jepang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Standar Kesehatan Publik melalui, Jepang memiliki peraturan yang sangat ketat terkait promosi kesehatan yang dikenal dengan Health Promotion Law, yang bertujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat dan mengurangi penyakit terkait gaya hidup seperti diabetes dan hipertensi. 2. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan, Jepang memiliki program peningkatan infrastruktur kesehatan yang berfokus pada perbaikan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata. Kebijakan ini mencakup pembaruan rumah sakit, klinik, dan layanan gawat darurat, serta penyediaan layanan kesehatan dalam berbagai bahasa untuk memudahkan wisatawan internasional. 3. Kontrol Ketat Terhadap Penyakit Menular, Jepang memiliki sistem yang kuat untuk mencegah dan mengontrol penyebaran penyakit menular. Selama pandemi COVID-19, Jepang menerapkan protokol yang ketat, termasuk pengujian yang luas, penelusuran kontak (contact tracing), dan karantina wajib bagi pendatang asing, untuk menjaga keselamatan penduduk lokal dan wisatawan. 4. Sanitasi Lingkungan dan Air Bersih, Pemerintah Jepang juga memiliki kebijakan untuk menjaga kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang tinggi, seperti melalui Water Pollution Control Law yang menetapkan standar kualitas air untuk sungai, danau, serta laut. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	5. Standar Kebersihan untuk Industri Makanan dan Perhotelan, Jepang menerapkan standar kebersihan yang ketat di restoran dan industri perhotelan, melalui Food Sanitation Act. Undang-undang ini mengatur kontrol ketat terhadap keamanan makanan, pemrosesan, dan distribusi, untuk memastikan makanan yang aman dan higienis bagi konsumen. 6. Penyediaan Layanan Medis untuk Wisatawan, Jepang juga memiliki kebijakan penyediaan layanan medis yang ramah wisatawan, seperti penyediaan asuransi kesehatan sementara bagi wisatawan dan pembentukan pusat informasi medis berbahasa asing. 7. Program Promosi Kesehatan Pariwisata, Jepang aktif mempromosikan pariwisata kesehatan (health tourism) yang mencakup program detoksifikasi, meditasi, onsen (pemandian air panas), dan terapi tradisional Jepang. Kebijakan ini mendukung pariwisata berkelanjutan yang fokus pada kesehatan dan kesejahteraan.	
3.01	Number of Physician per 1,000 pop	Australia
1)	Perekrutan Dokter dari Luar Negeri , Australia telah aktif merekrut dokter dari luar negeri, terutama dari negara-negara dengan pendapatan rendah hingga menengah, untuk mengatasi kekurangan dokter yang semakin meningkat. 2) Pembukaan Sekolah Kedokteran Baru , Upaya telah dilakukan untuk membuka lebih banyak sekolah kedokteran, terutama di daerah pedesaan dan regional, untuk meningkatkan pasokan lulusan dokter. Contohnya, Universitas Charles Darwin di Teritori Utara telah terlibat dalam inisiatif ini. 3) Meningkatkan Dukungan bagi Dokter Dilatih di Luar Negeri , Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) telah berkomitmen untuk mengurangi proses akreditasi bagi dokter lulusan internasional (IMG) untuk membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di daerah pedesaan. 4) Menangani Masalah Burnout dan Retensi , Upaya dilakukan untuk menangani masalah burnout dan retensi di kalangan dokter umum. Hal ini termasuk meningkatkan kondisi kerja, meningkatkan gaji, serta memberikan beasiswa untuk membuat praktik umum lebih menarik. 5) Strategi Kerja Sama Nasional Dokter , Strategi Kerja Sama Nasional Dokter bertujuan untuk meningkatkan akses kesehatan dengan mendukung orang-orang dengan kemampuan yang tepat di tempat yang tepat.	
3.02	Use of basic sanitation, % of pop	Australia, Japan, Korea, Rep., New Zealand, Singapore, Thailand
a.	Australia 1) Akses yang Lebih Baik ke Air Bersih dan Sanitasi Dasar , Konstruksi skema air pipa skala menengah hingga besar dan penyediaan kamar mandi yang sehat bagi sekolah, klinik kesehatan, pasar, dan rumah tangga. 2) Peningkatan Perilaku Higiene , Australia mendukung pengembangan layanan promosi higiene untuk membawa perubahan perilaku yang berkelanjutan. Ini termasuk mempromosikan praktik higiene yang baik seperti mencuci tangan dengan sabun, dengan mengarahkan kelompok yang rentan seperti anak-anak dan perempuan, serta memahami faktor sosio-budaya lokal untuk mendorong perubahan perilaku. 3) Membuat Layanan yang Berkelanjutan , Australia mendukung kebijakan dan strategi untuk memastikan layanan yang berkelanjutan melalui pemerintahan yang efektif dan	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>partisipasi dengan lembaga multilateral, masyarakat sipil, dan bisnis. Ini termasuk memperkuat sistem sektor WASH dan menetapkan model investasi yang berkelanjutan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.</p>	
	<p>4) Penggunaan Bantuan Luar Negeri Strategis, Bantuan Luar Negeri (ODA) Australia digunakan secara strategis untuk memperkuat sistem sektor WASH dan mendorong investasi lokal yang lebih berkelanjutan.</p> <p>5) Inisiatif WASH yang Inklusif, Organisasi seperti CBM Australia bekerja untuk memastikan bahwa inisiatif WASH dapat diakses oleh orang dengan disabilitas. Ini termasuk memberikan saran tentang cara memastikan bahwa air minum yang aman, fasilitas sanitasi, dan program higiene dapat diakses oleh orang dengan disabilitas.</p> <p>6) Inisiatif Berbasis Masyarakat, Plan International Australia bekerja dengan masyarakat untuk menyediakan air bersih, bahan untuk membangun kamar mandi, dan fasilitas sanitasi. Mereka juga melatih pemimpin masyarakat dan mengajarkan praktik higiene yang baik untuk memastikan penggunaan dan perawatan jangka panjang dari fasilitas tersebut.</p>	
	b. Japan	
	<p>1) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi yang Komprehensif, Jepang telah membangun sistem sanitasi yang luas, termasuk sistem pembuangan limbah dan pengolahan air limbah. Sistem ini telah diperluas ke seluruh negara, dengan lebih dari 70% populasi yang dilayani oleh sistem pembuangan limbah umum dan lebih dari 20% oleh sistem johkasou yang digunakan di daerah pedesaan atau daerah dengan kepadatan penduduk rendah.</p>	
	<p>2) Pengembangan Teknologi Sanitasi, Jepang telah mengembangkan berbagai teknologi sanitasi, termasuk pengolahan limbah malam (night soil) dan sludge. Sistem johkasou yang dikembangkan di Jepang dapat mengolah limbah domestik dari rumah-rumah individu atau kelompok rumah dan menghasilkan effluens yang berkualitas tinggi.</p>	
	<p>3) Pengelolaan Limbah yang Efektif, Pengumpulan limbah malam dan sludge secara teratur menggunakan truk vakum. Sampai saat ini, ada lebih dari 1.100 pabrik pengolahan limbah malam dan sludge yang beroperasi di Jepang.</p>	
	<p>4) Pengembangan Kebijakan dan Regulasi, Perubahan Undang-Undang Pembuangan Limbah pada tahun 1970 membawa standar kualitas air nasional dan program subsidi yang mendukung pembangunan fasilitas pengolahan limbah malam.</p>	
	c. Korea, Rep.	
	<p>1) Pengembangan dan Pelaksanaan Kebijakan, Undang-Undang Pengolahan Air Limbah (1966) diperkenalkan untuk meningkatkan sistem pengolahan air limbah dan limbah. Undang-Undang ini didukung oleh alokasi dua kementerian untuk mengembangkan sektor tersebut</p>	
	<p>2) Partisipasi Masyarakat, Gerakan "Desa Baru" (Sae-Maeul), yang dimulai pada akhir 1960-an, melibatkan partisipasi dan pendidikan masyarakat. Gerakan ini menyebabkan perubahan perilaku sanitasi, mengurangi signifikan masalah parasit usus dan tingkat infeksi.</p>	
	<p>3) Keterlibatan Sektor Swasta, Sektor swasta berperan penting dalam pengolahan limbah air, dengan investasi sebesar lebih dari \$800 juta antara tahun 1998 dan 2008, mengarah pada pembangunan 100 pabrik pengolahan limbah air. Pada tahun 2012, 58% dari pabrik-pabrik tersebut dimiliki dan dikelola oleh swasta.</p>	
	<p>4) Dukungan Keuangan, Pemerintah memberikan dukungan keuangan yang signifikan kepada sektor tersebut, mempertahankan tarif di bawah 2% dari pendapatan keluarga</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
<p>untuk dekat keluarga terbawah dan menawarkan subsidi operasional berkisar antara 10-13% dari total biaya.</p> <p>d. Singapore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kampanye SG Clean, NEA meluncurkan kampanye SG Clean untuk meningkatkan standar kebersihan dan memobilisasi masyarakat untuk menjaga kebersihan Singapura. Kampanye ini melibatkan penggunaan tanda kualitas SG Clean, yang menunjukkan komitmen suatu tempat untuk mencapai standar kebersihan tinggi. Tanda kualitas ini dilengkapi dengan daftar periksa sanitasi yang disesuaikan dengan operasional masing-masing bisnis. 2) Sistem Sanitasi Lingkungan Baru, NEA akan menerapkan sistem sanitasi lingkungan baru mulai tahun 2021, yang membuat wajib bagi tempat-tempat umum untuk memenuhi standar sanitasi lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. 3) Perbaikan Toilet Umum, NEA melakukan perbaikan desain toilet umum untuk meningkatkan kebersihan toilet. NEA akan mensubsidi perbaikan desain toilet di pusat hawker dan kafe yang memiliki infrastruktur tua, sehingga dapat lebih mudah menerapkan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas pembersihan toilet. 4) Penggunaan Teknologi, NEA menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pembersihan. Misalnya, menggunakan aplikasi mobile untuk melaporkan kekurangan pembersihan, sensor untuk memantau ketinggian sampah, dan sistem GPS untuk memantau pergerakan mesin pembersih jalan. 		
3.03	Use of basic drinking water, % of pop	Australia, Japan, Korea, Rep., New Zealand, Singapore, Thailand
<p>a. Australia,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Air dan Sanitasi, Pemerintah Australia berinvestasi dalam kegiatan yang menyediakan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi dasar. Ini termasuk mendukung pengembangan kapasitas untuk memastikan promosi kebersihan yang membawa perubahan perilaku yang berkelanjutan. 2) Dukungan Regional, The National Water Grid Fund (NWGF) mendukung Australia regional dengan membiayai proyek untuk meningkatkan keamanan air, meningkatkan efisiensi air, dan meningkatkan ketahanan jangka panjang terhadap kekeringan dan kekurangan air. 3) Bantuan Internasional, Program Hibah Air, didukung oleh pemerintah Australia, telah menginstal koneksi air baru di 35 daerah Indonesia, memanfaatkan lebih dari 60.000 rumah tangga dan menyediakan air yang lebih bersih dan fasilitas sanitasi yang lebih baik bagi sekitar 400.000 orang. 4) Dana Strategis, Australia's Water for Women Fund memprioritaskan memperkuat sistem sektor WASH, mengintegrasikan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, serta hasil yang tahan iklim. Dana ini telah menunjukkan praktik yang baik dalam memungkinkan aktor lokal untuk memimpin layanan yang lebih berkelanjutan dan menyesuainya untuk ketahanan iklim jangka panjang. <p>b. Japan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Konservasi Air, Jepang mendorong konservasi air melalui langkah-langkah seperti penggunaan air hujan dan manajemen siklus air urban yang efisien, yang membantu mengelola banjir urban dan meningkatkan efisiensi air secara keseluruhan. 2) Program Air dan Sanitasi dari JICA, The Japan International Cooperation Agency (JICA) menyediakan bantuan komprehensif kepada negara-negara berkembang, termasuk 		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>pengeboran sumur, perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem air dan saluran limbah yang disesuaikan dengan kebutuhan regional.</p>	
	<p>3) Water and Sanitation for Broad Partnership Initiative (WASABI), Inisiatif ini mendukung upaya mandiri negara-negara berkembang dengan mendirikan partisipasi luas dengan organisasi internasional dan negara-negara donatur lainnya. Fokusnya pada keberlanjutan, keamanan manusia, pengembangan kapasitas, dan ukuran lintas sektor.</p>	
	<p>4) Rencana Lingkungan Dasar, Rencana ini menangani kebijakan lingkungan jangka panjang dan komprehensif terkait kualitas dan kuantitas air, termasuk konservasi dan manajemen air.</p>	
	<p>5) Integrated Water Resource Management (IWRM), Jepang mendukung formulasi rencana IWRM, memastikan keberlanjutan melalui dukungan kebijakan dan proyek.</p>	
	<p>c. Korea, Rep.,</p>	
	<p>1) Penggunaan Air Limbah, Pemerintah Korea telah mempromosikan penggunaan air limbah yang telah diregangkan, yang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah air limbah yang digunakan mencapai 11,0% dari total air limbah yang dihasilkan, dengan fokus pada penyediaan air industri dan pertanian selama musim kemarau.</p>	
	<p>2) Desalinasi Air Laut, Korea Selatan juga telah mengembangkan teknologi desalinasi air laut untuk memperkaya sumber daya air.</p>	
	<p>3) Tangki Air Tanah, Negara ini telah berinvestasi dalam tangki air tanah untuk menyimpan dan mengelola sumber daya air tanah secara efektif. Ini membantu menjaga pasokan air yang stabil, terutama selama musim hujan rendah.</p>	
	<p>4) Filtrasi Pantai Sungai, Korea Selatan telah menerapkan sistem filtrasi pantai sungai, yang melibatkan ekstraksi air dari tepi sungai untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan air minum.</p>	
	<p>5) Pengumpulan Air Hujan, Korea Selatan telah mendorong penggunaan sistem pengumpulan air hujan untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan untuk kebutuhan non-potable seperti menguras toilet dan mencuci mobil. Ini membantu mengurangi beban pada pasokan air utama dan menghemat sumber daya air.</p>	
	<p>6) Pengembangan Infrastruktur Air, Korea Selatan telah berinvestasi secara besar-besaran dalam pengembangan infrastruktur air, termasuk pembangunan bendungan dan pembangkit listrik tenaga air.</p>	
	<p>7) Pendidikan Publik dan Perubahan Perilaku, Pemerintah Korea telah menerapkan kampanye pendidikan publik untuk mempromosikan konservasi air dan praktik sanitasi yang tepat. Gerakan "Desa Baru" misalnya, telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam perilaku sanitasi dan penurunan penyakit yang disebabkan oleh air.</p>	
	<p>d. Singapore</p>	
	<p>1) Produksi NEWater, Singapura memproduksi NEWater, yaitu air yang sangat murni dan aman diminum. NEWater diproduksi dari air bekas yang telah diolah lebih lanjut menggunakan teknologi membran canggih dan disinfeksi ultra-violet.</p>	
	<p>2) Desalinasi, Singapura menggunakan desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air minum. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk menghilangkan garam dan mineral lain dari air laut, sehingga membuatnya aman diminum.</p>	
	<p>3) Pengumpulan Air Hujan, Singapura mengumpulkan air hujan dari danau-danau reservoirnya dan menggunakan air tersebut sebagai bagian dari suplai air minum. Negara</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<p>ini berusaha meningkatkan daerah tangkapan airnya dari dua pertiga menjadi 90% dari luas tanahnya untuk maksimal mengumpulkan air hujan.</p> <p>4) Kampanye Kesadaran Masyarakat, Singapura melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat yang berkelanjutan untuk mendorong konservasi air dan penggunaan efisien air minum. Kampanye ini mempromosikan praktik seperti membatasi waktu mandi, menggunakan peralatan yang hemat air, dan mengurangi penggunaan air dalam kegiatan sehari-hari.</p>	
3.04	Hospital beds density per 10,000 pop	Japan
	<p>Jepang memiliki beberapa kebijakan terkait pengelolaan kepadatan tempat tidur rumah sakit, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regulasi Jumlah Tempat Tidur melalui Sistem Perencanaan Kesehatan, Setiap prefektur di Jepang diwajibkan untuk membuat rencana lima tahun terkait penyediaan layanan kesehatan, yang mencakup perencanaan jumlah tempat tidur rumah sakit. Pemerintah pusat menetapkan pedoman umum, sementara pemerintah prefektur melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lokal. 2) Pengaturan dan Klasifikasi Tempat Tidur, Tempat tidur rumah sakit di Jepang diklasifikasikan berdasarkan jenis perawatan, seperti akut, kronis, rehabilitasi, dan perawatan lansia. Setiap jenis tempat tidur memiliki regulasi tersendiri dalam hal izin dan persyaratan. 3) Pembatasan pada Pembangunan Rumah Sakit Baru, Untuk mencegah kelebihan kapasitas dan biaya kesehatan yang tidak perlu, Jepang memberlakukan pembatasan pada pembangunan rumah sakit baru, terutama di wilayah-wilayah yang sudah memiliki hospital beds density tinggi. Setiap pembangunan baru harus mendapat izin dari pemerintah prefektur dan memenuhi persyaratan terkait kebutuhan penduduk setempat. 4) Kebijakan Pengurangan Tempat Tidur Akut, Karena rasio tempat tidur akut (perawatan jangka pendek) di Jepang sangat tinggi, pemerintah mendorong untuk mengurangi jumlah tempat tidur ini guna menekan biaya kesehatan. Kebijakan ini diimbangi dengan pengembangan fasilitas perawatan jangka panjang (nursing care) untuk mendukung populasi lansia yang besar. 5) Kebijakan Berbasis Demografi, Mengingat populasi lansia yang besar dan angka kelahiran yang rendah, Jepang menyesuaikan distribusi tempat tidur untuk mengakomodasi kebutuhan populasi lanjut usia. Misalnya, ada fokus pada pembangunan lebih banyak fasilitas perawatan lansia dan rehabilitasi di area-area dengan proporsi penduduk lanjut usia yang tinggi. 	
3.05	Communicable disease incidence per 100,000 pop	Korea, Rep.
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Infectious Disease Prevention Act, Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan warga negara dengan mencegah terjadinya dan penyebaran penyakit menular. Termasuk dalamnya adalah langkah-langkah untuk pengawasan, pengendalian krisis, dan tanggapan darurat. 2) Pengawasan dan Deteksi, Stasiun Kuarantin Nasional memerlukan deklarasi kesehatan dari pengunjung yang masuk ke Korea, dan pengawasan gejala dilakukan untuk penyakit seperti demam, diare, muntah, dan batuk. Tes laboratorium digunakan untuk mendeteksi agen penyebab penyakit menular. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
3)	Langkah-langkah Pengendalian Krisis , Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah pengendalian krisis terhadap penyakit menular. Langkah-langkah ini termasuk sistem untuk merespons bencana, sistem manajemen darurat, persiapan daftar ahli, penyimpanan persediaan obat-obatan, dan pelatihan untuk situasi darurat.	
4)	Pelatihan dan Pendidikan , Pelatihan reguler dilakukan berdasarkan langkah-langkah pengendalian krisis untuk memastikan kesiapan dan tanggapan terhadap situasi darurat penyakit menular.	
5)	Inisiatif Kesehatan Masyarakat , The Korean Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) memantau dan melaporkan penyakit menular utama seperti demam berdarah, malaria, hepatitis A, shigellosis, dan virus Zika. Inisiatif kesehatan masyarakat berfokus pada mengidentifikasi dan mengisolasi individu yang terinfeksi untuk mencegah wabah.	
Pillar 4.	Human Resources and Labour Market, 1-7 (best)	Singapore
1)	Investasi dalam Pendidikan dan Pengembangan Tenaga Kerja , Singapura telah membuat investasi yang signifikan dalam pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Ini termasuk fokus pada pendidikan sebagai situs utama untuk investasi lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing.	
2)	Kebijakan Pasar Tenaga Kerja , Singapura telah mengelola gaji untuk mendukung pengembangan ekonominya. Awalnya, gaji dibatasi untuk mempromosikan industrialisasi yang cepat. Kemudian, kebijakan berubah untuk mendorong aktivitas teknologi yang lebih tinggi dan nilai tambah dengan mendorong peningkatan biaya tenaga kerja yang lebih besar dan peningkatan keterampilan.	
3)	Kemitraan Tripartit , The Employment Act (EA) mengatur syarat dan kondisi kerja untuk semua karyawan. The Fair Consideration Framework (FCF) dan Pedoman Tripartit tentang Praktik Ketenagakerjaan Adil memastikan praktek pengangkatan dan praktik ketenagakerjaan yang adil. Kementerian Tenaga Kerja (MoM), Kongres Buruh Nasional (NTUC), dan Federasi Pemilik Negeri Singapura (SNEF) mengawasi undang-undang ketenagakerjaan ini.	
4)	Pengelolaan Tenaga Kerja Asing , Undang-Undang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memerlukan pekerja asing untuk memiliki izin kerja yang sah. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan berbagai izin kerja berdasarkan keterampilan profesional dan gaji bulanan. Sistem Penilaian Kompensasi (COMPASS) diperkenalkan untuk mengevaluasi permohonan EP berdasarkan sistem poin.	
5)	Inisiatif HR Strategis , Terdapat fokus pada meningkatkan tim HR, menekankan kualitas dalam pencarian konfidensial, dan meningkatkan manajemen keterampilan berdasarkan. Peran spesialis seperti Manfaat, Gaji, Operasional HR, dan Teknologi HR sangat dibutuhkan.	
subpillar	Qualification of the Labour Force, 1-7 (best)	Singapore
1)	Sistem Pendidikan yang Ditingkatkan , Singapore telah menginvestasikan banyak dalam sistem pendidikan, sehingga terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah warga yang memiliki gelar sarjana, diploma, atau kualifikasi profesional. Pada tahun 2022, sekitar enam di sepuluh warga yang berada di dalam tenaga kerja adalah lulusan tingkat atas dengan gelar, diploma, atau kualifikasi profesional, meningkat dari 48% pada tahun 2012.	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<p>2) Peningkatan Keterampilan, Pemerintah telah mendorong peningkatan keterampilan dan bantuan pencarian kerja untuk membantu lebih banyak individu memasuki pasar kerja. Ini termasuk program seperti “Earn and Save” yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemajuan karir.</p> <p>3) Retirement and Re-employment Act (RRA), RRA, yang diperkenalkan pada tahun 2012, telah meningkatkan tingkat pekerjaan dengan meningkatkan usia pekerjaan yang wajib. Ini telah membantu pekerja yang lebih tua tetap di dalam tenaga kerja, kontribusi pada peningkatan partisipasi tenaga kerja secara keseluruhan.</p> <p>4) Kebijakan Upah yang Berorientasi Pada Pasar, Singapura telah menerapkan kebijakan upah yang berorientasi pasar, yang menekankan peningkatan partisipasi tenaga kerja dan pengembangan keterampilan. Pendekatan ini telah menggalakkan pertumbuhan aktivitas yang lebih berharga tinggi dan peningkatan keterampilan.</p> <p>5) Pengembangan Belajar Seumur Hidup, Pemerintah telah mendorong kesempatan belajar seumur hidup, mengakui pentingnya pengembangan keterampilan terus-menerus. Ini termasuk program yang fleksibel dan relevan baik di dalam maupun di luar tempat kerja, membuat informasi tentang pendidikan dewasa mudah diakses.</p>	
4.01	Labour force with intermediate education, % of total	Japan
	<p>1) Peningkatan Pencapaian Pendidikan, Jumlah pekerja laki-laki dengan gelar sarjana telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 1975, hanya 7% dari tenaga kerja laki-laki dalam kelompok usia 55-64 tahun yang memiliki gelar sarjana, tetapi pada tahun 1990, jumlah ini melebihi jumlah pria tanpa gelar sarjana dalam kelompok usia yang sama.</p> <p>2) Reformasi Kebijakan, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan untuk mendorong pekerja tua untuk terus bekerja.</p> <p>3) Kesehatan dan Kehidupan Panjang, Kesehatan yang ditingkatkan dan kehidupan yang lebih panjang juga telah berkontribusi pada peningkatan partisipasi tenaga kerja di kalangan pekerja tua. Harapan hidup pada usia 60 telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1970, memungkinkan lebih banyak orang untuk tetap di dalam tenaga kerja lebih lama.</p> <p>4) Transisi ke Pekerjaan yang Lebih Tidak Fisik, Ada transisi menuju pekerjaan yang lebih tidak fisik, yang membuat lebih mudah bagi pekerja tua untuk terus bekerja.</p>	
4.02	Labour force with advanced education, % of total	Singapore
	<p>1) Mengembangkan Pendidikan Tinggi, Pemerintah telah mendorong pendidikan tinggi dengan meningkatkan bagian tenaga kerja yang memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Pada Desember 2022, 41,6% tenaga kerja di Singapura memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi.</p> <p>2) Incentif Fiskal, Pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada sektor teknologi tinggi dan berintensitas keterampilan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing yang tidak terlatih. Hal ini telah membantu dalam restrukturisasi ekonomi untuk lebih bergantung pada tenaga kerja yang terlatih.</p> <p>3) Kebijakan Pasar Kerja, Selama tiga dekade terakhir, kebijakan pasar kerja di Singapura telah berkembang untuk menekankan pengembangan keterampilan dan peningkatan partisipasi tenaga kerja.</p>	
4.03	Quality of secondary education, 1-7 (best)	Singapore

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
1) Menawarkan Lebih Banyak Pilihan dan Spesialisasi , Singapura telah memperluas jangkauan mata pelajaran yang tersedia di tingkat O-level dan memperkenalkan modul elektif. Siswa yang jelas memiliki kualitas universitas dapat memilih Program Integrasi Sekolah, yang memungkinkan mereka melompati O-level dan terlibat dalam pengalaman belajar yang lebih luas yang mengembangkan potensi kepemimpinan dan berpikir kreatif mereka.	2) Mobilitas Horizontal dan Pilihan Mata Pelajaran , Sistem pendidikan sekarang memungkinkan lebih banyak mobilitas horizontal antara mata pelajaran dan jalur. Siswa yang berprestasi tinggi dapat pindah antar jalur, dan ada fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih mata pelajaran, memungkinkan siswa untuk mengikuti mata pelajaran dari berbagai jalur.	3) Sekolah Spesialis , Singapura menawarkan sekolah spesialisasi dalam berbagai bidang seperti olahraga, seni, matematika, dan sains. Selain itu, ada sekolah independen yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan minat siswa yang berbeda.
4) Opsi Pendidikan Pasca-Sekolah Menengah , Setelah menyelesaikan 10 tahun pendidikan umum, siswa dapat melanjutkan ke pendidikan pasca-sekolah menengah di sekolah menengah atas, politeknik, atau Institut Teknologi (ITE). Banyak siswa mengambil A-level atau kursus diploma dalam bidang teknis atau bisnis, dan ada kesempatan bagi lulusan ITE untuk melanjutkan ke politeknik atau universitas.	5) Pengembangan Tenaga Kerja Guru , Singapura memiliki sistem yang komprehensif untuk memilih, melatih, memotivasi, dan mengembangkan guru dan kepala sekolah. Kementerian Pendidikan memilih calon guru secara teliti, memberikan pelatihan di Institut Nasional Pendidikan, dan memastikan mereka diberi kompensasi yang memadai untuk menarik dan menjaga guru-guru berkualitas tinggi.	6) Reformasi Kurikulum dan Pengajaran , Inisiatif seperti "Teach Less, Learn More" telah bergerak menjauhkan instruksi dari memori berulang dan tugas berulang, fokus pada pemahaman konsep yang lebih dalam dan belajar berbasis masalah.
7) Intervensi Awal dan Pendidikan Taman Kanak-Kanak , Pemerintah telah memperbaiki kualitas, ketersediaan, dan keterjangkauan taman kanak-kanak, berusaha untuk menyediakan tempat taman kanak-kanak yang didukung oleh pemerintah untuk 80% anak-anak pada tahun 2025, termasuk subsidi yang ditingkatkan dan batas biaya untuk membuat pendidikan taman kanak-kanak lebih terjangkau bagi keluarga.	4.04	Quality of tertiary education, 1-7 (best) Indonesia
Kebijakan Ease of Finding Skilled Employees in Local Labour Market di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kerja terampil di pasar tenaga kerja lokal. Kebijakan ini menjadi penting karena kemampuan untuk menemukan karyawan yang terampil merupakan salah satu faktor utama dalam menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan tenaga kerja terampil juga berpengaruh langsung terhadap produktivitas, daya saing perusahaan, serta pengembangan industri di berbagai sektor. Kebijakan Quality of Tertiary Education di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi agar mampu mencetak lulusan yang kompeten, inovatif, dan berdaya saing di pasar global. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang mencakup peningkatan kualitas dosen, akreditasi program studi, pengembangan kurikulum, penguatan riset, serta pembentukan ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perubahan zaman.		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
<p>Berikut adalah Fokus Kebijakan Quality of Tertiary Education di Indonesia, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Akreditasi Pendidikan Tinggi 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan Tinggi 3. Penguatan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat 4. Internationalization and World Class University melalui Kerjasama Internasional dengan Peringkat Perguruan Tinggi Dunia. 5. Pembentukan dan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi 6. Transformasi Digital dalam Pendidikan Tinggi 7. Peningkatan Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pendidikan Tinggi 		
subpillar	Labour Market Dynamics, 1-7 (best)	Vietnam
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan Vokasional dan Teknikal, Negara Vietnam telah meningkatkan pelatihan vokasional dan teknik untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini termasuk mendorong perusahaan asing untuk berinvestasi di pusat pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. 2) Kerjasama dan Kolaborasi, Kerjasama yang kuat antara perusahaan, universitas, sekolah vokasional, dan organisasi internasional telah dipromosikan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terampil. 3) Investasi dalam Pelatihan, Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mempertimbangkan untuk membentuk Dana Bantuan Investasi yang memberikan pengembalian hingga 50% untuk meningkatkan keterampilan pekerja. 4) Pembuatan Kebijakan Berdasarkan Data, Kementerian Tenaga Kerja, Orang Tua, dan Urusan Sosial Vietnam bekerja sama dengan inisiatif seperti Data4Policy dan program GIZ's Regional Cooperation in Technical and Vocational Education and Training di ASEAN (RECOTVET) untuk meningkatkan bukti-bukti berdasarkan data untuk pembuatan kebijakan pasar tenaga kerja. 		
4.05	Hiring and firing practices, 1-7 (best)	Singapore
<ol style="list-style-type: none"> 1) Aliansi Tripartit untuk Praktik Pengangkatan dan Pemutusan Hubungan Kerja yang Adil dan Progresif (TAFEP), TAFEP didirikan untuk mendorong praktik pengangkatan yang adil, bertanggung jawab, dan progresif di Singapura. Organisasi ini mengawasi peningkatan praktik pengangkatan yang adil dan menangani sengketa kerja. 2) Undang-Undang Keterlaksanaan Kerja yang Adil (WFL), Undang-Undang WFL menetapkan pedoman jelas untuk praktik pengangkatan dan pemutusan hubungan kerja yang adil, termasuk larangan diskriminasi berdasarkan kriteria perlindungan seperti kebangsaan, usia, jenis kelamin, status pernikahan, status kehamilan, dan disabilitas. 3) Proses Penanganan Keluhan, Pemilik usaha harus melakukan penyelidikan, mencatat prosesnya, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada karyawan yang mengeluh, memastikan kerahasiaan dan melindungi karyawan dari balasan balik. 4) Regulasi Paspur Kerja, Pemilik usaha harus mempromosikan lowongan pekerjaan di MyCareersFuture selama minimal 14 hari dan mempertimbangkan semua calon sebelum mengangkat warga asing. 5) Sanksi untuk Tidak Keterlaksanaan, Pemilik usaha yang gagal menjawab permintaan TAFEP tentang praktik pengangkatan diskriminatif mungkin menghadapi sanksi, seperti 		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>pembatasan kemampuan untuk mengajukan paspor S dan paspor kerja selama hingga satu tahun dan pelatihan perbaikan untuk staf HR.</p> <p>6) Pengamanan Karyawan yang Ditingkatkan, Singapura telah meningkatkan pengamanan karyawan, termasuk cuti melahirkan berbayar selama 16 minggu dan dukungan tambahan untuk karyawan dengan disabilitas.</p>	
4.06	Ease of finding skilled employees in local labour market, 1-7 (best)	Indonesia
	<p>Kebijakan Ease of Finding Skilled Employees di Indonesia mencakup berbagai inisiatif strategis, mulai dari pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, program sertifikasi kompetensi, hingga penguatan layanan informasi pasar kerja. Pemerintah juga terus mendorong adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dan meningkatkan keterampilan digital tenaga kerja. Meskipun terdapat tantangan dalam hal kesenjangan keterampilan dan akses pelatihan di daerah terpencil, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.</p>	
4.07	Flexible working arrangements, 1-7 (best)	Singapore
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Tripartit, Mulai Desember 2024, semua majikan harus memiliki proses formal untuk pekerja yang meminta arahan kerja fleksibel. Majikan harus merespons permintaan ini dalam waktu dua bulan, memberikan keputusan tertulis dan alasan jika ada penolakan. 2) Pelatihan dan Dukungan, Pemerintah dan mitra tripartit akan menyediakan pelatihan dan dukungan bagi majikan untuk menerapkan arahan kerja fleksibel secara efektif. Ini termasuk mendidik majikan tentang berbagai jenis arahan kerja fleksibel, merancang pekerjaan, penilaian prestasi, dan pengelolaan perubahan. 3) Kerja Sama Inklusif, Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang lebih inklusif, terutama bagi senior, pengasuh, dan orang dengan kebutuhan khusus. Ini adalah respons terhadap pasar kerja yang ketat dan kebutuhan yang berubah dari populasi yang semakin tua serta mereka yang memiliki tanggung jawab pengasuhan. 4) Penilaian Berdasarkan Prestasi, atasan diharapkan untuk menilai prestasi karyawan berdasarkan hasil kerja daripada jam kerja. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan keadilan di tempat kerja. 5) Pedoman dan Sumber Daya, Aliansi Tripartit untuk Praktik Pengusaha yang Adil dan Progressif (TAFEP) menyediakan sumber daya dan praktik terbaik bagi atasan dan karyawan untuk mengelola arahan kerja fleksibel secara efektif. 	
4.08	Labour force participation, % of adult pop	Cambodia
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan dan Literasi, Cambodia telah melihat peningkatan signifikan dalam tingkat literasi, mencapai hampir 90% pada tahun 2019. Hal ini telah berkontribusi pada tenaga kerja yang lebih terampil, dengan pertumbuhan 1,6 kali dalam pekerjaan di industri sekunder dan tersier sejak 2008. 2) Pekerjaan Formal ke Pekerjaan Informal, Upaya telah dilakukan untuk memformalkan tenaga kerja, dengan tujuan mengurangi persentase tinggi pekerjaan informal. Pada tahun 2019, 88% dari tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan informal, tetapi formalisasi menawarkan manfaat seperti akses ke program keamanan sosial, upah yang lebih tinggi, dan kondisi kerja yang lebih baik. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
3)	Dukungan Finansial dan Teknis , Organisasi Internasional Buruh (ILO) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah memberikan dukungan finansial dan teknis untuk survei tenaga kerja dan inisiatif lain yang bertujuan memperbaiki kondisi pasar kerja.	
4)	Pembangunan Kebijakan dan Program , Pemerintah Kerajaan Kamboja telah didukung dalam mengembangkan kebijakan dan merancang program kerja untuk menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kondisi kerja, melibatkan data dari survei tenaga kerja.	
subpillar	Labour Market Resilience and Equality, 1-7 (best)	New Zealand
1)	Ketahanan Pasar Kerja , New Zealand memiliki kepercayaan yang kuat terhadap institusinya, kebijakan makro-ekonomi dan fiskal yang terpercaya, serta pasar kerja yang fleksibel yang memfasilitasi realokasi selama gangguan ekonomi. New Zealand menekankan penyesuaian jangka panjang dan pembelajaran, yang sangat penting untuk menghadapi gangguan yang tidak terduga dan tantangan masa depan.	
2)	Kesetaraan Pasar Kerja , Pemerintah berusaha menciptakan tempat kerja yang inklusif yang menyediakan akses yang sama ke peluang kerja, tidak diskriminatif, dan mendukung pekerja untuk memaksimalkan potensi mereka. Ini termasuk mengatasi kekurangan yang berkepanjangan dan mendorong diversitas. Menyikapi sistem pendidikan, imigrasi, dan kesejahteraan yang memenuhi kebutuhan kemampuan pekerja dan bisnis membantu mengurangi ketidaksetaraan dan memperluas peluang. Ini termasuk mendukung pembelajaran sepanjang hidup dan mengatasi kesalahan kemampuan.	
3)	Rekomendasi OECD , New Zealand mencetak skor yang dekat dengan rata-rata OECD dalam ketahanan dan adaptabilitas pasar kerja. Strategi Pekerjaan OECD menekankan kualitas pekerjaan, inklusivitas, dan ketahanan untuk mengatasi tantangan seperti produktivitas yang lambat dan ketidaksetaraan pendapatan. New Zealand telah membuat kemajuan dalam kesetaraan gender, dengan tingkat keterlibatan pekerjaan dan pendapatan wanita yang dekat dengan rata-rata OECD.	
4)	Prestasi Partai Buruh , Partai Buruh NZ telah melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan, membuat rumah lebih terjangkau, dan membantu lebih banyak warga Selandia Baru ke dalam pekerjaan dan pelatihan. Upaya ini bertujuan mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.	
4.09	Equal workforce opportunities, 1-7 (best)	New Zealand
1)	Perubahan Undang-Undang Gaji Sama , Perubahan pada Undang-Undang Gaji Sama tahun 1972 diperbarui pada tahun 2020, membuatnya lebih mudah bagi pekerja untuk mengajukan klaim gaji yang adil dengan majikan mereka.	
2)	Cuti Peringatan Kehilangan Kehamilan dan Kematian Janin , New Zealand telah memperkenalkan cuti peringatan yang dibayar untuk kehilangan kehamilan dan kematian janin, sehingga pasangan dapat berduka tanpa tekanan keuangan.	
3)	Te Mahere Whai Mahi Wāhine (Rencana Aksi Pekerjaan Wanita) , Rencana ini, yang diluncurkan pada tahun 2022, berfokus pada meningkatkan hasil pekerjaan bagi wanita, terutama wanita Māori, wanita Pasifik, wanita muda dan tua, wanita dengan disabilitas, wanita yang pernah menjadi pengungsi dan imigran baru, serta komunitas Rainbow.	
4)	Meningkatkan Keseimbangan Gender dalam Pengambilan Keputusan , Kementerian Urusan Wanita terus mendorong keseimbangan gender dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan nominasi wanita yang terampil, berpengalaman dan berkompeten untuk	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>duduk di badan-badan statutori. Tujuan adalah meningkatkan persentase wanita di badan-badan tersebut hingga 50% pada tahun 2010.</p> <p>5) Meningkatkan Keseimbangan Kerja dan Kehidupan, Kebijakan untuk meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan sedang dikembangkan untuk memungkinkan lebih banyak orang, terutama wanita, untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan berbayar dengan menangani tanggung jawab dan aktivitas di luar pekerjaan. Ini termasuk inisiatif untuk mendukung partisipasi wanita di dalam pekerjaan, terutama di bidang seperti anak-anak dan pendidikan.</p> <p>6) Mengatasi Diskriminasi Gaji dan Ketenagakerjaan, Pemerintah mengatasi diskriminasi gaji dan ketenagakerjaan di sektor pemerintahan, kesehatan umum, dan pendidikan. Ini termasuk pengembangan Rencana Tindakan Kerja yang Adil untuk memastikan pekerjaan yang memuaskan di New Zealand.</p>	
4.10	Workers' rights, 1-5+ (worst)	Japan, New Zealand, Singapore
	<p>a. Japan,</p> <p>1) Reformasi Undang-Undang Buruh, Pada tahun 2019, Jepang memperkenalkan reformasi undang-undang buruh yang termasuk pengecualian lima tahun untuk pekerjaan penting sosial yang dikenal dengan jam kerja panjang. Pengecualian ini akan berakhir pada April 2024, dan batasan jam lembur akan berlaku untuk semua pekerja. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi waktu menunggu dermaga dan pengangkutan tangan untuk memperpendek jam kerja pengemudi, terutama bagi pekerja paruh waktu, termasuk wanita dan pria tua.</p> <p>2) Kebijakan Hak Asasi Manusia, Jepang Post Group mengembangkan kebijakan hak asasi manusia pada April 2019 berdasarkan Prinsip-Prinsip PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan ini mempromosikan kesadaran hak asasi manusia, mendukung Prinsip-Prinsip Hak Anak dan Bisnis PBB, serta memastikan konsistensi dengan hukum dan peraturan terkait ketenagakerjaan.</p> <p>3) Menghormati Hak Asasi Manusia, Federasi Bisnis Jepang (JBF) merevisi Pedoman Pelaksanaan Bab 4, Menghormati Hak Asasi Manusia, pada tahun 2021. Selain itu, JBF juga mengeluarkan hasil survei ketiga tentang Piagam Perilaku Korporasi pada Januari 2024, fokus pada inisiatif terkait hak asasi manusia. Konferensi Nasional Kecil dan Menengah (NCSME) juga mempromosikan "pengelolaan yang menghormati manusia" untuk mengintegrasikan perspektif menghormati hak asasi manusia.</p> <p>4) Pelatihan Pekerja Asing, Pemerintah Jepang telah menerima rencana untuk menciptakan sistem pelatihan pekerja asing tidak terampil dan memfasilitasi mereka untuk mencapai kesempatan kerja jangka menengah hingga panjang di Jepang. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang mendesak dan mengembangkan sumber daya manusia.</p> <p>5) Konsistensi dengan Standar Ketenagakerjaan, Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Jepang menetapkan hari kerja delapan jam dan minggu kerja empat puluh jam. Pemilik usaha wajib mematuhi ketentuan-ketentuan ini untuk melindungi kesehatan pekerja. Kementerian Kesehatan, Buruh dan Ketenagakerjaan (MHLW) melakukan inspeksi untuk memastikan konsistensi, meskipun pelaksanaannya dapat sulit karena ketergantungan pada laporan data sukarela dari pemilik usaha.</p> <p>6) Anti-Diskriminasi dan Kesetaraan Peluang, Jepang telah menerapkan hukum anti-diskriminasi dan mempromosikan diversitas dan inklusi dalam praktik-praktik ketenagakerjaan. Perjanjian internasional memadvokasi anti-diskriminasi di tempat</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	kerja, menekankan kesetaraan peluang tanpa memandang gender, ras, agama, atau faktor lainnya.	
	7) Kesehatan dan Keselamatan Kerja , Jepang menerapkan pedoman internasional untuk keselamatan dan kesehatan kerja untuk memastikan kondisi kerja yang aman. Negara ini secara teratur memperbarui regulasi untuk melindungi pekerja dari bahaya kerja.	
	8) Sosial Keamanan dan Manfaat , Jepang menyediakan sistem keamanan sosial yang komprehensif untuk pekerja, termasuk pelayanan pensiun dan kesehatan. Ini memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke manfaat-manfaat esensial dan dukungan.	
	b. New Zealand,	
	1) Perluasan Gaji Hidup yang Progresif , Pemerintah Sosial telah berkomitmen untuk secara bertahap memperluas gaji hidup ke pekerja di sektor pendidikan dan kesehatan, dengan tujuan mendukung penyedia layanan depan dengan standar hidup yang layak.	
	2) Peningkatan Upah Minimum , Upah minimum telah dinaikkan setiap tahun, dengan tarif saat ini sebesar \$23,15 per jam, dan rencana untuk terus meningkatkan secara moderat setiap tahun.	
	3) Penghapusan Tarif Pekerja Muda dan Pelatihan , Pemerintah Sosial Demokrat telah menghapus tarif pekerja muda dan pelatihan, sehingga pekerja muda dan yang dalam pelatihan dibayar upah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, mempromosikan kesetaraan dalam sistem upah minimum.	
	4) Perlindungan Perjanjian Gaji Adil , Pemerintah Sosial Demokrat telah melindungi perjanjian gaji adil, yang memungkinkan serikat buruh dan asosiasi pengusaha untuk bernegosiasi untuk standar pekerjaan minimum di seluruh industri.	
	5) Perlindungan Pekerja Migran yang Diperkuat , Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran dan Lainnya telah diberlakukan, meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan memperkenalkan tindakan penegakan yang lebih kuat bagi pengusaha yang menggunakan tenaga kerja migran.	
	6) Sederhanaan Undang-Undang Libur , Pemerintah telah menerima rekomendasi untuk menyederhanakan Undang-Undang Libur, dengan tujuan membuatnya lebih praktis dan tidak berat bagi pengusaha dan pekerja.	
	7) Modernisasi Hubungan Kerja , Pemerintah telah berkomitmen untuk memodernisasi hubungan kerja, melindungi perundingan bersama, dan memastikan definisi yang lebih baik antara pekerja dan kontraktor untuk melindungi pekerja yang rentan.	
	8) Ulasan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja , Pemerintah telah menandakan ulasan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tetap sesuai dengan tujuan, menangani masalah seperti kewajiban yang tidak transparan dan persyaratan yang tidak praktis.	
	c. Singapore	
	1) Kerja Fleksibel , Mulai dari 1 Desember 2024, karyawan di Singapura memiliki hak untuk meminta pekerjaan empat hari seminggu, hari tambahan bekerja dari rumah, dan waktu kerja yang disesuaikan. Ini adalah bagian dari pedoman Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices yang meminta perusahaan untuk menetapkan proses untuk karyawan untuk mengajukan permohonan kerja fleksibel resmi. Pemilik perusahaan dapat menolak permohonan jika mereka secara signifikan mempengaruhi produktivitas, meningkatkan biaya, atau tidak praktis karena sifat pekerjaan.	
	2) Model Upah Progresif (PWM) , Model ini bertujuan untuk meningkatkan upah pekerja bawah gaji melalui peningkatan keterampilan dan peningkatan produktivitas. Selain itu,	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>persyaratan baru ditetapkan untuk perusahaan yang merekrut pekerja asing untuk membayar semua karyawan Singapura dengan gaji kualifikasi lokal minimal S\$1,400 per bulan.</p> <p>3) Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan, Pemerintah telah menekankan pentingnya menginvestasikan dalam keterampilan dan sumber daya manusia warga Singapura. Ini termasuk memperbarui kebijakan tenaga kerja, memastikan praktik pekerjaan yang adil, dan mengambil sikap tegas terhadap diskriminasi.</p> <p>4) Dukungan Kesehatan Mental, Tripartite Advisory on Mental Well-being at Workplaces bertujuan untuk memprioritaskan kesehatan mental staf. Task force yang disebut Project Dawn telah dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dan akses pekerja migran terhadap bantuan kesehatan mental.</p>	
4.11	Female labour force participation, %	Lao PDR
	<p>1) Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintah telah menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, dengan tujuan meningkatkan partisipasi mereka di dalam kerja. Ini termasuk memperluas akses ke pendidikan dan mempertahankan perempuan di sekolah, terutama di tingkat sekolah menengah rendah dan atas. Fokus adalah pada pendidikan STEM untuk perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang karir mereka.</p> <p>2) Mendorong Hak-Hak Perempuan, Pemerintah Lao telah menerapkan berbagai rencana untuk mempromosikan kemajuan hak-hak perempuan. Ini termasuk mengubah persepsi laki-laki terhadap kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan kesetaraan gender dalam semua bentuk, dan meningkatkan kesadaran tentang peran perempuan di sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan.</p> <p>3) Konsiliasi Kerja-Keluarga, Untuk mempromosikan konsiliasi kerja-keluarga, Pemerintah Lao telah memperkenalkan kebijakan seperti memungkinkan ayah untuk mengambil cuti kelahiran selama 15 hari untuk menangani bayi baru dan ibu sementara masih menikmati manfaat cuti penuh. Undang-undang keluarga yang diubah bertujuan untuk melindungi perempuan dan mengurangi risiko keuangan yang sering ditanggung oleh perempuan dalam peristiwa perceraian.</p> <p>4) Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pemimpin, Pemerintah Lao telah berusaha meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi pemimpin. Contohnya, perempuan mewakili sekitar 45% pegawai sipil, dan ada 41 anggota perempuan dari 149 anggota di Majelis Nasional, yang merupakan salah satu yang tertinggi di wilayah Asia Tenggara.</p> <p>5) Menguntungkan Organisasi Perempuan, Uni Perempuan Lao (LWU) berperan penting dalam mewakili kepentingan perempuan dan mempromosikan hak-hak mereka. LWU bekerja sama dengan mitra pengembangan dan sektor relevan untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan penghargaan terhadap kerja sosial tidak dibayar dan pekerjaan domestik yang dilakukan oleh perempuan.</p>	
4.12	Social protection basic coverage, % of pop	Australia, Mongolia, New Zealand, Singapore
a. Australia,	<p>1) Membantu Pemerintah Mitra, Australia membantu pemerintah mitra dalam meningkatkan efektifitas dan jangkauan program perlindungan sosial mereka. Ini termasuk membantu mereka dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>program yang mendukung individu dan keluarga dalam mengurangi dan mencegah kemiskinan serta mengatasi sumber ketidakstabilan dan eksklusi sosial.</p>	
	<p>2) Menghubungkan Ahli Australia dengan Organisasi, Australia mendukung organisasi di negara berkembang dengan menghubungkannya dengan ahli Australia. Kerjasama ini membantu meningkatkan kapasitas organisasi tersebut untuk melaksanakan program perlindungan sosial yang efektif.</p> <p>3) Advokasi dan Penglibatan Kebijakan, Organisasi seperti CBM Australia (CBMA) beradvokasi untuk perlindungan sosial yang berbasis hak dan inklusif disabilitas. CBMA meminta peningkatan investasi dalam perlindungan sosial dalam program bantuan pembangunan resmi Australia dan beradvokasi untuk pembentukan Pusat Keunggulan untuk memconsolidasi keahlian tentang perlindungan sosial inklusif disabilitas.</p> <p>4) Inisiatif Perlindungan Sosial Global, Bank Dunia menekankan pentingnya sistem perlindungan sosial adaptif yang dapat memperluas pendaftaran, pendaftaran, dan partisipasi program. Australia dapat berkontribusi pada inisiatif global ini dengan mendukung pengembangan skema perlindungan sosial yang kuat dan inklusif yang menangani kebutuhan kelompok yang rentan, termasuk perempuan, remaja, dan orang dengan disabilitas.</p>	
	<p>b. New Zealand,</p> <p>1) Pengenalan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial , Undang-undang ini memperkenalkan berbagai manfaat baru, termasuk penyediaan untuk penyakit, pengangguran, yatim piatu, dan penanganan darurat, sehingga memasang kesejahteraan sosial pada dasar yang lebih sistematis dan menetapkan kerangka yang bertahan hingga saat ini.</p> <p>2) Manfaat Keluarga Universal , Manfaat ini mendukung pendidikan dan pemeliharaan anak-anak, meningkatkan biaya dukungan sosial secara signifikan tetapi sangat disambut.</p> <p>3) Sistem Superannuation Nasional (1977), Sistem ini menggantikan Pensilinan Umum yang berdasarkan penghasilan dan Manfaat Superannuation Universal, meningkatkan pengeluaran dukungan sosial lebih lanjut.</p> <p>4) Manfaat Tujuan Rumah Tangga, Manfaat ini diperkenalkan untuk orang tua tunggal, menangani kesulitan ibu tunggal dan merupakan penambahan signifikan pada sistem kesejahteraan sosial.</p> <p>5) Manfaat yang Dibayar Berdasarkan Penghasilan, Sistem kesejahteraan sosial New Zealand beroperasi dalam kerangka sistem manfaat yang dibayar berdasarkan penghasilan dan dibiayai dari pajak umum, sehingga memastikan bahwa manfaat diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.</p> <p>6) Reformasi Targeting, Pemerintah Buruh pada tahun 1980-an berusaha untuk fokus kembali pengeluaran kesejahteraan sosial ke mereka yang paling membutuhkan, termasuk keluarga miskin dan keluarga kerja dengan penghasilan rendah. Ini termasuk memperkenalkan pajak tambahan pada penghasilan lain yang diterima oleh Superannuitan dan meningkatkan Manfaat Tujuan Rumah Tangga.</p>	
	<p>c. Singapore</p> <p>1) Pengenalan Undang-Undang Usia Pensiun, Usia pensiun di Singapura dinaikkan dari 55 tahun menjadi 60 tahun pada tahun 1993 dan kemudian menjadi 62 tahun pada tahun 1999. Perubahan ini diharapkan akan meningkat secara bertahap menjadi 67 tahun</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<p>dalam waktu yang akan datang, sehingga memungkinkan periode kontribusi yang lebih lama ke sistem pensiun.</p> <p>2) Subsidi yang Luas untuk Kesehatan dan Perumahan, Pemerintah menyediakan subsidi yang luas untuk kesehatan dan perumahan, yang merupakan komponen penting dari perlindungan sosial.</p> <p>3) Dukungan untuk Kebutuhan Pensiun, Pemerintah menawarkan dukungan untuk menjaga warga Singapura tetap produktif dan meningkatkan upah bagi kelompok bawah dan tengah kekayaan yang luas, sehingga mereka memiliki kebutuhan pensiun yang memadai.</p> <p>4) Bantuan Sosial dan Komunitas, Pemerintah menyediakan bantuan sosial dan komunitas bagi kelompok bawah dan rentan, sehingga mereka memiliki akses ke layanan esensial dan dukungan.</p> <p>5) Digitalisasi Agensi Layanan Sosial, Pemerintah mendukung digitalisasi agensi layanan sosial (SSAs), yang telah menyebabkan peningkatan produktivitas dan pelayanan yang lebih baik bagi penerima manfaat. Promosi Perlindungan Sosial, Pemerintah telah secara aktif mempromosikan perlindungan sosial melalui berbagai inisiatif, termasuk pembentukan strategi nasional perlindungan sosial dan penggabungan skema yang ada ke dalam sistem nasional.</p>	
4.13	Social protection spending, % of GDP	Japan
	<p>1) Pengembangan Sistem Keamanan Sosial, Jepang memperkenalkan sistem keamanan sosial universal setelah Perang Dunia II. Undang-Undang Konstitusi Baru (1947) menekankan hak untuk standar hidup minimum, sehingga membentuk sistem keamanan sosial universal. Komponen utama termasuk pensiun nasional dan asuransi kesehatan nasional, yang menjangkau semua warga Jepang.</p> <p>2) Peningkatan Cepat Pengeluaran Keamanan Sosial, Dari periode pasca-perang hingga periode pertumbuhan ekonomi tinggi (1955-1973), pengeluaran keamanan sosial meningkat pesat. Pertumbuhan ini terus berlanjut bahkan setelah periode stagnasi ekonomi, dengan rasio pengeluaran keamanan sosial terhadap pendapatan nasional meningkat dari sekitar 6% pada tahun 1973 menjadi lebih dari 12% pada awal tahun 1990-an.</p> <p>3) Peningkatan Manfaat, Pengenalan program asuransi kesehatan universal pada awal tahun 1960-an secara signifikan meningkatkan manfaat kesehatan. Selain itu, manfaat pensiun, seperti pensiun lanjut usia, telah diperbaiki sepanjang tahun, yang berkontribusi pada peningkatan pengeluaran keamanan sosial secara keseluruhan.</p> <p>4) Pengembangan Kebijakan Keluarga, Jepang mengembangkan kebijakan keluarga untuk mendukung perempuan yang bekerja, seperti "Rencana Angel," yang bertujuan meningkatkan kesetaraan kesempatan dan mengatasi kekurangan tenaga kerja dan penurunan tingkat kelahiran.</p> <p>5) Peningkatan Proyeksi Pengeluaran Kesejahteraan Sosial, Pemerintah proyeksi bahwa pengeluaran kesejahteraan sosial akan meningkat 60% hingga tahun 2040, dengan pengeluaran tahunan mencapai 190 triliun yen (\$1,7 triliun).</p>	
Pillar 5.	ICT Readiness, 1-7 (best)	Korea, Rep.
	<p>1) Dukungan Pemerintah dan Investasi, Pemerintah telah melakukan investasi yang signifikan dalam teknologi modern, mengalokasikan sebagian besar dari GDP untuk proyek R&D. Investasi ini membantu dalam pengembangan teknologi baru dan mendorong inovasi. Badan</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>Korea untuk Kesempatan Digital (KADO) didirikan untuk meningkatkan akses ke Internet dan menyediakan pelatihan literasi digital bagi sebagian besar populasi.</p> <p>2) Pengembangan Infrastruktur, Negara ini telah meluncurkan Jaringan Konvergensi Broadband (BcN) untuk menghubungkan bahkan area terpencil, mengatasi kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Korea Selatan juga telah mengembangkan infrastruktur ICT yang baik, termasuk koneksi Internet cepat dan jaringan seluler maju seperti 5G.</p> <p>3) Mendorong Inovasi dan R&D, Perusahaan seperti Samsung telah mendirikan pusat penelitian di seluruh dunia untuk berkolaborasi dengan peneliti terkemuka dan institusi, meningkatkan kemampuan R&D dalam bidang seperti AI, komputasi awan, dan data besar. Pemerintah telah mendorong kerja sama antara pihak-pihak yang berbeda, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, untuk memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang komplementer.</p> <p>4) Sistem Kesehatan ICT Publik, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MoHW) telah mengembangkan sistem ICT terintegrasi untuk pengawasan dan tindakan kesehatan publik, yang sangat penting dalam mengelola krisis kesehatan publik seperti pandemi COVID-19.</p> <p>5) Kerja Sama Strategis dan Ekspansi Pasar, Perusahaan Korea Selatan telah membentuk kerja sama strategis dengan perusahaan internasional untuk memperluas jangkauan pasar. Misalnya, SK Telecom telah membentuk perusahaan patungan dengan uber untuk menyediakan layanan mobilitas inovatif berdasarkan teknologi 5G di Asia Tenggara.</p>	
5.01	Individuals using internet, % of pop	Malaysia
	<p>1) Meningkatkan Infrastruktur, Malaysia telah menginvestasikan dalam memperluas dan meningkatkan infrastruktur internet, termasuk rencana broadband mobile, yang telah membuat akses internet lebih terjangkau dan luas. Tingkat pendaftaran broadband mobile telah melebihi 130%, menunjukkan tingkat penetrasi internet mobile yang tinggi.</p> <p>2) Meningkatkan Literasi Digital, Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan literasi digital, yang sangat penting untuk meningkatkan penggunaan internet. Ini termasuk menyediakan akses pelatihan literasi digital, sehingga lebih banyak orang dapat menggunakan internet secara efektif untuk berbagai tujuan.</p> <p>3) Mendorong Kegiatan Ekonomi, Pemerintah telah mendorong kegiatan ekonomi online, seperti perbankan, belanja, dan kegiatan terkait pekerjaan. Hal ini telah membantu meningkatkan jumlah pengguna internet karena lebih banyak orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.</p>	
5.02	Broadband internet subscribers per 100 pop	Korea, Rep.
	<p>1) Kebijakan Pemerintah dan Pengembangan Infrastruktur, Korea Selatan menginvestasikan banyak dalam membangun jaringan fiber universal. Pemerintah menginvestasikan dalam penelitian dan pengembangan, yang mengarah pada peluncuran perangkat elektronik TDX, yang membantu mencapai status telepon universal dengan cepat. Pemerintah meluncurkan NBIS untuk memperkomputerkan layanan pemerintah, mendorong penggunaan teknologi dan jaringan data.</p> <p>2) Persaingan Pasar dan Deregulasi, Pemerintah memperkenalkan kebijakan untuk mendorong persaingan di sektor telekomunikasi, termasuk revisi Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi. Ini menyebabkan diperkenalkannya persaingan di sektor panggilan lokal dan jarak jauh, mendorong layanan internet cepat. Korea Selatan juga membuat Undang-Undang melarang</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<p>praktik tidak adil, melarang tarif yang tidak wajar untuk akses ke jalur fiber, dan menghambat konsentrasi korporasi di sektor telekomunikasi, mengubah pasar dari duopoli ke pasar yang lebih kompetitif.</p> <p>3) Inisiatif Sektor Swasta dan Faktor Sosial, Pemerintah mendorong usaha internet dengan menawarkan manfaat pajak dan pinjaman dengan tingkat bunga rendah, yang bersinergi dengan peluncuran infrastruktur. Ini menyebabkan berdirinya start-up internet baru.</p> <p>4) Ekspansi Broadband Pedesaan, Korea Selatan menerapkan kemitraan publik-privat untuk memperluas penutupan broadband di daerah pedesaan melalui jaringan fiber, memastikan akses internet cepat yang sama di seluruh negara.</p>	
5.03	Active mobile broadband internet subscription per 100 pop	Japan
	<p>1) Ekspansi Jaringan 5G, Operator seperti NTT Docomo telah fokus pada ekspansi jaringan 5G, berusaha mencapai 97% populasi pada tahun 2024. Ekspansi ini telah mendorong adopsi layanan 5G dengan ARPU yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada pertumbuhan langganan broadband mobile.</p> <p>2) Rencana Diskon Keluarga, NTT Docomo telah memperkenalkan rencana diskon keluarga untuk layanan 5G, untuk mendorong pertumbuhan langganan. Rencana ini membuat layanan 5G lebih terjangkau bagi keluarga, sehingga meningkatkan jumlah langganan broadband mobile.</p> <p>3) Perbaikan Kinerja Jaringan, Operator juga telah meningkatkan kinerja jaringan mereka, dengan Rakuten Mobile dan SoftBank meningkatkan layanan mereka. Misalnya, Rakuten Mobile telah melihat peningkatan dalam pengalaman jaringan, mengalahkan pesaing dalam beberapa kategori seperti Pengalaman Game dan Pengalaman Aplikasi Suara.</p> <p>4) Teknologi Baru, Pengadopsian teknologi Open RAN dan RAN virtual oleh operator seperti au dan NTT Docomo telah memfasilitasi pelaksanaan layanan 5G. Teknologi ini telah meningkatkan efisiensi jaringan dan pengalaman pengguna, yang berkontribusi pada pertumbuhan langganan broadband mobile.</p>	
5.04	3G mobile network coverage rate, % of pop	Mongolia
	<p>1) Investasi dalam Layanan Data Seluler, Empat operator seluler utama di Mongolia—MobiCom, Unitel, Skytel, dan G-Mobile—telah menginvestasikan banyak dalam layanan data seluler, yang dianggap sebagai masa depan telekomunikasi di negara tersebut.</p> <p>2) Pengembangan Layanan 3G dan 4G, Operator telah mengembangkan layanan 3G dan 4G long-term evolution (LTE) untuk meningkatkan average revenue per user (ARPU) dan untuk memenuhi permintaan data yang meningkat, terutama di daerah perkotaan.</p> <p>3) Penutupan Daerah Pedesaan, Untuk memastikan bahwa populasi pedesaan yang signifikan di negara ini memiliki akses ke layanan telekomunikasi, operator telah bekerja untuk memperluas penutupan daerah pedesaan dengan layanan 2G. Hal ini telah menjadi sangat menantang karena wilayah negara yang luas dan berpenduduk jarang.</p> <p>4) Dukungan Pemerintah, Pemerintah Mongolia telah mengintroduksi rencana pengembangan jangka panjang yang besar untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan telekomunikasi nasional. Rencana ini termasuk inisiatif untuk memperluas jaringan seluler ke daerah pedesaan.</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
5)	Pengenalan Smartphone Murah , Pengenalan smartphone murah baru dari berbagai pemasok diharapkan akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan data, sehingga meningkatkan permintaan layanan 3G dan 4G.	
6)	Penggunaan Teknologi VSAT , BusinessCom Networks telah menerapkan teknologi VSAT untuk memperluas jaringan seluler ke daerah pedesaan, menyediakan layanan suara, SMS, dan data yang terjangkau untuk desa-desa kecil yang terletak jauh dari ibu kota.	
5.05	Use of digital payments, % pop 15+	Australia
1)	Perubahan Regulasi , Pemerintah Australia telah mengumumkan rencana untuk mengubah peraturan yang ada untuk mengatur layanan pembayaran digital seperti Apple Pay, Google Pay, dan dompet digital lainnya. Langkah ini bertujuan untuk membawa layanan-layanan tersebut di bawah kerangka regulasi yang sama dengan metode pembayaran tradisional seperti kartu kredit.	
2)	Pengembangan Dompet Digital , Pemerintah telah mengakui popularitas dompet digital di kalangan muda-mudi Australia. Transaksi melalui dompet digital telah meningkat secara signifikan, mencapai 35% transaksi kartu pada kuartal Juni, naik dari 10% pada awal tahun 2020.	
3)	Pengembangan Infrastruktur , Infrastruktur untuk pembayaran digital telah diperkuat, dengan aplikasi keuangan populer seperti Apple Pay dan Google Pay menjadi lebih umum digunakan. Bank-bank besar juga telah mengembangkan sistem “tap and pay” sendiri, sehingga memfasilitasi adopsi pembayaran digital.	
4)	Peningkatan Penerimaan , Bisnis telah diperingatkan untuk menerima pembayaran digital, dengan penggunaan QR menu di restoran menjadi lebih umum.	
5.06	Use of digital platforms for providing transportation and shipping, 1-7 (best)	Korea, Rep.
1)	Pengembangan Digital Freight Forwarders , Perusahaan seperti Portlogics telah muncul, menawarkan sistem manajemen pelayanan berbasis otomatisasi proses robotik untuk memudahkan pengawasan dan memberikan update waktu nyata untuk pengiriman.	
2)	Investasi dan Pendanaan , Portlogics telah mendapatkan \$1,6 juta dalam pendanaan pre-Series A, yang akan digunakan untuk mengembangkan platformnya lebih lanjut, termasuk peningkatan kemampuan analisis data menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk memperbaiki analisis data untuk memperkirakan biaya.	
3)	Rencana Ekspansi , Portlogics berencana untuk memperluas operasinya ke Asia Tenggara dan Amerika Serikat setelah tahun 2024, dengan tujuan untuk menangkap pasar digital forwarding yang tumbuh, yang diperkirakan mencapai \$22,9 miliar pada tahun 2030.	
4)	Kerjasama dan Kemitraan , Portlogics sedang berdiskusi dengan perusahaan keamanan SaaS B2B untuk memperkuat langkah keamanan data, memastikan perlindungan data pelanggan dan menjaga integritas operasinya.	
5.07	Use of digital platform for providing hotels, restaurants and leisure activity services	Korea, Rep.
1)	Pengimplementasian Concierge Digital , Perusahaan seperti Stayfolio telah memperkenalkan layanan concierge digital yang dipimpin oleh Vouch, yang menyediakan dukungan multi bahasa, rekomendasi atraksi, dan fungsi obrolan langsung.	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
2)	Pengembangan Budaya Wisata Lokal , Stayfolio bertujuan untuk mempromosikan budaya wisata lokal di Korea, meningkatkan nilai komunitas pariwisata lokal, dan menginspirasi pengalaman wisata unik. Inisiatif ini mendorong penggunaan platform digital untuk mengurus dan mempromosikan akomodasi dan atraksi lokal.	
3)	Investasi dalam Teknologi Perhotelan , ONDA, penyedia solusi booking hotel terkemuka di Korea, telah meningkatkan pendanaan untuk mengembangkan dan meningkatkan solusi digitalnya. ONDA mengoperasikan platform seperti ONDA HUB, Hotel Plus, dan DIVE, yang membantu hotel mengelola pemesanan, tamu, dan properti lebih efisien.	
4)	Kolaborasi dengan Perusahaan Pemesanan Wisata Online Global , ONDA bekerja sama dengan perusahaan pemesanan wisata online global, termasuk Google Hotel, untuk menyediakan alat bagi hotel untuk menerima pembayaran online dan mengelola properti mereka.	
5.08	Power losses, % of domestic supply	Singapore
1)	Program Penerangan Pedesaan , Pada tahun 1963, pemerintah memulai Program Penerangan Pedesaan selama 10 tahun untuk menghubungkan setiap wilayah pedesaan ke jaringan listrik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup dan memastikan keberlanjutan keuangan dengan memerlukan pendapatan dari penjualan listrik untuk melebihi atau setara dengan investasi modal dalam waktu tujuh tahun.	
2)	Penggunaan Kabel Aluminium Terisolasi , Untuk mengurangi kecurian dan kegagalan penyediaan listrik, pemerintah mengganti kabel tembaga telanjang dengan kabel aluminium terisolasi. Perubahan ini membantu menjaga penyediaan listrik yang stabil dan efisien.	
3)	Investasi dalam Infrastruktur Listrik , Singapura terus menginvestasikan dalam infrastruktur listrik, termasuk pembangunan stasiun listrik baru dan modernisasi jaringan transmisi dan distribusi. Contohnya, Stasiun Listrik Pasir Panjang dibuka pada tahun 1952 untuk memenuhi permintaan listrik pasca-perang, dan Stasiun Listrik St James dikonversi menjadi pusat hiburan malam pada tahun 2009.	
4)	Langkah Efisiensi , Upaya telah dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi. Contohnya, penggunaan teknologi dan praktik efisiensi energi telah dipromosikan untuk mengurangi konsumsi energi yang berlebihan oleh pusat data dan fasilitas lain yang berenergi tinggi.	
DIMENSION B	T&T POLICY AND ENABLING CONDITIONS, 1-7 (BEST)	Malaysia
1)	Kebijakan Pariwisata Nasional 2020-2030 , Pemerintah meluncurkan kebijakan ini untuk memastikan kesinambungan industri pariwisata negara dan target menjadikan Malaysia sebagai destinasi pariwisata global top 10 dalam kedatangan dan pendapatan. Langkah-langkah utama meliputi penggunaan kerjasama antara sektor publik dan swasta, penggunaan digitalisasi, dan meningkatkan pengembangan yang berkelanjutan dan inklusif.	
2)	Zona Investasi Pariwisata Khusus (STIZ) , Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan STIZ melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk menarik investor lokal dan internasional. Zona-zona ini akan menawarkan berbagai fasilitas termasuk akomodasi, perbankan, komersial, logistik, rumah sakit, dan tempat tinggal bagi lansia, sehingga meningkatkan ekosistem pariwisata.	
3)	Konektivitas Udara Strategis , Tourism Malaysia sedang memperdalam kerjasama dengan maskapai penerbangan lokal untuk mempromosikan program stopover dan mengubah penumpang transit menjadi wisatawan. Ini termasuk memberikan insentif kepada maskapai	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>untuk memulai layanan baru atau meningkatkan frekuensi layanan yang ada melalui dana matching.</p> <p>4) Kerjasama Strategis, Pemerintah sedang memperkuat kerjasama dengan maskapai penerbangan di Timur Tengah untuk menarik wisatawan Eropa dan bekerja sama dengan maskapai yang beroperasi di Singapura untuk menarik lebih banyak wisatawan Cina.</p>	
Pillar 6.	Prioritization of T&T, 1-7 (best)	Indonesia
	<p>Kebijakan Prioritization of Travel & Tourism di Indonesia adalah kebijakan strategis yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk menempatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta promosi budaya dan keanekaragaman alam Indonesia.</p> <p>Kebijakan ini didorong oleh kesadaran akan potensi pariwisata Indonesia yang sangat besar, baik dari segi keindahan alam, kekayaan budaya, hingga keragaman destinasi wisata. Indonesia memiliki berbagai destinasi wisata unggulan, seperti Bali, Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan banyak lagi yang menjadikannya sebagai salah satu negara tujuan wisata utama di kawasan Asia-Pasifik.</p>	
6.01	T&T government expenditure, % of Gov't budget	Singapore
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Pengembangan Wisata, Pemerintah telah menambahkan \$300 juta ke dalam Dana Pengembangan Wisata untuk mendukung pengembangan dan pemasaran produk wisata baru dan pengalaman, serta merevitalisasi penawaran yang sudah ada, serta meningkatkan keterampilan pekerja di sektor wisata. 2) Pembangunan Atraksi Baru dan Perbaikan, Inisiatif-inisiatif termasuk peluncuran atraksi baru seperti Trifecta, sebuah atraksi salju, ombak, dan skate di Orchard Road, serta ekspansi Resorts World Sentosa dengan zona Minions dan akuarium yang lebih besar. 3) Sensoryscape, Jalur baru yang menghubungkan Resorts World Sentosa dan pantai-pantai Sentosa, yang dilengkapi dengan taman berkebun multi-sensorik dan tampilan seni cahaya digital, merupakan bagian dari rencana lebih luas untuk mengubah Sentosa menjadi tempat hiburan dan pariwisata yang berbeda. 4) Dukungan Industri Kapal Pesiar, Pemerintah telah bekerja sama dengan Disney Cruise Line untuk menandatangani MOU untuk homeporting eksklusif Disney Adventure di Singapura mulai tahun 2025. 5) Investasi Infrastruktur, Pengembangan area lifestyle air permukaan baru dan sistem transportasi tanpa pengemudi antara pulau utama dan Resorts World Sentosa merupakan bagian dari rencana ekonomi yang lebih luas untuk meningkatkan sektor pariwisata. 6) Perjanjian Bebas Visa, Perjanjian bebas visa 30 hari bersama antara Singapura dan Tiongkok diharapkan meningkatkan kedatangan dan pengeluaran wisatawan di berbagai sektor terkait pariwisata. 	
6.02	Comprehensiveness of annual T&T data, 0-120 (best)	Indonesia
	<p>Kebijakan Comprehensiveness of Annual Travel & Tourism Data di Indonesia merujuk pada kebijakan yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pariwisata dan ekonomi kreatif secara menyeluruh dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk menyediakan</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
<p>informasi yang akurat, tepat waktu, dan lengkap, yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan, perencanaan, dan pengembangan sektor pariwisata di tingkat nasional maupun daerah. Ini juga sejalan dengan standar internasional dalam penyediaan data pariwisata untuk pelaporan kepada badan-badan global, seperti UNWTO (United Nations World Tourism Organization).</p> <p>Komponen Kebijakan Comprehensiveness of Annual T&T Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan Data Pariwisata Nasional dan Daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dinas pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2) Pengembangan sistem informasi dan database pariwisata terintegrasi yang menggabungkan data dari berbagai sumber 3) Penyusunan laporan tahunan mengenai perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Badan Pusat Statistik. 4) Penggunaan teknologi digital untuk mendukung pengumpulan dan analisis data pariwisata, serta pemanfaatan big data dan artificial intelligence untuk menganalisis tren pariwisata, preferensi wisatawan, serta dampak kebijakan pariwisata terhadap masyarakat dan lingkungan. 5) Kerjasama antara berbagai kementerian dan lembaga terkait 		
6.03	Timeliness of providing monthly/quarterly T&T data, 0-22.5 (best)	Australia, Cambodia, India, Indonesia, Japan, Korea, Rep., Malaysia, Mongolia, Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam
<p>a. Australia,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengenalan Indikator IHK Bulanan, Pada Oktober 2022, Australian Bureau of Statistics (ABS) mulai menerbitkan indikator IHK bulanan. Ini memberikan informasi yang lebih cepat bagi para pembuat kebijakan dan masyarakat, meskipun hanya mewakili sekitar 66 hingga 77 persen dari berat IHK keranjang barang dan jasa, tergantung pada bulan dalam siklus kuartalan. 2) IHK Bulanan Lengkap pada Akhir 2025, ABS berencana untuk menerbitkan ukuran bulanan lengkap dari IHK pada akhir 2025. Ini akan melibatkan pengumpulan data yang komprehensif selama bulan acuan, memprioritaskan akurasi data dan menjaga tingkat komentar dan analisis yang sama seperti IHK kuartalan saat ini. 3) Seri yang Disesuaikan Musiman dan Analitis, IHK bulanan lengkap akan mencakup seri yang disesuaikan musiman bulanan dan seri analitis seperti rata-rata yang dipangkas, median berat, dan seri barang-barang tradisional dan non-tradisional. Awalnya, hanya beberapa seri yang disesuaikan musiman yang akan diterbitkan karena beberapa seri bulanan memiliki panjang waktu yang lebih singkat dari yang diperlukan untuk penyesuaian musiman standar. 4) Keterlibatan Stakeholder, ABS telah berinteraksi dengan stakeholder dalam proses desain untuk memastikan bahwa IHK bulanan baru memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat luas. Ini termasuk pembaruan berkelanjutan dan simulasi yang menampilkan IHK bulanan lengkap lebih dekat dengan tanggal penerbitan. <p>b. Japan,</p>		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alat Komunikasi Digital, Pemerintah Jepang telah beralih dari media tradisional ke alat komunikasi digital untuk menyebarkan informasi tentang Jepang, sehingga memudahkan wisatawan internasional untuk mengakses informasi tentang negara tersebut. 2) Dukungan Bahasa Beragam, Sistem informasi berbahasa beragam yang komprehensif telah dibangun di bandara, transportasi umum, dan atraksi wisata untuk mendukung peningkatan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang. 3) Sistem Pengurangan Pajak, Perubahan pada sistem pengurangan pajak pada tahun 2020 telah menghilangkan kebutuhan untuk staf memberikan pengurangan pajak pada barang-barang yang dijual melalui mesin penjual otomatis, mempercepat proses tanpa memerlukan pemeriksaan paspor. 4) Jasa Pemandu Wisata dan Penerjemah, Aturan yang hanya memungkinkan pemandu wisata dan penerjemah yang terlisensi bekerja telah dihapus, memungkinkan individu tanpa sertifikasi formal untuk memberikan jasa pemandu wisata dan penerjemah dengan biaya. 	
<p>c. Korea, Rep.,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Pengumpulan Data yang Ditingkatkan, Laboratorium Data Pariwisata Korea telah berperan penting dalam meningkatkan pengumpulan dan analisis data. Ini termasuk penggunaan data pengeluaran wisatawan dari Shinhan Card untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan tepat waktu tentang perilaku dan pola pengeluaran wisatawan. 2) Kolaborasi dengan Industri Pariwisata, Pemerintah telah bekerja sama dengan industri pariwisata untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti data gerakan pengunjung dari KT, yang membantu memahami pola dan durasi pengunjung. 3) Upaya Promosi, Upaya promosi yang berlanjut, terutama di pasar baru seperti Amerika dan Eropa, telah berkontribusi pada peningkatan jumlah pengunjung. Upaya ini termasuk kampanye pemasaran yang sasaran dan inisiatif perjalanan. 4) Dukungan Kebijakan Pariwisata, Pemerintah telah mendukung kebijakan pariwisata yang mendorong perjalanan rekreasi, seperti mengurangi jam kerja maksimum dari 68 menjadi 52, yang telah mendorong orang untuk mengejar hobi dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan rekreasi. 	
<p>d. Singapore,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Media Releases Singapura Tourism Board (STB), STB secara teratur mengeluarkan media releases yang memberikan update tentang berbagai kegiatan dan inisiatif pariwisata. media releases ini dapat di-filter dan didaftarkan untuk mendapatkan update yang tepat waktu. 2) Laporan Kuartal, STB dan asosiasi industri lainnya, seperti Asosiasi Hotel Singapura dan Asosiasi Perantauan Nasional Singapura, menyediakan laporan kuartal dan wawasan tentang industri pariwisata. Laporan-laporan ini membantu memahami tren dan tantangan saat ini di sektor pariwisata. 3) Kumpulan dan Analisis Data, STB mengumpulkan dan menganalisis data tentang kedatangan wisatawan, tingkat pendudukan hotel, dan indikator lainnya yang penting. Data ini sering kali diterbitkan setiap kuartal, memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja sektor pariwisata. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	4) Inisiatif Strategis , STB telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis, seperti Accelerator Pariwisata Singapura, yang bertujuan untuk membawa teknologi canggih global untuk meningkatkan penawaran pariwisata dan memperbaiki operasional bisnis.	
6.04	Country Brand Strategy rating, 0-100 (best)	Australia
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Merek Negara Terpadu, Bloom Consulting mengembangkan representasi yang terpadu dan konsisten dari kemampuan Australia untuk meningkatkan daya saing global negara tersebut. 2) Pembentukan Ide Sentral, Ide Sentral Australia menjadi 'optimisme', yang didasarkan pada elemen unik dan autentik dari identitas nasional Australia. 3) Merek Baru dan Tagline, Pemerintah Australia memperkenalkan Merek Baru dan tagline 'Only in Australia', untuk memperkuat reputasi Australia sebagai destinasi investasi yang kompetitif internasional, tempat yang bagus untuk dikunjungi, penyedia pendidikan berkualitas, dan eksportir produk dan jasa premium. 4) Sumber Daya Pemasaran, Lebih dari 300 sumber daya pemasaran disediakan secara gratis bagi bisnis Australia untuk membantu mempromosikan produk dan jasa Australia di luar negeri dan menarik lebih banyak investasi dan wisatawan. 5) Peningkatan Persepsi Internasional, Australia diakui karena kinerjanya yang kuat dalam Global Soft Power Index, naik 3 tempat ke 10, dan merayakan peningkatan 3,3 poin dalam skor Index. Selain itu, Australia berada di peringkat 9 global dalam Nation Brands Index. 	
Pillar 7.	Openness to T&T, 1-7 (best)	Singapore
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kampanye "Uniquely Singapore", Diluncurkan pada Maret 2004, kampanye ini bertujuan untuk menampilkan Singapura sebagai destinasi wisata yang unik dan menarik, menekankan perpaduan modernitas dan kekayaan budaya. 2) Dana Pengembangan Pariwisata, Pada tahun 2005, pemerintah Singapura mengumumkan Dana Pengembangan Pariwisata sebesar SGD 2 miliar untuk mendukung peningkatan pendapatan pariwisata menjadi SGD 30 miliar dan meningkatkan kunjungan wisatawan menjadi 17 juta orang pada tahun 2015.3) 3) Duta Jarak Aman (SDA), Selama pandemi COVID-19, pemandu wisata dilatih sebagai SDA untuk mempromosikan pengelolaan jarak aman dan mendorong kesadaran akan protokol kesehatan. 4) Sertifikasi CruiseSafe, Untuk memulihkan kepercayaan konsumen dalam perjalanan kapal pesiar, Badan Pariwisata Singapura (STB) memperkenalkan program Sertifikasi CruiseSafe, yang memerlukan audit dan sertifikasi bagi kapal pesiar sebelum mereka dapat melanjutkan operasionalnya. 5) Tugas Pakar Pemulihan Pariwisata (TRAC), Didirikan pada Februari 2020, TRAC bekerja sama dengan mitra industri untuk mengembangkan strategi pemulihan dan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan sektor pariwisata. 6) Rencana Jalan Raya Industri Acara (RRIA), Inisiatif ini, diluncurkan oleh Asosiasi Konvensi dan Pameran Singapura (SACEOS) dalam kerjasama dengan STB dan Enterprise Singapura, bertujuan untuk mengembangkan model bisnis hybrid inovatif dan jalur baru untuk kemampuan baru di sektor MICE (Rapat, Incentif, Konferensi, dan Pameran). 7) Sistem Pelatihan Profesional Industri Pariwisata (TIP-it), Program ini diperluas untuk meningkatkan kemampuan karyawan di industri pariwisata, membantu mengatasi tantangan sumber daya manusia dan memberikan kesempatan pekerjaan ekspansi. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
8)	Program Mitra Pemasaran (MPP) , Program sebesar SGD 20 juta ini diluncurkan untuk mendukung inisiatif dan kerjasama pemasaran yang bertujuan memulihkan kepercayaan konsumen dan permintaan pariwisata.	
7.01	Visa requirements, 0-100 (best)	Malaysia
1)	Rencana Liberalisasi Visa , Bebas Visa untuk Warga Cina dan India: Mulai 1 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024, warga Cina dan India diberikan izin tinggal bebas selama 30 hari di Malaysia. Masa berlaku untuk visa masuk telah diperpanjang dari tiga bulan menjadi enam bulan dari tanggal penerbitan untuk semua jenis visa, termasuk Multiple Entry Visa (MEV) dan Social Visit Pass (SVP). Pengembangan Masa Tinggal SVP: Masa tinggal SVP telah diperpanjang dari 14 hari menjadi 30 hari untuk 22 negara.	
2)	Graduate Pass baru , Diperkenalkan Graduate Social Visit Pass (GSVP) untuk mahasiswa internasional dari 23 negara yang telah menyelesaikan atau akan menyelesaikan gelar sarjana atau lebih tinggi di institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Pass ini berlaku selama 12 bulan dan termasuk Multiple Entry Visa (MEV).	
3)	Umrah Transit Visa , Diperkenalkan visa transit Umrah dengan SVP selama 7 hari untuk warga negara 32 yang ingin mengunjungi Malaysia untuk alasan sosial sebelum atau setelah melakukan Umrah.	
4)	Digital Arrival Card (MDAC) , Mulai 1 Januari 2024, semua warga negara asing perlu menyelesaikan dan mengajukan aplikasi MDAC secara online paling lambat tiga hari sebelum tanggal kedatangan mereka di Malaysia. Beberapa paspor dan Long-term Passes diberikan kekecualian.	
5)	Xpats Gateway , Sistem aplikasi tunggal, Xpats Gateway, telah diluncurkan untuk mempercepat waktu pengolahan visa pekerja asing. Perusahaan di sektor keuangan, energi, dan sektor lain yang penting diprioritaskan, dengan waktu pengolahan dipersingkat menjadi lima hari kerja.	
7.02	Number of air service agreements	China
1)	Perjanjian Bilateral , China telah menyelesaikan berbagai perjanjian layanan udara bilateral dengan berbagai negara. Misalnya, perjanjian dengan Uni Eropa, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, dan Hungaria, antara lain.	
2)	Kerangka Regulasi , China telah menetapkan kerangka regulasi yang kuat untuk memfasilitasi transportasi udara internasional. Badan Penerbangan Sipil China (CAAC) berperan penting dalam mengawasi dan mengelola perjanjian-perjanjian ini, memastikan kinerja yang sesuai dengan standar internasional dan peraturan domestik.	
3)	Liberalisasi Pasar , China telah menerapkan kebijakan untuk meliberalisasi pasar transportasi udara. Ini termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah rute dan penerbangan internasional, serta mempromosikan partisipasi maskapai asing di pasar China.	
4)	Kerja Sama Internasional , China telah berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk meningkatkan koneksi transportasi udara internasional. Ini termasuk berpartisipasi dalam forum dan perjanjian global, seperti Konvensi Penerbangan Internasional (Chicago Convention), untuk memperstandardkan dan memfasilitasi layanan udara internasional.	
7.03	Travelsat Hospitality Reputation Index	Nepal
1)	Membuat Kerangka Perencanaan Tujuan Wisata yang Inklusif , Pemerintah telah memprioritaskan membuat kerangka yang seimbang antara kesejahteraan masyarakat	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>dengan perlindungan sumber daya alam dan budaya serta kesehatan keuangan penyedia jasa pariwisata.</p> <p>2) Menggunakan Manajemen Tujuan Wisata Holistik, Masyarakat dan industri pariwisata berpartisipasi dalam manajemen tujuan wisata holistik, berinvestasi dalam praktik-praktik lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Ini termasuk memasarkan pengalaman yang berkelanjutan dan memberikan pendidikan kepada wisatawan tentang praktik-praktik perjalanan yang bertanggung jawab.</p> <p>3) Mengatur Undang-Undang Pariwisata, Nepal telah mengatur undang-undang pariwisata yang menciptakan insentif untuk kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini juga mendukung standar global seperti Global Sustainable Tourism Council (GSTC).</p> <p>4) Mengpromosikan Pertukaran Budaya, Inisiatif seperti tur warisan budaya, homestay, proyek pariwisata berbasis masyarakat, dan festival budaya yang menghargai keberagaman sedang dipromosikan untuk mendorong pertukaran yang lebih dalam antara pengunjung dan masyarakat setempat.</p>	
7.04	Passport mobility score	Singapore
<p>Singapura meningkatkan skor mobilitas paspornya dengan bernegosiasi dan memperoleh perjanjian bebas visa dengan berbagai negara. Langkah strategis ini memungkinkan Singapura untuk memperluas destinasi perjalanan visa-free, sehingga meningkatkan kekuatan paspornya. Secara khusus, upaya Singapura melibatkan diplomasi yang bertujuan untuk meningkatkan reciprocitas visa dan memperoleh perjanjian yang memberikan warga Singapura akses ke lebih banyak negara tanpa perlu visa.</p>		
Pillar 8.	Price Competitiveness, 1-7 (best)	Malaysia
	<p>1) Mengurangi Pengawasan Harga, Para ekonom telah mengusulkan pemerintah Malaysia untuk mengurangi keterlibatannya dalam menetapkan harga komoditas untuk meningkatkan daya saing global negara tersebut. Ini termasuk mengurangi subsidi dan pengawasan harga terhadap barang-barang seperti telur, yang dapat mengganggu keseimbangan alami permintaan dan penawaran.</p> <p>2) Mengoptimalkan Prosedur Regulasi, Pemerintah telah diperingatkan untuk mengoptimalkan prosedur regulasi untuk menarik lebih banyak investasi langsung asing (IDA).</p> <p>3) Meningkatkan Produktivitas, Meningkatkan produktivitas dianggap sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing. Ini melibatkan mempercepat pertumbuhan produktivitas, meningkatkan inovasi, dan menurunkan harga produk utama yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin, sehingga meningkatkan daya beli rumah tangga mereka.</p> <p>4) Menandatangani Perjanjian Perdagangan, Malaysia telah diperingatkan untuk mempertimbangkan menandatangani perjanjian perdagangan seperti Perjanjian Ekonomi Regional yang Luas (RCEP) dan Perjanjian Perdagangan yang Luas dan Progresif Pasifik (CPTPP) untuk meningkatkan perdagangan luar negeri dan mengintegrasikan perusahaan-perusahaan ke dalam rantai nilai global.</p> <p>5) Reformasi Struktural, Melaksanakan reformasi struktural dalam pajak, subsidi, dan pasar tenaga kerja juga direkomendasikan untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan menarik investasi asing.</p>	
8.01	Hotel price index, US\$	Indonesia

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>Kebijakan Penanganan Harga Hotel di Indonesia merupakan salah satu strategi penting dalam menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, sekaligus mempertahankan daya saing destinasi pariwisata. Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), bersama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), mengimplementasikan berbagai Kebijakan dan regulasi terkait penetapan harga hotel guna mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas.</p> <p>Penetapan harga hotel yang sesuai dapat mempengaruhi minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Harga yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya tarik destinasi, sementara harga yang terlalu rendah dapat menurunkan kualitas layanan dan menimbulkan ketidakstabilan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang menjaga keseimbangan harga dan memastikan transparansi penentuan tarif hotel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regulasi Penetapan Harga Minimum dan Maksimum 2) Pengawasan dan Regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) 3) Penerapan Pajak dan Retribusi yang Seimbang 4) Promosi Paket Wisata Terintegrasi 5) Sistem Pemantauan dan Penilaian Harga 6) Kebijakan Diskon dan Penetapan Tarif Spesial 7) Kerjasama dengan Online Travel Agents (OTA) dan Platform Digital: 	
8.02	Purchasing power parity, PPP\$	Lao PDR
1)	<p>Investasi di Zona Ekonomi Khusus (SEZ), Pengembangan SEZ telah memfasilitasi ekspor manufaktur, terutama dalam elektronik, telekomunikasi, dan peralatan listrik. Hal ini telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam ekspor manufaktur, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan PPP.</p>	2)
2)	<p>Proyek Energi Terbarukan, Pengembangan proyek energi terbarukan, seperti Proyek Angin Musim, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri moderat. Investasi ini dalam sektor energi akan membantu meningkatkan kinerja energi negara dan potensial meningkatkan PPP.</p>	3)
3)	<p>Proyek Investasi Publik (PIP), Pemerintah telah melakukan investasi dalam proyek infrastruktur publik, yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan PPP. Investasi ini bertujuan untuk memperbaiki lingkungan bisnis dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.</p>	4)
4)	<p>Transformasi Struktural, Pemerintah bekerja pada transformasi struktural untuk beralih dari ekspor berbasis sumber daya ke produk yang lebih berdaya tambah tinggi. Transformasi ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan, yang dapat mempengaruhi positif terhadap PPP.</p>	
8.03	Fuel price levels, US\$/litre	Malaysia
1)	<p>Sistem Subsidi Berfokus, Pemerintah telah beralih dari subsidi yang luas ke pendekatan yang lebih terfokus, dengan tujuan untuk membantu terutama mereka yang membutuhkan. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan pemerintah sambil memastikan bantuan mencapai kelompok masyarakat yang paling rentan.</p>	2)
2)	<p>Penyesuaian Harga, Harga bahan bakar diesel telah disesuaikan menjadi 3,35 ringgit per liter di Semenanjung Malaysia, sementara menjaga tingkat yang lebih rendah yaitu 2,15 ringgit</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>per liter di Sabah dan Sarawak, serta untuk kendaraan logistik tertentu di bawah sistem subsidi.</p> <p>3) Harga Khusus untuk Kelompok Tertentu, Harga khusus akan tersedia untuk kelompok tertentu seperti nelayan, bus sekolah, dan ambulans untuk mengurangi dampak kenaikan harga pada kehidupan mereka.</p> <p>4) Bantuan Uang Tunai untuk Individu yang Berhak, Bantuan uang tunai bulanan akan diberikan kepada individu yang berhak dengan kendaraan diesel, petani skala kecil, dan petani komoditas skala kecil untuk membantu menutup biaya kenaikan harga.</p> <p>5) Peninjauan Harga Mingguan, Harga bahan bakar diesel akan diperiksa setiap minggu untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar, sehingga sistem harga baru tetap kompetitif dan responsif terhadap kondisi pasar.</p>	
8.04	Short-term rental price, US\$	Nepal
	<p>Pertumbuhan pasar sewa jangka pendek di Nepal sebagian besar dipicu oleh popularitas platform seperti Airbnb, yang memungkinkan pemilik properti untuk memasukkan properti mereka ke dalam daftar untuk sewa jangka pendek. Trend ini dipicu oleh kemajuan teknologi dan daya tarik akomodasi yang terjangkau dan unik bagi wisatawan.</p>	
DIMENSION C	INFRASTRUCTURES AND SERVICES	Singapore
	<p>1) Rencana Panjang dan Master Plan, Singapura menggunakan Rencana Panjang untuk menentukan penggunaan terbaik dari tanahnya dan memenuhi kebutuhan infrastruktur selama 50 tahun ke depan. Rencana Panjang pertama diluncurkan pada tahun 1971 dan telah direvisi setiap 10 tahun sejak itu. Master Plan menerjemahkan strategi luas dari Rencana Panjang ke dalam rencana penggunaan tanah spesifik, fokus pada infrastruktur.</p> <p>2) Inisiatif Smart Nation, Diluncurkan pada tahun 2014, Inisiatif Smart Nation bertujuan untuk mengoptimalkan teknologi untuk merencanakan infrastruktur Singapura yang lebih baik saat ini dan di masa depan. Fokus pada tiga domain: pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.</p> <p>3) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data, Badan Pengembangan Kawasan Urban (URA) menggunakan analisis data untuk mempengaruhi perencanaan penggunaan tanah, menangani isu-isu seperti tren demografis, aksesibilitas fasilitas, dan pola mobilitas. Badan Transportasi Darat (LTA) menggunakan sistem harga jalan elektronik untuk mengelola data lalu lintas, menyesuaikan waktu lampu lalu lintas dan memberikan peringatan lalu lintas waktu nyata.</p> <p>4) Pengembangan Infrastruktur, Singapura telah menginvestasikan banyak dalam infrastruktur modern, termasuk Bandara Internasional Changi, yang telah menjadi hub penerbangan utama, dan Terminal PSA Singapura, yang merupakan terminal transshipment terpadat di dunia. Pemerintah juga telah mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang komprehensif</p> <p>5) Pembiayaan Infrastruktur Baru, Pemerintah Singapura berencana untuk mengeluarkan \$68 miliar dalam obligasi baru untuk membiayai proyek infrastruktur jangka panjang utama, termasuk jalur kereta bawah tanah, pompa air, dan dinding gelombang pasang untuk melindungi terhadap kenaikan permukaan laut.</p> <p>6) Pengembangan Perumahan Umum dan Pengembangan Kota, Badan Perumahan dan Pengembangan (HDB) dan Badan Pengembangan Ekonomi (EDB) telah berperan penting dalam menangani pengangguran dan kekurangan perumahan umum, isu-isu kritis setelah kemerdekaan Singapura.</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
7)	Infrastruktur dan Layanan Digital , Singapura berada di garis depan digitalisasi, dengan sebagian besar populasi menggunakan bank internet dan pembayaran mobile untuk layanan publik. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan layanan digital dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup warga.	
Pillar 9.	Air Transport Infrastructure, 1-7 (best)	Singapore
1)	Pengadaan Bahan Bakar Udara yang Dapat Diperbaharui (SAF) yang Terpusat , CAAS akan menggabungkan pengadaan bahan bakar udara yang dapat diperbaharui (SAF) untuk mengelola biaya dan mengumpulkan permintaan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan SAF, yang sangat penting untuk mengurangi emisi karbon di sektor penerbangan.	
2)	Modernisasi Armada dan Perbaikan Operasional , Penerbang Singapura telah berinvestasi dalam pesawat yang lebih baru dan efisien bahan bakar serta menerapkan perbaikan operasional seperti inisiatif penurunan berat dan penggunaan unit power auxiliary yang lebih sedikit di darat.	
3)	ITM Penerbangan 2025 , ITM Penerbangan menggarisbawahi strategi untuk mengubah Bandara Changi menjadi hub penerbangan global yang siap untuk masa depan. Prioritas utama termasuk pembangunan hub penerbangan yang aman dan berkelanjutan, mengoptimalkan teknologi untuk inovasi, serta meningkatkan pengembangan sumber daya kerja.	
9.01	Efficiency of air transport services, 1-7 (best)	Singapore
1)	Penggunaan Teknologi dan Automasi , Badan Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) bekerja sama dengan komunitas bandara untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengulas inisiatif yang bertujuan meningkatkan produktivitas. Termasuk pengenalan mesin check-in mandiri, pelayanan check-in awal, dan mesin check-in mandiri di Bandara Changi untuk meningkatkan kapasitas penanganan penumpang dan mengurangi permintaan puncak untuk check-in penumpang.	
2)	Peningkatan Infrastruktur , CAAS mendukung perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan melalui Dana Pengembangan Penerbangan (ADF). Dana ini digunakan untuk berbagai inisiatif seperti penggunaan teknologi, peningkatan infrastruktur, dan re-engineering proses bandara.	
3)	Inovasi Digital , Ada dorongan untuk inovasi digital dan integrasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman penumpang. Ini termasuk aplikasi biometrik, solusi digital, dan teknologi 5G di terminal dan fasilitas udara.	
4)	Bahan Bakar Udara Sustainabel (SAF) , Singapore Airlines, bersama Cathay Pacific, telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk bekerja sama dalam langkah-langkah keberlanjutan, termasuk peningkatan penggunaan SAF.	
5)	Perjanjian Layanan Udara , Menandatangani Perjanjian Layanan Udara yang ditingkatkan dengan negara-negara seperti Mongolia dan aransemen teknis tentang perawatan penerbangan dengan Hong Kong, yang membantu meningkatkan koneksi dan mengurangi biaya operasional.	
9.02	Available seat kilometres per week, millions per pop	N/A
9.03	Number of operating airlines	N/A

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
9.04	Airport connectivity score	China
<p>1) Pembangunan Bandara, Pembangunan bandara baru, seperti Bandara Daxing Beijing, telah meningkatkan signifikan koneksi udara di negara tersebut. Bandara ini dirancang sebagai pusat transfer internasional utama, memperbaiki koneksi Beijing ke pasar internasional.</p> <p>2) Liberalisasi Kebijakan Penerbangan, China telah liberalisasi Perjanjian Layanan Udara (ASAs) bilateral-nya dalam beberapa tahun terakhir, yang telah menyebabkan peningkatan koneksi udara internasional.</p> <p>3) Pengembangan Maskapai LCC (Low-Cost Carrier), Pertumbuhan maskapai LCC di China telah berkontribusi pada peningkatan koneksi udara. Maskapai LCC telah memperluas jaringan rute dan meningkatkan frekuensi penerbangan, membuat perjalanan udara lebih aksesibel dan terjangkau bagi masyarakat yang lebih luas.</p> <p>4) Perbaikan Infrastruktur Bandara, Perbaikan infrastruktur bandara, termasuk ekspansi terminal dan penambahan landasan pacu baru, telah meningkatkan kapasitas dan efisiensi bandara Cina, sehingga meningkatkan koneksi.</p>		
Pillar 10.	Ground and Port Infrastructure, 1-7 (best)	Singapore
<p>1) Pengembangan Pelabuhan Tuas, Pelabuhan Tuas dirancang untuk berkelanjutan dan tahan lama, dengan platform operasional 5 meter di atas MSL (Mean Sea Level) untuk menyesuaikan dengan kenaikan permukaan laut. Pelabuhan ini akan menangani hingga 65 juta unit TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) per tahun, menjadikannya pelabuhan kontainer terbesar di dunia. Tuas Port akan menjadi pelabuhan digital dan otomatis, menampilkan inovasi seperti Digitalport@SG dan Sistem Just-in-Time untuk mempercepat proses pelayaran dan memperbaiki waktu pengiriman.</p> <p>2) Pengembangan Pelabuhan Pasir Panjang, Area pelabuhan ini diperluas dari 277 hektar dalam Rencana Master 1985 menjadi 650 hektar dalam Konsep Rencana 1991, dengan pekerjaan reklamasi bertujuan meningkatkan ketersediaan lahan untuk kegiatan pelabuhan. Pelabuhan awalnya dikembangkan di Pasir Panjang untuk berfungsi sebagai pintu masuk bagi kapal laut dan kapal pesisir, menangani barang konvensional dan industri lighterage.</p> <p>3) Teknologi Maritim dan Digitalisasi, Sistem ini menggunakan analisis data dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan pertukaran informasi digital antara kapal dan darat, serta memprediksi situasi tabrakan potensial, meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Singapura sedang mengembangkan jaringan 5G maritim untuk mendukung aplikasi digital seperti pilotase jarak jauh, pengisian bahan bakar digital, dan telemedisin, meningkatkan digitalisasi maritim</p>		
10.01	Quality of roads, 1-7 (best)	Singapore
<p>1) Penggunaan Tanah Terintegrasi dan Transportasi, Singapura telah menerapkan kebijakan pengembangan transit terintegrasi (TOD) untuk memaksimalkan akses ke transportasi umum dengan memperkenalkan penggunaan tanah campuran. Ini termasuk pembangunan pusat transportasi terintegrasi (ITH) yang sepenuhnya terdorong angin bus intercity yang terhubung secara langsung ke stasiun MRT, area komersial, dan fasilitas masyarakat.</p> <p>2) Penggunaan Data untuk Perencanaan, Singapura menggunakan analisis data untuk memandu perencanaan penggunaan tanah dan mengelola kebutuhan transportasi. Autoritas Pengembangan Kota (URA) dan Autoritas Transportasi (LTA) memanfaatkan data untuk mengoptimalkan perencanaan infrastruktur, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi perjalanan panjang. Misalnya, LTA menggunakan sistem harga jalan elektronik untuk</p>		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<p>menyesuaikan waktu lampu lalu lintas, memberikan prioritas untuk bus, dan berbagi peringatan lalu lintas waktu nyata, meningkatkan efisiensi dan keselamatan infrastruktur transportasi.</p> <p>3) Langkah-Langkah Keselamatan Jalan, Singapura telah menerapkan berbagai langkah keselamatan jalan, termasuk Program Spot Hitam dan audit keselamatan jalan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan jalan dan meningkatkan keselamatan jalan dengan menangani lokasi yang rentan dan menerapkan sistem manajemen jalan yang lebih baik.</p> <p>4) Investasi dalam Pemeliharaan Jalan, Meskipun ada beberapa kritik tentang pemeliharaan jalan, Singapura terus berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan infrastruktur jalan. LTA telah menyatakan komitmen untuk memelihara dan meningkatkan kualitas jalan, mengakui bahwa ada selalu ruang untuk perbaikan lebih lanjut.</p>	
10.02	Road density, km/surface area	Singapore
	<p>1) Sistem Kuota Kendaraan, Sistem Kuota Kendaraan yang mengontrol jumlah kendaraan baru yang diizinkan untuk pendaftaran setiap tahun. Ini membantu mengelola populasi kendaraan dan mengurangi kemacetan.</p> <p>2) Sertifikat Hak Milik Kendaraan, Untuk mendaftarkan kendaraan baru, individu harus berpartisipasi dalam lelang sertifikat hak milik kendaraan, yang mewakili hak untuk memiliki kendaraan selama 10 tahun.</p> <p>3) Pembayaran Jalan Elektronik, Diperkenalkan pada tahun 1998, sistem ini mengenakan biaya kepada pengendara yang menggunakan jalan yang padat selama jam sibuk. Biaya yang berbeda-beda tergantung pada jalan, waktu, dan kondisi lalu lintas, sehingga mendorong pengendara untuk mengubah moda transportasi, rute perjalanan, atau waktu perjalanan untuk mengurangi kemacetan.</p> <p>4) Sistem Transportasi Intelejen, Singapura mengumpulkan informasi dari jaringan Sistem Transportasi Intelejen untuk mengelola aliran lalu lintas, memantau insiden lalu lintas, dan mengirimkan tim pemulihan untuk mengurangi kemacetan. Sistem ini juga menyediakan informasi lalu lintas waktu nyata untuk membantu pengendara merencanakan rute perjalanan.</p> <p>5) Perencanaan Pola Kotak, Strategi perencanaan kota ini melibatkan penyebaran berbagai jenis penggunaan tanah dalam kota untuk mengurangi kepadatan. Dengan memiliki penggunaan tanah yang beragam, Singapura berusaha menciptakan lingkungan kota yang lebih seimbang dan hidup.</p> <p>6) Opsi Transportasi Hijau dan Bangunan, Singapura mendorong bangunan hijau dan transportasi umum untuk mengurangi jejak karbon dan mengurangi efek pulau panas kota.</p>	
10.03	Efficiency of train services, 1-7 (best)	Japan
	<p>1) Privatisasi dan Divestasi, Privatisasi Jepang Railways bertujuan untuk menghilangkan efisiensi manajemen dan meningkatkan kinerja operasional. Reformasi struktural ini bertujuan untuk mencapai layanan kereta api berkualitas tinggi.</p> <p>2) Pengembangan Kereta Api Tingkat Tinggi, Pengembangan dan penggunaan jaringan kereta api tingkat tinggi, seperti Shinkansen, telah secara signifikan meningkatkan efisiensi layanan kereta api. Jaringan ini menyediakan transportasi yang cepat dan dapat diandalkan, mendukung pertumbuhan ekonomi Jepang.</p> <p>3) Pengembangan Infrastruktur, Infrastruktur Jepang yang sangat berkembang, termasuk sistem transportasi publik, telah menjadi faktor kunci dalam menjaga efisiensi. Ini termasuk</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
logistik yang terorganisir dan sistem transportasi yang efisien yang menangani kepadatan penduduk yang tinggi di negara tersebut.		
10.04	Railroad density, km/100 square km surface area	Singapore
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Jaringan Kereta Api, Jaringan kereta api diperkirakan akan berkembang menjadi sekitar 360 km pada awal tahun 2030-an, memberikan pilihan perjalanan yang lebih nyaman dan alternatif bagi penumpang. 2) Pengenalan Kereta Baru, Pihak Land Transport Authority (LTA) telah memperkenalkan kereta baru, seperti kereta R151 untuk Jalur Utara-Selatan dan Timur-Barat, serta kereta baru untuk LRT Sengkang-Punggol untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan. 3) Perbaikan Tengah Masa, Kereta MRT tanpa pengemudi di Jalur Utara Timur sedang menjalani perbaikan tengah masa untuk memperbarui interior kereta, mengurangi waktu downtime perawatan, dan mengurangi risiko gangguan karena kegagalan peralatan. 4) Penggantian Kereta Lama, Semua kereta generasi pertama di LRT Bukit Panjang akan digantikan dengan kereta baru yang dilengkapi dengan sistem redundansi yang lebih baik dan sistem pemantauan kondisi peralatan, yang diharapkan selesai pada tahun 2026. 5) Pengembangan Depo, Depo LRT Sengkang-Punggol sedang diperluas dari 3,5 hektar menjadi 11,1 hektar untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan menciptakan lebih banyak ruang untuk fasilitas perawatan, yang diharapkan selesai pada tahun 2027. 6) Proyek Kereta Api Baru, Singapura juga sedang merencanakan beberapa proyek kereta api baru, termasuk perluasan Jalur Thomson-East Coast ke Bandara Changi, Jalur Jurong, dan Jalur Cross Island, yang akan meningkatkan kepadatan jaringan kereta api lebih lanjut. 		
10.05	Efficiency of public transport services, 1-7 (best)	Japan
<ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan Kereta Api yang Tinggi, Sektor transportasi Jepang menonjol karena efisiensi energinya, terutama karena penggunaan kereta api yang tinggi. Kereta api merupakan metode utama transportasi penumpang, memungkinkan akses cepat dan sering dalam dan antara kota-kota besar dan wilayah metropolitan. 2) Keterlambatan yang Rendah, Semua kereta api di Jepang dikenal karena keterlambatannya yang rendah, yang merupakan ciri khas sistem transportasi umum negara ini. Keterlambatan yang rendah ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan perjalanan yang efisien. 3) Perencanaan Strategis, Jepang telah aktif menggunakan sistem ramah lingkungan seperti monorail dan Automated Guideway Transit (AGT) untuk menciptakan struktur kota yang padat, meningkatkan efisiensi transportasi umum. 4) Jaringan Komprehensif, Jaringan tol yang terintegrasi dan terbagi dengan akses terbatas menghubungkan kota-kota besar, dan kereta api komuter dan transportasi cepat dengan kapasitas tinggi menghubungkan daerah pinggiran dengan pusat kota, memungkinkan individu untuk berpindah ke daerah yang lebih luas dan lebih terjangkau. 5) Pemilikan Jalan Tol Swasta, Perusahaan koleksi tol yang dahulu merupakan Jepang Highway Public Corporation telah diubah menjadi perusahaan swasta milik publik. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong persaingan dan mengurangi biaya tol, yang dapat meningkatkan efisiensi transportasi jalan. 6) Infrastruktur Modern dan Terorganisir, Sistem transportasi umum Jepang modern, nyaman, aman, dan terorganisir dengan baik, membuatnya menjadi pilihan utama dibandingkan 		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
dengan kendaraan pribadi. Ini termasuk kereta api yang baik, sistem subway, dan feri yang menghubungkan pulau utama.		
10.06	Efficiency of seaport services, 1-7 (best)	Singapore
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Kapal Generasi Berikutnya, Sistem ini, dikembangkan oleh Maritime Port Authority (MPA), menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi tabrakan dan mengelola kondisi lalu lintas lebih efisien. Sistem ini dapat mengidentifikasi titik rawan lalu lintas dan memberi saran kepada kapten untuk menghindarinya 2) DigitalPORT@SG™, Platform digital ini, dikembangkan oleh NCS, memudahkan semua transaksi seperti pengelolaan kapal, imigrasi, dan pembersihan pelabuhan. Platform ini memungkinkan perusahaan pelayaran untuk mengajukan semua dokumen yang diperlukan dalam satu kali pengajuan. Ini telah menyelamatkan sekitar 100.000 jam kerja manusia setiap tahun dan meningkatkan operasional pelabuhan. 3) Singapore Maritime Data Hub (SG-MDH), Hub data maritim sentral ini memungkinkan berbagi data maritim terbuka antara perusahaan pelayaran dan lembaga pemerintah, seperti jadwal pengiriman bahan bakar tepat waktu dan aplikasi penyewaan perahu, sehingga meningkatkan efisiensi operasi maritim. 4) Ekspansi Pelabuhan Mega Tuas, Pelabuhan Mega Tuas, yang akan selesai pada tahun 2040, akan menjadi pelabuhan terbesar di dunia yang sepenuhnya otomatis. Pelabuhan ini akan mengintegrasikan sistem cerdas dan inovatif, termasuk jaringan pintar dengan keberlanjutan di hati. 		
Pillar 11.	Tourist Services and Infrastructure, 1-7 (best)	New Zealand
<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong Investasi Internasional, Kementerian Bisnis, Inovasi & Pekerjaan (MBIE) telah mempromosikan dan mendorong investasi internasional dalam aset pariwisata melalui New Zealand Trade and Enterprise. 2) Meningkatkan Infrastruktur Bandara, Bandara internasional di New Zealand sedang berusaha untuk meningkatkan infrastruktur mereka untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, meskipun ini memerlukan perencanaan jangka panjang. 3) Meningkatkan Kapasitas Hotel, Meskipun ada permintaan yang signifikan untuk akomodasi hotel, namun tidak ada peningkatan yang sebanding dalam kapasitas hotel, sehingga menyebabkan tingkat ketersediaan kamar yang tinggi dan biaya kamar yang tinggi di musim puncak. Namun, pembangunan hotel sedang merespons permintaan di Auckland dan Christchurch. 4) Mendukung Pengembangan Infrastruktur Lokal, Pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur lokal, terutama di destinasi wisata populer, untuk memastikan bahwa sektor tersebut memiliki semua input yang diperlukan untuk menyediakan pengalaman wisata yang berkualitas tinggi. 5) Investasi dalam Fasilitas Konferensi Internasional, Industri pariwisata dan pemerintah telah melakukan investasi signifikan dalam fasilitas konferensi internasional untuk menarik lebih banyak acara bisnis dan konferensi. 6) Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Meskipun infrastruktur jalan di New Zealand tidak mendapatkan skor yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, pemerintah telah menargetkan area dengan tingkat kecelakaan yang tinggi yang melibatkan pengemudi asing untuk perbaikan. 		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
7)	Meningkatkan Jangkauan Seluler , Meskipun beberapa jalan utama di Selandia Baru memiliki jangkauan seluler yang terbatas atau tidak stabil, kebanyakan kota dan kota di sekitar negara ini memiliki jangkauan seluler yang memadai.	
8)	Menangani Kekhawatiran Masyarakat , Warga New Zealand telah mengungkapkan kekhawatiran tentang infrastruktur komunitas, biaya hidup, keamanan, dan lingkungan alam. Pemerintah dan industri pariwisata bekerja sama untuk menangani isu-isu ini, termasuk meningkatkan infrastruktur komunitas dan mengelola biaya hidup.	
9)	Pemasaran dan Promosi , Tourism New Zealand memasarkan negara sebagai destinasi wisata internasional, dan otoritas lokal dan regional menyediakan infrastruktur pariwisata dan kerangka perencanaan lokal untuk membantu komunitas tumbuh dan mengelola tantangan pariwisata lokal.	
11.01	Hotel rooms, per 100 pop	New Zealand
1)	Pembangunan Hotel Baru , Terdapat perkiraan \$1,1 miliar untuk proyek-proyek hotel yang sedang mulai dibangun atau dalam tahap perencanaan di Selandia Baru. Proyek-proyek ini diharapkan menambah sekitar 2.500 kamar baru ke pasar.	
2)	Fokus di Auckland , Mayoritas proyek-proyek baru ini terkonsentrasi di Auckland, yang diperkirakan akan melihat peningkatan 20% dalam kamar hotel. Auckland menanggung 50% dari kamar baru, dan 80% dari total pengeluaran disebabkan oleh gedung-gedung hotel tinggi.	
3)	Proyek Perbaikan dan Konversi , Dengan biaya konstruksi dan tenaga kerja yang meningkat, ada pergeseran menuju proyek perbaikan dan konversi daripada pembangunan baru. Pendekatan ini memungkinkan penyerapan produk kualitas tinggi baru ke pasar dengan cepat.	
4)	Jaringan Hotel Terkenal , Mayoritas penambahan kamar sejak 2019 adalah terkenal, dengan IHG, Wyndham Hotels & Resorts, dan Sudima Hotels menjadi tiga jaringan teratas dalam penambahan kamar.	
11.02	Number of Short-term rental listing, per 10,000 pop	New Zealand
New Zealand telah memperkenalkan City Portal oleh Airbnb, yang menyediakan pemerintah daerah dengan alat dan data untuk membantu mengelola sewa jangka pendek di wilayah mereka. Inisiatif ini bertujuan memberikan kebijakan lebih baik dengan data, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang sewa jangka pendek.		
11.03	Labour productivity in hotels and restaurants, US\$ per pop	Singapore
1)	Investasi dalam Pelatihan dan Penelitian , Pemerintah telah menginvestasikan dalam pelatihan dan penelitian untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ini termasuk inisiatif seperti National Productivity and Continuing Education Council, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai program dan sistem dukungan.	
2)	Penggunaan Otomasi dan Rekayasa Ulang , Upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan otomasi dan rekayasa ulang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.	
3)	Target Produktivitas , Pemerintah telah menetapkan target produktivitas yang ambisius, dengan harapan pertumbuhan tahunan sebesar 2 hingga 3 persen selama dekade berikutnya, dengan satu hingga dua persen berasal dari peningkatan produktivitas.	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
4)	Legislasi Keadilan Tempat Kerja , Singapura telah mengintrodusir legislasi keadilan tempat kerja untuk memastikan bahwa pekerja asing menambah nilai ekonomi.	
5)	Program Pengembangan Keterampilan , Inisiatif seperti SkillsFuture telah diperkuat untuk membantu pekerja meningkatkan dan mengembangkan keterampilan mereka, yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ini termasuk dukungan bagi pekerja yang tidak sengaja kehilangan pekerjaan untuk mengembangkan keterampilan baru dan menemukan pekerjaan.	
6)	Transformasi Industri , Industri pariwisata sedang mengalami transformasi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Hotel dan restoran telah mengalihkan staf, meningkatkan prosedur operasional, dan mencari pemahaman pelanggan untuk mengelola defisit tenaga kerja.	
11.04	T&T capital investment intensity, US\$ per emp	Singapore
1)	Dana Pengembangan Wisata (TDF) , Pada tahun 2015, pemerintah menetapkan dana S\$2 miliar untuk mendukung inisiatif di empat bidang: mengembangkan infrastruktur kritis, mendorong kemampuan pengembangan wisata berbasis di Singapura, mengancam acara ikonik dan besar, dan mengembangkan produk wisata strategis.	
2)	Injeksi Modal , Pada tahun 2024, pemerintah menginjeksikan lebih dari S\$300 juta untuk membantu sektor pariwisata terus mengalami pemulihan pasca-pandemi. Dana ini akan digunakan untuk mengembangkan produk dan pengalaman baru, memperbarui penawaran yang ada, dan meningkatkan keterampilan pekerja.	
3)	Kemampuan Manpower Strategis , Pada tahun 2022, lebih dari setengah miliar dolar AS dibiayai untuk mendukung kemampuan sumber daya manusia strategis dan menggantikan biaya bisnis di sektor pariwisata.	
4)	Atraksi Baru dan Acara , Dana Pengembangan Wisata telah memperkenalkan atraksi baru dan acara gaya hidup, seperti atraksi olahraga dan gaya hidup Trifecta di Somerset, serta memberikan bantuan kepada lebih dari 100 bisnis pariwisata lokal untuk menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.	
DIMENSION D	T&T RESOURCES, 1-7 (best)	China
1)	Meningkatkan Pariwisata Domestik , China telah mempercepat reformasi pasar, sehingga pariwisata domestik berkembang pesat. Pasar pariwisata domestik telah menjadi yang terbesar di dunia, dengan upaya untuk mengembangkan produk pariwisata seperti pariwisata budaya, pariwisata merah, pariwisata kesehatan dan wellness, pariwisata pendidikan, pariwisata olahraga, dan pariwisata pantai.	
2)	Pengembangan Pariwisata Masuk dan Keluar , China telah aktif mengembangkan pariwisata masuk dan keluar. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah mempromosikan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, dengan tujuan untuk membuat China sebagai konsumen internasional pertama dan destinasi paling menarik.	
3)	Pengembangan Infrastruktur , Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi, fasilitas penerimaan, dan kualitas layanan pariwisata secara keseluruhan. Ini termasuk pengembangan platform cerdas untuk meningkatkan distribusi informasi pariwisata dan meningkatkan standar layanan.	
4)	Inisiatif Pariwisata Berkelanjutan , Inisiatif seperti pelatihan B2B untuk agen perjalanan, mempromosikan perjalanan musim tidak sibuk, mengembangkan produk untuk pasar target yang tepat, menggunakan perjalanan sebagai kesempatan pendidikan, mendorong dan	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	menggalang kata-kata mulut, serta membentuk kerjasama dengan organisasi lingkungan bertujuan untuk mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab.	
5)	Menggunakan Influencer Media Sosial , Penyedia perjalanan di AS meningkatkan upaya untuk berinteraksi dan bermitra dengan influencer media sosial di Cina untuk menyoroti penawaran mereka, memanfaatkan platform seperti WeChat dan TikTok untuk mencapai audiens yang lebih luas.	
Pillar 12.	Natural Resources, 1-7 (best)	Australia
1)	Program Exploring for the Future , Geoscience Australia memainkan peran penting dalam mengembangkan data geosains pra-kompetitif untuk mengurangi risiko daerah yang belum dieksplorasi, mendorong investasi eksplorasi, dan memberikan kepastian bagi sektor mineral, energi, dan pertanian. Program ini bertujuan untuk mengungkap potensi sumber daya mineral, energi, dan air tanah di Australia	
2)	Investasi dalam Eksplorasi , Program ini mendukung eksplorasi daerah baru, fokus pada daerah yang saat ini belum dieksplorasi. Ini termasuk pengembangan tambang baru dan infrastruktur untuk mengekstrak sumber daya mineral dan energi	
3)	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam , Selama 30 tahun terakhir, pemerintah Australia secara bertahap telah membiayai program pengelolaan sumber daya alam yang semakin besar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penargetan dan evaluasi investasi dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga sumber daya dapat digunakan secara berkelanjutan dan efektif.	
4)	Trade Boom , Trade Boom 2005–11 dipicu oleh peningkatan signifikan harga ekspor komoditas Australia, terutama bijih besi, batu bara, dan gas alam. Boom ini menyebabkan investasi besar-besaran dalam tambang dan infrastruktur pertambangan, yang menghasilkan peningkatan permintaan tenaga kerja dan upah yang lebih tinggi	
5)	Ketergantungan Ekonomi pada Alam , Penelitian oleh Australian Conservation Foundation menunjukkan bahwa sekitar setengah dari GDP Australia memiliki ketergantungan langsung yang moderat hingga tinggi pada alam. Ini termasuk sektor seperti pertambangan, properti, transportasi, dan logistik, yang semua bergantung pada jasa ekosistem untuk berkembang.	
12.01	Number of World Heritage natural sites	China
1)	Upaya Konservasi , China telah melakukan upaya signifikan untuk melindungi situs warisan alamnya, termasuk relik geologi, gunung, hutan, danau, spesies hewan langka, dan spesies tanaman. Upaya ini tidak hanya melindungi sumber daya alam China tetapi juga memberikan manfaat ekonomi melalui pariwisata, yang telah memperkuat industri terkait seperti catering, retail, dan transportasi.	
2)	Kemampuan Publik , Pemerintah China telah meningkatkan kesadaran publik tentang konservasi situs warisan budaya dan alam. Ini termasuk merayakan Hari Warisan Budaya dan Alam, yang sebelumnya dikenal sebagai Hari Warisan Budaya pada tahun 2017, untuk membangkitkan semangat publik dan mendorong kontribusi terhadap upaya konservasi. Kerjasama Internasional , China telah membangun hubungan persahabatan dengan 12 situs warisan dunia di luar negeri dan telah berpartisipasi dalam program pertukaran lintas perbatasan tentang perlindungan warisan dunia. Kerjasama internasional ini telah memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam mengelola dan melindungi situs warisan dunia.	
12.02	Total known species	Indonesia

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
<p>Kebijakan pengelolaan Total Known Species di Indonesia berfokus pada perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, yang mencakup spesies flora dan fauna yang telah teridentifikasi. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, meminimalkan risiko kepunahan spesies, dan mendukung keseimbangan alam. Sebagai salah satu negara megadiversity dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya global untuk pelestarian lingkungan.</p> <p>Kebijakan Utama Pengelolaan Total Known Species di Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Spesies dan Habitat Kritis 2. Penetapan Kawasan Konservasi 3. Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 4. Kebijakan Restorasi dan Rehabilitasi Habitat 5. Pengelolaan Spesies Dilindungi 6. Kerjasama Internasional dan Regional 		
12.03	Total protected areas, km2	Australia
<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Taman Nasional, Pemerintah Australia mendirikan Sistem Taman Nasional pada tahun 1996 untuk mengkoordinasikan jaringan area yang dilindungi. Sistem ini bertujuan untuk melindungi contoh yang komprehensif, cukup, dan representatif dari keanekaragaman hayati Australia. 2) Taman Laut, Pemerintah telah memperluas taman laut, terutama di perairan negara bagian seperti sekitar Kepulauan Cocos dan Kepulauan Natal. 3) Organisasi Nirlaba (NGO), NGO seperti Australian Wildlife Conservancy dan Bush Heritage Australia telah memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan area yang dilindungi. Organisasi-organisasi ini melindungi atau mengelola area tanah yang besar, dengan Australian Wildlife Conservancy mengelola sekitar 13 juta hektar dan Bush Heritage Australia mengelola lebih dari 11 juta hektar. 4) Area Perlindungan Masyarakat Adat, Kerjasama antara Pemilik Tradisional dan pemerintah federal telah mengarah pada pembentukan 81 Area Perlindungan Masyarakat Adat, yang mencakup 85 juta hektar, yaitu 50% dari area tanah yang dilindungi di Australia. 5) Konservasi Tanah Swasta, Pengikatan konservasi pada sertifikat tanah swasta juga telah digunakan untuk melindungi area tambahan. Organisasi seperti Trust for Nature (Victoria) dan Tasmanian Land Conservancy telah memfasilitasi upaya-upaya ini. 6) Inisiatif Negara Bagian dan Wilayah, Setiap negara bagian dan wilayah memiliki mekanisme sendiri untuk menetapkan area yang dilindungi di atas tanah publik dan swasta, sehingga memastikan pengaturan pemerintahan yang beragam dan memenuhi kebutuhan manajemen yang unik untuk keanekaragaman hayati dan manusia. 		
12.04	Natural tourism Digital Demand, 0-100 (best)	Japan
<p>a. Proyek Transformasi Digital</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aplikasi Seluler: Membuat aplikasi seluler untuk berbagai jenis transportasi, tempat wisata baru, dan pariwisata berjalan kaki untuk meningkatkan layanan regional, ekonomi, dan kontribusi lingkungan. 		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>2) Sistem Pendukung Pariwisata Berbasis Web: Mengintegrasikan Web-GIS, sistem rekomendasi, dan jaringan sosial untuk mempromosikan perjalanan yang terdistribusi dan mengelola kongesti pariwisata.</p> <p>3) Aplikasi Digital: JTB Corp telah mengembangkan aplikasi seperti Kotozna, yang menyediakan komunikasi bahasa, layanan penginapan, dan layanan wisata lainnya untuk memfasilitasi komunikasi antara wisatawan dan pengelola destinasi.</p> <p>b. Inisiatif Pariwisata Berkelanjutan</p> <p>1) Manajemen Overtourism: Kota seperti Kyoto telah menerima pariwisata berkelanjutan dengan memprediksi kongesti lalu lintas dan beradaptasi dengan "bentuk baru perjalanan" dengan tur virtual dan manajemen kebersihan maju.</p> <p>2) Konservasi Lingkungan: Mengenalkan pajak masuk bagi pengunjung untuk mengurangi kongesti dan melindungi sumber daya lingkungan, seperti pulau Miyajima.</p> <p>3) Praktik Ramah Lingkungan: Mempromosikan pertanian organik dan praktik pertanian berkelanjutan di wilayah seperti Ogawa, yang telah menyiapkan 19% lahan pertaniannya untuk pertanian organik.</p> <p>c. Promosi dan Dukungan Digital</p> <p>1) Dukungan Bahasa Multibahasa: Mengembangkan sistem informasi berbahasa multibahasa yang komprehensif di bandara, transportasi umum, dan atraksi wisata untuk mendukung wisatawan asing.</p> <p>2) Jasa Pemandu Wisata: Menghapus persyaratan pemandu wisata berlisensi, memungkinkan individu tanpa sertifikasi formal untuk menyediakan jasa pemandu dan penerjemah dengan biaya.</p> <p>3) Platform Informasi Pariwisata: JTB BOKEN berfungsi sebagai platform informasi untuk aktivitas pariwisata lokal, menampilkan berbagai aktivitas pariwisata dan memungkinkan wisatawan untuk memesan dan membayar dengan mudah.</p>	
12.05	Number of terrestrial and freshwater ecoregions	China
	<p>1) Revegetasi dan Aforestasi, China telah melaksanakan program revegetasi dan aforestasi secara luas, yang telah menyebabkan restorasi area tanah yang besar. Hal ini telah menyebabkan pembentukan ecoregion baru, terutama dalam ekosistem hutan, yang telah menjadi jenis ekosistem yang paling sering dipelajari sejak tahun 2000.</p> <p>2) Konservasi Tanah dan Air, Proyek-proyek di daerah dataran loess telah berfokus pada konservasi tanah dan air, yang telah berkontribusi pada pembentukan ecoregion baru. Upaya ini sangat penting dalam menangani isu-isu lingkungan seperti penurunan kemampuan kandungan sumber daya ekosistem.</p> <p>3) Proyek Restorasi Ekologi, Pemerintah China telah meluncurkan beberapa proyek nasional-level restorasi ekologi, termasuk Master Plan for National Key Ecosystem Protection and Restoration Major Projects (2021–2035). Inisiatif ini bertujuan untuk memulihkan dan melindungi berbagai jenis ekosistem, termasuk sungai, rawa, hutan, padang rumput, dan ladang.</p> <p>4) Konservasi Biodiversitas, Ada penekanan yang tumbuh pada konservasi biodiversitas, yang sangat penting untuk pembentukan dan pemeliharaan ecoregion yang sehat.</p>	
Pillar 13.	Cultural Resources, 1-7 (best)	Japan

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Sistem Perlindungan Warisan Budaya, Jepang telah secara signifikan memperluas sistem perlindungan warisan budaya, termasuk tindakan yang lebih beragam untuk menyesuaikan perubahan gaya hidup dan evolusi budaya. 2) Diplomasi Budaya, Jepang telah aktif terlibat dalam diplomasi budaya, yang termasuk reformasi institusional dan strategi diplomatik. Pendekatan ini telah membantu membangun kembali citra Jepang setelah Perang Dunia II dengan mempromosikan aspek budayanya, seperti manga dan anime, yang telah menjadi sangat menarik secara global. 3) Kerja Sama Budaya Internasional, Jepang telah berpartisipasi dalam berbagai program perlindungan warisan budaya internasional, bekerja sama dengan negara-negara seperti Kazakhstan, Bhutan, Irak, Kamboja, dan lain-lain. Proyek-proyek ini bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya, meningkatkan reputasi Jepang dalam perlindungan warisan budaya dan kekuatan lembut. 4) Bantuan Budaya, Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan budaya untuk membantu negara-negara berkembang dalam mempromosikan aktivitas budaya dan pendidikan. Bantuan ini telah diberikan kepada negara-negara seperti Tiongkok, Ceko, Slowakia, Hungaria, Bulgaria, Polandia, dan Rumania, di antara lainnya. 5) Promosi Olahraga Tradisional, Jepang juga telah terlibat dalam melestarikan dan mempromosikan olahraga tradisional di negara-negara berkembang, berkontribusi pada pertukaran budaya dan pemahaman antarnegara. 6) Pembentukan Yayasan Jepang, Yayasan Jepang didirikan pada tahun 1972 untuk melakukan program pertukaran budaya internasional yang komprehensif. Organisasi ini telah berperan penting dalam mempromosikan pertukaran budaya internasional yang luas dan kerja sama. 	
13.01	Number of World Heritage cultural sites	China
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proyek Penelitian Nasional, China telah melaksanakan proyek penelitian nasional untuk menelusuri asal-usul peradaban Cina, yang telah membantu dalam mengidentifikasi dan melestarikan situs warisan budaya. 2) Renovasi Skala Besar, Negara ini telah melaksanakan renovasi skala besar pada beberapa situs warisan budaya dunia di Beijing, termasuk Makam Ming, Tembok Besar, dan Kota Terlarang, semua yang selesai sebelum 2008. 3) Sensus Warisan Budaya Intangible, Dari tahun 2005 hingga 2009, China melakukan sensus nasional warisan budaya intangible, menghitung hampir 870.000 sumber warisan budaya intangible, dengan beberapa di antaranya terdaftar dalam daftar Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity UNESCO. 4) Fokus Peningkatan pada Pelestarian, Selama dekade terakhir, pemerintah lokal Cina telah mencantumkan pelestarian warisan budaya sebagai elemen penting dalam sistem evaluasi kinerja mereka, sehingga meningkatkan jumlah unit perlindungan situs warisan budaya tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. 5) Teknologi Baru, Cina telah mencapai kemajuan teknologi signifikan dalam perlindungan situs warisan budaya, termasuk arkeologi bawah air, yang telah membantu dalam penemuan dan pelestarian situs warisan budaya. 	
13.02	Oral and intangible cultural heritage	China

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang yang Berlaku, China telah mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk melindungi warisan budaya intangible, termasuk Undang-Undang tentang Warisan Budaya Intangible (ICH Law) dan undang-undang terkait hak cipta. 2) Konvensi UNESCO, Anggota ini telah memfasilitasi penggabungan berbagai praktik budaya Cina ke dalam Daftar Warisan Budaya Intangible UNESCO, seperti Tai Chi, Upacara Wangchuan, dan akupunktur. 3) Sensus Nasional dan Inventarisasi, Dari tahun 2005 hingga 2009, China melakukan sensus nasional tentang warisan budaya intangible, mengidentifikasi sekitar 870.000 sumber warisan budaya intangible. Inventarisasi ini komprehensif telah membantu memahami kedalaman dan luasnya warisan budaya Cina. 4) Langkah-Langkah Pelestarian, Ketika elemen-elemen tertentu ditetapkan ke dalam Daftar Warisan Budaya Intangible yang Memerlukan Perlindungan Darurat UNESCO, Cina berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah pelestarian untuk memperkuat viabilitas warisan budaya tersebut. 5) Promosi dan Pengembangan, Upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan nilai budaya warisan budaya intangible kepada masyarakat umum, mempromosikan pariwisata budaya, dan mengintegrasikan tradisi suku bangsa ke dalam program pengembangan ekonomi. 6) Perlindungan Hak Cipta, Pemerintah Cina telah menekankan pentingnya hak cipta dalam melindungi warisan budaya intangible. Ini termasuk menggunakan hak cipta merek dagang, paten, dan indikasi geografis untuk memperkuat hak cipta untuk warisan budaya intangible. 	
13.03	Number of large sports stadiums	China
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Investasi Pemerintah, Pemerintah China telah menginvestasikan banyak dalam membangun fasilitas olahraga. Dalam periode tiga tahun yang berakhir pada tahun 2020, jumlah fasilitas olahraga nasional meningkat 89,7%, dan luas area fasilitas olahraga meningkat 33,4%. 2) Diplomasi Stadion, China aktif terlibat dalam membangun dan membiayai konstruksi stadion di negara-negara lain, terutama di Afrika. Praktik ini, dikenal sebagai "diplomasi stadion," melibatkan membangun stadion sebagai bentuk subsidi untuk mendapatkan pengaruh politik dan kebaikan hati. 3) Perencanaan Sentralisasi, Badan Administrasi Olahraga (GAS) mengawasi pengembangan fasilitas olahraga dan tim nasional, memastikan pendekatan sentralisasi dalam membangun dan mengelola infrastruktur olahraga. 4) Endorsement Komersial, China juga menerima pendanaan tambahan dari lotere olahraga nasional dan endorsement komersial, yang mendukung konstruksi dan perawatan fasilitas olahraga. 	
13.04	Cultural and entertainment tourism Digital Demand, 0-100 (best)	Japan
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Promosi Pariwisata Budaya, Pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang baru pada Mei 2020 yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata yang memperdalam pemahaman budaya negara. Ini termasuk mendorong fasilitas seperti museum untuk memberikan lebih banyak informasi tentang latar belakang budaya dan sejarah pameran mereka, serta mempromosikan pelestarian dan revitalisasi tradisi kuno di daerah-daerah terpencil. 2) Meningkatkan Partisipasi Lokal, Konsep "jibungoto" (自分事), yang berarti "sesuatu yang mengenai saya," bertujuan untuk menciptakan jaringan standar pembawa lokal yang 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
<p>mempromosikan budaya daerah mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan ikatan terhadap budaya lokal di kalangan warga, sehingga meningkatkan pengalaman pariwisata budaya secara keseluruhan.</p> <p>3) Omotenashi Digital, Penerapan teknologi digital untuk menghidupkan kembali budaya tradisional Jepang "Omotenashi," yang menekankan kebiasaan berhospitalitas, telah menjadi fokus utama. Ini termasuk memperbaiki tindakan informatif, seperti berbagi ulasan dan skor dari orang lokal, serta menggunakan perangkat mobile untuk mengenali tanda-tanda toko.</p> <p>4) Desain Pariwisata Cerdas, Integrasi teknologi untuk membantu interaksi dan meningkatkan kualitas layanan telah menjadi strategi utama. Ini termasuk menggunakan bahasa tubuh untuk meningkatkan interaksi dengan staf lokal dan memperbaiki antarmuka untuk memenuhi hasil pencarian web dengan tanda-tanda toko.</p>		
13.05	Number of UNESCO Creative Cities	China
<p>1) Pemilihan Kota, China telah memilih dan mendesain beberapa kota untuk bergabung dalam UCCN. Misalnya, Shanghai ditetapkan sebagai Kota Desain pada tahun 2010, dan Chaozhou dan Chongqing dipilih sebagai Kota Kreatif Masakan dan Desain, masing-masing pada tahun 2023.</p> <p>2) Promosi dan Koordinasi, Kantor Promosi Kota Kreatif UNESCO (Shanghai) didirikan pada tahun 2010 untuk mengkoordinasikan pengembangan industri desain kreatif di Shanghai dan mempromosikan status kota tersebut sebagai Kota Desain.</p> <p>3) Kerja Sama Internasional, Shanghai menjalin kerja sama erat dengan kota-kota kreatif lainnya, seperti Helsinki, Finlandia, dalam bidang desain kreatif, meningkatkan profil internasional dan berkontribusi pada pengembangan urban yang inovatif bagi kota-kota kreatif di China.</p> <p>4) Dukungan Inisiatif, Shanghai meluncurkan inisiatif seperti "City of Design-Creative 100" untuk mempromosikan merek, talenta, dan produk kreatif, mendukung konstruksi Shanghai sebagai Kota Desain dan Pusat Inovasi Sains dan Teknologi.</p> <p>5) Pengembangan dan Pemulihan Kota, Shanghai telah melaksanakan proyek pemulihan kota yang signifikan, seperti pembangunan Menara Shanghai dan regenerasi ruang publik, yang telah berkontribusi pada pengembangan kota tersebut sebagai kota kreatif.</p>		
Pillar 14.	Non-Leisure Resources, 1-7 (best)	Japan
<p>Jepang meningkatkan Sumber Daya Non-Rekreasi dengan fokus pada jumlah perusahaan besar dan universitas terkemuka. Institusi-institusi ini berkontribusi pada keseluruhan daya tarik negara sebagai destinasi wisata, meningkatkan kategori sumber daya non-rekreasi. Kebijakan pengembangan Non-Leisure Resources di Jepang berfokus pada optimalisasi sumber daya yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata rekreasi, namun memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Kebijakan pengembangan non-leisure resources ini berperan penting dalam mendiversifikasi produk pariwisata Jepang dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian negara. Upaya tersebut memungkinkan Jepang untuk menarik segmen wisatawan yang lebih luas dan meningkatkan daya saingnya di sektor pariwisata global.</p>		
14.01	Presence of Forbes Global 2000 HQ locations	Japan

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Kantor Pusat Forbes Asia, Pada tahun 1999, Forbes Asia diluncurkan dengan Will Adamopoulos sebagai kepala, yang merupakan langkah penting dalam memperluas kehadiran Forbes di wilayah tersebut. 2) Luncuran Forbes Asia, Edisi pertama Forbes Asia diterbitkan pada tahun 2005, yang lebih memperkuat kehadiran Forbes di wilayah tersebut. Majalah ini menjadi publikasi utama untuk berita bisnis dan keuangan di Asia. 3) Konferensi CEO Global Forbes, Konferensi CEO Global Forbes pertama diadakan di Singapura pada tahun 2001, yang kemudian menjadi acara tahunan. Konferensi ini sangat sukses dan membantu mendirikan Forbes sebagai pemain utama di komunitas bisnis Asia. 4) Luncuran Daftar Kaya Asia, Terinspirasi oleh daftar 400 orang terkaya di Amerika Serikat, Forbes meluncurkan seri Daftar Kaya Asia pada tahun 2004. Inisiatif ini menyoroti kesuksesan pengusaha dan bisnis Asia, yang berkontribusi pada peningkatan pengaruh Forbes di wilayah tersebut. 5) Eksansi Majalah Terlisensi, Forbes memperluas jangkauannya dengan meluncurkan majalah terlisensi di berbagai negara Asia, termasuk Cina, Jepang, Korea, Indonesia, India, Mongolia, Thailand, dan Vietnam. 	
14.02	Presence of global cities	China
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Reformasi Ekonomi, Peluang kerja yang dibawa oleh reformasi ekonomi yang diluncurkan pada akhir tahun 1970-an menyebabkan lonjakan besar-besaran orang yang pindah dari daerah pedesaan ke kota, sehingga meningkatkan populasi kota secara signifikan. Pada tahun 2020, lebih dari 61,4% penduduk Cina tinggal di kota, membuat urbanisasi menjadi pengemban utama pengembangan kota-kota global 2) Pengembangan Infrastruktur, Inisiatif Jalur Sutra (Belt and Road) telah menghubungkan kota-kota pedalaman ke rute perdagangan antar-kontinen, meningkatkan pentingnya strategis dan pertumbuhan ekonomi mereka. Inisiatif ini juga telah menyebabkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, seperti Dana Jalur Sutra, yang bertujuan untuk mengembangkan kota-kota dan negara-negara di sepanjang jalur BR. 3) Partisipasi Internasional, Cina telah berpartisipasi aktif dengan komunitas internasional melalui inisiatif seperti Forum Jalur Sutra, yang telah menarik dukungan dan investasi internasional yang signifikan. Hal ini telah meningkatkan pengaruh global kota-kota Cina. 4) Pertumbuhan Ekonomi dan Properti, Inisiatif BR dan strategi Go-West telah mendorong pertumbuhan ekonomi di kota-kota barat Cina, seperti Chengdu, Chongqing, Wuhan, dan Guiyang. Pertumbuhan ini telah meningkatkan permintaan properti komersial dan residensial, menarik perusahaan properti terkemuka dan meningkatkan pentingnya strategis dan ekonomi kota-kota tersebut. 5) Jalan Raya Global Hybrid, Cina telah mengadopsi pendekatan hybrid untuk pembentukan kota global, mengintegrasikan pengembangan kota tradisional dengan kemajuan ekonomi dan teknologi modern. Pendekatan ini telah terlihat khususnya di wilayah seperti Delta Sungai Yangtze, yang telah menjadi pusat penting aktivitas ekonomi global. 	
14.03	Number of top universities	China
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Investasi Pemerintah, Pemerintah Cina telah menginvestasikan banyak dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Ini termasuk dana untuk pengembangan penelitian, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan penelitian universitas Cina. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
2)	Reformasi dan Inovasi , Ada komitmen kuat untuk membuat institusi-institusi Cina global dan mereformasi pendidikan untuk fokus pada inovasi dan penelitian. Hal ini telah menyebabkan peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian.	
3)	Kolaborasi Internasional , Universitas Cina diperingan untuk berpartisipasi dalam kolaborasi internasional, yang telah membantu mereka mendapatkan pengakuan global. Ini termasuk kerjasama dengan institusi internasional dan partisipasi dalam jaringan penelitian global.	
4)	Penelitian Terbuka , Cina telah berjalan maju dalam penelitian terbuka, yang telah memperluas ruang publikasi jurnal akademik yang termasuk dalam peringkat. Hal ini telah menyebabkan peningkatan publikasi dan sitasi, yang berkontribusi pada peringkat yang lebih tinggi.	
5)	Kualitas Pengajaran dan Penelitian , Universitas Cina telah meningkatkan skor mereka dalam pilar kualitas pengajaran dan penelitian, termasuk metrik seperti kekuatan penelitian, keistimewaan penelitian, dan pengaruh penelitian.	
14.04	Non-leisure tourism Digital Demand, 0-100 (best)	China
1)	Integrasi Teknologi Digital , Integrasi teknologi digital telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan wisata Cina. Ini termasuk penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan, mengorganisasi pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional.	
2)	Kolaborasi Bersektor , China telah mempromosikan kolaborasi bersektor dalam industri pariwisata, yang mengarah pada munculnya model kolaborasi baru dan bentuk wisata yang unik.	
3)	Pengembangan Sumber Daya Manusia , Ada peningkatan fokus pada pelatihan sumber daya manusia dan pelatihan di tempat kerja untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dari wisata digital.	
4)	Personalisasi , Personalisasi mulai mendapatkan momentum di kalangan wisatawan Cina, dengan alat digital yang memungkinkan pengalaman perjalanan yang lebih terpersonalisasi.	
DIMENSION E	T&T SUSTAINABILITY, 1-7 (best)	Australia
1)	Rangka Kerja dan Kit Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan , Dikembangkan oleh Pemerintah Australia dan pemerintah negara bagian dan wilayah, rangka kerja dan kit ini bertujuan untuk menyatukan dan menginspirasi tindakan pada pariwisata berkelanjutan.	
2)	Program Pengurangan Emisi Pariwisata , Diluncurkan oleh Menteri Pariwisata Don Farrell dan Australian Tourism Industry Council (ATIC), program ini bertujuan untuk memberdayakan bisnis pariwisata untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Program ini merupakan bagian dari Quality Tourism Framework (QTF) dan termasuk program pelatihan online dan akreditasi.	
3)	Strategi THRIVE 2030 , Strategi ini dipimpin oleh industri dan didukung oleh pemerintah untuk ekonomi pengunjung Australia. Strategi ini mengakui pentingnya keberlanjutan untuk pertumbuhan dan ketahanan jangka panjang.	
4)	Permintaan Konsumen untuk Keberlanjutan , Penelitian Tourism Australia menunjukkan bahwa lebih dari 75% calon wisatawan berkomitmen untuk keberlanjutan, dengan minat signifikan terhadap praktik seperti perlakuan hewan liar etis, pelestarian warisan budaya, mendukung bisnis lokal, dan mengurangi emisi karbon.	
5)	Pariwisata Adat , Tourism Australia telah menyoroti pentingnya pariwisata adat, yang mempromosikan dan melestarikan budaya-budaya adat Australia. Ini termasuk mendukung	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	bisnis lokal dan komunitas serta memberikan kesempatan untuk pertukaran budaya dan pemahaman.	
Pillar 15.	Environmental Sustainability, 1-7 (best)	New Zealand
<ol style="list-style-type: none"> 1) Target Net Zero Emisi, New Zealand berencana mencapai net zero emisi untuk semua gas rumah kaca kecuali metana biogenik oleh tahun 2050. Ini termasuk penurunan 24% hingga 47% emisi metana biogenik dibandingkan dengan tahun 2017 oleh tahun 2050, dengan penurunan 10% oleh tahun 2030. 2) Program Reformasi Tiga Air, Pemerintah sedang mereformasi manajemen air minum, air hujan, dan limbah. Investasi infrastruktur nasional ini diperkirakan berkisar antara US\$75 miliar hingga US\$100 miliar dan bertujuan menyediakan air minum yang aman, air hujan yang lebih baik, dan limbah yang lebih efisien serta berkelanjutan untuk generasi mendatang. 3) Kendaraan Listrik, Pemerintah berencana membuat armada kendaraan emisi nol oleh tahun 2025/26. Ini sejalan dengan tujuan menjadi ekonomi net zero emisi oleh tahun 2050. New Zealand sangat berpotensi untuk adopsi kendaraan listrik karena persentase tinggi sumber energi terbarukan, tetapi perlu meningkatkan jaringan pengisian baterai nasional. 4) Infrastruktur Air, New Zealand memiliki kebutuhan infrastruktur air yang signifikan untuk menghadapi bencana alam, perubahan iklim, dan intensifikasi tanah. Ini termasuk mengupgrade pabrik pengolahan limbah, yang diharapkan akan sangat mahal dan signifikan karena harapan komunitas dan budaya yang meningkat. 5) Penurunan Emisi Pertanian, Ada kebutuhan untuk menurunkan emisi pertanian sambil menjaga produksi makanan dan serat tinggi. Ini memerlukan perubahan praktik di lapangan, penggunaan lahan, dan kemajuan dalam penelitian dan teknologi. 6) Tenaga Surya dan Angin, New Zealand diperingatkan untuk berinvestasi dalam tenaga surya dan angin untuk mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. 7) Praktik Bisnis yang Berkelanjutan, Banyak perusahaan di New Zealand memprioritaskan keberlanjutan, dengan inisiatif seperti mengurangi pengemasan, menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali, dan menerapkan program daur ulang. Contohnya, Kōkako Organic Coffee Roasters di Auckland telah mengurangi limbah dengan mengurangi pengemasan dan menggunakan ember yang dapat digunakan kembali untuk pengiriman biji kopi. 		
subpillar	T&T Energy Sustainability, 1-7 (best)	New Zealand
<ol style="list-style-type: none"> 1) Komitmen Keberlanjutan Pariwisata Selandia Baru (TSC), Inisiatif ini bertujuan untuk melihat setiap bisnis pariwisata di Selandia Baru berkomitmen pada keberlanjutan oleh tahun 2025. Fokusnya pada empat elemen keberlanjutan pariwisata: Ekonomi, Pengunjung, Masyarakat, dan Lingkungan. 2) Tantangan Karbon, Diluncurkan pada tahun 2021, Tantangan Karbon adalah fokus utama untuk mengurangi dampak karbon dari sektor pengunjung. 3) Qualmark, Dimiliki oleh Selandia Baru Pariwisata, Qualmark menilai dan mengakui bisnis yang menyediakan pengalaman berkelanjutan. Mereka memberikan penghargaan perak, perunggu, atau emas berdasarkan kinerja terhadap Kriteria Bisnis Pariwisata Berkelanjutan, mempromosikan keberlanjutan di seluruh industri. 4) Kerjasama dan Inisiatif, Selandia Baru Pariwisata telah bermitra dengan organisasi seperti Trees That Count untuk menanam pohon-pohon asli dan mendukung upaya konservasi. 		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<p>Mereka juga mendukung inisiatif Tiaki – Care for New Zealand yang mengajak pengunjung untuk menjaga Selandia Baru selama perjalanan mereka.</p> <p>5) Transportasi Berkelanjutan, Banyak tur di Selandia Baru menawarkan opsi transportasi ramah lingkungan seperti tur yang menggunakan energi listrik dan petualangan bersepeda.</p> <p>6) Akomodasi Berkelanjutan, Fokus pada akomodasi yang ramah lingkungan memastikan bahwa wisatawan dapat memilih penginapan yang memprioritaskan efisiensi energi dan pengurangan limbah.</p> <p>7) Proyek Konservasi Hutan Hujan, Wisatawan dapat berpartisipasi dalam proyek konservasi tangan-ke-tangan seperti penanaman pohon dan pengawasan satwa liar, yang berkontribusi langsung pada pelestarian flora dan fauna asli.</p> <p>8) Makanan Lokal dan Pengurangan Limbah, Tur di Selandia Baru sering menawarkan makanan lokal yang diperoleh dengan bertanggung jawab dan mengajak pengunjung untuk mengurangi limbah.</p>	
15.01	T&T GHG intensity, Kg of CO2e per USD of T&T GDP	Japan
	<p>1) Peningkatan Pengukuran dan Pengungkapan, Industri pariwisata Jepang telah meningkatkan pengukuran dan pengungkapan emisi gas rumah kaca dari pariwisata, menyesuaikan dengan Kontribusi Terukur Nasional (NDC) Perjanjian Paris.</p> <p>2) Peningkatan Fokus pada Transportasi, Industri pariwisata di Jepang telah melihat peningkatan emisi dari transportasi, terutama dari emisi langsung dari pembakaran bensin dalam mobil penumpang, pesawat, dan pembelian bensin.</p> <p>3) Promosi Praktik yang Berkelanjutan, Upaya telah dilakukan untuk mempromosikan praktik yang berkelanjutan dalam industri pariwisata, seperti mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan penggunaan sumber daya energi terbarukan.</p> <p>4) Penggunaan Analisis Siklus Hidup (LCA), Industri pariwisata Jepang telah mengintegrasikan analisis siklus hidup (LCA) untuk mengevaluasi jejak karbon aktivitas pariwisata.</p>	
15.02	T&T energy intensity, MJ of energy per Real USD of T&T GDP	Japan
	<p>Jepang telah menyumbang JPY 90,1 juta untuk meningkatkan promosi efisiensi energi dan kegiatan terkait rendah karbon di wilayah APEC. Dana ini mendukung kegiatan di bawah pengawasan Kelompok Kerja Energi APEC, dengan tujuan untuk memperkuat upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan mempromosikan transisi energi melalui berbagai jalur praktis.</p>	
15.03	T&T use of low-carbon energy, % of total	New Zealand
	<p>1) Rencana Dekarbonisasi Pariwisata, Rencana Dekarbonisasi Pariwisata bertujuan untuk mengurangi emisi dengan mengusulkan target pengurangan emisi, mengidentifikasi aksi yang diperlukan, dan menghitung kebutuhan energi untuk sistem pariwisata net-zero karbon.</p> <p>2) Elektrifikasi Kapal Wisata, Destinasi Queenstown, Lake Wānaka Tourism, dan Dewan Daerah Queenstown Lakes bekerja sama untuk membuat ekonomi pariwisata mereka net-zero karbon pada tahun 2030. Bagian dari upaya ini termasuk mengalihkan kapal wisata ke listrik untuk mengurangi emisi.</p> <p>3) Mengurangi Sampah, Operator pariwisata seperti Adventure South NZ menerapkan prosedur daur ulang dan kompos yang ketat, donasi sepeda dan helm lama ke agen</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	dukungan masyarakat, dan mengorganisir penebangan pohon tahunan dan pembersihan sampah untuk mengurangi dampak lingkungan.	
4)	Investasi dalam Teknologi Rendah Karbon , Air New Zealand bekerja sama dengan mitra untuk menciptakan penerbangan tanpa emisi, berencana untuk melakukan penerbangan demonstrasi menggunakan listrik, hybrid, atau hidrogen hijau pada tahun 2026 dan menggantikan armada domestik dengan tenaga yang berkelanjutan pada tahun 2030.	
15.04	Renewable energy regulation, 0-100 (best)	India
1)	Target Energi Terbarukan , India telah menetapkan target yang ambisius, termasuk mencapai 500 GW kapasitas energi berbasis non-fosil oleh tahun 2030 dan mencapai net-zero emisi oleh tahun 2070. Target ini merupakan bagian dari "Panchamrit" yang diumumkan pada konferensi iklim COP26.	
2)	Inisiatif Kebijakan , Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempromosikan energi terbarukan, seperti program insentif terkait produksi (PLI) untuk industri manufaktur PV surya, baterai kimia canggih, dan produksi hidrogen hijau.	
3)	Bea Cukai , Pemerintah telah menetapkan bea cukai dasar pada sel surya fotovoltaik dan modul surya untuk mendorong industri manufaktur domestik. Misalnya, bea cukai 25% pada sel surya dan bea cukai 40% pada modul surya diberlakukan pada April 2022.	
4)	Misi Hidrogen Hijau , India meluncurkan Misi Hidrogen Hijau dengan anggaran sekitar \$2,4 miliar untuk menjadikan India sebagai pusat global produksi dan penggunaan hidrogen hijau.	
5)	Kota dan Taman Surya , Pemerintah telah menyetujui pembangunan 57 taman surya dengan kapasitas total 39,28 GW dan mendukung pengembangan kota surya.	
6)	Kebijakan Hibrida Angin-Surya , Kebijakan nasional diumumkan pada tahun 2018 untuk mempromosikan sistem hibrida grid terhubung angin-surya PV, dengan tujuan untuk menggunakan efisien infrastruktur transmisi dan mengatasi tantangan intermitensi.	
7)	Dukungan Investasi dan Keuangan , Pemerintah telah meningkatkan subsidi untuk energi terbarukan, yang mencapai INR 14,843 crore (USD 1,8 miliar) pada tahun fiskal 2023, meningkat 8% dari tahun fiskal 2022.	
15.05	Energy efficiency regulation, 0-100 (best)	Korea, Rep.
1)	Undang-Undang Penggunaan Energi yang Rasional (1979) , Undang-undang ini ditetapkan untuk mengelola penggunaan energi dan mendorong efisiensi. Diikuti oleh enam rencana lima-tahun untuk Mengoptimalkan Penggunaan Energi, yang terus berkembang dan meningkatkan kebijakan efisiensi energi selama bertahun-tahun.	
2)	Target Efisiensi Energi , Pemerintah telah menetapkan target efisiensi energi secara sukarela untuk industri, mendorong investasi swasta dan inovasi melalui insentif dan instrumen pasar.	
3)	Koleksi dan Pengawasan Data , Korea Selatan telah mengembangkan sistem pengumpulan data yang kuat, termasuk Sistem Informasi Statistik Energi Korea (KESIS) dan Sistem Informasi Total Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (NETIS), untuk memantau dan menganalisis konsumsi energi dan emisi.	
4)	Campuran Kebijakan , Campuran kebijakan ini mencakup kombinasi pendekatan wajib, seperti standar dan program label efisiensi energi, dan pendekatan pasar, seperti skema perdagangan emisi (ETS).	
5)	Penggunaan Hidrogen dan Ammonia Co-firing , Pemerintah berencana untuk mengkomersialkan setidaknya 30% penggunaan hidrogen co-firing pada tahun 2035 dan	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>100% pada tahun 2040, serta 20% penggunaan amonia co-firing pada tahun 2030, sebagai bagian dari strategi penutupan batu bara.</p> <p>6) Promosi Energi Terbarukan, Skema Portofolio Energi Terbarukan (RPS) memerlukan perusahaan listrik utama untuk meningkatkan bagian energi terbarukan dalam campuran listrik, dengan target 10% pada tahun 2023 dan 25% pada tahun 2034.</p>	
subpillar	Pollution and Environmental Conditions, 1-7 (best)	New Zealand
	<p>Langkah-Langkah yang Ditempuh untuk Menangani Polusi dan Masalah Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurangi Konsumsi Energi: New Zealand telah mempromosikan penggunaan bahan daur ulang yang menggunakan energi lebih sedikit. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi jejak karbon negara dan mengurangi dampak lingkungan. 2) Pengawasan Kualitas Udara: Kementerian Lingkungan, bersama dengan pemerintah daerah dan otoritas unitari, mengawasi kualitas udara untuk mengetahui tingkat polutan seperti partikulat halus (PM) dan nitrogen dioksida (NO₂). 3) Penurunan Emisi Kendaraan: Pemerintah telah memperkenalkan standar emisi ekshalan kendaraan yang lebih ketat untuk mengurangi emisi berbahaya. Ini termasuk menerapkan standar Euro 6 dan Euro VI yang secara signifikan mengurangi emisi nitrogen oksida, partikulat, dan polutan lainnya. 4) Mendorong Pemanasan Bersih: Inisiatif untuk mengurangi pembakaran luar ruangan dan mendorong metode pemanasan bersih, seperti pembakaran kayu tanpa asap, telah diterapkan untuk mengurangi polusi udara. <p>Area-Area di Mana Upaya Mereka Menyebabkan Peningkatan Polusi dan Kondisi Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan Iklim: Iklim New Zealand sedang memanas, yang diharapkan akan menyebabkan lebih sering dan intensif peristiwa cuaca ekstrem seperti panas, banjir, dan kebakaran hutan. 2) Emisi Transportasi: Meskipun upaya untuk mengurangi emisi, transportasi masih menjadi sumber utama polusi udara. Kendaraan diesel, khususnya, berkontribusi sebagian besar emisi berbahaya, yang meningkatkan dampak kesehatan dan biaya sosial. 3) Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi: Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi telah menyebabkan tingkat polusi udara yang lebih tinggi, terutama di area dengan konsentrasi kendaraan bermotor dan aktivitas industri yang tinggi. 	
15.06	Particulate matter (2.5) concentration	New Zealand
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan dan Pengelolaan, Dewan regional dan unitary telah aktif mengawasi dan mengelola kualitas udara. Hal ini termasuk menrack tingkat PM dan menerapkan strategi untuk mengurangi polusi. 2) Kampanye Kesadaran Publik, Kampanye kesadaran publik telah dilakukan untuk memberitahu orang-orang tentang dampak pembakaran kayu dan batu bara untuk pemanasan rumah, mendorong penggunaan alternatif yang lebih bersih seperti pompa panas. 3) Inisiatif Transportasi, Inisiatif seperti meningkatkan transportasi aktif, pilihan transportasi umum, standar emisi kendaraan yang lebih bersih, dan mendorong penggunaan kendaraan tanpa emisi telah dilakukan untuk mengurangi nitrogen dioksida (NO₂) dan polutan lainnya. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
4)	Revisi Kebijakan , Standar Lingkungan Nasional untuk Kualitas Udara (NES-AQ) sedang direvisi untuk memastikan mereka memberikan tingkat perlindungan kesehatan yang seimbang berdasarkan pemahaman ilmiah terbaru tentang dampak polusi udara pada kesehatan.	
5)	Jaringan Pengawasan yang Ditingkatkan , Jaringan pengawasan untuk PM2.5 dan NO2 sedang diperluas untuk memberikan data yang lebih baik untuk intervensi kesehatan masyarakat.	
15.07	Level of water stress	Cambodia
1)	Pengembangan Irigasi , Kamboja telah mengembangkan sistem irigasi untuk mendukung pertanian, yang merupakan konsumen utama air. Contoh seperti Ta Soung Irrigation Scheme, VIS scheme, dan Taing Krasaing Irrigation Scheme. Schemata ini menutupi sekitar 63.895 hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan area irigasi menjadi 2 juta hektar pada tahun 2023.	
2)	Eksplorasi Air Tanah , Sumber daya air tanah digunakan secara signifikan, dengan lebih dari 25.000 sumur air tanah komunitas dan sumur motoris besar untuk irigasi. Eksploitasi ini semakin meningkat, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama musim kering.	
3)	Pengelolaan Air melalui Mitigasi Banjir , Undang-Undang Rancangan Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup ketentuan untuk mitigasi banjir. Namun, strategi mitigasi banjir yang komprehensif sulit dilakukan karena skala sistem hidrologi alami dan tekanan untuk menanggapi dan eksploitasi daerah banjir.	
4)	Kredit Air dan Mikrofinans , Organisasi seperti Water.org bekerja sama dengan lembaga mikrofinans untuk menyediakan pinjaman yang terjangkau untuk perbaikan penyediaan air dan sanitasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi, terutama di daerah pedesaan.	
5)	Proyek Air Komunitas , WaterAid Australia telah melaksanakan proyek air komunitas, seperti instalasi sumur komunitas, yang telah meningkatkan akses ke air bersih bagi masyarakat setempat. Contohnya, di Prek Bei, sumur komunitas diinstal, memungkinkan warga untuk mengakses air secara teratur dan menanam sayuran untuk dijual.	
6)	Mengangkut Air dari Tonlé Sap , Pihak Siem Reap Water Supply Authority telah mengusulkan mengangkut air dari Tonlé Sap untuk mengurangi kekurangan air.	
15.08	Red List Index, 0-1 (best)	Mongolia
1)	Pengumpulan Daftar Merah Nasional , Mongolia telah mengumpulkan Daftar Merah yang komprehensif untuk berbagai kelompok taksonomi, termasuk mamalia, ikan, reptil, amfibi, burung, dan tumbuhan. Daftar-daftar ini dikembangkan melalui workshop yang melibatkan lebih dari 300 ahli dan diterbitkan dalam bahasa Mongolia dan Inggris.	
2)	Rencana Tindakan Konservasi Ringkasan , Bersama dengan Daftar Merah, Rencana Tindakan Konservasi Ringkasan dibuat untuk menguraikan langkah-langkah konservasi yang diperlukan untuk spesies yang terancam. Rencana-rencana ini bertujuan membantu pemerintah, ahli konservasi, dan otoritas pemerintah untuk memprioritaskan tindakan konservasi.	
3)	Hutan Lindung yang Dipimpin Masyarakat , Program Steppe Forward dan Zoological Society of London (ZSL) telah mendirikan hutan lindung yang dipimpin masyarakat, seperti Khoid Mogoin Gol-Teel Local Protected Area, untuk melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
4) Penelitian dan Pemantauan , Penelitian dan pemantauan terus dilakukan untuk menilai status konservasi spesies. Contohnya, Daftar Merah Burung Mongolia dan Tumbuhan Obat Tradisional diterbitkan pada tahun 2012, dan pekerjaan berlanjut termasuk pengumpulan volume kedua Daftar Merah Tumbuhan dan pemantauan ilmiah Kambing liar di Gobi Desert. 5) Pemberantasan Perdagangan Hewan Liar Illegal , Upaya untuk mencegah perdagangan hewan liar ilegal telah diperkuat melalui inisiatif seperti Silent Steppe II, pengembangan aplikasi pengenalan produk hewan liar, dan pelatihan petugas keamanan.		
15.09	Forest cover loss, average % of baseline	Pakistan
1) Inisiatif Hijau Pakistan , Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan penutupan hutan, melestarikan habitat satwa liar, dan meningkatkan sequestering karbon. Ini berfokus pada inovasi teknologi untuk melestarikan dan meningkatkan hutan. 2) Proyek Tsunami Pohon Miliaran , Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan penutupan hutan melalui upaya penanaman pohon skala besar. Proyek ini telah sukses dalam menanam miliaran pohon, berkontribusi signifikan pada upaya reboisasi di Pakistan. 3) Proyek Tsunami Pohon Miliaran Kedua , Mirip dengan Proyek Tsunami Pohon Miliaran, inisiatif ini bertujuan untuk menanam pohon tambahan sejumlah miliaran untuk meningkatkan penutupan hutan di Pakistan. 4) Restorasi Lahan Hutan (FLR) , Pendekatan FLR sedang diterapkan di berbagai wilayah Pakistan untuk memulihkan integritas ekologis sambil meningkatkan kesejahteraan manusia. Pendekatan ini mengintegrasikan konservasi biodiversitas, perlindungan warisan budaya, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. 5) Inisiatif Penanaman Pohon , Pemerintah telah meluncurkan beberapa inisiatif penanaman pohon untuk mengatasi deforestasi dan meningkatkan penutupan hutan.		
15.10	Proportion of safely treated domestic wastewater flows, %	Singapore
1) Infrastruktur Pengolahan Limbah yang Canggih , Singapura telah mengembangkan infrastruktur pengolahan limbah yang komprehensif dan efisien. Badan Air Nasional Singapura, PUB, mengawasi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air, termasuk pengolahan limbah. Teknologi canggih seperti bioreaktor membran (MBR) dan sistem osmosis balik (RO) digunakan untuk mencapai tingkat kejernihan air yang lebih tinggi. 2) Sistem Drainase Lubang Dalam (DTSS) , DTSS mengumpulkan, mengolah, dan membuang air bekas menggunakan lubang-lubang dalam untuk mengangkut limbah ke jauh ke dalam tanah. Sistem ini mengurangi kebutuhan akan penggunaan lahan yang luas dan meningkatkan efisiensi pengolahan limbah. 3) Pengolahan Air Limbah , Singapura mengolah air limbahnya untuk membuatnya aman diminum. Pabrik Pengolahan Air Limbah Changi adalah fasilitas utama dalam proses ini, mampu mengolah hingga 900 juta liter air limbah setiap hari. Air yang telah diolah, dikenal sebagai "NEWater," bersih, aman, dan dapat diminum. Air ini digunakan secara luas dalam industri dan sistem pendingin, serta beberapa digunakan untuk menambahkan reservoir air minum. 4) Peningkatan Pengolahan dan Penggunaan Ulang yang Aman , Singapura telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pengolahan dan penggunaan ulang air limbah yang aman. Ini termasuk pengolahan air limbah rumah tangga yang aman, yang berkontribusi pada peningkatan proporsi air limbah domestik yang aman.		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
15.11	Clean ocean water, 0-100 (best)	Australia
<p>1) Investasi dalam Pengelolaan Taman Laut dan Marine, Pemerintah Australia menginvestasikan \$10,8 juta untuk meningkatkan pengelolaan taman laut dan marin, termasuk memperkuat kepemimpinan lingkungan internasional dalam kebijakan laut dan melindungi Terumbu Karang Raksasa melalui Rencana Keberlanjutan Jangka Panjang Reef 2050.</p> <p>2) Pengembangan Solusi Inovatif, Seabin, sebuah desain Australia untuk "tempat sampah laut," sedang didistribusikan secara global untuk membantu membersihkan sampah plastik. Alat ini menggunakan pompa air bawah permukaan untuk mengumpulkan sampah dan mikroplastik, dengan tujuan mengurangi polusi laut.</p> <p>3) Penurunan Polusi Plastik, Upaya untuk mengurangi polusi plastik termasuk inisiatif seperti meningkatkan jumlah stasiun refill air, membuat tutup yang terikat wajib, dan meningkatkan alternatif non-plastik untuk bahan pengemasan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai yang masuk ke lingkungan laut.</p> <p>4) Pengelolaan Air yang Lebih Baik, Australia juga fokus pada pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk penggunaan pabrik desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air, terutama di daerah dengan permintaan air tinggi dan curah hujan rendah.</p>		
subpillar	Preservation of Nature, 1-7 (best)	Australia
<p>1) Strategi Australia untuk Alam 2019-2030, Strategi ini bertujuan untuk mempromosikan koneksi yang lebih kuat antara manusia dan alam, meningkatkan cara Australia merawat alam, dan membangun serta berbagi pengetahuan tentang konservasi keanekaragaman hayati. Termasuk target nasional seperti melindungi dan melestarikan 30% tanah dan 30% laut Australia oleh 2030, bekerja menuju keadaan tidak ada lagi spesies yang punah, dan restorasi efektif dari ekosistem yang rusak.</p> <p>2) Konservasi Hutan, Proporsi hutan asli Australia yang secara resmi dilindungi di taman konservasi alam publik telah meningkat dari 11% pada tahun 1998 menjadi 17% pada tahun 2013. Sistem taman konservasi yang komprehensif, adekuat, dan representatif (CAR) telah dibuat untuk melindungi persentase tertentu dari setiap jenis hutan, termasuk 15% dari distribusi pra-1750 dan 90% atau lebih dari hutan liar yang berkualitas tinggi.</p> <p>3) Wilayah Terlindungi, Australia memiliki lebih dari 6.000 wilayah terlindungi di tanah pribadi, yang merupakan area terbesar di dunia yang dilindungi secara pribadi. Kawasan Terlindungi oleh Masyarakat Adat (IPAs) mencakup lebih dari 84 juta hektar, memanfaatkan pengetahuan dan pengelolaan masyarakat adat.</p> <p>4) Temuan Survei Nasional, Survei nasional menemukan dukungan kuat di kalangan warga Australia untuk peningkatan investasi pemerintah federal dalam konservasi alam, dengan 95% responden ingin lebih banyak dana untuk alam dan 75% mengadvokasi setidaknya 2% dari anggaran federal untuk dialokasikan ke konservasi alam.</p>		
15.12	Number of environmental treaty ratifications, 0-29 (best)	India, Japan, Korea Rep.
<p>a. India India meningkatkan jumlah perjanjian lingkungan yang disetujui dengan secara resmi bergabung dengan Perjanjian Paris pada tanggal 2 Oktober 2016. Ini membawa India ke 62 negara yang telah menyetujui perjanjian tersebut, yang bertujuan untuk menangani perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke sumber energi terbarukan. India telah berkomitmen untuk memastikan bahwa setidaknya 40% listriknya</p>		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
	<p>dihasilkan dari sumber non-fosil pada tahun 2030 sebagai bagian dari kewajibannya di bawah Perjanjian Paris.</p> <p>b. Japan, Jepang meningkatkan jumlah perjanjian lingkungan dengan meratifikasi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk melawan pemanasan global. Ratifikasi Jepang terhadap Protokol Kyoto merupakan langkah penting dalam mengubah perjanjian tersebut menjadi hukum internasional, karena perlu ratifikasi dari setidaknya 55 negara dan oleh negara-negara industri yang mengeluarkan setidaknya 55% emisi CO2 dunia industri pada tahun 1990.</p> <p>c. Korea Rep.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ratifikasi Perjanjian Paris, Korea Selatan meratifikasi Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dengan tujuan untuk mempertahankan peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2 °C dibandingkan dengan tingkat pra-industri dan mengejar upaya untuk membatasi peningkatan suhu di bawah 1,5 °C. 2) Penyampaian Kontribusi Terukur Nasional (NDC), Korea Selatan menyampaikan INDC-nya pada Juni 2015 dan memperbaruinya pada tahun 2021, dengan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 40% dibandingkan dengan tingkat 2018 pada tahun 2030. 3) Pelaksanaan Kebijakan Domestik, Pemerintah Korea telah menetapkan Undang-Undang Dasar tentang Pertumbuhan Hijau dan Rendah Karbon pada tahun 2011, yang memberikan landasan hukum untuk kebijakan dan tindakan perubahan iklim. Langkah-langkah lainnya termasuk Sistem Manajemen Target Emisi dan Energi (TMS), Roadmap Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, Sistem Pedagang Emisi (ETS), dan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Nasional. 4) Pembentukan Rencana Dasar untuk Tanggapan Perubahan Iklim, Pada Desember 2016, pemerintah Korea menerima Rencana Dasar untuk Tanggapan Perubahan Iklim dan Road Map untuk Mencapai Tujuan Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Nasional untuk menerapkan Perjanjian Paris secara domestik. 5) Peningkatan Update NDC, Pada Desember 2020, Korea Selatan menyampaikan NDC yang diperbarui, dengan tujuan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Update ini termasuk langkah-langkah untuk mengelola 84 risiko iklim di enam sektor dan menetapkan rencana tahunan untuk mencapai NDC berdasarkan sektor. 6) Promosi Green New Deal Korea, Sejak Juli 2020, Korea Selatan telah mempromosikan Green New Deal Korea, yang termasuk pilar baru yang fokus pada pembangunan dasar untuk netralitas karbon. Inisiatif ini bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian NDC dan meningkatkan keberlanjutan masyarakat. 	
15.13	Adequate protection for nature, 1-7 (best)	New Zealand
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Adaptasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengimplementasikan aksi untuk mengurangi tekanan manusia pada ekosistem pesisir, memulihkan ekosistem, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Ini termasuk mengurangi aktivitas predator dan pengonsumsi, memulihkan habitat, dan mendorong keamanan bio kekuatan untuk mengurangi risiko spesies invasif. 2) Strategi Keanekaragaman Hayati, New Zealand telah mengembangkan Te Mana o te Taiao, strategi keanekaragaman hayati asli, dan Peraturan Dasar Nasional untuk Keanekaragaman Hayati Asli (NPS-IB) untuk melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati. 	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
3)	<p>Teknologi Lingkungan, New Zealand telah berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Negara ini sedang beralih ke ekonomi neto nol emisi pada tahun 2050 dan berfokus pada sumber energi terbarukan, kendaraan listrik, dan praktik penggunaan tanah yang berkelanjutan.</p>	
4)	<p>Program Reformasi Tiga Air, Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan jasa air minum, air hujan, dan limbah. Ini melibatkan investasi infrastruktur besar untuk memastikan air minum aman dan terpercaya serta kinerja lingkungan yang lebih baik dari limbah dan air hujan.</p>	
5)	<p>Partisipasi Publik dan Pendidikan, Departemen Konservasi Alam (DOC) telah melakukan penelitian untuk memahami persepsi warga New Zealand tentang lingkungan dan keanekaragaman hayati. Penelitian ini membantu meningkatkan komunikasi dan partisipasi dengan masyarakat untuk mempromosikan upaya konservasi dan pemulihan.</p>	
6)	<p>Kebijakan Perdagangan, New Zealand telah mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam kebijakan perdagangan, fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Negara ini telah menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan Inggris, yang mencakup komitmen iklim yang kuat dan standar keberlanjutan.</p>	
15.14	Total protected areas, % total area	Australia
1)	<p>Sistem Taman Nasional (NRS), NRS didirikan pada tahun 1996 untuk mengkoordinasikan jaringan area yang dilindungi. Tujuan NRS adalah melindungi contoh yang komprehensif, cukup, dan representatif dari keanekaragaman hayati Australia. NRS telah berkembang secara signifikan, dengan lebih dari 22,1% dari luas tanah yang saat ini dilindungi, menutupi 169,9 juta hektar di seluruh 13.906 properti.</p>	
2)	<p>Area Dilindungi oleh Masyarakat Adat (IPAs), Masyarakat adat telah berperan penting dalam memperluas area yang dilindungi. IPAs menutup lebih dari 49% dari NRS, dengan lebih dari 84 juta hektar yang dilindungi, yang merupakan lebih dari 10% dari luas tanah Australia.</p>	
3)	<p>Organisasi Nirlaba (NGOs), Organisasi seperti Australian Wildlife Conservancy dan Bush Heritage Australia telah membeli dan mengelola traktat tanah yang besar untuk konservasi. NGOs ini telah melindungi atau mengelola hampir 13 juta hektar dan 11 juta hektar, masing-masing.</p>	
4)	<p>Konservasi Tanah Swasta, Kovenan konservasi pada titel tanah swasta juga telah berkontribusi pada peningkatan area yang dilindungi. Kelompok seperti Trust for Nature (Victoria) dan Tasmanian Land Conservancy telah berperan dalam upaya ini.</p>	
5)	<p>Taman Laut, Pemerintah juga telah memperluas taman laut, melindungi perairan kawasan sekitar pulau seperti Cocos Islands dan Christmas Island.</p>	
15.15	Average proportion of all key biodiversity areas covered by protected areas, %	Thailand
1)	<p>Pembesaran Area Perlindungan, Thailand telah meningkatkan luas dan jumlah area perlindungan yang dilindungi secara hukum. Setidaknya 20% dari area laut dan pantai negara tersebut telah ditetapkan sebagai area perlindungan, dan setidaknya 5 situs rawa-rawa penting internasional telah ditetapkan sebagai situs Ramsar.</p>	
2)	<p>Rencana Pengelolaan, Rencana pengelolaan area perlindungan telah ditulis dan diterima untuk banyak situs konservasi, yang membantu dalam pengelolaan dan konservasi area tersebut.</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
3)	Upaya Konservasi , Pemerintah Thailand telah melaksanakan berbagai upaya konservasi, termasuk perlindungan dan pemulihan spesies endemik yang terancam punah, dan identifikasi 98 area sebagai area tanaman penting.	
4)	Kampanye Peningkatan Kesadaran , Kampanye peningkatan kesadaran melalui berbagai kegiatan dan media telah meningkatkan pengetahuan tentang isu biodiversitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi.	
5)	Kolaborasi Ilmiah , Pusat Nasional Teknologi Genetik dan Bioteknologi telah berkolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk melaksanakan proyek-proyek terkait produksi benih beras teknologi transfer dan pengelolaan dan perbaikan varietas cabe panas, yang mendukung konservasi biodiversitas.	
Pillar 16.	T&T Socioeconomic Impact, 1-7 (best)	Sri Lanka
1)	Sistem Regulasi , Sri Lanka telah bekerja untuk menciptakan sistem regulasi, sertifikasi, dan standar untuk memastikan integrasi teknologi digital ke sektor pariwisata dalam cara yang inklusif dan berkelanjutan.	
2)	Partisipasi Masyarakat , Negara tersebut telah menekankan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Ini termasuk memastikan bahwa masyarakat lokal terinformasi dan aktif terlibat dalam inisiatif pariwisata, yang membantu mengurangi kemiskinan dan pengembangan masyarakat.	
3)	Pengembangan Infrastruktur , Pariwisata telah mendorong pengembangan proyek infrastruktur penting seperti perbaikan jalan, kereta api, pelabuhan, bandara, serta fasilitas utilitas seperti energi, air, pengelolaan limbah, dan komunikasi. Perbaikan ini bermanfaat baik wisatawan maupun masyarakat lokal.	
4)	Konservasi Lingkungan , Pariwisata telah menjadi pengemban utama konservasi biodiversitas di Sri Lanka, membantu melindungi spesies terancam dan mencegah perdagangan ilegal. Ini sesuai dengan upaya negara untuk mengelola aset lingkungan secara berkelanjutan.	
5)	Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan , Wisatawan telah menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pekerjaan dan tingkat pendidikan, sehingga mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat khususnya di daerah seperti Ella di Provinsi Uva.	
6)	Promosi Pengalaman Asli , Sri Lanka telah fokus pada promosi pengalaman pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan standar hidup masyarakat lokal tetapi juga melestarikan budaya dan lingkungan	
7)	Praktik Berkelanjutan , Sektor pariwisata di Sri Lanka bergerak menuju berkelanjutan dengan menerapkan praktik yang menghormati masyarakat lokal dan budaya regional. Ini termasuk menyediakan informasi kepada tamu tentang perjalanan bertanggung jawab dan terlibat dalam pengembangan masyarakat berkelanjutan.	
16.01	T&T GDP multiplier	Lao PDR
1)	Visit Laos Year , Pemerintah meluncurkan "Visit Laos Year" pada tahun 2024, dengan tujuan menarik setidaknya 4,6 juta wisatawan. Inisiatif ini diharapkan akan meningkatkan signifikan penerimaan pariwisata dan berkontribusi pada PDB negara.	
2)	Paket Bantuan Pariwisata , Pemerintah telah menggelar paket bantuan pariwisata untuk memberikan likuiditas kepada bisnis, sehingga membantu menjaga staf yang terampil dan mencegah penutupan massal bisnis terkait pariwisata.	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
3)	Protokol Kesehatan dan Strategi Komunikasi , Melaksanakan protokol kesehatan dan strategi komunikasi terkait sangat penting untuk membangun kepercayaan di kalangan wisatawan dan memperkuat sektor pariwisata.	
4)	Intelektual dan Pemasaran , Berinvestasi dalam intelektual pasar, pelatihan, dan alat digital penting untuk memahami kebutuhan pasar yang berbeda dan mengembangkan strategi pemasaran yang sasaran untuk menarik lebih banyak wisatawan.	
5)	Diversifikasi Produk dan Pasar Pariwisata , Pemerintah berusaha untuk meningkatkan, memperluas, dan memanfaatkan berbagai produk dan layanan pariwisata untuk menangani berbagai pasar, termasuk pasar sumber sekunder.	
6)	Meningkatkan Hubungan Ekonomi , Dengan memahami dan meningkatkan hubungan antar-industri antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi lainnya, negara berusaha untuk memaksimalkan dampak ekonomi dari pariwisata.	
16.02	T&T employment multiplier	Lao PDR
1)	Proyek Keterampilan untuk Pariwisata , Proyek ini, yang didukung oleh Luxembourg dan Swiss, bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan pengembangan keterampilan di sektor pariwisata dan hospitality. Proyek ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang diperlukan kepada orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pariwisata, sehingga meningkatkan multiplikator pekerjaan.	
2)	Rencana Pemulihan Pariwisata , Rencana pemulihan COVID-19 untuk Lao PDR mencakup prioritas strategis seperti meningkatkan keterlibatan antara pemerintah dan sektor swasta, meluncurkan paket dukungan pariwisata, dan menerapkan protokol kesehatan.	
3)	Visit Laos Year , Pemerintah meluncurkan "Visit Laos Year" pada tahun 2024, dengan tujuan menarik setidaknya 4,6 juta wisatawan. Inisiatif ini diharapkan akan meningkatkan pariwisata secara signifikan dan berkontribusi pada peningkatan multiplikator pekerjaan di sektor tersebut.	
16.03	T&T high-wage jobs, % of emp in high wage sectors	India
1)	Alokasi Anggaran 2024 , Pemerintah telah mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk sektor pariwisata, yang diharapkan akan meningkatkan pengembangan infrastruktur dan kerjasama strategis.	
2)	Peningkatan Keterampilan , Organisasi berinvestasi dalam program peningkatan keterampilan untuk mempersiapkan karyawan dengan tren terbaru dan perkembangan yang akan datang dalam industri.	
3)	Mendorong Vertical Pariwisata Spesialis , India juga mendorong vertical pariwisata spesialis seperti pernikahan destinasi, pariwisata agama, pariwisata internasional, olahraga petualangan, pariwisata ekologi, pariwisata budaya, dan pariwisata pedesaan.	
4)	Fokus pada Wisatawan Berpenghasilan Tinggi , Pemerintah juga fokus pada menyajikan pengalaman wisata bagi wisatawan berpenghasilan tinggi yang siap mengeluarkan biaya lebih banyak. Ini termasuk meningkatkan pilihan kuliner, memberikan akses VIP, dan meningkatkan pengalaman perjalanan secara keseluruhan.	
5)	Pengembangan Infrastruktur , Upaya dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur, seperti ekspansi merek hotel budget seperti Ginger Hotels, yang berencana untuk meningkatkan kehadirannya di wilayah Timur dan Timur Laut India dalam tiga hingga lima tahun ke depan.	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
16.04	T&T labour gender parity, % of emp	New Zealand
<p>1) Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Wanita, Pemerintah bekerja untuk mengurangi dampak pinjaman mahasiswa pada wanita, sehingga akan memperbaiki ketersediaan biaya pendidikan tinggi bagi wanita. Komisi Pensiun dan Kementerian Urusan Perempuan sedang melakukan kampanye untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam perencanaan keuangan dan program tabungan pensiun.</p> <p>2) Meningkatkan Partisipasi Wanita dalam Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan, Layanan Nominasi Kementerian Urusan Perempuan bertujuan untuk meningkatkan persentase perempuan di badan-badan statutori di sektor ekonomi menjadi 50% pada tahun 2010 melalui penyediaan nominasi perempuan yang memiliki keterampilan, kualifikasi, dan pengalaman yang tepat.</p> <p>3) Meningkatkan Keseimbangan Kerja dan Kehidupan, Kebijakan sedang dikembangkan untuk menangani masalah keseimbangan kerja dan kehidupan, yang akan memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan berbayar dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan aktivitas di luar pekerjaan.</p> <p>4) Meningkatkan Partisipasi Wanita dalam Usaha, Kelompok Steering Inter-agensi Wanita dalam Usaha, dipimpin oleh Kementerian Urusan Perempuan, bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kesuksesan bagi usaha kecil dan menengah yang dimiliki dan dioperasikan oleh perempuan, terutama perempuan Māori.</p> <p>5) Meningkatkan Transparansi Gaji dan Kesetaraan Gaji, NZCTU mendorong transparansi gaji dan pelaporan celah gaji, yang dikenal memiliki efek positif pada kesetaraan gaji. Perundingan kolektif dan perjanjian kolektif juga meningkatkan transparansi gaji dan memiliki efek positif pada kesetaraan gaji.</p> <p>6) Meningkatkan Akses ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Cuti Keluarga Bayi (CKB), NZCTU mendukung peningkatan akses ke PAUD yang berkualitas tinggi dan CKB yang gender egaliter untuk membantu mengurangi celah gaji gender dan meningkatkan partisipasi wanita di dalam pekerjaan.</p>		
Pillar 17.	T&T Demand Sustainability, 1-7 (best)	Indonesia
<p>Kebijakan Utama T&T Demand Sustainability di Indonesia Beberapa kebijakan utama yang telah diimplementasikan pemerintah Indonesia untuk mendukung T&T Demand Sustainability meliputi:</p> <p>1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo) yang menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Destinasi-destinasi ini dipilih untuk mengurangi ketergantungan pada Bali sebagai destinasi utama serta untuk menyebarkan dampak ekonomi pariwisata ke wilayah lain di Indonesia.</p> <p>2) Penerapan Konsep Quality Tourism, Quality Tourism berfokus pada pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dengan menarik wisatawan yang lebih menghargai keberlanjutan, memiliki pengeluaran yang lebih tinggi, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta budaya lokal. Strategi ini mencakup pembatasan jumlah pengunjung di destinasi tertentu (misalnya, Pulau Komodo) dan pengembangan pengalaman wisata yang lebih berorientasi pada pelestarian alam dan budaya.</p>		

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
3)	Penerapan Kebijakan Daya Dukung (Carrying Capacity), Di destinasi wisata yang rentan terhadap kerusakan lingkungan seperti Taman Nasional Komodo, Kawah Ijen, dan Gunung Bromo, pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian jumlah pengunjung per hari untuk menjaga ekosistem dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Daya dukung juga diterapkan pada destinasi pantai dan laut, seperti di Kepulauan Raja Ampat, untuk menjaga ekosistem terumbu karang.	
4)	Pengembangan Desa Wisata, Desa wisata berperan penting dalam kebijakan T&T Demand Sustainability dengan menawarkan pengalaman wisata berbasis komunitas yang lebih ramah lingkungan, menghargai tradisi lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Program ini telah mencakup ratusan desa wisata di seluruh Indonesia dengan fokus pada ekowisata, agrowisata, dan wisata budaya.	
5)	Pengelolaan Sampah dan Polusi, Pemerintah menginisiasi program "Bebas Sampah 2025" dan kampanye "Gerakan Indonesia Bersih" untuk mengurangi dampak polusi dan sampah plastik di destinasi wisata. Upaya ini mencakup pengelolaan limbah yang lebih baik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan program edukasi lingkungan.	
6)	Program Pengembangan SDM dan Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan, Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata dengan memberikan pelatihan mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan, manajemen pariwisata, dan penerapan standar keberlanjutan dalam operasional pariwisata. Mendorong sertifikasi hotel, restoran, dan destinasi wisata yang berkomitmen pada prinsip keberlanjutan.	
17.01	Inbound length of stay, days	Australia
1)	Mengajarkan Agensi , Pemerintah Australia telah mengajarkan agensi perjalanan tentang bagaimana efektif menjual Australia, memperpanjang lamanya tinggal tamu, dan mempromosikan Australia di atas destinasi lain. Hal ini membantu meningkatkan hasil dan mendorong tamu untuk tinggal lebih lama di negara tersebut.	
2)	Mengembangkan Praktik yang Berkelanjutan , Upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan praktik yang berkelanjutan di sektor pariwisata, yang dapat menarik tamu yang tertarik pada pengalaman yang lebih panjang dan lebih bermakna.	
3)	Mengubah Layanan , Pemberi layanan pariwisata telah mengubah layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar tamu masuk. Contohnya, beberapa penyedia akomodasi telah menginvestasikan dalam renovasi dan memperluas layanan seperti pilihan bahasa Cina dan Hindi untuk menarik berbagai jenis tamu.	
4)	Meningkatkan Pengalaman Tamu , Inisiatif yang bertujuan meningkatkan pengalaman tamu secara keseluruhan juga dapat berkontribusi pada lamanya tinggal. Ini termasuk meningkatkan infrastruktur dan layanan di berbagai wilayah, seperti Queensland, untuk membuat mereka lebih menarik bagi wisatawan.	
17.02	Seasonality of international tourist arrivals, peak season % of total	China
1)	Mempermudah Syarat Visa , Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah merelaksasi syarat visa, sehingga membuat lebih mudah bagi wisatawan Tiongkok untuk berpergian.	
2)	Kampanye Promosi , Departemen Budaya dan Pariwisata Abu Dhabi, misalnya, telah menunjuk aktris Tiongkok Liu Yifei sebagai duta wisata untuk Abu Dhabi. Video promosi yang	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indicator Negara Asia Pasific
	<p>menampilkan Liu di Weibo telah menarik perhatian yang signifikan, sehingga meningkatkan minat terhadap Uni Emirat Arab sebagai destinasi wisata.</p> <p>3) Koneksi Penerbangan yang Lebih Baik, Kebijakan visa bebas Uni Emirat Arab dan koneksi penerbangan yang kuat telah membuatnya menjadi tujuan yang menarik bagi wisatawan Tiongkok, dengan data menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemesanan dan kedatangan.</p> <p>4) Upaya Pemasaran yang Ditingkatkan, Pameran Pariwisata Arab di Dubai, yang berlangsung dari 6 Mei, diharapkan akan memiliki dua kali jumlah pameran dan profesional perjalanan Tiongkok dibandingkan dengan acara tahun 2019, menunjukkan fokus yang ditingkatkan pada pemasaran ke pasar Tiongkok.</p>	
17.03	Concentration of interest in cultural attractions, % of views	Mongolia
	<p>1) Mengpromosikan Warisan Budaya di Luar Negeri, Kementerian Budaya telah sangat aktif dalam menampilkan budaya Mongolia di seluruh dunia. Misalnya, selama Forum Budaya Internasional di St. Petersburg, Rusia, Menteri Budaya Nomin Chinbat meluncurkan panggilan aksi untuk mengembalikan artefak budaya sejarah Mongolia yang tersebar di seluruh dunia. Ini termasuk upaya untuk menegosiasikan pengembalian artefak dari institusi seperti Museum Britania, yang saat ini menyimpan 122 artefak Mongolia dari dinasti Il-Khanid.</p> <p>2) Diplomasi Budaya, Mongolia menggunakan diplomasi budaya untuk memperkuat kerjasama internasional dan menarik wisatawan. Ini termasuk mempromosikan budaya Mongolia melalui acara di Paris dan London, dengan tujuan menarik wisatawan Eropa.</p> <p>3) Akses Bebas Visa, Mongolia telah memperoleh akses bebas visa untuk warga negara asing dari 34 negara, membuatnya lebih mudah bagi wisatawan untuk mengunjungi negara tersebut.</p> <p>4) Kebijakan Tetangga Ketiga, Pemerintah mengembangkan hubungan bilateral dengan negara tetangga ketiga seperti Vietnam, Korea Selatan, Singapura, Turki, dan Amerika Serikat untuk meningkatkan wisata. Ini termasuk perjanjian tentang koneksi udara dan sistem visa.</p> <p>5) Industri Kreatif, Mongolia menawarkan insentif pajak kepada perusahaan produksi film untuk mengambil lokasi syuting di negara tersebut, yang dapat membantu menampilkan pemandangan dan warisan budaya Mongolia kepada audiens yang lebih luas.</p> <p>6) Festival Budaya, Mongolia merayakan berbagai festival budaya, seperti Naadam Ulaanbaatar, yang telah menjadi daya tarik signifikan bagi wisatawan internasional dan domestik. Festival-festival ini menampilkan tradisi nomadik yang kaya dan keunikan budaya negara tersebut.</p>	
17.04	Concentration of interest in nature attractions, % of views	Bangladesh
	<p>1) Pengembangan Wisata Alam, Negara tersebut telah aktif mempromosikan wisata alam, memanfaatkan sumber daya alam seperti hutan, hutan bakau, dan satwa liar. Daerah Chittagong Hill Tracts, dengan luas hutan yang signifikan, dan Sundarbans, yang merupakan area bakau terbesar di dunia, adalah destinasi utama untuk wisata alam.</p> <p>2) Pengembangan Infrastruktur, Bangladesh telah menginvestasikan dana dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung wisata alam. Ini termasuk pengembangan jalan, hotel, dan tempat wisata, yang meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas bagi wisatawan.</p>	

No.	Dimensions /Pillars/Individual Indicators	Benchmarking Indikator Negara Asia Pasific
3)	Upaya Konservasi , Pemerintah telah bekerja pada upaya konservasi untuk melindungi dan melestarikan atraksi alam. Ini termasuk melindungi hutan, hutan bakau, dan habitat satwa liar, yang sangat penting untuk menarik wisatawan.	
4)	Pemasaran dan Promosi , Bangladesh telah aktif memasarkan dan mempromosikan atraksi alamnya untuk meningkatkan konsentrasi minat. Ini termasuk mengemukakan kondisi lingkungan unik dan warisan budaya negara tersebut.	
17.05	Geographically dispersed tourism, 1-7 (best)	China
1)	Inisiatif Jalur Sutra , Inisiatif ini telah memacu dinamika pasar dan mempromosikan pengembangan pariwisata di wilayah-wilayah yang berada di sepanjang rute, sehingga meningkatkan indikator-indikator seperti pendapatan per kapita dari pariwisata domestik dan internasional serta pendapatan per kapita dari kunjungan wisatawan domestik dan internasional.	
2)	Reformasi Sistem Budaya , Reformasi ini telah berkontribusi pada pengembangan pariwisata dengan mengintegrasikan budaya dan pariwisata, yang telah mempromosikan pengembangan pariwisata di berbagai wilayah.	
3)	Pariwisata Digital , China telah mengdigitalisasi sumber daya alam pariwisata, membuatnya lebih mudah diakses dan menarik bagi wisatawan, yang telah membantu dalam menyebarluaskan pariwisata ke berbagai wilayah.	

ANALISA PESAING POTENSIAL INDONESIA


Travel & Tourism Development Index (TTDI) mengukur daya saing sektor pariwisata berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek kebijakan, infrastruktur, dan lingkungan wisata di berbagai negara. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menempati posisi ke-6 dibawah Japan, Australia, China, Singapore, dan Korea Rep., namun Indonesia berhasil unggul dari New Zealand. Saat ini, Indonesia menghadapi persaingan ketat dari sejumlah negara-negara asia pasifik yang memiliki kekuatan dan strategi pengembangan pariwisata yang kuat.

Pada kawasan Asia Pasifik, Indonesia bersaing dengan negara-negara yang memiliki performa kuat di sektor pariwisata, baik dalam hal daya tarik destinasi, infrastruktur, maupun kebijakan pendukung pariwisata. Untuk memperkuat daya saing, Indonesia harus mampu meningkatkan daya Tarik wisata agar dapat bersaing dipasar global. Indonesia memiliki daya tarik yang kuat dalam kategori sumber daya alam dan budaya, berkat keanekaragaman alam seperti pantai, hutan tropis, dan terumbu karang, serta warisan budaya seperti candi Borobudur dan Prambanan, serta tradisi budaya yang unik di Bali dan Yogyakarta.

Untuk menganalisis pesaing potensial Indonesia pada TTDI di kawasan Asia Pasifik, dan berdasarkan Indikator TTDI serta potensi pariwisata masing-masing negara, pesaing utama Indonesia di Asia Pasifik mencakup:

1. Singapore

- Keunggulan: Singapore memiliki tingkat daya saing T&T yang sangat baik di Kawasan Asia Tenggara, dan selalu menempati posisi pertama. Di Kawasan Asia Pasifik pun,



Singapore menempati urutan ke-4 setelah Jepang, Australia, dan China. Singapore memiliki jumlah kunjungan wisatawan global yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan menawarkan berbagai macam atraksi dan aktivitas pariwisata yang sangat unik. Sebagai negara kecil dengan keterbatasan sumber daya alam, Singapura berhasil mengoptimalkan potensi pariwisatanya melalui berbagai keunggulan yang menjadikannya destinasi kelas dunia. Keunggulan pariwisata Singapura dalam TTDI mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, inovasi, keamanan, serta kualitas layanan. Selanjutnya, kekuatan daya saing Singapore pada TTDI terletak di Lingkungan Bisnis yang mendukung, keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengelolaan tenaga kerja, Prioritas Pariwisata oleh Pemerintah, Infrastruktur dan Layanan pariwisata, serta Aksesibilitas dan konektivitas. Singapore terus aktif dalam membangun kekuatan pariwisatanya dengan menawarkan *Unique Experience* bagi para traveller dunia.

- Tantangan bagi Indonesia:
 - Singapore merupakan Hub penerbangan Internasional yang terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Singapore memiliki infrastruktur dan konektivitas terbaik yang mampu memudahkan para wisatawan dunia. Singapore juga terus membangun citra positif bagi para wisatawan global melalui berbagai program pembangunan pariwisata yang terintegrasi. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mencari langkah strategis dalam penguatan pariwisata kedepan dengan kolaborasi pemasaran dengan pihak Singapore, melalui penawaran berbagai destinasi pariwisata yang tidak dimiliki oleh Singapore.
 - Singapura memiliki infrastruktur pariwisata yang sangat baik, mulai dari transportasi publik yang modern dan terintegrasi seperti MRT, bus, dan taksi, hingga bandara internasional yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia, yaitu Changi Airport. Sedangkan, Indonesia memiliki bandara internasional yang baik seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, namun, pengelolaan dan aksesibilitas dari dan ke bandara masih perlu ditingkatkan. Transportasi publik di destinasi wisata utama juga belum sepenuhnya terintegrasi.
 - Singapura adalah salah satu pusat MICE terkemuka di dunia. Negara ini memiliki fasilitas konferensi dan pameran berkelas internasional, seperti Singapore Expo dan Suntec Convention Centre, serta infrastruktur pendukung yang sangat baik untuk kegiatan bisnis. Sedangkan, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk sektor MICE, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya. Namun, fasilitas MICE di Indonesia masih belum sekompetitif Singapura, baik dari segi kualitas infrastruktur, kapasitas ruang, maupun layanan pendukung.
 - Kondisi daya saing Indonesia dengan Singapore saat ini berjarak sekitar 9 peringkat, dengan konsep pembangunan kepariwisataan yang terus di inisiasi dan dipimpin oleh pemerintah, Indonesia diharapkan mampu mendekati atau bahkan menyalip daya saing negara Singapore di beberapa tahun mendatang.

2. Korea Rep.

- Keunggulan: Korea Selatan adalah salah satu negara yang sangat kompetitif di sektor pariwisata global, terbukti dengan posisinya yang kuat dalam *Travel & Tourism Development Index* (TTDI). Keunggulan pariwisata Korea Selatan terletak pada daya

tarik budaya modern dan tradisional yang kuat, strategi pemasaran yang efektif, dan infrastruktur pariwisata yang berkembang pesat. Para wisatawan dunia pasti paham dengan kondisi pertumbuhan pariwisata di negara Korea. Pembangunan konsep pariwisata yang terintegrasi dengan seluruh sektor, mampu menjadi daya Tarik tersendiri bagi para wisatawan. Keunggulan pariwisata Korea Selatan dalam TTDI didorong oleh pemanfaatan budaya populer, pemasaran digital yang efektif, infrastruktur transportasi yang canggih, serta pengembangan pariwisata medis dan MICE. Jika dilihat dari peta sebaran indikator, *ICT Readines* menjadi salah satu tingkat daya saing yang paling tinggi di Korea dibandingkan dengan negara-negara di Kawasan Asia Pasifik lainnya. Selain itu juga, Korea Rep mampu menjaga sustainable melalui regulasi dalam mengoptimalkan energi bahkan mampu menciptakan *transportasi public* yang *low carbon*.

- Tantangan bagi Indonesia:
 - Korea Rep saat ini mampu menempati posisi ke-14 dunia atau posisi ke-5 di kawasan Asia Pasifik. Indonesia harus banyak belajar dengan Korea yang salah satunya adalah terkait ICT, yang dimana selama beberapa periode perhitungan, Pilar *ICT Readiness* Indonesia selalu berada di peringkat bawah.
 - Korea mampu menghadirkan atau menciptakan pengalaman yang berbeda jika para wisatawan berkunjung ke negara tersebut, selain itu juga seluruh destinasi pariwisatanya sudah terhubung berbagai transportasi public yang memudahkan aksesibilitas bagi para wisatawan. Untuk mencapai kearah tersebut, diharapkan Indonesia mampu belajar dengan melihat regulasi yang dimiliki negara Korea dan apa yang dapat di implementasikan di Indonesia dengan terukur dan terstruktur.
 - Korea Selatan telah mengembangkan inisiatif pariwisata berkelanjutan, seperti pengelolaan taman nasional, pengembangan kawasan wisata ramah lingkungan, serta promosi ekowisata. Pemerintah Korea Selatan juga mendukung program-program pariwisata yang mengutamakan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Jika dilihat, Indonesia memiliki banyak potensi ekowisata, seperti taman nasional, cagar alam, dan destinasi wisata pedesaan. Namun, pengembangan pariwisata berkelanjutan masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi, kesadaran lingkungan, serta pengelolaan kawasan wisata. Indonesia perlu mengembangkan kebijakan pariwisata yang lebih berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal, serta mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya.
 - Korea Selatan memiliki infrastruktur transportasi yang sangat baik, termasuk jaringan kereta cepat (KTX) yang menghubungkan kota-kota utama, serta transportasi publik yang modern dan efisien. Meskipun Indonesia memiliki bandara internasional yang berkembang, infrastruktur transportasi publik di dalam kota maupun antar-destinasi masih belum terintegrasi dengan baik. Tantangan bagi Indonesia adalah meningkatkan jaringan transportasi, memperbaiki aksesibilitas ke destinasi-destinasi wisata, serta memastikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi wisatawan.

3. New Zealand

- Keunggulan: New Zealand terkenal dengan pemandangan alam yang spektakuler, seperti pegunungan, danau, pantai, dan hutan-hutan yang masih alami. Keindahan alam ini menjadi daya tarik utama wisatawan dari seluruh dunia, dan negara ini mampu mengelola keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya dengan baik. Dalam TTDI, aspek ini memberi nilai positif dalam kategori daya tarik pariwisata. New Zealand dianggap sebagai negara yang aman bagi para wisatawan, dan ini merupakan salah satu indikator penting dalam TTDI. Selain itu, New Zealand juga sangat fokus pada keberlanjutan pariwisata dengan inisiatif-inisiatif ramah lingkungan untuk melestarikan alam dan budaya setempat. Pemasaran pariwisata New Zealand dilakukan secara efektif melalui kampanye internasional seperti "*100% Pure New Zealand*", yang meningkatkan citra dan daya tarik negara ini di mata wisatawan global. Beberapa pilar pada TTDI, New Zealand memiliki keunggulan dari negara-negara di Kawasan Asia Pasifik seperti *Tourist Service & Infrastructure* dan *Environmental Sustainability*.
- Tantangan Bagi Indonesia
 - New Zealand memiliki reputasi yang kuat dalam keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, yang merupakan komponen penting dalam TTDI. Indonesia perlu memperkuat kebijakan dan praktik pariwisata berkelanjutan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri pariwisata untuk menjaga kelestarian lingkungan.
 - New Zealand memiliki infrastruktur pariwisata yang terintegrasi dengan baik, termasuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas penunjang yang memenuhi standar internasional. Sedangkan, banyak destinasi wisata di Indonesia, terutama di luar kota-kota besar dan Bali, masih menghadapi kendala infrastruktur, seperti transportasi yang terbatas, akses jalan yang buruk, dan minimnya fasilitas umum yang memadai.
 - New Zealand adalah salah satu negara teraman di dunia bagi wisatawan, yang menjadi faktor penting dalam TTDI. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal persepsi keamanan, terutama di beberapa destinasi wisata yang terkadang diwarnai oleh insiden kejahatan kecil, ketidaktertiban, atau kurangnya pengawasan keamanan.
 - Untuk dapat bersaing dengan New Zealand di TTDI, Indonesia perlu melakukan upaya lebih dalam meningkatkan keberlanjutan pariwisata, pengembangan infrastruktur, pengelolaan destinasi yang efektif, serta menciptakan citra dan strategi pemasaran yang kuat. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya yang melimpah serta memperbaiki area-area yang masih lemah, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saingnya di kancah pariwisata global.

4. Thailand

- Keunggulan: Thailand adalah salah satu negara yang memiliki daya saing pariwisata tinggi di dunia dan menempati peringkat 40 Besar dunia dalam TTDI. Dalam konteks TTDI, Thailand masih kurang begitu agresif dalam memperkuat daya saingnya, dan masih kalah jauh dari Indonesia. Namun, negara ini berhasil memanfaatkan berbagai keunggulannya untuk menarik wisatawan internasional, dan banyak dari aspek

tersebut yang menjadi tantangan bagi Indonesia untuk bersaing di sektor pariwisata, diantaranya adalah Infrastruktur Pariwisata yang Memadai dan Terpadu, Pemasaran Pariwisata yang Efektif dan Strategi Brand yang Kuat, Diversifikasi Produk Wisata, Daya Tarik Wisata yang Terjangkau, Keramahtamahan dan Kualitas Layanan, serta Keamanan dan Stabilitas. Thailand juga sangat aktif dalam pemasaran pariwisata global dan menawarkan pengalaman wisata yang beragam, mulai dari ekowisata hingga pariwisata kesehatan.

- Tantangan bagi Indonesia
 - Thailand memiliki infrastruktur pariwisata yang sangat baik, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga fasilitas pendukung lainnya (seperti Bangkok, Phuket, dan Chiang Mai) dan berhasil mengungguli Indonesia pada TTDI. Di Indonesia, infrastruktur pariwisata yang baik baru tersedia di beberapa kota besar dan destinasi populer seperti Bali dan Jakarta. Namun, banyak destinasi lainnya masih memerlukan pengembangan infrastruktur transportasi, aksesibilitas, dan fasilitas publik yang memadai.
 - Thailand telah berhasil membangun brand pariwisata yang kuat melalui kampanye global seperti "*Amazing Thailand*" dan menjadi salah satu yang terbaik di Kawasan asia tenggara. Kampanye ini menekankan pengalaman budaya, kuliner, dan keramahtamahan orang Thailand yang membuat wisatawan merasa nyaman dan ingin kembali berkunjung. Indonesia juga memiliki brand pariwisata, yaitu "*Wonderful Indonesia*", namun brand awareness global masih kurang optimal.
 - Thailand dikenal dengan "*Land of Smiles*", yang menggambarkan keramahan dan kualitas layanan yang tinggi di sektor pariwisatanya. Meskipun Indonesia dikenal dengan keramahtamahan penduduknya, kualitas layanan di sektor pariwisata masih bervariasi. Di beberapa destinasi, standar pelayanan mungkin belum memenuhi harapan wisatawan internasional.
 - Thailand telah memanfaatkan berbagai keunggulannya dalam TTDI untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang kompetitif. Bagi Indonesia, tantangan utamanya adalah meningkatkan infrastruktur, memperkuat strategi pemasaran, mendiversifikasi produk wisata, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan. Jika Indonesia berhasil mengatasi tantangan-tantangan ini, maka daya saing pariwisatanya dapat meningkat dan mampu menarik lebih banyak wisatawan internasional dan memperkuat daya saing kepariwisataan di kancah global.

5. Malaysia

- Keunggulan: Malaysia memiliki beberapa keunggulan pariwisata yang menjadikannya salah satu negara teratas dalam TTDI. Negara ini berhasil mengembangkan pariwisata dengan strategi yang baik dan menawarkan berbagai keunggulan yang membuatnya kompetitif di kancah internasional. Malaysia mampu unggul dan menjadi yang terdepan di Kawasan asia pasifik khususnya pada dimensi *T&T Policy and Enabling Conditions*, yang merupakan Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Insentif menjadi unggulan utama dalam pembangunan sektor pariwisata. Selain itu, Malaysia juga mampu menjadi yang terbaik di Kawasan asia pasifik pada pilar *Price competitiveness*, serta beberapa indikator TTDI, seperti *Individuals using internet*, *Visa requirements*,

dan *Fuel price levels*. Malaysia juga memiliki kekuatan dalam infrastruktur pariwisata, konektivitas transportasi, Pariwisata Medis dan Kesehatan, dan strategi pemasaran yang agresif. Malaysia juga memiliki pariwisata berbasis alam dan budaya yang kuat, seperti Taman Nasional Kinabalu dan situs warisan dunia UNESCO di Melaka.

- Tantangan bagi Indonesia:
 - Malaysia bersaing ketat dengan Indonesia dalam hal pengelolaan lingkungan dan keramahan wisatawan. Dengan promosi pariwisata yang kuat dan biaya perjalanan yang relatif terjangkau, Malaysia menjadi tujuan wisata favorit di Asia Tenggara.
 - Malaysia memiliki konektivitas internasional yang kuat, terutama melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) yang menjadi salah satu hub penerbangan terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Malaysia juga memiliki banyak rute penerbangan internasional yang menghubungkan negara ini dengan berbagai kota besar di dunia. Indonesia memiliki bandara-bandara internasional yang baik, seperti Soekarno-Hatta di Jakarta dan Ngurah Rai di Bali. Namun, tantangan utamanya adalah keterbatasan rute penerbangan internasional ke beberapa destinasi pariwisata di luar Bali dan Jakarta.
 - Malaysia memiliki infrastruktur pariwisata yang terintegrasi dengan baik, mulai dari jalan raya yang mulus, sistem transportasi umum yang efisien (seperti MRT di Kuala Lumpur), hingga fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Di Indonesia, infrastruktur pariwisata masih menjadi kendala, terutama di daerah-daerah yang baru berkembang.
 - Malaysia adalah salah satu destinasi pariwisata medis terkemuka di Asia Tenggara. Dengan fasilitas kesehatan yang berkualitas, biaya yang lebih terjangkau dibandingkan negara-negara barat, dan tenaga medis yang profesional, Malaysia berhasil menarik banyak wisatawan medis dari berbagai negara. Pemerintah juga memberikan dukungan penuh pada sektor ini dengan mempromosikan Malaysia sebagai "*Healthcare Travel Destination*". Sedangkan, Indonesia belum banyak mengembangkan sektor pariwisata medis, meskipun terdapat potensi besar di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali.
 - Malaysia memiliki strategi branding pariwisata yang kuat dengan kampanye internasional seperti "*Malaysia, Truly Asia*". Kampanye ini berhasil menciptakan citra yang jelas di benak wisatawan internasional tentang keunikan Malaysia. Indonesia memiliki kampanye "*Wonderful Indonesia*", tetapi branding ini masih perlu diperkuat dan dikomunikasikan lebih konsisten di pasar internasional.
 - Keunggulan Malaysia dalam TTDI mencakup berbagai aspek mulai dari infrastruktur, kebijakan, strategi branding, hingga keamanan dan stabilitas. Untuk Indonesia, tantangan utamanya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat regulasi dan kebijakan pro-pariwisata, serta menciptakan strategi pemasaran yang lebih terarah dan inovatif. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat bersaing lebih baik dengan Malaysia dan meningkatkan posisinya di TTDI.

6. India:

- Keunggulan: India adalah salah satu negara dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat di dunia dan menunjukkan posisi yang kuat dalam Travel & Tourism Development Index (TTDI). Keunggulan pariwisata India mencakup banyak aspek yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi yang kompetitif di kancah global, terutama dalam hal daya tarik budaya, spiritual, serta ragam produk wisata. Keunggulan India dalam TTDI terletak pada keberagaman budaya, warisan sejarah, pariwisata kesehatan, serta ekosistem pariwisata berbasis komunitas. India berhasil unggul dari berbagai negara Kawasan Asia Pasifik dalam beberapa indikator, seperti *Renewable energy regulation* dan *T&T high-wage jobs*. Selain itu, India menawarkan pengalaman wisata budaya dan sejarah yang unik, seperti Taj Mahal dan Jaipur. India juga aktif mempromosikan wisata spiritual dan kesehatan, serta meningkatkan infrastruktur untuk pariwisata.
- Tantangan bagi Indonesia:
 - India menonjol dalam daya tarik budaya dan infrastruktur layanan kesehatan, serta meningkatkan upaya digitalisasi dalam promosi pariwisata internasional.
 - India dikenal sebagai salah satu destinasi dengan kekayaan budaya dan warisan sejarah yang luar biasa. Banyak situs warisan dunia UNESCO seperti Taj Mahal, Jaipur City Palace, dan Qutub Minar yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Indonesia juga memiliki warisan budaya yang melimpah, seperti Candi Borobudur dan Prambanan, serta kekayaan budaya lokal di berbagai daerah. Namun, tantangannya adalah mempromosikan situs-situs ini secara lebih luas dan mengembangkan destinasi-destinasi budaya baru yang dapat bersaing dengan daya tarik wisata budaya India.
 - India adalah salah satu destinasi utama untuk pariwisata spiritual dan kesehatan, seperti yoga, meditasi, dan pengobatan Ayurveda. Sebenarnya, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan pariwisata kesehatan dan spiritual, namun, Indonesia belum banyak mengeksplorasi potensi ini secara optimal di pasar internasional.
 - India telah memulai inisiatif untuk mengembangkan ekosistem pariwisata yang lebih berkelanjutan. Program seperti "*Eco-Tourism*" dan promosi ekowisata di berbagai wilayah pegunungan, taman nasional, dan kawasan konservasi membantu menarik wisatawan yang peduli terhadap lingkungan. Indonesia memiliki banyak potensi untuk ekowisata, seperti taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi laut. Namun, pengelolaan yang kurang optimal dan kurangnya kesadaran akan praktik pariwisata berkelanjutan menjadi tantangan utama.
 - Bagi Indonesia, tantangannya adalah memaksimalkan potensi budaya dan warisan sejarah yang melimpah, mengembangkan pariwisata kesehatan dan spiritual, serta menciptakan program pariwisata berbasis komunitas yang lebih terarah. Penguatan strategi pemasaran dan branding juga sangat penting untuk memastikan daya saing Indonesia di pasar internasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi utama di kawasan Asia.

4

Bagian Keempat





**STRATEGI
PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
INDONESIA**

BAGIAN EMPAT – STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA

INDONESIA *GOLDEN TOURISM 2045*

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, masing-masing memiliki warisan budaya yang unik, pemandangan alam yang menakjubkan, dan beragam flora dan fauna. Potensi pariwisata yang luar biasa di negara ini telah lama diakui, dengan industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Dwi W. & Subekti N., 2017). Seiring dengan berkembangnya lanskap pariwisata global, Indonesia harus memposisikan dirinya secara strategis untuk memanfaatkan tren dan peluang yang muncul guna mengamankan posisinya sebagai tujuan wisata utama.

Inisiatif "Pariwisata Emas Indonesia 2045" bertujuan untuk mendorong negara ini menjadi pusat pariwisata global pada pertengahan abad ke-21. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, pemerintah berupaya mengembangkan infrastruktur pariwisata kelas dunia, mempromosikan beragam penawaran Indonesia di panggung global, dan membina ekosistem pariwisata berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat lokal dan melestarikan warisan alam negara ini. Dengan menerapkan prioritas strategis yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur, diversifikasi produk, praktik berkelanjutan, dan pemasaran global, Indonesia siap mewujudkan visinya untuk menjadi salah satu tujuan wisata utama dunia. Pemerintah telah mengidentifikasi beberapa prioritas strategis utama untuk mencapai tujuan ambisius ini.

Pertama, Indonesia harus terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, baik fisik maupun digital, untuk meningkatkan pengalaman dan aksesibilitas pengunjung. Ini termasuk meningkatkan jaringan transportasi, meningkatkan konektivitas, dan meningkatkan kemampuan digital bisnis pariwisata untuk memanfaatkan peningkatan *e-commerce* dan pemesanan perjalanan daring (Abo El Nile, 2022). Kedua, pemerintah harus memprioritaskan diversifikasi penawaran pariwisata, yang memamerkan kekayaan warisan budaya, keajaiban alam, dan pengalaman lokal yang unik di negara ini. Dengan mengembangkan beragam produk pariwisata yang menarik, Indonesia dapat menarik lebih banyak segmen wisatawan dan memantapkan dirinya sebagai tujuan wisata yang memiliki banyak sisi.

Selain itu, negara ini harus fokus untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri pariwisata selaras dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Azhari et al., 2023). Terakhir, pemerintah harus memelopori kampanye pemasaran dan branding yang komprehensif untuk mengangkat citra Indonesia di panggung global. Hal ini harus melibatkan kemitraan strategis dengan organisasi pariwisata internasional, kegiatan promosi yang terarah, dan pemanfaatan platform digital untuk menjangkau dan melibatkan calon pengunjung.

Namun demikian, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting untuk dilanjutkan setiap tahunnya dalam rangka memperkuat capaian kepariwisataan di tingkat global. Oleh karena itu, berinvestasi dalam infrastruktur pariwisata berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan pengalaman dan aksesibilitas pengunjung, sekaligus menjaga integritas lingkungan dan budaya berbagai destinasi di Indonesia (Moh. Fadli et al., 2022). Ini termasuk mengembangkan opsi transportasi ramah lingkungan, menerapkan solusi energi terbarukan, dan mempromosikan konservasi sumber daya alam.

Dengan memprioritaskan praktik berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan pertumbuhan pariwisatanya selaras dengan tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial jangka panjang. Selain itu, pemerintah harus bekerja sama erat dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan dan perspektif mereka ke dalam pengembangan infrastruktur dan penawaran pariwisata, memberdayakan mereka sebagai pemangku kepentingan utama di masa depan industri ini. Melalui pendekatan seimbang yang menggabungkan fasilitas pariwisata kelas dunia dengan inisiatif berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat, Indonesia dapat memantapkan dirinya sebagai pemimpin global dalam pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dan inklusif.

Untuk melengkapi investasi infrastrukturnya, Indonesia juga harus memprioritaskan diversifikasi penawaran produk pariwisatanya. Dengan memamerkan kekayaan warisan budaya, keajaiban alam, dan pengalaman lokal yang unik, pemerintah dapat menarik lebih banyak segmen wisatawan dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang memiliki banyak sisi (Achmad et al., 2023; Muhammad Fahrizal et al., 2022). Hal ini dapat melibatkan pengembangan aktivitas pariwisata baru, seperti wisata petualangan, pengalaman kuliner, dan program budaya yang mendalam, selain mempromosikan objek wisata yang sudah ada. Keterlibatan aktif dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata ini akan menjadi sangat penting, karena hal ini akan memastikan bahwa manfaat industri didistribusikan secara merata dan bahwa karakter unik setiap destinasi dilestarikan.




Keberhasilan penerapan prioritas strategis ini, melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat, akan menjadi krusial dalam mewujudkan visi "Pariwisata Emas Indonesia 2045" dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia pada pertengahan abad ke-21. Dengan memanfaatkan diplomasi digital untuk mempromosikan keunikan wisata Indonesia dan memperkuat komunikasi pemasaran terpadu, negara ini dapat secara efektif melibatkan calon wisatawan dan mengamankan posisinya sebagai destinasi global terkemuka.

Pariwisata Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045

Terwujudnya Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran Visi, yaitu: mencapai pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, meningkatnya kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas

2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesenambungan Pembangunan.

Berdasarkan delapan misi (agenda) pembangunan tersebut, Pariwisata masuk kedalam misi no. 2 yakni Transformasi ekonomi. Dalam penjelasannya transformasi ekonomi tersebut, diharapkan pariwisata dapat memperkuat seluruh sektor pendukung dan penopang pariwisata sehingga mampu memberikan daya saing di kancah global. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industry manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Visi Indonesia 2045	Sasaran Visi 2045		
 Berdaulat	SASARAN VISI NO 3 Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Global Power Index 		
 Maju	SASARAN VISI NO 1 Pendapatan per kapita setara negara maju <ul style="list-style-type: none"> • GNI Per Capita • Kontribusi PDB Maritim • Kontribusi PDB Manufaktur 	SASARAN VISI NO 2 Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemiskinan • Rasio Gini (indeks) • Kontribusi PDRB KTI 	SASARAN VISI NO 4 Daya saing SDM meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Modal Manusia (indeks)
 Berkelanjutan	SASARAN VISI NO 5 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Intensitas Emisi GRK • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 		

Gambar 16 Pemetaan Visi Indonesia 2045 dengan Sasaran Visi
 Sumber: UU No. 59/2024

Pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi. Menurut UU No 59/20224 tentang RPJPN 2025 – 2045, capaian ini didukung dengan pelaksanaan kebijakan: (i) integrasi konektivitas domestic dan global yang didukung kebijakan visa yang kondusif; (ii) peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan prestasi olahraga dalam diversifikasi daya Tarik destinasi pariwisata yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara; (iii) penguatan integrasi dan daya saing trade, tourism and

investment; (iv) peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global; (v) penguatan rantai pasok industry pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan Blue, Green, and Circular economy, digitalisasi, dan kemajuan teknologi; (vi) penyelesaian 10 destinasi pariwisata prioritas (Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, dan Morotai) yang dipandu melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan (RIDPN/ITMP), penguatan pariwisata regenerative Bali, pengembangan kluster pariwisata di IKN, dan pengembangan destinasi pariwisata prioritas berikutnya; serta (vii) penguatan promosi pariwisata antara lain melalui pembentukan kelembagaan proosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi.

Tabel 3 Indikator Capaian Transformasi Ekonomi pada Sektor Pariwisata dalam RPJPN 2025-2045.

Arah (Tujuan) Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	12. Pengembangan Pariwisata		
	a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0
	b. Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10	100

Sumber: UU No. 59/2024

Untuk memperkuat pondasi kepariwisataan Indonesia di kancah global, dibutuhkan integrasi ekonomi domestic dan global yang akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok Global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai *economic powerhouse* yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Salah satu kebijakan terkait integrasi tersebut dalam sektor pariwisata yakni penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada dalam kerangka Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

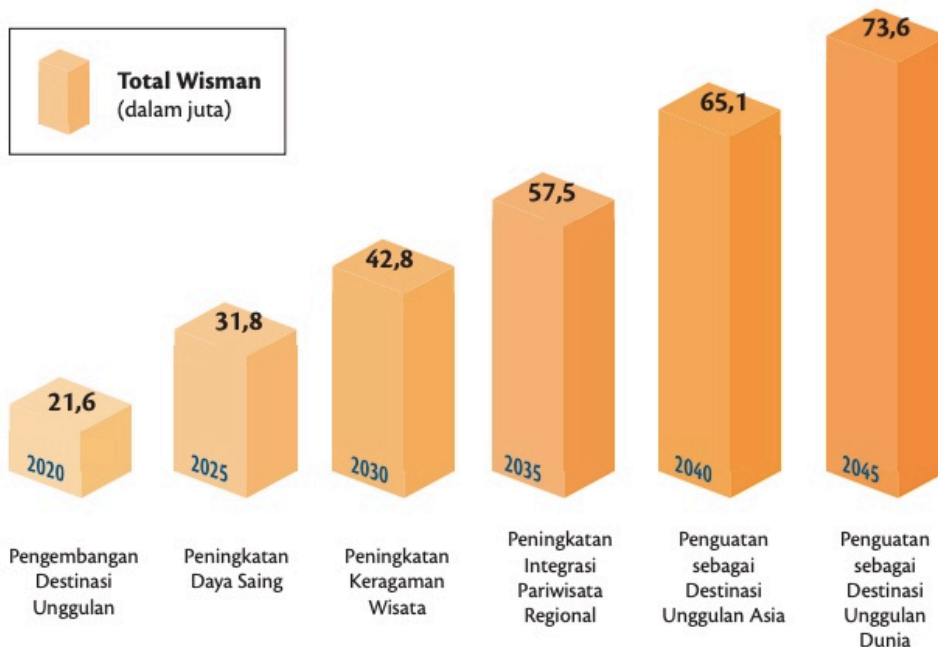
Kerangka pembangunan daya saing sebagaimana yang dijelaskan, diharapkan pembangunan pariwisata Indonesia tetap berpedoman pada paembangunan pariwisata berkelanjutan. Setiap periode 5 tahunan telah disusun kerangka yang berbeda-beda, pada tahun 2025-2029 (Penguatan penerapan Pariwisata Berkelanjutan); periode selanjutnya 2030-2034 (peningkatan daya saing pariwisata); periode 2035-2039 (Peningkatan destinasi pariwisata unggulan Asia); terakhir periode 2040-2045 (Perwujudan Destinasi Pariwisata Unggulan Dunia). Untuk mensukseskan arah pembangunan pariwisata tersebut, pelaksanaan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan menjadi unggulan dunia.



Gambar 17 Arah Kebijakan Pariwisata dalam kerangka pembangunan jangka Panjang

Sumber: Bappenas, 2023

Indonesia menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan digerakkan oleh investasi dan perdagangan; industri, pariwisata, maritim, dan jasa; serta didukung oleh infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat. Komitmen terhadap lingkungan hidup terus dijaga bagi keberlanjutan pembangunan. Pada jangka panjang, Indonesia diharapkan menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata Asia dan dunia. Keragaman Indonesia yang mencakup lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa, beberapa situs warisan dunia, serta keanekaragaman hayati terbesar ke-3, merupakan potensi besar bagi pengembangan pariwisata termasuk wisata bahari.



Gambar 18 Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata
Sumber: Bappenas, 2019

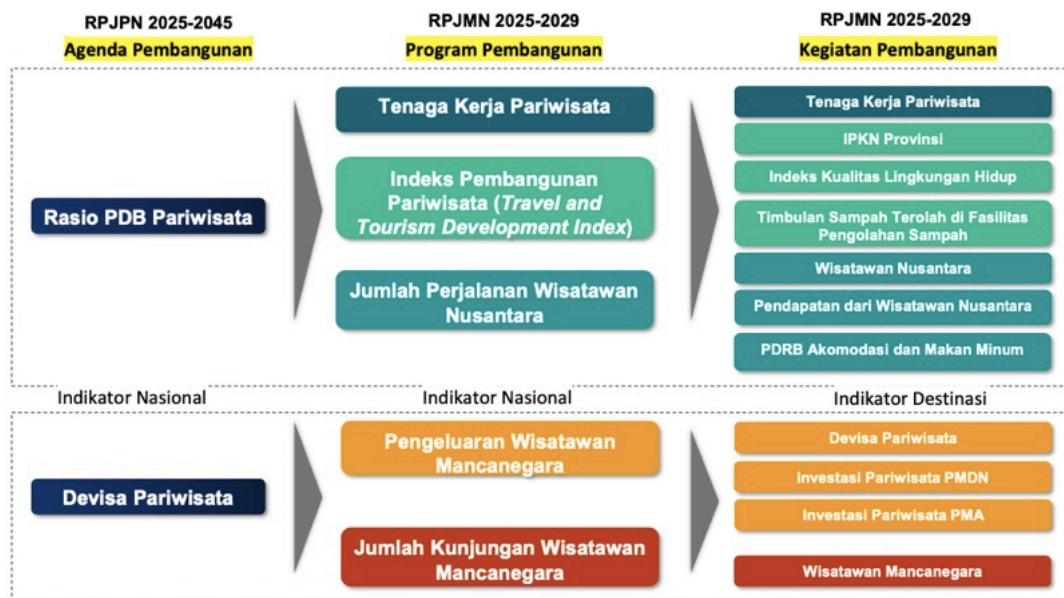
Pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi pariwisata didukung peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hingga mencapai 73,6 juta pada tahun 2045. Destinasi pariwisata dikembangkan dengan keragaman dan keunggulan layanan terbaik di kawasan ASEAN, Asia, dan dunia secara bertahap, sehingga peringkat daya saing pariwisata Indonesia meningkat menjadi 10 besar dunia.

Pariwisata Indonesia dalam Rencana Jangka Menengah

Pengembangan pariwisata dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 akan berfokus pada pemulihan, penguatan daya saing, dan pengembangan destinasi yang berkelanjutan. Kerangka RPJMN 2025-2029 ini akan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta pelestarian sosial budaya. Fokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi inti dalam upaya pengembangan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud diatas, di elaborasi berdasarkan isu strategis yang akan terjadi dalam menuju sasaran 2045 yakni Kontribusi PDB Pariwisata sebesar 8% dan Devisa Pariwisata sejumlah 100 Miliar USD. Isu strategis tersebut berupa Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (*overtourism*) dan akulturasi budaya dari wisatawan; Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata

berkelanjutan; Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman; Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata; serta Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal. Untuk mengetahui keterkaitan antara indikator pembangunan jangka Panjang terhadap program dan kegiatan pembangunan jangka menengah, dapat dilihat pada pemetaan indikator pembangunan pariwisata.



Gambar 19 Pemetaan Indikator Pembangunan Pariwisata antara Agenda Pembangunan, Program Pembangunan, dan Kegiatan Pembangunan.

Sumber: Bappenas, 2024

Penguatan indeks pembangunan pariwisata (*Travel & Tourism Development Index/TTDI*) telah masuk dalam Program pembangunan RPJMN 2025-2029, yang dimana memiliki kegiatan pembangunan yang terdiri dari IPKN Provinsi; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Program pembangunan pariwisata tersebut, bertema tentang Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan dengan sasaran program meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan. Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Blue-Green-Circular Economy* (BGCE); membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata; memperkuat rantai pasok inklusif; meningkatkan tata kelola destinasi dan industri pariwisata; meningkatkan kompetensi SDM pariwisata, dan melestarikan lingkungan dan budaya; meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan; menguatkan pemasaran yang bertanggung jawab; serta mekanisme pembiayaan pariwisata berkelanjutan.

Untuk memperkuat capaian pariwisata Indonesia, diharapkan program pembangunan dapat terukur dengan jelas dan tepat agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan pada tahun 2029 mendatang. Pelaksanaan program tersebut juga, pada dasarnya dapat dilakukan secara kolaborasi lintas sektor agar mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia pada level nasional maupun tingkat global. Oleh karena itu, dalam Rancangan RPJMN 2025-2029, terdapat lima indikator pembentuk dalam peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia dalam menuju 2029, yakni sebagai berikut:


Tabel 4 Indikator Program Pembangunan Pariwisata Menuju Tahun 2029

Sasaran Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan	Target 2029
meningkatkan nilai tambah dan daya saing kepariwisataan	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (<i>average spending per arrival</i>)	USD 1.600 /kunjungan
	Tenaga Kerja Pariwisata	29 juta orang
	Indeks Pembangunan Pariwisata (<i>Travel and Tourism Development Index</i>)	Peringkat 20 besar
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	20 juta kunjungan
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	1.500 juta perjalanan (MPD)

Sumber: Bappenas, 2024

Melihat kondisi capaian pembangunan kepariwisataan Indonesia saat ini dikancah global, Indonesia berhasil memperoleh hasil positif pada TTDI 2024, yakni naik 10 peringkat dari TTDI 2021. Sejatinya, Indonesia menempati peringkat ke 22 dari 119 negara, yang dimana mengalami peningkatan sebanyak +48 peringkat dari peringkat 70 pada tahun 2013, atau mengalami kenaikan +14 peringkat dari tahun 2019. Pada Kawasan Asia-Pasifik, Indonesia masuk dalam kelompok 6 besar, atau naik 1 peringkat dari TTDI 2021, yang dimana Indonesia mampu menggeser Selandia Baru dari peringkat ke-6. Di kawasan ASEAN, Indonesia masih berada diposisi ke-2 setelah Singapura, namun Indonesia mengalami peningkatan skor yang paling besar (+4,5%) yang terbaik di negara ASEAN.

Secara khusus, sejak tahun 2019, Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam *T&T Socioeconomic Impact* (+13%, peringkat 25 ke 10), *T&T Demand Sustainability* (+20,4%, peringkat 52 hingga 5) dan *Ground and Port Infrastructure* (+13%, peringkat 52 ke 36). Perkembangan lainnya yang dicapai oleh Indonesia sejak tahun 2019 di antaranya *Health and Hygiene* (+5,5%, peringkat 91 hingga 89) dan *ICT Readiness* (+8,3%, tetap di peringkat 73). Meskipun pertumbuhan T&T di atas rata-rata, negara-negara *Low to upper- middle-income economies* seperti negara berkembang lainnya hampir 90% nya berada di bawah rata-rata



skor TTDI (yakni 4,0). Hal ini menunjukkan perlunya investasi lebih lanjut untuk menutup kesenjangan dalam rangka peningkatan pangsa pasar T&T, serta kesiapan dalam menghadapi risiko dan peluang di masa depan.

Namun demikian, untuk mencapai target pada tahun 2029, yakni peringkat TTDI masuk dalam 20 besar dan bahkan 15 besar, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memperkuat capaian indeks kepariwisataan Indonesia di kancah global. Salah satu langkah strategis untuk mencapai target tersebut diantaranya membangun grand design strategies untuk memperkuat capaian-capaian indikator *Travel & Tourism* mulai dari Level Global, Level Nasional, hingga Level Kabupaten/Kota. Kerangka strategi tersebut perlu disesuaikan dan disinkronisasikan antara data capaian yang dilakukan Pemda Kabupaten/Kota, Pemda Provinsi, dan juga Kementerian/Lembaga terkait. Dikarenakan proses perhitungan indeks TTDI menggunakan data capaian global yang bersumber dari organisasi Internasional, strategi penguatan indikator juga harus dapat disinkronisasikan antara data yang dihasilkan K/L dengan organisasi internasional. Dengan demikian, kerangka strategi pembangunan TTDI dapat terintegrasi dengan program/kegiatan dari level daerah, nasional, hingga global.

GRAND STRATEGY KEPARIWISATAAN INDONESIA

Grand Strategy ini merupakan panduan strategis nasional yang dirancang untuk mengarahkan perkembangan sektor kepariwisataan Indonesia menjadi industri yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. *Grand Strategy* Kepariwisataan ini akan berperan sebagai kerangka kerja bagi pemerintah, pelaku industry, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai visi dan misi pariwisata Indonesia di kancah global. Melalui program pembangunan yang terintegrasi, diharapkan grand strategy ini dapat menawarkan langkah-langkah strategi pembangunan kepariwisataan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholders. Kerangka grand strategy ini dibagi kedalam 3 (tiga) fokus, yakni: Penguatan Indikator TTDI Indonesia; Pengembangan IPKN (Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional) yang Berkelanjutan; dan Pembangunan IPKKK (Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota) yang berdaya saing.



Gambar 20 Kerangka Grand Strategy Pembangunan Kepariwisata Indonesia

Strategi 1: Penguatan Indikator TTDI Indonesia

Penjelasan: Kerangka TTDI 2024 terdiri dari 5 Dimensi, 17 Pilar, dan 102 Indikator. Penguatan Indikator TTDI Indonesia dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas terkait apa saja indikator yang mempengaruhi indikator TTDI berdasarkan hasil capaian Indonesia. Sselanjutnya, indikator tersebut diampu oleh K/L apa saja, sehingga dapat dengan jelas peta kolaborasi kedepannya. Untuk membangun daya saing kedepan, perlu untuk disusun suatu langkah strategi dalam melakukan perbaikan dari masing-masing indikator. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai hasil positif pengukuran daya saing kepariwisataan Indonesia di kancah global.

Tabel 5 Strategi Peluang Perbaikan TTDI Indonesia

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
A	ENABLING ENVIRONMENT, 1-7 (best)	4.63	4,7	4,7			
1	Business Environment, 1-7 (best)	4.67	4.28	4,3			
1.01	Rule of law, 0-100 (best)	3.44	4.1	4,3	<p>Pelindungan terhadap Hak Milik, penilaian didasarkan pada skor rata-rata dari subfaktor dengan bobot yang sama, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risiko ekspropriasi, - perlindungan hak kekayaan intelektual, serta - efektivitas penegakan kontrak dan hukum. 	<p>Kementerian ATR/BPN Kemenkumham Mahkamah Agung Kejaksaan Agung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengawasan berkala terhadap kepemilikan tanah dan properti untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan. - Membentuk task force lintas lembaga untuk penanganan masalah pertanahan dengan layanan aduan 24 jam
					<p>Efektivitas yudisial diukur melalui skor rata-rata dari subfaktor yang juga memiliki bobot yang sama, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - independensi kehakiman, 	<p>Mahkamah Agung Komisi Yudusial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadopsi praktik terbaik dan standar internasional dalam sistem peradilan dari negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan reformasi peradilan.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					<ul style="list-style-type: none"> - kualitas proses pengadilan, dan - persepsi terhadap kualitas layanan publik serta - independensi pegawai negeri. 		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti mewajibkan publikasi putusan pengadilan - Membangun sistem pengaduan yang efektif dan mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat pengadilan beserta dengan perlindungan saksi. - Memperkuat peran Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim dan memastikan adanya mekanisme sanksi yang efektif bagi pelanggaran dan persoalan yang menarik perhatian publik
					Integritas pemerintah ditentukan dari rata-rata skor subfaktor yang serupa, mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - persepsi korupsi, - risiko suap, dan - upaya pengendalian korupsi 	KPK Kejaksaan Agung POLRI	<ul style="list-style-type: none"> - Merevisi dan memperbarui peraturan anti-korupsi untuk menanggapi tantangan dan dinamika baru dalam praktek korupsi. - Mempercepat Peraturan perundang-undangan tentang Perampasan Aset - Meningkatkan internalisasi dan pemantauan pelaksanaan Core Values "BerAKHLAK" dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN).
1.02	Burden of government regulation, 1-7 (best)	5.01	4.1	3,9	Perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah dan persyaratan administratif	Kemenhumkam	Secara berkala mengevaluasi kebijakan dan peraturan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan tidak membebani perusahaan secara berlebihan.
					Kemudahan dalam mengajukan izin usaha	Kementerian Investasi/BKPM	Penggunaan Sistem Terpadu Elektronik (Online Single Submission - OSS)
					Undang - undang yang mendukung kemudahan berusaha	Kemenkumham	Penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					Kemudahan birokrasi dalam mendirikan dan menjalankan usaha	Kementerian Investasi/BKPM	Penguatan Pengawasan Anti-Korupsi
1.03	Government ensuring policy stability, 1-7 (best)	5.37	4.3	4,0	Kebijakan yang stabil untuk berbisnis	Kemenkeu KemenInvest BI OJK	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk kolaborasi dalam proyek-proyek lingkungan. - Respon Cepat Kebijakan Fiskal & APBN Menghadapi Pandemi
1.04	Country credit rating, 0-100 (best)	4.60	4.3	4,0	Kelayakan Kredit Negara	Kemenkeu	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan utang yang efektif untuk mengurangi beban utang, termasuk refinancing utang jangka pendek dengan utang jangka panjang pada suku bunga yang lebih rendah.
					Peringkat Kredit Utang Negara	Kemenkeu Kementerian PPN/Bappenas Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengelolaan ULN dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga defisit anggaran pada level yang aman dan terkendali dengan memprioritaskan pengeluaran yang produktif serta memperbaiki efisiensi belanja negara.
1.05	De-jure financial globalization, 0-100 (best)	4.34	4.3	4,6	Pembatasan penanaman modal, diukur melalui prevalensi kepemilikan asing dan regulasi aliran modal internasional	Kemenkeu KemenInvest/BKPM	Menyederhanakan prosedur administrasi terkait pembatasan investasi untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi proses.
					Keterbukaan Rekening Modal	Kemenkeu	Meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi terkait aliran modal dan kepemilikan aset untuk memerangi penghindaran pajak dan pencucian uang.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					Perjanjian Investasi Internasional	KemenInvest/BKPM Kemenlu	Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa perjanjian investasi diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan.
1.06	De-jure trade globalization, 0-100 (best)	4.55	4.5	4,9	Regulasi perdagangan	Kemenkeu Kemendag Kemenperin Kemenhumkam	- Pengaturan terbaru dari kementerian perdagangan yang mengatur termasuk ekspor dan impor
					Pajak Perdagangan	Kemenkeu Kemendag APBN DPR	- Pajak yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa
					Tarif Perdagangan	Kemenkeu Kemendag	- Pengaturan Tarif non Tarif
					Perjanjian Perdagangan	Kemenhumkam Kemendag	- Perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan negara negara asia pasifik
1.07	SME access to finance, 1-7 (best)	5.37	4.4	4,1	Kemudahan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mendapatkan pembiayaan operasional bisnis melalui sektor keuangan	OJK BI Kemenkeu Kemendag Kemenkop UKM	Platform crowdfunding bisa digunakan untuk mendapatkan dana dari masyarakat umum
2	<i>Safety and Security, 1-7 (best)</i>	5.77	5.70	5,5			

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
2.01	Confidence in local police, 0-1 (best)	6.25	5.1	4,7	Kepercayaan terhadap institusi Kepolisian	POLRI Kopolnas	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih terbuka terhadap media dan masyarakat, terutama penanganan kasus yang mendapat perhatian publik - Memperkuat posisi Kompolnas dalam melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri;
2.02	Safety walking alone at night, 1-7 (best)	5.80	4.7	4,4	Tingkat Kriminalitas pada Malam Hari	POLRI Kopolnas Kemenko Pohukam	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah CCTV pada tempat di mana rawan terjadi tindakan kriminalitas - Meluncurkan berbagai inisiatif keselamatan publik, termasuk supermarket dan kafe yang buka 24 jam, yang menyediakan tempat aman untuk dikunjungi di malam hari.
					Kebijakan penjagaan keamanan di malam hari	POLRI	<ul style="list-style-type: none"> - Menekankan patroli kaki dan sepeda, kunjungan ke rumah, dan peningkatan visibilitas polisi di kawasan.
					Penerangan jalan di malam hari	Kemenuhub	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang lampu pada tempat tempat yang gelap.
2.03	Homicide rate per 100,000 pop, 1-7 (best)	6.14	6.5	6,0	Jumlah Kasus Pembunuhan	POLRI Kemenuhumkam Kemendag BPS	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan keamanan pada tempat-tempat yang rawan - Melakukan sosialisasi kepada warga secara berkala - Melaksanakan patroli kepolisian bersama-sama dengan warga - Berkolaborasi dengan institusi terkait lainnya

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
2.04	Global Terrorism Index, 1-7 (best)	3.70	5.3	5,8	Insiden Terrorisme	POLRI TNI BIN BNPT	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan terkait WNI yang disinyalir mejadi Teroris - Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan kepada WNI yang disinyalir Teroris - Meningkatkan keamanan pada tempat kelembagaan - Meningkatkan keamanan pada tempat keibadahan - Meningkatkan keamanan pada tempat transportasi (Bandara, terminal, etc
					Kematian Akibat Terrorisme	POLRI TNI BIN BNPT	- Kompensasi atas kematian akibat terorisme
					Sandera Dalam Terrorisme	POLRI TNI BIN BNPT	- menciptakan peraturan peraturan spesifik atas prosedur penyelamatan tiap sandera dalam situasi tersebut
2,05	Organized violence, deaths per 100,000 pop (1-7 best)	6,98	6,9	6,7	Konflik Negara	TNI POLRI BIN	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Diplomasi Bilateral dan Multilateral - Kerjasama Pertahanan Regional
					Konflik Non Negara	TNI POLRI BIN	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Polri dan TNI - Peningkatan Kerjasama Intelijen
					Tindakan Kekerasan Sepihak	TNI POLRI BIN	- Memberikan fasilitas kepada korban dengan membentuk lembaga untuk melindungi korban dan pemenuhan hak-hak korban, serta memberikan pendampingan kepada korba
3	Health and Hygiene, 1-7 (best)	3.78	4.53	4,7			

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
3.01	Number of Physician per 1,000 pop, 1-7 (best)	1.83	3.0	3,8	- Jumlah Dokter Umum - Jumlah Dokter Spesialis	Kemenkes	- Menambah Fakultas kedokteran di beberapa Universitas - meningkatkan Jumlah lulusan fakultas kedokteran - mengurangi biaya pendidikan dan memberikan insentif khususnya bagi Calon Dokter yang siap ditempatkan di daerah 3T - meningkatkan jumlah kuota pendidikan kesehatan - membangun beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit Baru
3.02	Use of basic sanitation, % of pop, 1-7 (best)	6.21	6.2	6,0	Jumlah Pengguna Fasilitas Layanan Sanitasi Dasar	Kemenkes KLHK BPS Kemen PUPR	- Memperbanyak fasilitas layanan sanitasi pada lingkungan kota
3.03	Use of basic drinking water, % of pop, 1-7 (best)	6.29	6.3	6,2	Jumlah pengguna layanan air minum dasar	Kemenkes KLHK BPS Kemen PUPR	- Meningkatkan filter air pada pedesaan dan tempat-tempat terpencil - Merevitalisasi jaringan pemipaan air minum untuk kebutuhan masyarakat kota
3.04	Hospital beds density per 10,000 pop, 1-7 (best)	1.87	3.3	3,5	Jumlah tempat tidur rawat inap dalam Rumah Sakit Pemerintah	Kemenkes	- Melakukan kerjasama antara pemerintah dan Swasta dalam rangka pembangunan Rumah Sakit di berbagai daerah (Tingkat Kabupaten/Kota Hingga Provinsi) - Membangun Puskesmas dan Rumah Sakit khususnya di daerah 3T - Membangun rumah sakit terapung di daerah-daerah pesisir dan di pedalaman
					Jumlah tempat tidur rawat inap dalam Rumah sakit swasta	Kemenkes	
					Jumlah tempat tidur rawat inap dalam rumah sakit umum	Kemenkes	

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					Jumlah tempat tidur rawat inap dalam rumah sakit khusus	Kemenkes	
					Jumlah tempat tidur rawat inap dalam pusat rehabilitasi	Kemenkes	
3.05	Communicable disease incidence per 100,000 pop, 1-7 (best)	5.18	5.5	5,3	Jumlah individu yang terdiagnosis penyakit menular seperti HIV/AIDS, infeksi menular seksual lainnya, infeksi pernapasan bawah, tuberkulosis, penyakit tropis yang diabaikan, dan malaria, serta penyakit menular lainnya.	Kemenkes	<ul style="list-style-type: none"> -Menghimbau kepada seluruh warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan diri dan lingkungan - Menjadwalkan pos-pos kesehatan kepada wargan secara berkala
4	<i>Human Resources and Labour Market, 1-7 (best)</i>	4.13	4.09	4,2			
4.01	Labour force with intermediate education, % of total, 1-7 (best)	3.66	4.0	4,5	Jumlah Angkatan kerja yang berpendidikan menengah atas atau non-universitas setelah sekolah menengah sesuai dengan Klasifikasi Standar Internasional Bidang Pendidikan 2011 (ISCED 2011)	Kemendikbudristek Kemnaker Kemenko PMK BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Mendidik Masyarakat yang kurang berpendidikan dengan mengembangkan event pendidikan di daerah yang kurang berpendidikan (Desa, Kampung, etc) - Memberikan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu - Menyusun program Pelatihan bagi para angkatan kerja

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
4.02	Labour force with advanced education, % of total, 1-7 (best)	2.51	3.8	3,9	Jumlah Angkatan kerja yang berpendidikan tinggi termasuk gelar sarjana atau setara, gelar master atau setara, dan gelar doktor atau setara, sesuai dengan Klasifikasi Standar Internasional Bidang Pendidikan 2011 (ISCE 2011).	Kemendikbudristek Kemnaker Kemenko PMK BPS	- Meningkatnya insentif pada angkatan kerja yang berpendidikan tinggi - Memperkuat revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi atau Technical Vocational Education and Training (TVET)
4.03	Quality of secondary education, 1-7 (best)	4.85	4.3	4,1	- Efektivitas pendidikan menengah non kejuruan - Jumlah lulusan pendidikan menengah non kejuruan - Jumlah lowongan kerja bagi lulusan pendidikan menengah non kejuruan	Kemendikbudristek BNSP Kemeneraker	- Meningkatnya insentif pada angkatan pendidikan non kejuruan - Membangun skema pelatihan pengembangan kompetensi - Memetakan jumlah lulusan dengan ketersediaan lowongan pekerjaan - Meningkatkan lapangan pekerjaan dengan berkolaborasi pada seluruh industri
4.04	Quality of tertiary education, 1-7 (best)	5.68	4.5	4,4	- Efektivitas pendidikan tingkat tersier - Jumlah lulusan pendidikan tingkat tersier - Jumlah lowongan kerja bagi lulusan pendidikan tersier	Kemendikbudristek Kemenko PMK Kemnaker	- Meningkatkan pendanaan untuk penelitian dan proyek inovatif di perguruan tinggi. - Membangun skema pelatihan pengembangan kompetensi - Memetakan jumlah lulusan dengan ketersediaan lowongan pekerjaan - Meningkatkan lapangan pekerjaan dengan berkolaborasi pada seluruh industri
4.05	Hiring and firing practices, 1-7 (best)	5.16	4.3	4,0	- Peraturan Perekrutan pekerja fleksibel	Kemnaker	- Menetapkan standar kompensasi yang adil bagi pekerja yang terkena PHK untuk memberikan jaminan keamanan finansial sementara
					Peraturan Pemecatan pekerja fleksibel	Kemnaker	- Memahami Kontrak Kerja yang Jelas - Alasan yang Sah untuk PHK

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
4.06	Ease of finding skilled employees in local labour market, 1-7 (best)	5.17	4.3	4,3	Pencarian keterampilan di pasar tenaga lokal	Kemenko PMK BNSP Kemnaker	- Mengembangkan Event yang memperluas jaringan non Pekerja dalam bidang bidang tertentu
					Kesesuaian kurikulum pembelajaran dan profil lulusan dengan pasar tenaga kerja	Kemendikbudristek	- Pembaruan Kurikulum Secara Berkala - Program Pendidikan dan Pelatihan Ulang (Reskilling dan Upskilling)
4.07	Flexible working arrangements, 1-7 (best)	5.04	4.4	4,2	fleksibilitas kerja jarak jauh dalam perusahaan indonesia	Kemnaker Kemenko PMK BUMN	- Revisi regulasi ketenagakerjaan yang mendukung fleksibitas kerja - Menambahkan beberapa jenis pekerjaan remote work - Menyusun pedoman yang mengatur FWA
					Jumlah industri yang menjalankan program FWA		
4.08	Labour force participation, % of adult pop, 1-7 (best)	4.55	3.9	3,8	Jumlah Penyedia Tenaga kerja bagi penduduk berumur 15 tahun keatas	Kemnaker	- Memperkuat program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja, terutama bagi lulusan SMP & SMA/SMK
4.09	Equal workforce opportunities, 1-7 (best)	4.30	4.3	4,3	Kesetaraan Kerja Wanita	Kemenko PMK	- Meingkatkan Keinginan masyarakat untuk berkontribusi dengan ekonomi agar mengurangi pengangguran
					Kesetaraan Kerja Etnis atau Latar Belakang Ras	Kemenko PMK	- Perkuat penegakan hukum yang melarang diskriminasi berdasarkan etnis atau ras di tempat kerja. - Memastikan bahwa proses rekrutmen dan seleksi tidak diskriminatif dan mempertimbangkan keberagaman etnis serta latar belakang ras dalam perekrutan karyawan.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					Kesetaraan Kerja Penyandang Disabilitas	Kemenko PMK	<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak atas pekerjaan - Mendorong dan mengatur perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik seperti ramp, lift, dan toilet khusus.
					Kesetaraan Kerja yang mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ+	Kemenko PMK	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengesahan undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas melarang diskriminasi di tempat kerja berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender.
4.10	Workers' rights, 1-7 (best)	2.20	3.1	4,1	tingkat penghormatan terhadap hak-hak pekerja	Kemenaker	<ul style="list-style-type: none"> - Menegaskan peraturan tentang hak pekerja - Adanya monitoring dan evaluasi terkait pelanggaran hak-hak pekerja
					Pelanggaran Hak pekerja dalam hukum dan praktik	Kemenaker	<ul style="list-style-type: none"> - Tegaskan pekerja dalam membaca ToS dan Kontrak mereka - pekerja dapat diinformasikan tentang hak pekerja - Kemenaker dapat menindak keras bagi perusahaan yang melanggar hak pekerja
4.11	Female labour force participation, %, 1-7 (best)	4.43	4.7	4,9	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan - Jumlah partisipasi angkatan kerja laki-laki 	Kemenaker	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan dapat menyusun SOP terkait perekrutan angkatan kerja perempuan dan laki-laki - Kemenaker dapat memantau terkait angkatan kerja perempuan dan laki-laki - Angkatan kerja untuk perempuan dan laki-laki

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
							harus diperjelas dalam kompetensi dan akapabilitas yang dibutuhkan
4.12	Social protection basic coverage, % of pop, 1-7 (best)	2.67	4.1	4,3	Jumlah Penduduk yang tercakup dalam komponen utama perlindungan sosial, seperti tunjangan anak dan kehamilan, bantuan bagi pengangguran, penyandang disabilitas, korban kecelakaan kerja, dan lansia.	BPJS Kemenkes Kemenaker	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat - Menyeimbangkan hak-hak yang diterima masyarakat dalam keikutsertaan pada program perlindungan sosial
4.13	Social protection spending, % of GDP, 1-7 (best)	1.41	2.3	3,0	Jumlah Pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial dan kesejahteraan	BPJS Kemenkes Kemenaker	<ul style="list-style-type: none"> - Mereformasi terhadap program-program yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat - Menyeimbangkan hak-hak yang diterima masyarakat dalam keikutsertaan pada program perlindungan sosial
5	ICT Readiness, 1-7 (best)	4.81	4.98	5,0			
5.01	Individuals using internet, % of pop, 1-7 (best)	4.99	5.2	5,5	Jumlah Pengguna Internet di Indonesia	KemKominfo BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah jumlah BTS di Indonesia - Pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta serta seluruh provider di Indonesia
5.02	Broadband internet subscribers per 100 pop, 1-7 (best)	1.59	3.1	3,4	Jumlah total langganan broadband tetap (berkabel) yang merupakan layanan akses internet publik berkecepatan tinggi dengan koneksi TCP/IP, pada kecepatan unduh minimal 256 kb/detik.	KemKominfo BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah jumlah BTS di Indonesia - Membangun beberapa tempat free internet dalam lingkungan yang kurang mendapati layanan internet

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
5.03	Active mobile broadband internet subscription per 100 pop, 1-7 (best)	5.56	5.6	5,6	Jumlah langganan broadband seluler aktif di Indonesia	KemKominfo BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah jumlah BTS di Indonesia - Memberikan promo paket Internet bagi seluruh Provider
5.04	3G mobile network coverage rate, % of pop, 1-7 (best)	6.70	6.4	6,5	Ketersediaan Jaringan minimal 3G di wilayah Indonesia	KemKominfo	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang beberapa menara seluler dalam lokasi strategis yang menyangkupi beberapa lokasi pedesaan yang tidak ada sinyal jaringan seluler - Memasang menara seluler hingga kawasan 3T
5.05	Use of digital payments, % pop 15+, 1-7 (best)	3.23	4.8	4,9	Jumlah populasi yang berumur 15 tahun ke atas yang terlibat dalam pembayaran digital	Bank Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Mendidik Anak umur 15 tahun agar mempelajari pembayaran digital - Melakukan sosialisasi hingga kesekolah-sekolah dalam mekanisme pembayaran digital
5.06	Use of digital platforms for providing transportation and shipping, 1-7 (best)	5.59	4.7	4,5	Jumlah Pengguna Platform Digital untuk Transportasi dan Pengiriman	KemKominfo	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbanyak promosi platform digital untuk transportasi dan pengiriman - Mempermudah aplikasi transportasi yang sudah ada - Mengintegrasikan aplikasi pengirimandi Indonesia
5.07	Use of digital platform for providing hotels, restaurants and leisure activity services, 1-7 (best)	5.58	4.9	5,0	Jumlah Platform Digital pada Hotel	KemKominfo	<ul style="list-style-type: none"> - Mempermudah layanan Digital untuk layanan dan pengiriman - Melayani berbagai interaksi online pada platform digital dengan Customer Service yang memadai
					Jumlah Platform Digital pada Restoran	KemKominfo	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pegawai restaurant pada media digital untuk mengembangkan sosial media pada restaurant tersebut.
					Jumlah Platform Digital pada layanan Rekreasi	KemKominfo Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbanyak dan Memudahkan aksesibilitas pada layanan rekreasi

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					Pemanfaatan Platform digital pada hotel	KemKominfo Kemenparekraf	- Pelatihan pada penggunaan teknologi digital tersebut
					Pemanfaatan Platform Digital pada Restoran	KemKominfo	- Pelatihan pada penggunaan teknologi digital tersebut
					Pemanfaatan Platform Digital pada Layanan Rekreasi	KemKominfo Kemenparekraf	- Pelatihan pada penggunaan teknologi digital tersebut - pelatihan epda perbaikan penggunaan alat digital tersebut
5.08	Power losses, % of domestic supply, 1-7 (best)	5.28	5.1	4,9	Jumlah Kerugian transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagai persentase pasokan domestik	KemKominfo ESDM	- Melakukan evaluasi terkait kebocoran distribusi listrik ke konsumen - Memperbaiki permasalahan Kerugian transmisi dan distribusi tenaga listrik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak - Menganalisis data pelanggan dalam membantu menemukan kerugian teknis dan non-teknis. Pola yang tidak umum dapat membantu mendeteksi penipuan dan pencurian.
B	T&T POLICY AND ENABLING CONDITIONS, 1-7 (BEST)	5.10	4,5	4,3			
6	Prioritization of T&T, 1-7 (best)	6.03	4.49	4,4			
6.01	T&T government expenditure, % of Gov't budget, 1-7 (best)	6.70	3.7	3,4	Jumlah Pengeluaran pemerintah di sektor perjalanan dan pariwisata	Kememkeu Kemenparekraf BPS	- Membuat skala prioritas dalam penguatan perjalanan dan pariwisata - Memfokuskan Pengeluaran terhadap Destinasi Pariwisata Prioritas agar Meningkatkan ekonomi setempat

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
6.02	Comprehensiveness of annual T&T data, 1-7 (best)	6.20	4.0	4,3	Ketersediaan Data Statistik Pariwisata	BPS	- Meningkatkan Kolaborasi dengan berbagai K/L dalam memproduksi data - Melakukan pengecekan dan validasi terhadap data-data statistik pariwisata
6.03	Timeliness of providing monthly/quarterly T&T data, 1-7 (best)	7.00	6.5	6,3	Ketersediaan data Kedatangan Wisatawan Mancanegara Secara Bulanan	BPS Kemenparekraf	- Lack perhitungan data pariwisata dapat diperbaiki dengan H+1 bulan - Mempererat kolaborasi dengan berbagai stakeholders
					Ketersediaan data penerimaan pariwisata Secara Bulanan	BPS Kemenparekraf	
6.04	Country Brand Strategy rating, 1-7 (best)	4.79	4.6	4,5	Jumlah promosi tentang Country brand	Kemenparekraf	- memperkuat promosi country brand ke berbagai kegiatan/event - meningkatkan promosi conutry brand ke berbagai negara - melakukan kolaborasi dengan berbagai stakholders dalam meningkatkan contry brand strategy
7	Openness to T&T, 1-7 (best)	3.83	3.96	3,9			
7.01	Visa requirements, 1-7 (best)	4.19	3.8	3,4	- Jumlah Bebas Visa Kunjungan - Jumlah Visa on Arrival - Jumlah Visa Electronic	Kemenhumkam	- Melakukan kajian yang mendalam terkait pengelompokan negara-negara masuk kedalam kategori jenis visa BVK, VoA, dan Visa Electronic - Berkolaborasi dengan K/L lainnya dalam rangka memperkuat kebijakan visa Indonesia - Koordinasi terus menerus dengan berbagai negara dalam rangka memperluas kebijakan Visa - Meningkatkan efisiensi perizinan dalam penerbitan visa

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
7.02	Number of air service agreements, 1-7 (best)	2.67	3.2	3,4	Jumlah Perjanjian Layanan Udara yang terlibat suatu peroknomian.	Kemenhub Kemenlu	<ul style="list-style-type: none"> - Indonesia masuk dalam ASEAN open sky agreement - Memperbaharui dan meningkatkan jumlah kebijakan air service agreement dengan berbagai negara, salah satunya negara-negara yang menjadi daya tarik kunjungan wisman - Mengembangkan bandara-bandara utama seperti Soekarno-Hatta (Jakarta) dan Ngurah Rai (Bali) sebagai hub internasional yang menghubungkan berbagai destinasi global.
7.03	Travelsat Hospitality Reputation Index, 1-7 (best)	5.53	5.5	5,4	Data Sentimen dan Diskusi Online tentang keramahan penduduk setempat terhadap pengunjung yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberlanjutan, ekonomi, lingkungan, dan isu sosial politik yang berdampak pada persepsi keramahaman komunitas tujuan wisata.	Kemendparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan masyarakat yang ada di sekitar lokasi destinasi wisata untuk menjaga dan mentertibkan lingkungan - Melakukan sosialisasi secara berkala terkait keramahaman terhadap pengunjung oleh K/L terkait
7.04	Passport mobility score	2.93	3.6	4,2	Jumlah negara di dunia yang bebas visa dengan menggunakan Passport Indonesia	Kemendparekraf Kemendhumkam kemenlu	<ul style="list-style-type: none"> - Diplomasi dengan berbagai negara terkait bebas visa untuk Passport Indonesia - Melakukan kajian mendalam khususnya pro & Cons untuk negara yang akan menjadi tujuan bebas visa dengan Passport Indonesia
8	Price Competitiveness, 1-7 (best)	5.44	5.02	4,6			

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
8.01	Hotel price index, US\$, 1-7 (best)	7.00	5.4	4,4	Harga Tarif Hotel Kelas Menengah hingga Atas	BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun standarisasi harga hotel kelas menengah hingga ke atas - Melakukan promosi yang terintegrasi terkait perhotelan di seluruh daerah - Memberikan insentif bagi hotel - Untuk mengurangi monopoly pada tarif hotel, pembuatan peraturan tentang pengurangan harga standar hotel kelas menengah hingga atas
8.02	Purchasing power parity, PPP\$, 1-7 (best)	6.36	5.5	5,2	Konversi Paritas Daya Beli	Kemenkeu BPS	Memanfaatkan teknologi informasi dan big data untuk mengumpulkan dan menganalisis data harga secara lebih efisien dan akurat.
					Penguatan ekonomi Indonesia	Kemenkeu BPS	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi - ekspansi moneter
8.03	Fuel price levels, US\$/litre, 1-7 (best)	4.72	3.8	3,7	Harga Bensin Eceran	Kemen ESDM	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan harga BBM dengan pasar di global secara real-time - Berkomunikasi dengan industri perminyakan untuk dapat membangun harga yang kompetitive
8.04	Short-term rental price, US\$, 1-7 (best)	3.70	5.3	5,0	Ketersediaan data AirBnB pada Properti yang Aktif	Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Berkolaborasi dengan AirBnB terkait data harian - Mengoptimalkan penggunaan Search Engine Optimization (SEO) dan Search Engine Marketing (SEM) untuk meningkatkan visibilitas properti di Airbnb.
C	INFRASTRUCTURE AND SERVICES, 1-7 (best)	3.40	3,4	3,4			
9	Air Transport Infrastructure, 1-7 (best)	4.34	3.98	3,6			

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
9.01	Efficiency of air transport services, 1-7 (best)	5.48	4.9	4,7	Ketepatan waktu pada Layanan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan	Mengimplementasikan sistem manajemen penerbangan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas.
					Frekuensi pada layanan transportasi udara	Kementerian Perhubungan	Menerapkan teknologi pengendalian lalu lintas udara (Air Traffic Control) yang lebih canggih, seperti sistem navigasi berbasis satelit, yang dapat mengurangi waktu tunggu pesawat untuk lepas landas dan mendarat
					Kecepatan pada layanan transportasi Udara	Kementerian Perhubungan	Mengembangkan bandara-bandara utama di Indonesia sebagai hub transportasi udara regional untuk meningkatkan konektivitas antar-daerah dan memperpendek waktu tempuh melalui penerbangan langsung
					Harga pada layanan Transportasi Udara	Kementerian Perhubungan	Mengurangi monopoli dalam penyediaan bahan bakar avtur untuk menciptakan persaingan yang sehat dan menurunkan harga avtur, yang merupakan salah satu komponen biaya terbesar bagi maskapai
9.02	Available seat kilometres per week, millions per pop, 1-7 (best)	N/A	2.1	2,3	Jumlah Kapasitas Penumpang yang bisa diangkut maskapai penerbangan	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong maskapai untuk mengadopsi teknologi digital dalam operasional, seperti sistem reservasi online, check-in otomatis, dan aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi. - Meningkatkan jumlah frekuensi penerbangan untuk Daerah-daerah yang menjadi prioritas utama,
9.03	Number of operating airlines, 1-7 (best)	N/A	4.0	3,3	Jumlah Maskapai untuk penyediaan penerbangan terjadwal	kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Mempermudah izin penerbangan untuk maskapai baru yang melayani rute-rute daerah 3T - Menambah kerjasama dengan maskapai baru yang akan melayani rute-rute daerah priritas pariwisata.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
9.04	Airport connectivity score, 1-7 (best)	6.62	4.9	3,9	Jumlah konektivitas antar bandara di Indonesia	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kerjasama dengan maskapai untuk rute-rute penerbangan prioritas - Memberikan insentif bagi maskapai yang akan melakukan konektivitas baru pada daerah 3T - Menambah kerjasama dengan berbagai maskapai dalam menambah konektivitas penerbangan di daerah Pusat Bisnis
10	Ground and Port Infrastructure, 1-7 (best)	3.97	3.91	3,6			
10.01	Quality of roads, 1-7 (best)	5.20	4.6	4,4	Kualitas, Keluasan, dan Kondisi Infrastruktur jalanan	Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas atas kondisi jalan raya di Indonesia - Tanggap cepat dalam perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan
10.02	Road density, km/surface area, 1-7 (best)	1.89	3.7	3,2	Jumlah Panjang Jalan raya, jalan utama atau nasional, jalan sekunder atau regional, serta semua jenis jalan lainnya.	Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki jalan yang masih dibawah standar untuk menjadi jalan beraspal - membangun jalan baru yang menghubungkan kota-kota yang memiliki kepadatan penduduk diatas rata-rata
10.03	Efficiency of Train Services, 1-7 (best)	5.26	4.3	3,6	Harga pada layanan Kereta Api	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah kerjasama dengan pihak swasta dalam pemanfaatan rel kereta api - Mengintegrasikan jadwal kereta api jarak jauh - Menghitung dan menerapkan secara jelas harga tiket per kilometer
					Ketepatan waktu pada layanan Kereta Api	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan jadwal lebih pasti dan Jelas
					Frekuensi pada layanan Kereta Api	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah frekuensi jadwal kereta api pada libur nasional

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					Kecepatan pada layanan Kereta Api	Kementerian Perhubungan	- Mengurangi rail crossing dan membuat fly over atau underpass pada rel kereta api
10.04	Railroad density, km/100 square km surface area, 1-7 (best)	1.18	2.2	2,3	Jumlah Jaringan Rel Kereta Api	Kementerian Perhubungan	- Membangun jaringan rel kereta api untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan - Membangun jaringan rel kereta wisata untuk Pulau Bali
10.05	Efficiency of public transport services, 1-7 (best)	5.05	4.4	4,1	Frekuensi pada layanan transportasi darat	Kementerian Perhubungan	- Meningkatkan pembuatan terminal bis dan jadwal yang tetap - Menambah kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam pembangunan jaringan transportasi darat
					ketepatan waktu pada layanan transportasi darat	Kementerian Perhubungan	- Membangun sistem Traffic Counting untuk ketepatan jadwal transportasi Bus dan transportasi darat pada umumnya
					Harga pada layanan transportasi darat	Kementerian Perhubungan	- Menyusun pedoman yang jelas terkait harga batas atas dan batas bawah - Menerapkan berbagai aturan untuk mengurangi kejadian ojol atau taxi yang melebihi lebihkan harga tersebut
					Kecepatan pada layanan transportasi darat	Kementerian Perhubungan	- Memperbanyak Bus Lane - Keamanan dan ketertiban dalam memasuki Bus Lane
10.06	Efficiency of seaport services, 1-7 (best)	5.25	4.3	4,1	Efisiensi Pelayanan Pelabuhan (Feri/Kapal)	Kementerian Perhubungan	- Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan pada pelabuhan - Membuat sistem penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal yang akurat - Membangun pelayanan customer yang terintegrasi

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
11	<i>Tourist Services and Infrastructure, 1-7 (best)</i>	1.90	2.43	3,0			
11.01	Hotel rooms, per 100 pop, 1-7 (best)	1.69	2.6	3,0	Jumlah Kamar Hotel Seluruh Bintang di Setiap Provinsi	Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan investasi di bidang Akomodasi pariwisata - Promosi pariwisata yang berorientasi peningkatan investasi - Penyederhanaan Izin Pembangunan, khususnya pada daerah priortas pariwisata - Mendorong penggunaan material bangunan lokal dan berkelanjutan dalam pengembangan hotel untuk mendukung ekonomi lokal dan mengurangi jejak karbon. - Membatasi pembangunan hotel di daerah yang sudah padat atau memiliki potensi untuk mengalami overdevelopment
11.02	Number of Short-term rental listing, per 10,000 pop, 1-7 (best)	1.14	1.8	2,4	Jumlah Poperti Aktif dalam platform AirBnB	kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan platform penyewaan properti untuk berbagi data yang diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.
11.03	Labour productivity in hotels and restaurants, US\$ per pop, 1-7 (best)	2.00	2.4	3,0	Jumlah tenaga kerja bidang hotel dan restaurant	Kemenaker	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan investasi terkait pembangunan hotel & Restoran - Pembangunan Infrastruktur terkait Hotel dan Restoran - Pelatihan & Sertifikasi SDM Pada Hotel dan Restoran
					nilai tambah bruto Hotel dan Restoran	Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Infrastruktur terkait Hotel dan Restoran - Meningkatkan kerja sama dengan platform perjalanan global

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
11.04	T&T capital investment intensity, US\$ per emp, 1-7 (best)	2.76	2.9	3,4	Jumlah Investasi dalam sektor perjalanan dan pariwisata	kememparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat promosi pariwisata dalam rangka meningkatkan investasi pada sektor T&T - Memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha baru di sektor pariwisata
D	T&T RESOURCES, 1-7 (best)	4.16	3,3	2,6			
12	Natural Resources, 1-7 (best)	5.43	3.75	2,9			
12.01	Number of World Heritage natural sites, 1-7 (best)	5.00	3.6	2,7	Jumlah situs alam Warisan Dunia	Kemendikbudristek	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi situs alam Indonesia untuk dapat dijadikan Warisan Dunia - Berkolaborasi dengan World Heritage Committee dalam mempromosikan situs alam Indonesia
12.02	Total known species, 1-7 (best)	7.00	4.1	2,7	Jumlah Spesies Flora dan Fauna yang terdaftar oleh Red List	BRIN KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan flora dan fauna secara berkala oleh tim Peneliti Indonesia
12.03	Total protected areas, km2, 1-7 (best)	6.23	4.9	4,2	Jumlah kawasan Daratan yang dilindungi	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan dan pengecekan secara berkala untuk kawasan daratan yang dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku
					Jumlah kawasan Lautan yang dilindungi	KKP	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan dan pengecekan secara berkala untuk kawasan Lautan yang dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku
12.04	Natural tourism Digital Demand, 0-100 (best), 1-7 (best)	1.93	2.3	2,2	Volume Pencarian Online Rekreasi dan Akomodasi Alam	Kemenkominfo Kememparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Promosi melewati media online (instagram) - Memberikan review yang positif terhadap akomodasi dan rekreasi alam - Bekerjasama dengan agen perjalanan online seperti Tripadvisor, Tiket.com, Traveloka, dan lainnya untuk berbagi data dan wawasan mengenai perilaku pemesanan wisatawan.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
12.05	Number of terrestrial and freshwater ecoregions, 1-7 (best)	7.00	3.9	3,0	Jumlah Ekoregion Daratan dan Lautan Indonesia	KKP KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - menerapkan prinsip-prinsip sustainable tourism - Memberikan sanksi yang keras bagi yang melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku - Mensosialisasikan kepada masyarakat dan wisatawan dalam menjaga lingkungan destinasi pariwisata
13	Cultural Resources, 1-7 (best)	3.98	3.01	2,4			
13.01	Number of World Heritage cultural sites, 1-7 (best)	2.20	2.6	2,3	Jumlah situs budaya Warisan Dunia	Kemendikbudristek	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi situs Budaya Indonesia untuk dapat dijadikan Warisan Dunia - Berkolaborasi dengan World Heritage Committee dalam mempromosikan situs alam Indonesia" - Membuat website resmi dan memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang situs budaya, termasuk sejarah, kegiatan, dan acara yang terkait.
13.02	Oral and intangible cultural heritage, 1-7 (best)	5.80	3.8	3,3	Jumlah warisan budaya tak benda meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait. Komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus, individu, mengakui ini sebagai bagian dari warisan budaya mereka	Kemendikbudristek	<ul style="list-style-type: none"> - Memetakan kembali warisan budaya tak benda Indonesia - Berkomunikasi kembali dengan masyarakat adat di seluruh daerah

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
13.03	Number of large sports stadiums, 1-7 (best)	6.60	3.3	2,3	Total jumlah stadion olahraga di sebuah negara dengan kapasitas lebih dari 20.000 kursi	Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> - Berkolaborasi dengan pihak swasta untuk membangun stadion-stadion baru yang berkapasitas minimal 20.000 kursi yang dapat dijadikan penyelenggaraan berbagai kegiatan - Berkomitmen dengan pemerintah daerah untuk membangun stadion baru baru yang berkapasitas minimal 20.000 kursi
13.04	Cultural and entertainment tourism Digital Demand, 0-100 (best)	1.66	2.5	2,0	Volume Pencarian Online oleh Wisata Budaya dan Hiburan	Kemkominfo Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Promosi melewati media online (instagram) - Membuat website resmi dan memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang situs budaya, termasuk sejarah, kegiatan, dan acara yang terkait. - Memberikan review yang positif terhadap akomodasi dan rekreasi alam - Bekerjasama dengan agen perjalanan online seperti Tripadvisor, Tiket.com, Traveloka, dan lainnya untuk berbagi data dan wawasan mengenai perilaku pemesanan wisatawan.
13.05	Number of UNESCO Creative Cities, 1-7 (best)	3.67	3.1	2,4	Jumlah Kota Kreatif berdasarkan Jaringan Kota Kreatif UNESCO (UCCN)	Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Berkolaborasi dengan berbagai daerah terkait keunggulan yang dimiliki dalam Creative Cities - Membangun peta creative cities sebagai unggulan masing-masing daerah
14	Non-Leisure Resources, 1-7 (best)	3.06	3.24	2,5			
14.01	Presence of Forbes Global 2000 HQ locations, 1-7 (best)	2.03	3.2	2,5	Jumlah Perusahaan yang termasuk dalam Forbes Global 2000	KemInvest	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong perusahaan besar di Indonesia untuk dapat terus bersaing di kancah global - Mendorong merger dan akuisisi antara perusahaan lokal untuk menciptakan perusahaan yang lebih besar dan kompetitif di tingkat global.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
14.02	Presence of global cities, 1-7 (best)	3.45	3.7	2,9	Jumlah kota yang menjadi pusat ekonomi besar di Indonesia berdasarkan GaWC	Kemenkeu Kemendikbudristek Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan pusat-pusat ekonomi Indonesia Baru di berbagai kota Indonesia yang memiliki daya saing global - Mempromosikan secara terus menerus terkait peluang investasi di kota tersebut yang berkaitan dengan pusat ekonomi baru
14.03	Number of top universities, 1-7 (best)	5.47	3.8	2,8	Jumlah Peringkat Universitas di Indonesia pada Webometrics	KemKominfo Kemendikbudristek	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi sistem pendidikan dan benchmarking dengan universitas top dunia - membangun konten web yang memiliki infografis dan informasi up to date - meningkatkan jumlah artikel ilmiah global oleh para dosen di Indonesia - memberikan insentif bagi dosen yang memiliki artikel berkelas dunia
14.04	Non-leisure tourism Digital Demand, 1-7 (best)	1.29	2.3	1,9	Volume Pencarian Online Berkaitan dengan Kesehatan untuk memperbuat wisatawan datang ke Indonesia	KemKominfo Kemenkes	Meningkatkan kualitas dan akreditasi rumah sakit serta klinik kesehatan untuk menarik wisatawan kesehatan yang mencari perawatan medis berkualitas.
					Volume Pencarian Online berkaitan dengan Bisnis Pariwisata untuk memperbuat wisatawan datang ke Indonesia	KemKominfo Kemendikbudristek Kemendikbudristek	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Promosi melewati media online (instagram) - Bekerjasama dengan agen perjalanan online seperti Tripadvisor, Tiket.com, Traveloka, dan lainnya untuk berbagi data dan wawasan mengenai perilaku pemesanan wisatawan.
					Volume Pencarian Online Berkaitan dengan pendidikan untuk memperbuat wisatawan datang ke Indonesia	KemKominfo Kemendikbudristek	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar bisa menarik perhatian calon mahasiswa - Meningkatkan konten web setiap universitas di Indonesia, untuk memudahkan informasi didalamnya

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
E	T&T SUSTAINABILITY, 1-7 (best)	4.86	4,2	4,2			
15	Environmental Sustainability, 1-7 (best)	4.34	4.23	4,3			
15.01	T&T GHG intensity, Kg of CO2e per USD of T&T GDP, 1-7 (best)	4.63	4.4	4,8	Emisi Gas Rumah Kaca yang terpengaruhi oleh Aktivitas Travel & Tourism	KLHK Kemen ESDM	<ul style="list-style-type: none"> - menyusun kebijakan terkait transportasi ramah lingkungan, seperti listrik, gas, dll - Menggunakan standar Euro 4 atau Bio-fuel untuk berbagai jenis kendaraan transportasi - Efisiensi energi pada Industri Perhotelan - Menerapkan circular economy pada industri perhotelan
15.02	T&T energy intensity, MJ of energy per Real USD of T&T GDP, 1-7 (best)	5.19	4.9	4,9	Jumlah megajoule energi berdasarkan Sumber energi termasuk Lingkup 1, 2, dan 3, ditambah dengan transportasi internasional.	KLHK Kemen ESDM	Mempercepat penerapan teknologi terbaru yang mengurangi konsumsi energi, seperti sistem manajemen energi cerdas dan peralatan efisien.
15.03	T&T use of low-carbon energy, % of total, 1-7 (best)	3.20	2.6	2,9	Jumlah Penggunaan Energi Rendah Karbon dalam sektor Perjalanan dan Pariwisata	KLHK Kemen ESDM Kemenparekraf	- Mendorong investasi dalam infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan tenaga air, serta panas bumi di destinasi wisata dan industri perhotelan
15.04	Renewable energy regulation, 1-7 (best)	4.18	4.4	4,7	kerangka hukum untuk energi terbarukan	Bappenas Kemen ESDM PLN	Menyusun strategi implementasi untuk mencapai target-target ini melalui pengembangan proyek-proyek energi terbarukan.
					Perencanaan untuk energi terbarukan	Kemen ESDM	Menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang terintegrasi dengan target energi terbarukan jangka panjang dan menengah, serta memastikan bahwa target tersebut realistis dan dapat dicapai dengan kebijakan yang ada.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					Penyediaan insentif dan dukungan regulasi untuk energi terbarukan	Kemen ESDM	Mengembangkan regulasi yang mendukung penetrasi energi terbarukan, termasuk feed-in tariff (FiT), pembebasan bea masuk untuk peralatan energi terbarukan, dan skema dukungan untuk proyek-proyek kecil dan menengah di sektor energi terbarukan.
					Ketersediaan Insentif finansial dan regulasi	Kemenkeu Kemen ESDM	Mempermudah akses ke pembiayaan bagi proyek energi terbarukan, khususnya bagi UKM dan proyek-proyek komunitas, dengan menyediakan jaminan kredit dan skema pembiayaan berbunga rendah.
					Ketersediaan Konektivitas jaringan dan penggunaannya	KemKominfo	Menginvestasikan dalam modernisasi jaringan listrik untuk mendukung integrasi energi terbarukan, termasuk pengembangan smart grid, yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi gangguan dalam penyaluran energi.
					Risiko dari pihak negara	Kemen ESDM	Memperkuat peraturan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi di sektor energi terbarukan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.
					penetapan harga karbon dan pemantauannya.	Kemen ESDM	Mengimplementasikan sistem penetapan harga karbon yang transparan dan efektif, seperti perdagangan emisi atau pajak karbon, yang dapat mendorong pengurangan emisi karbon dan mendukung pengembangan energi terbarukan.
15.05	Energy efficiency regulation, 1-7 (best)	2.92	4.3	4,2	Perencanaan efisiensi energi nasional	Kemen ESDM	- Memberikan insentif pajak untuk investasi dalam teknologi dan peralatan yang meningkatkan efisiensi energi.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					Ketersediaan Entitas efisiensi energi	Kemen ESDM	Mendirikan atau memperkuat badan khusus yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan efisiensi energi
					Ketersediaan Insentif dan mandat untuk industri serta pengguna akhir komersial	Kemen ESDM	Menawarkan insentif seperti pengurangan pajak, subsidi, atau akses ke pinjaman berbunga rendah bagi industri yang menerapkan teknologi dan praktik efisiensi energi.
					Ketersediaan insentif dan mandat untuk sektor publik	Kemen ESDM	Memberikan insentif atau penghargaan kepada instansi pemerintah yang berhasil mengurangi konsumsi energi secara signifikan, misalnya melalui program kompetisi antar instansi.
					Ketersediaan insentif dan mandat untuk program utilitas energi	Kemen ESDM	Mendorong perusahaan utilitas untuk mengembangkan dan melaksanakan program efisiensi energi bagi pelanggan
					Penyediaan Mekanisme keuangan efisiensi energi	Kemen ESDM	Mendorong pengembangan mekanisme pembiayaan hijau yang mudah diakses, seperti obligasi hijau dan dana khusus untuk efisiensi energi
					Standar kinerja efisiensi energi minimal	Kemen ESDM	Memperbarui dan memperketat standar kinerja energi minimal untuk berbagai jenis peralatan, mesin, dan perangkat elektronik
					Ketersediaan Sistem pelabelan energi	Kemen ESDM	Mewajibkan pelabelan energi pada semua perangkat listrik dan elektronik, yang mencerminkan tingkat efisiensi energi.
					Ketersediaan Kode bangunan energi	Kemen ESDM	Meningkatkan frekuensi dan ketegasan inspeksi terhadap kepatuhan bangunan terhadap kode energi, serta menerapkan sanksi bagi pelanggaran.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
					Sektor transportasi	Kementerian perhubungan	Mendorong adopsi kendaraan listrik dan hibrida melalui insentif fiskal seperti pengurangan pajak kendaraan bermotor, serta pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai.
					Penetapan harga dan pemantauan karbon.	Kemen ESDM	Meningkatkan pemantauan dan pelaporan emisi karbon oleh sektor industri dan energi, termasuk pengembangan basis data emisi nasional yang transparan dan dapat diakses publik.
15.06	Particulate matter (2.5) concentration, 1-7 (best)	4.12	3.3	3,6	Polusi udara luar ruangan yang terdiri dari partikel halus (PM 2.5)	KLHK BMKG	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor - Menggunakan kendaraan umum berbasis ramah lingkungan - Mengurangi Pembakaran Sampah yang mengakibatkan polusi - Memberikan sanksi kepada pabrik-pabrik yang memiliki guas buang tidak sesuai standar dan prosedur yang berlaku - Membangun regulasi dan mengimplementasikan yang ketat terkait pengendalian polusi udara
15.07	Level of water stress, 1-7 (best)	5.22	5.0	5,2	Penarikan air tawar sebagai proporsi sumber air tawar yang tersedia	PDAM Kemenkes Kemen PUPR KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - Membatasi pembuatan sumur bor untuk rumah padat penduduk - Membangun infrastruktur jaringan pipa air bersih baru untuk pemukiman
15.08	Red List Index, 0-1 (best)	4.01	4.0	5,2	Jumlah daftar dan perubahan pada Kelompok Spesies terancam punah berdasarkan Red List Index IUCN	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatkan awareness pada masyarakat terkait spesies terancam punah - Menyusun regulasi yang ketat jika terdapat pelanggaran pada spesies terancam punah
15.09	Forest cover loss, average % of baseline, 1-7 (best)	5.10	4.9	5,2	Jumlah Deforestasi kawasan hutan di Indonesia setiap tahunnya	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat peraturan terkait penebangan pohon di hutan - Memberikan sanksi hukum yang ketat terhadap pelanggaran hukum atas pembakaran hutan

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
15.10	Proportion of safely treated domestic wastewater flows, %, 1-7 (best)	N/A	4.3	4,3	Persentase Air Limbah Domestik yang diperlakukan sesuai prosedur	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun prosedur terkait pengelolaan limbah domestik - Melakukan sosialisasi dalam rangka pengolahan limbah domestik ke masyarakat - Meningkatkan awareness kepada masyarakat dan industri terkait kepentingan air limbah dan akibat pencemaran lingkungan - Membuat jaringan instalasi air limbah perumahan
15.11	Clean ocean water, 1-7 (best)	4.38	4.4	4,7	Kebersihan Perairan Laut dari Kontaminasi	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan sampah pada lautan bebas - Mewajibkan industri untuk melakukan RPL/RKL - Memberikan sanksi tegas kepada industri yang tidak melakukan pemantauan lingkungan
15.12	Number of environmental treaty ratifications, 1-7 (best)	5.55	5.6	5,8	Jumlah Perjanjian Lingkungan Hidup Internasional yang diratifikasi	KLHK Kemenu	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan perjanjian internasional dengan negara tetangga terkait Lingkungan Hidup - Bersama-sama dalam pemantauan lingkungan hidup di perbatasan perairan maupun daratan
15.13	Adequate protection for nature, 1-7 (best)	5.33	4.3	4,2	Perlindungan Aset Alam dan Sosial	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan - Pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan
15.14	Total protected areas, % total area, 1-7 (best)	1.63	2.6	2,9	Jumlah kawasan Daratan yang dilindungi	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan dan pengecekan secara berkala untuk kawasan daratan yang dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku
					Jumlah kawasan Lautan yang dilindungi	KKP	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan dan pengecekan secara berkala untuk kawasan Lautan yang dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
15.15	Average proportion of all key biodiversity areas covered by protected areas, %, 1-7 (best)	2.52	3.4	4,0	Kawasan Kunci Biodiversitas daratan dan air Tawar yang dilindungi oleh kawasan lindung atau Tindakan Konservasi Efektif Lainnya	BRIN KLHK KKP	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengawasan dan patroli di kawasan kunci biodiversitas untuk mencegah perburuan liar, penebangan ilegal, dan aktivitas merusak lainnya. - Mengembangkan mekanisme pembiayaan berkelanjutan untuk program konservasi melalui dana pemerintah, donor internasional, dan investasi swasta.
16	T&T Socioeconomic Impact, 1-7 (best)	5.41	4.31	4,3			
16.01	T&T GDP multiplier, 1-7 (best)	6.57	4.6	4,1	Jumlah PDB Sektor Perjalanan dan Pariwisata	Kemendagri BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan investasi di sektor perjalanan dan pariwisata - Memperkuat promosi pariwisata yang terintegrasi - Membangun infrastruktur terkait sektor Perjalanan dan Pariwisata
16.02	T&T employment multiplier, 1-7 (best)	3.83	3.8	3,8	Jumlah lapangan kerja tidak langsung dalam sektor pariwisata	Kemnaker Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peraturan atau pedoman yang jelas terkait pekerjaan tidak langsung - Menumbuhkembangkan infrastruktur yang mendukung pekerjaan tidak langsung - Berkoordinasi dengan pihak swasta terkait pekerjaan tidak langsung
16.03	T&T high-wage jobs, % of emp in high wage sectors, 1-7 (best)	6.11	3.3	3,5	Jumlah dan Jenis/Kriteria Upah dalam pekerjaan sektor T&T	BPS Kemnaker	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong sertifikasi profesi bagi pekerja di sektor pariwisata untuk meningkatkan profesionalisme dan standar layanan.

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
16.04	T&T labour gender parity, % of emp, 1-7 (best)	5.12	5.5	5,7	- Jumlah pekerja perempuan di sektor perjalanan dan pariwisata - Jumlah pekerja laki-laki di sektor perjalanan dan pariwisata	Kemenaker	- Perusahaan dapat menyusun SOP terkait perekrutan angkatan kerja perempuan dan laki-laki - Kemenaker dapat memantau terkait jumlah pekerja perempuan dan laki-laki - Jumlah pekerja untuk perempuan dan laki-laki harus diperjelas dalam kompetensi dan akapabilitas yang dibutuhkan
17	T&T Demand Sustainability, 1-7 (best)	4.84	3.97	3,8			
17.01	Inbound length of stay, days, 1-7 (best)	7.00	5.4	3,8	Jumlah lama tinggal Wisatawan	Kemenparekraf	- Menghadirkan fasilitas lengkap pada Hotel-hotel berbintang - Membuat atraksi yang menarik pada destinasi-destinasi wisata - Membuat paket wisata lengkap yang menarik pengunjung
17.02	Seasonality of international tourist arrivals, peak season % of total, 1-7 (best)	5.56	3.7	4,4	Total kedatangan wisatawan Internasional pada high season selama 3 bulan teratas	Kemenparekraf	- memberikan promo-promo paket wisata dan maskapai penerbangan pada bulan-bulan tertentu - Membuat atraksi yang menarik di destinasi pariwisata pada bulan-bulan tertentu
17.03	Concentration of interest in cultural attractions, % of views, 1-7 (best)	2.32	2.8	3,0	Pangsa total tampilan laman dari 10% atraksi budaya teratas yang menerima jumlah kunjungan signifikan berdasarkan Tripadvisor	Kemenparekraf	- Mapping data terkait atraksi budaya di Tripadvisor - Melakukan promosi terintegrasi untuk atraksi budaya - Membuat paket promo pada atraksi budaya - Membuat review yang menarik di lokasi atraksi budaya - Bekerjasama dengan Tripadvisor terkait data-data tersebut

No.	Dimension/Pillar/Indikator	Indonesia (4.46)	APAC Avg. (4.11)	Global Avg. (4.0)	Analisis Indikator	K/L Terkait	Strategi Peluang Perbaikan
		Score	Score	Score			
17.04	Concentration of interest in nature attractions, % of views, 1-7 (best)	1.68	2.8	3,3	Pangsa total tampilan laman dari 10% atraksi Alam teratas yang menerima jumlah kunjungan signifikan berdasarkan Tripadvisor	kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Mapping data terkait atraksi alam di Tripadvisor - Melakukan promosi terintegrasi untuk atraksi alam - Membuat paket promo pada atraksi alam - Membuat review yang menarik di lokasi atraksi alam - Bekerjasama dengan Tripadvisor terkait data-data tersebut
17.05	Geographically dispersed tourism, 1-7 (best)	4.79	4.0	3,7	Penyebaran Pengunjung Asing (wisatawan dan pelancong bisnis) di Indonesia	Kemenkomarvest Kemenparekraf	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat pembangunan Destinasi pariwisata Prioritas - Memperkuat destinasi-destinasi pariwisata di beberapa daerah - Membangun infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas pariwisata di berbagai daerah - Meningkatkan promosi dan atraksi pariwisata diberbagai destinasi menarik

Strategi 2: Pengembangan IPKN yang Berkelanjutan

Penjelasan: IPKN atau Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional telah ada dari tahun 2022 yang bertujuan untuk mengukur daya saing yang Tangguh dan berkelanjutan kepariwisataan tingkat Provinsi. Pada IPKN 2024, kerangka perhitungan terdiri dari 5 Sub Indeks, 16 Pilar, dan 96 Indikator (32 Indikator primer dan 64 indikator sekunder) yang berdasarkan kerangka TTDI 2021. Untuk pengembangan kepariwisataan nasional yang berkelanjutan, perlu disesuaikan Kembali indikator-indikator IPKN dengan TTDI 2024, agar proses pengukuran atas capaian kepariwisataan Indonesia di kancah global dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Tabel 6 Redesign Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional berbasis TTDI 2024

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
Dimension A.	Enabling Environment	A.	Enabling Environment	Dimensi	
Pilar 1	Business Environment	A.1	Lingkungan Bisnis	Pilar	
01.01	Rule of law	A.1.1	Tingkat Integritas dan Potensi Risiko Korupsi, 0-100 (Terbaik)	S	Indeks ini merupakan adopsi dari Indeks Persepsi Korupsi yang diukur melalui indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional. SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) SPI merujuk pada nilai 0-100 (Terbaik), dimana 0-72.9 Rentan, 73-77.9 Waspada, dan 78-100 terJAGA. Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
01.02	Burden of government regulation	A.1.2	Beban Peraturan Pemerintah Daerah	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Seberapa mudahnya bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah daerah dan persyaratan administratif (misalnya izin, pelaporan, peraturan perundang-undangan)? [1 = sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]”
01.03	Government ensuring policy stability	A.1.3	Pemerintah Daerah Menjamin Kondusifitas Iklim usaha	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di daerah Anda, sejauh mana pemerintah menjamin lingkungan kebijakan yang stabil dalam menjalankan bisnis? [1 = Tidak ada sama sekali; 7 = Sangat memberikan jaminan]”
01.04	Country credit rating				

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
01.05	<i>De-jure financial globalization</i>				
01.06	<i>De-jure trade globalization</i>				
01.07	SME access to finance	A.1.4	Akses Pembiayaan UMKM	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di daerah Anda, sejauh mana usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat akses pembiayaan yang mereka butuhkan untuk operasional bisnis mereka melalui sektor keuangan? [1 = Sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]”
Pilar 2	Safety and Security	A.2	Keselamatan dan Keamanan	Pilar	
02.01	Confidence in local police	A.2.1	Keandalan Layanan Kepolisian	S	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di daerah Anda, Sejauh mana layanan kepolisian dapat diandalkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban secara efisien? [1 = sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]”
02.02	Safety walking alone at night	A.2.2	Keamanan Berjalan Sendirian pada Malam Hari di Ruang Publik	S	Mengacu pada Tingkat kekhawatiran rumah tangga berjalan sendirian di malam hari. Menggunakan indikator "Tidak Khawatir".
02.03	Homicide rate	A.2.3	Tingkat Pembunuhan per 100.000 Populasi	S	Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa per 100.000 populasi.
02.04	Global Terrorism Index				
02.05	Organized violence, deaths	A.2.4	Kekerasan terorganisir	S	Jumlah kematian akibat kekerasan terorganisir yang diakibatkan oleh terorisme, konflik SARA, separatisme, dan makar yang dihitung rata-rata bergerak 5 tahun.
Pilar 3	Health and Hygiene	A.3	Kesehatan dan Higienis	Pilar	
03.01	Physician density	A.3.1	Rasio Dokter per 1.000 Populasi	S	Indikator ini menghitung rasio jumlah kepadatan dokter di provinsi. Jumlah tersebut adalah penjumlahan dari Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis.
03.02	Use of basic sanitation	A.3.2	Penggunaan Sanitasi Dasar	S	Indikator ini menghitung persentase rumah tangga dengan sanitasi layak. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
					(septic tank) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/ SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Untuk daerah perdesaan, dikatakan memiliki akses sanitasi layak, jika kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja ke tangki septik atau lubang tanah dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Konsep sanitasi layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/ Dt.2.4/01/2019.
03.03	Use of basic drinking water	A.3.3	Penggunaan Air Minum Dasar (PDAM, Kemasan atau Sumur), % Rumah Tangga	S	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Layak . Sumber air minum layak yaitu sumber air minum utama yang digunakan meliputi leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/ Dt.2.4/01/2019.
03.04	Hospital beds density	A.3.4	Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 Populasi	S	Rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 populasi.
03.05	Communicable disease incidence	A.3.5	Kasus Penduduk Terkena Penyakit Menular per 100.000 Populasi	S	Rasio penduduk yang terkena penyakit menular per 100.000 penduduk. Indikator jumlah kasus penduduk terkena penyakit menular dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk terkena penyakit menular dengan kategori penyakit yaitu HIV, AIDS, tetanus, diare, TBC, COVID 19 dan suspect campak, per 100.000 penduduk. Data didapatkan dari jumlah total penduduk yang terkena masing-masing penyakit menular dibagi jumlah penduduk. HIV (Lampiran 59.a Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV (minimal)) + AIDS (Lampiran 60.c Jumlah kasus kumulatif AIDS) + TETANUS (Lampiran 69.b Jumlah kasus tetanus neonatorum dan faktor risiko) + DIARE (Lampiran 61 Kasus diare yang dilayani - Semua umur) +TBC (Lampiran 56.a Jumlah terduga TBC) + COVID19 (Lampiran 84.a Jumlah kasus konfirmasi) + CAMPAK (Lampiran 69.c Jumlah kasus suspect campak)

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
Pilar 4	Human Resources and Labour Market	A.4	Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja	Pilar	
04.01	Labour force with intermediate education	A.4.1	Angkatan Kerja dengan Pendidikan Minimal SMA/ sederajat	S	Pangsa angkatan kerja yang memiliki setidaknya pendidikan menengah Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan non-perguruan tinggi menengah atas atau pasca sekolah menengah menurut Klasifikasi Standar Internasional Pendidikan 2011 (ISCED 2011)
04.02	Labour force with advanced education	A.4.2	Angkatan Kerja dengan Pendidikan Minimal Perguruan Tinggi	S	Pangsa angkatan kerja yang memiliki pendidikan lanjutan Pendidikan lanjutan meliputi pendidikan tinggi siklus pendek, jenjang pendidikan sarjana atau sederajat, jenjang pendidikan magister atau sederajat, atau jenjang pendidikan doktoral atau sederajat menurut Klasifikasi Standar Internasional Pendidikan 2011 (ISCE 2011).
04.03	Quality of secondary education	A.4.3	Kualitas pendidikan menengah	P	Jawaban terhadap pertanyaan survei: “Di daerah Anda, seberapa baik pendidikan menengah non-vokasi memenuhi kebutuhan perekonomian yang kompetitif?” [1 = Tidak sama sekali; 7 = Sebagian besar]
04.04	Quality of tertiary education	A.4.4	Kualitas pendidikan tinggi	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survei: “Di daerah Anda, seberapa baik sebagian sistem pendidikan perguruan tinggi memenuhi kebutuhan perekonomian yang kompetitif: ?” [1 = Tidak sama sekali; 7 = Sebagian besar]
04.05	Hiring and firing practices	A.4.5	Praktik perekrutan dan pemecatan	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survei: “Di negara Anda, sejauh mana peraturan mengizinkan perekrutan dan pemecatan pekerja yang fleksibel?” [1 = Tidak sama sekali; 7 = Sangat fleksibel]
04.06	Ease of finding skilled employees in local labour market	A.4.6	Kemudahan Mencari Karyawan Terampil di Pasar Tenaga Kerja Lokal	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di daerah Anda, sejauh mana perusahaan dapat menemukan orang-orang dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan di pasar tenaga kerja lokal? [1 = Sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]”
04.07	Flexible working arrangements	A.4.7	Pengaturan Kerja yang Fleksibel	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di daerah Anda, sejauh mana perusahaan menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel seperti kerja jarak jauh dan paruh waktu? [1 = Sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]”

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
04.08	Labour force participation	A.4.8	Partisipasi angkatan kerja	S	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi: yaitu seluruh orang yang memasok tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa selama periode tertentu.
04.09	Equal workforce opportunities	A.4.9	Kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan kerja yang sama	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di daerah Anda, sejauh mana perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara untuk: a). Perempuan; b). Mereka yang berasal dari latar belakang agama, etnis atau ras minoritas c). Penyandang disabilitas; d). Kaum marjinal lainnya? [1 = Tidak sama sekali ; 7 = Sebagian besar]”
04.10	Workers’ rights	A.4.10	Hak Pekerja	S	Jumlah pelanggaran hak pekerja per provinsi yang tercatat
04.11	Female labour force participation	A.4.11	Partisipasi angkatan kerja perempuan	S	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi: mencakup semua orang yang memasok tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki dihitung dengan membagi partisipasi angkatan kerja perempuan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan dikalikan dengan 100.
04.12	Social protection basic coverage	A.4.12	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	S	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (BPJS). Cakupan jaminan Kesehatan nasional didapatkan dari persentase jumlah penduduk di tiap provinsi yang memiliki BPJS, dengan menggunakan data yang berasal dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Kementerian Kesehatan. Buku Laporan Profil Kesehatan, BAB 4 – Pembiayaan Kesehatan, Lampiran 9a. Cakupan Kepesertaan JKN, Laporan Profil Kesehatan. Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
04.13	Social protection spending				
Pilar 5	ICT Readiness	A.5.	Tingkat Kesiapan ICT	Pilar	
05.01	Individuals using internet	A.5.1	Pengguna internet	S	Pengguna internet dihitung dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Statistik Telekomunikasi Indonesia, Tabel 34c. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut Provinsi. Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
05.02	Broadband internet subscribers	A.5.2	Pelanggan Internet Broadband	S	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga. Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga. Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
05.03	Mobile broadband subscribers	A.5.3	Pelanggan Internet Smartphone	S	Persentase pengguna internet menggunakan HP di provinsi. Menggunakan data 2023, atau data terakhir yang tersedia.
05.04	3G mobile network coverage	A.5.4	Cakupan Jaringan 4G	S	Dihitung menggunakan cakupan dari sinyal 4G provinsi.
05.05	Use of digital payments	A.5.5	Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan layanan keuangan	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey "Di Provinsi anda, bagaimana penggunaan platform digital pada layanan keuangan? [1- Tidak Menggunakan Sama Sekali s.d. 7- Digunakan pada Sebagian Besar Layanan]"
05.06	Use of digital platforms for providing transportation and shipping	A.5.6	Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan transportasi dan pengiriman	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey "Di Provinsi anda, bagaimana penggunaan platform digital pada layanan Transportasi dan Pengiriman? [1- Tidak Menggunakan Sama Sekali s.d. 7- Digunakan pada Sebagian Besar Layanan]"
05.07	Use of digital platform for providing hotels, restaurants and leisure activity services	A.5.7	Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan layanan hotel, restoran, dan aktivitas rekreasi	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey "Di Provinsi anda, bagaimana penggunaan platform digital pada layanan Hotel, Restoran, dan Aktivitas rekreasi? [1- Tidak Menggunakan Sama Sekali s.d. 7- Digunakan pada Sebagian Besar Layanan]"
05.08	Power losses	A.5.8	Susut Jaringan	S	Susut jaringan dihitung dari persentase jumlah susut jaringan yang terjadi di satu provinsi dalam satu tahun yang didapatkan dari data besaran susut jaringan tenaga listrik yang terjadi yang terdiri atas susut jaringan transmisi tegangan tinggi, susut jaringan distribusi tegangan menengah, dan susut jaringan distribusi tegangan rendah.

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
Dimension B.	T&T Policy an Enabling Conditions	B.	T&T Policy an Enabling Conditions	Dimensi	
Pilar 6	Prioritization of T&T	B.1	Prioritas Pembangunan Kepariwisataa	Pilar	
06.01	T&T government expenditure	B.1.1	Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah di Sektor Pariwisata	S	<p>Persentase jumlah anggaran sektor pariwisata dari total keseluruhan anggaran Pemerintah Provinsi.</p> <p>Data anggaran pariwisata daerah didapatkan dari komunikasi langsung dengan Kementerian Keuangan, sementara total anggaran pemerintah daerah diambil dari komponen belanja daerah pada laman https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd, dengan pilihan Periode Desember, tahun 2023, Wilayah Provinsi, dan Sub-wilayah Provinsi.</p>
06.02	Comprehensiveness of T&T data	B.1.2	Ketersediaan Data Pariwisata, 0-31 (Terbaik)	S	<p>Ketersediaan data pariwisata masing-masing provinsi, didapatkan dengan melakukan pengecekan data pada masing-masing website resmi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tingkat Provinsi yang mampu tugas terkait pariwisata. Pengukuran berdasarkan tersedia atau tidaknya data pariwisata di Provinsi, dengan rentang nilai 0-30 (terbaik).</p> <p>Variabel data yang diamati, antara lain: (1) Data total kunjungan wisatawan mancanegara per tahun; (2) Data total kunjungan wisatawan mancanegara per bulan; (3) Data total kunjungan wisatawan mancanegara per kebangsaan; (4) Data kunjungan wisatawan mancanegara per tahun per kebangsaan; (5) Data kunjungan wisatawan mancanegara per bulan per kebangsaan; (6) Data total pengeluaran wisatawan mancanegara; (7) Data total pengeluaran wisatawan mancanegara per kebangsaan; (8) Data lama tinggal wisatawan mancanegara; (9) Data lama tinggal wisatawan mancanegara per kebangsaan; (10) Data total kunjungan wisatawan nusantara; (11) Data kunjungan wisatawan nusantara per bulan; (12) Data tingkat penghunian kamar hotel bintang; (13) Data tingkat penghunian kamar hotel bintang per bulan; (14) Data tingkat penghunian kamar hotel non bintang/akomodasi lainnya; (15) Data tingkat penghunian kamar hotel non bintang/akomodasi lainnya per bulan; (16) Data jumlah tamu asing pada hotel bintang; (17) Data jumlah tamu asing pada hotel non bintang/akomodasi lainnya; (18) Data jumlah tamu asing pada hotel bintang per bulan; (19) Data jumlah tamu asing pada hotel non bintang/akomodasi lainnya per bulan; (20) Data jumlah tamu indonesia pada hotel bintang; (21) Data jumlah tamu indonesia pada</p>

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
					hotel non bintang/akomodasi lainnya; (22) Data jumlah tamu indonesia pada hotel bintang per bulan; (23) Data jumlah tamu indonesia pada hotel non bintang/akomodasi lainnya per bulan; (24) Data total pengunjung obyek/daya tarik wisata; (25) Data pengunjung obyek/daya tarik wisata per bulan; (26) Data pengunjung asing obyek/daya tarik wisata; (27) Data pengunjung asing obyek/daya tarik wisata per bulan; (28) Data pengunjung indonesia obyek/daya tarik wisata; (29) Data pengunjung indonesia obyek/daya tarik wisata per bulan; (30) Data total tenaga kerja sektor pariwisata; dan (31) Data kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian.
06.03	Timeliness of T&T data	B.1.3	Kebaruan Data Pariwisata, 0-24 (Terbaik)	S	Jumlah ketersediaan data terbaru berdasarkan indikator jenis data. Kebaruan data pariwisata di tingkat provinsi dilihat dari diperbarui atau tidaknya data pariwisata pada website Pemerintah Provinsi dalam satu tahun terakhir, dengan rentang nilai 0-24 (terbaik). Periode pengamatan data adalah Januari s.d. Desember 2023 untuk data wisatawan mancanegara dan nusantara.
06.04	Country Brand Strategy rating				
		B.1.4	Rasio Desa Wisata	S	Rasio desa wisata yang terdaftar dalam JADESTA per 10 desa pada provinsi. Indikator desa wisata diperhitungkan berdasarkan kategori di seluruh provinsi yang bersumber data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibandingkan dengan keseluruhan jumlah desa yang ada. Perhitungan kategori pada jumlah desa wisata menggunakan sistem penjumlahan pada pembobotan masing-masing kategori, yaitu: Rintisan (Bobot 1.5), Berkembang (Bobot 2), Maju (Bobot 2.5), Mandiri (3). Sebaran Desa Wisata per Provinsi, Jejaring Desa Wisata (JADESTA), https://jadesta.kemeparakraf.go.id/sebaran , menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia. Jumlah desa setiap provinsi diambil dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTlVloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi--2022.html .
Pillar 7	Openness to T&T	B.2.	Keterbukaan terhadap T&T	Pilar	-
07.01	Visa requirements				

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
07.02	Number of air service agreements				
07.03	<i>Travelsat Hospitality Reputation Index</i>				
07.04	<i>Passport mobility score</i>				
Pilar 8	Price Competitiveness	B.2.	Daya Saing Harga	Pilar	
08.01	Hotel price index	B.2.1	Indeks Harga Hotel Berbintang	S	Indeks harga Hotel Bintang 3 Provinsi. Dihitung berdasarkan indeksasi harga rata-rata kamar yang dibayarkan. Indeks merupakan pembagian antara harga rata-rata hotel Provinsi dengan rata-rata nasional. Hotel bintang 3 dipilih karena ketersediaan sampel pada setiap Provinsi pada rujukan data. Indeks diperoleh dari jarak antara rata-rata harga Provinsi dengan Nasional. Semakin mendekati dengan rata-rata nasional, maka harga akan semakin kompetitif, dan berlaku sebaliknya.
08.02	Purchasing power parity	B.2.2	Paritas Daya Beli, Rp. Ribu/Orang/Tahun	S	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. • Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP. • Pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP, dengan pertimbangan : Share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012 Cara Hitung : $EYS = \text{Sigma}(E/P)$ Interpretasi : Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda dengan rentang tertinggi 732.720 dan yang terendah 360.000. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
					berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membelis suatu barang atau jasa. Kegunaan : Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.
08.03	Fuel price levels				
08.04	Short-term rental price	B.2.3	Indeks Harga Akomodasi Lainnya	S	Indeks harga Hotel yang terklasifikasi Non Bintang di Provinsi. Dihitung berdasarkan indeksasi harga rata-rata kamar yang dibayarkan. Indeks merupakan pembagian antara harga rata-rata hotel Provinsi dengan rata-rata nasional. Indeks diperoleh dari jarak antara rata-rata harga Provinsi dengan Nasional. Semakin mendekati dengan rata-rata nasional, maka harga akan semakin kompetitif, dan berlaku sebaliknya.
Dimension C.	Infrastructure and Services	C.	Infrastructure and Services	Dimensi	
Pilar 9	Air Transport Infrastructure	C.1	Infrastruktur Transportasi Udara	Pilar	
09.01	Efficiency of air transport services	C.1.1	Efisiensi pelayanan transportasi udara	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Provinsi anda, bagaimana efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi udara (jika ada)? [1- Sangat Tidak Efisien s.d. 7- Sangat Efisien]”
09.02	Available seat kilometres	C.1.2	Ketersediaan Tempat Duduk Pesawat per Populasi	S	Ketersediaan tempat duduk pesawat yang menuju provinsi setiap tahunnya (domestik dan internasional), per jumlah penduduk. Indikator ketersediaan tempat duduk pesawat menuju provinsi dihitung untuk melihat daya tampung/carrying capacity-nya. Jumlah ketersediaan tempat duduk ini akan dibagi dengan jumlah penduduk dalam satu provinsi tersebut untuk mendapatkan nilai rasionya.
09.03	Number of operating airlines	C.1.3	Banyaknya Maskapai Penerbangan yang Beroperasi	S	Banyaknya maskapai penerbangan yang beroperasi di semua bandara di Provinsi.
09.04	Airport connectivity	C.1.4	Jumlah Koneksi ke Bandara Lain di Luar Provinsi	S	Jumlah koneksi ke bandara lain di luar provinsi (domestik dan internasional) untuk mengukur tingkat integrasi provinsi dalam jaringan udara nasional.

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
Pilar 10	Ground and Port Infrastructure	C.2	Infrastruktur Darat dan Pelabuhan	Pilar	
10.01	Quality of roads	C.2.1	Kualitas jalan	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Bagaimana Anda menilai jalan di daerah Anda? [1 = Sangat terbelakang ; 7 = eksensif dan efisien dengan standar nasional]”
10.02	Road density	C.2.2	Rasio Panjang Jalan Beraspal	S	Indikator ini menghitung rasio panjang jalan beraspal di setiap Provinsi. Rasio didapatkan dengan membagi panjang jalan beraspal dengan panjang jalan pada statistik Jenis Permukaan Jalan Provinsi. Paved adalah jenis permukaan jalan provinsi dengan tipe perkerasan Aspal/ Penetrasi/Macadam dan Perkerasan Beton dalam satuan kilometer (km), sedangkan Jumlah adalah keseluruhan jenis permukaan jalan provinsi paved dan unpaved tiap provinsi dalam satuan kilometer (km).
10.03	Efficiency of train services	C.2.3	Efisiensi pelayanan transportasi umum	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Provinsi anda, bagaimana efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi umum (seperti: bis, kereta api, kereta bawah tanah, taksi, angkutan umum, dll)? [1- Sangat Tidak Efisien s.d. 7- Sangat Efisien]”
10.04	Railroad density	C.2.4	Densitas Rel Kereta Api	S	Kilometer rel kereta api per 100 kilometer persegi tanah Densitas jalur rel kereta api adalah rasio panjang total jaringan jalur kereta api terhadap luas daratan suatu Provinsi. Jalur kereta api adalah panjang jalur kereta api yang tersedia untuk layanan kereta api, berapa pun jumlah jalur paralelnya.
10.05	Efficiency of public transport services	C.2.5	Efisiensi pelayanan angkutan umum	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survei: “Di daerah Anda, seberapa efisien (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga) layanan transportasi berikut: Transportasi umum (misalnya bus, kereta api, kereta bawah tanah, sepeda listrik, dan taksi)?” [1 = Sangat tidak efisien – termasuk yang terburuk di dunia; 7 = Sangat efisien – salah satu yang terbaik di dunia]
10.06	Efficiency of seaport services	C.2.6	Efisiensi pelayanan Pelabuhan	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Provinsi anda, bagaimana efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi pelabuhan (seperti: feri, kapal) (jika ada)? [1- Sangat Tidak Baik s.d. 7- Sangat Baik]”
Pilar 11	Tourist Services and Infrastructure	C.3	Infrastruktur Layanan Pariwisata	Pilar	

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
11.01	Hotel rooms density	C.3.1	Densitas Kamar Hotel per 100 Populasi	S	Rasio jumlah kamar hotel yang dimiliki di tiap provinsi per 100 populasi. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel klasifikasi bintang dan hotel nonbintang. Buku Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia, Lampiran 6 dan 7 Banyaknya Kamar pada Usaha Hotel Bintang dan akomodasi lainnya. Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
11.02	Short-term rental listing density	C.3.2	Densitas Kamar Akomodasi Lainnya per 100 Populasi	S	Rasio jumlah kamar akomodasi lainnya yang dimiliki di tiap provinsi per 100 populasi. Akomodasi lainnya adalah usaha penyediaan akomodasi yang tidak masuk klasifikasi hotel yang mencakup kelas melati. Buku Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia, Lampiran 10 Banyaknya Kamar pada Usaha Akomodasi Lainnya. Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
11.03	Labour productivity in hotels and restaurants	C.3.3	Produktivitas Tenaga Kerja di Bidang Perhotelan dan Restoran, dalam Rp. Juta	S	Indikator produktivitas tenaga kerja di bidang perhotelan dan restoran diukur berdasarkan jumlah produktivitas tenaga kerja di bidang perhotelan dan restoran (juta rupiah per populasi) dihitung dari PDRB Provinsi Sektor Jasa Perhotelan dan Restoran dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sektor jasa perhotelan dan restoran per provinsi. PDRB merujuk pada [Seri 2010] PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Seluruh Indonesia, pada tautan https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIwNiMx/-seri-2010--pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-di-provinsi-seluruh-indonesia--miliar-rupiah--2010-2024.html . Basis harga konstan digunakan untuk mengeliminasi dampak inflasi yang terjadi. Jumlah tenaga kerja didapatkan dari publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tabel 3.24.1. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, pada tautan https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/08/f8c567805aa8a6977bd4594a/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2023.html . Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia yang dapat digunakan.
11.04	T&T capital investment intensity	C.3.4	Investasi Sektor Pariwisata	S	Persentase investasi sektor pariwisata terhadap total investasi di provinsi. Persentase investasi sektor pariwisata terhadap total investasi di masing-masing provinsi berdasarkan usaha pariwisata yang dikategorikan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Data ini didapatkan dari BKPM yang dapat diakses dari OSS. Bersumber

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
					dari data Direktorat Manajemen Investasi Kemenparekraf /Baparekraf, atau Komunikasi langsung dengan BKPM, menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
Pilar 12	Natural Resources	D.1	Sumber Daya Alam	Pilar	
12.01	Number of World Heritage natural sites	D.1.1	Jumlah Situs Alam Warisan Dunia (standar UNESCO)	S	Jumlah situs alam warisan dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO.
12.02	Total known species	D.1.2	Jumlah Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Diketahui	S	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa liar yang diketahui di tiap Provinsi. Khusus untuk Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, data dibagi berdasarkan rasio luas wilayah. Luas Daerah didapatkan dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2021.html?year=2021 . Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
12.03	Total protected areas	D.1.3.	Rasio Kawasan Hutan Lindung, km2	S	Rasio kawasan hutan lindung dengan luas keseluruhan Provinsi. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Hutan Lindung Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan Luas Daerah didapatkan dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2021.html?year=2021 . Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
12.04	Natural tourism Digital Demand	D.1.4	Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Alam Popular	S	Keyword yang digunakan: Beach Accommodation, Beach Hotel, Beach, Beaches, Garden, Gardens, Natural Wonders, Natural Parks, Reserves, National Park, Theme Park, City Park, Geopark, Camping, Golf Accommodation, Golf Hotel, Golf Cottage, Rural Accommodation, Rural Hotel, Ski Accommodation, Diving, Dive, Snorkeling, Golf, Water Sports, Pool, Winter Sports, Adventure, Outdoor Adventure, Outdoor, Animal Watching, Boating, Fishing, Hunting, Hiking, dan Climbing. Keywords tersebut disandingkan dengan nama Provinsi beserta Ibu Kota Provinsi. Volume pencarian dihitung juga berdasarkan variasi antar keywords.
12.05	Number of terrestrial and	D.1.5.	Rasio Area Danau, Sungai dan Rawa	S	Rasio Luas area danau, sungai dan rawa (jumlah luas daratan dan perairan kawasan hutan dalam Hektar) dengan luas keseluruhan Provinsi.

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
	freshwater ecoregions				Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan Luas Daerah didapatkan dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2021.html?year=2021 . Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
Pilar 13	Cultural Resources	D.2	Sumber Daya Budaya	Pilar	
13.01	Number of World Heritage cultural sites	D.2.1	Jumlah situs budaya warisan dunia (standar UNESCO)	S	Jumlah situs warisan budaya yang terdaftar di UNESCO.
13.02	Oral and intangible cultural heritage	D.2.2	Jumlah Kekayaan Warisan Budaya Tak Benda	S	Jumlah kekayaan warisan budaya tak benda yang dimiliki dan terdaftar di provinsi. Menggunakan kata kunci yang sesuai dengan daftar UNESCO. Untuk warisan tak benda yang belum teridentifikasi kewilayannya, maka akan merujuk data pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kata kunci yang digunakan pada database kemendikbud antara lain: Silat, Keris, Gamelan, Wayang (Terhusus untuk yang berbentuk boneka), Jamu, dan Batik.
13.03	Number of large sports stadiums	D.2.3	Jumlah Stadion Olahraga Standar Nasional	S	Jumlah stadion olah raga yang dimiliki oleh Provinsi dengan standar nasional. Pembobotan dilakukan sebagai berikut: Stadion dengan kapasitas < 8.000 mendapat 1.0, kapasitas 8.000 s.d. 10.000 mendapat 2.0, kapasitas 10.000-20.000 mendapat 3.0, sedangkan > 20.000 mendapat 4.0.
13.04	Cultural and entertainment tourism Digital Demand	D.2.4	Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Budaya dan Hiburan	S	Keyword yang digunakan: Gastro Activities, Restaurants, Café, Local Gastronomy, Historical Sites, Museums, UNESCO, History, Local Dances, Local People, Tribes, Local Traditions, Traditional Markets, Religious Sites, Pilgrimage, Chruch, Mosque, Temple, Performing Arts, Art, Concert, Urban Landmarks, Aquariums, Entertainment, Parks, Theme Park, Gambling, Nightlife, Night Club, Shopping, Special Events, Zoos, dan Events. Keywords tersebut disandingkan dengan nama Provinsi beserta Ibu Kota Provinsi. Volume pencarian dihitung juga berdasarkan variasi antar keywords.
13.05	Number of UNESCO Creative Cities	D.2.5	Rasio Kabupaten/Kota	S	Kabupaten/Kota Kreatif menjelaskan terciptanya ekosistem pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif yang kondusif di setiap Provinsi. Rasio KaTa Kreatif didapatkan dari

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
			Kreatif (KaTa Kreatif)		jumlah Kabupaten/Kota Kreatif dibandingkan dengan jumlah Kabupaten dan Kota dalam satu provinsi. Perhitungan pada indikator ini akan menggunakan data yang bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui penghitungan angka kumulatif pada setiap Provinsi yang selanjutnya akan dilakukan normalisasi data dengan formulasi perhitungan indikator. Jumlah Kabupaten/Kota didapatkan dari https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1102/tabel-data , menggunakan data tahun 2023 atau yang terakhir tersedia.
		D.2.6	Jumlah Penyelenggaraan Event	S	Indikator Jumlah Penyelenggaraan Event yang berskala daerah, nasional maupun internasional yang diselenggarakan di suatu provinsi. Data yang digunakan bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Daerah. Perhitungan yang digunakan pada indikator ini menggunakan sistem penjumlahan pada pembobotan dari masing – masing skala event, yaitu: event daerah (nx1), event nasional (nx2), event internasional (nx3).
Pillar 14	Non-Leisure Resources, 1-7 (best)	D.3	Sumber Daya Non- Rekreatif	Pilar	
14.01	Presence of Forbes Global 2000 HQ locations				
14.02	Presence of global cities				
14.03	Number of top universities	D.3.1	Rasio Universitas Unggulan	S	Rasio jumlah universitas terakreditasi A, B, Unggul, dan Baik Sekali terhadap keseluruhan universitas yang terakreditasi di setiap Provinsi. Buku Ikhtisar Data Pendidikan Tinggi Tahun 2022/2023, Tabel 6 Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi Menurut Akreditasi Tiap Provinsi Tahun 2022/2023. Pembobotan dilakukan pada masing-masing tingkatan akreditasi. Untuk Akreditasi A dan Unggul diberikan bobot 4, sedangkan Akreditasi B dan Baik sekali 2.

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
14.04	Non-leisure tourism Digital Demand	D.3.2	Permintaan Digital Wisatawan untuk Kategori Daya Tarik Wisata Non-rekreasi	S	Keyword yang digunakan: Business tourism, Business, Health tourism, Health, Entrepreneurship, Exchange Programs, Financial Aid, Aid, Degrees and Courses, Degrees, Courses, Voluntary Tourism, Medical Tourism, dan Medical. Keywords tersebut disandingkan dengan nama Provinsi beserta Ibu Kota Provinsi. Volume pencarian dihitung juga berdasarkan variasi antar keywords.
Dimension E.	T&T Sustainability	E.	T&T Sustainability	Dimensi	
Pilar 15	Environmental Sustainability	E.1	Keberlanjutan Lingkungan	Pilar	
15.01	T&T GHG intensity	E.1.1	Rasio Emisi Gas Rumah Kaca terhadap PDRB Pariwisata	S	Emisi GRK dalam CO2e kg per Rp. PDRB Pariwisata
15.02	T&T energy intensity	E.1.2	Intensitas energi Pariwisata	S	Megajoule energi, per Rp. PDRB
15.03	T&T use of low-carbon energy	E.1.3	Persentase Energi Terbarukan terhadap Total Penggunaan Energi dalam Sektor Pariwisata	S	Energi terbarukan dari total penggunaan energi dalam perjalanan & pariwisata
15.04	<i>Renewable energy regulation</i>				
15.05	<i>Energy efficiency regulation</i>				
15.06	Particulate matter (2.5) concentration	E.1.4	Indeks kualitas udara	S	Indeks kualitas udara per provinsi didapatkan dari laporan Statistik kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan rentang penilaian 0-100 (terbaik).
15.07	Level of water stress	E.1.5	Tingkat waterstress	S	Penarikan air tawar sebagai proporsi sumber air tawar yang tersedia
15.08	Red List Index				

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
15.09	Forest cover loss	E.1.6	Tutupan Lahan yang Berkurang (Laju Deforestasi), Ha/Tahun	S	Jumlah rata-rata tutupan lahan yang berkurang/hilang (deforestasi) setiap tahunnya (per kilometer persegi)
15.10	Proportion of safely treated domestic wastewater flows	E.1.7	Indeks Kualitas Air Laut, 0-100 (Terbaik)	S	Indeks kualitas air laut di provinsi, dengan rentang nilai 0-100 (terbaik).
15.11	Clean ocean water				
15.12	Number of environmental treaty ratifications				
15.13	Adequate protection for nature	E.1.8	Perlindungan yang memadai terhadap alam oleh pemerintah daerah	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey "Di Provinsi anda, sejauh mana perusahaan-perusahaan memperhitungkan dampak proses produksi terhadap lingkungan dan alam? [1- Tidak Ada Pengelolaan yang Jelas s.d. 7- Memiliki Pengelolaan yang Jelas]"
15.14	Total protected areas coverage	E.1.9	Rasio Cakupan Kawasan Hutan Lindung, %	S	Rasio atas total cakupan kawasan lindung dibagi total wilayah di provinsi.
15.15	Average proportion of all key biodiversity areas covered by protected areas	E.1.10	Proporsi Rata-rata Keanekaragaman Hayati Kunci yang Tercakup dalam Kawasan Konservasi per km ²	S	Proporsi rata-rata (dalam persen) kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati kunci yang tercakup dalam kawasan konservasi.
Pilar 16	T&T Socioeconomic Impact	E.2	Dampak Sosioekonomi Kepariwisata	Pilar	

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
16.01	T&T GDP multiplier	E.2.1	PDRB Sektor Perjalanan dan Pariwisata, %	S	Pangsa dari setiap sektor didasarkan pada Penyediaan Akomodasi (94.25), Penyediaan Makan dan Minum (50.21), Jasa angkutan Rel untuk Penumpang (60.51), Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang (25.36), Jasa Angkutan Air untuk Penumpang (40.79), Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang (98.22), Jasa Persewaan Kendaraan (51.94), Jasa Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya (88.50), Jasa Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi (36.39), Jasa Olahraga dan Rekreasi (11.45), Barang-Barang Pariwisata (23.14), dan Jasa Pariwisata Lainnya (0.22)
16.02	<i>T&T employment multiplier</i>	E.2.2	Kontribusi dan Tenaga Kerja Pariwisata	S	Rasio tenaga kerja pariwisata terhadap kontribusi perjalanan langsung dan lapangan kerja pariwisata
16.03	<i>T&T high-wage jobs</i>	E.2.3	Upah Tenaga Kerja Provinsi	S	Jumlah upah tenaga kerja tingkat Provinsi
16.04	<i>T&T labour gender parity</i>	E.2.4	Keseimbangan Gender Tenaga Kerja Pariwisata	S	Perbedaan tenaga kerja di sektor pariwisata antara laki-laki dan perempuan
Pilar 17	Demand Sustainability	E.3	Kebutuhan untuk keberlanjutan	Pilar	
17.01	Inbound length of stay	E.3.1	Lama Perjalanan Wisatawan Nusantara	S	Rata-rata lama perjalanan wisatawan nusantara (per malam) berdasarkan provinsi tujuan.
17.02	Seasonality of international tourist arrivals	E.3.2	Musim Kedatangan Wisatawan Nusantara	S	Dihitung dengan pendekatan indeks musiman. Indeks musiman dihitung dengan membagi jumlah dari total 3 (tiga) bulan dimana kunjungan wisatawan berada pada angka tertinggi (Top-3) dengan total kunjungan dalam 1 (satu) tahun. Indeks didapatkan dari rata-rata bergerak 2 (dua) tahun terakhir.
17.03	Concentration of interest in cultural attractions	E.3.3	Rasio Pengunjung Daya Tarik Wisata Budaya	S	Rasio jumlah pengunjung daya tarik wisata budaya terhadap keseluruhan wisatawan nusantara ke provinsi. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke daya tarik wisata budaya dihitung berdasarkan persentase jumlah kunjungan ke daya tarik wisata budaya dibagi total kunjungan wisatawan nusantara di provinsi. Daya tarik wisata budaya yang dikategorikan dalam indikator ini termasuk didalamnya "Wisata Sejarah/ Religi/Historical/ Religious Tourism", "Wisata Kesenian/Cultural Tourism", "Wisata Kuliner/Culinary Tourism", "Wisata Kota & Pedesaan/ City/ Rural Tourism"

No Indikator TTDI 2024	Indikator TTDI 2024	No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	Jenis Data	Rincian IPKN 2025
17.04	Concentration of interest in nature attractions	E.3.4	Rasio Pengunjung Daya Tarik Wisata Alam (Bahari, Ekowisata, dan Adventure)	S	Rasio jumlah pengunjung daya tarik wisata alam terhadap keseluruhan jumlah wisatawan nusantara ke provinsi. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke daya tarik wisata alam dihitung berdasarkan persentase jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke daya tarik wisata alam dibagi total kunjungan wisatawan nusantara di provinsi tersebut. Daya tarik wisata alam yang dikategorikan dalam indikator ini termasuk di dalamnya "Wisata Bahari/Marine Tourism", "Eko Wisata/Eco Tourism", "Wisata Petualangan/Adventure Tour", "Wisata Terintegrasi/Integrated Tourism".
17.05	Geographically dispersed tourism	E.3.5	Persebaran wisatawan pada Daya Tarik Wisata Setempat	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey "Bagaimana sebaran wisatawan, baik rekreasi dan bisnis, di Provinsi anda? [1- Hanya terkonsentrasi di beberapa lokasi saja s.d 7- Menyebar dengan merata]"

Strategi 3: Pembangunan IPKKK yang Berdaya Saing

Penjelasan: IPKKK atau Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota merupakan suatu langkah baru yang dilakukan di Indonesia untuk mengukur daya saing kepariwisataan di tingkat Kabupaten/Kota. Pembangunan IPKKK ini berbasis *Re-design* IPKN terbaru sehingga akan menggambarkan capaian yang dihasilkan oleh Kabupaten/Kota dapat sesuai atau sejalan dengan hasil Provinsi pada IPKN, sehingga dapat berjalan secara simultan dengan capaian Indonesia pada TTDI. Oleh karena itu, IPKKK ini kedepannya akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi yang diasistensi oleh Kemenparekraf untuk menilai capaian kepariwisataan daerahnya untuk seluruh Kabupaten/Kota.

Tabel 7 Kerangka Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota berbasis IPKN

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
Dimensi A	Enabling Environment	Dimensi A	Enabling Environment		
A.1	Lingkungan Bisnis	A.1.	Lingkungan Bisnis		
A.1.1	Tingkat Integritas dan Potensi Risiko Korupsi, 0-100 (Terbaik)	A.1.1	Tingkat Integritas dan Potensi Risiko Korupsi, 0-100 (Terbaik)	S	Indeks ini merupakan adopsi dari Indeks Persepsi Korupsi yang diukur melalui indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional. SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
A.1.2	Beban Peraturan Pemerintah Daerah	A.1.2	Beban Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Seberapa mudahnya bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah kabupaten/kota dan persyaratan administratif (misalnya izin, pelaporan, peraturan perundang-undangan)? [1 = sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]”
A.1.3	Pemerintah Daerah Menjamin Kondusifitas Iklim usaha	A.1.3	Pemerintah Kabupaten/Kota Menjamin Kondusifitas Iklim usaha	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Kabupaten/Kota Anda, sejauh mana pemerintah menjamin lingkungan kebijakan yang stabil dalam menjalankan bisnis? [1 = Tidak ada sama sekali; 7 = Sangat memberikan jaminan]”
A.1.4	Akses Pembiayaan UMKM	A.1.4	Akses Pembiayaan UMKM	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Kabupaten/Kota Anda, sejauh mana usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat akses pembiayaan yang mereka butuhkan untuk operasional bisnis mereka melalui sektor keuangan? [1 = Sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]”

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
A.2	Keselamatan dan Keamanan	A.2	Keselamatan dan Keamanan	Pilar	
A.2.1	Keandalan Layanan Kepolisian	A.2.1	Keandalan Layanan Kepolisian	S	Tanggapan terhadap pertanyaan survey "Di Kabupaten/Kota Anda, Sejauh mana layanan kepolisian dapat diandalkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban secara efisien? [1 = sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]"
A.2.2	Keamanan Berjalan Sendirian pada Malam Hari di Ruang Publik	A.2.2	Keamanan Berjalan Sendirian pada Malam Hari di Ruang Publik	S	Mengacu pada Tingkat kekhawatiran rumah tangga berjalan sendirian di malam hari. Menggunakan indikator "Tidak Khawatir".
A.2.3	Tingkat Pembunuhan per 100.000 Populasi	A.2.3	Tingkat Pembunuhan per 100.000 Populasi	S	Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa per 100.000 populasi.
A.2.4	Kekerasan terorganisir	A.2.4	Kekerasan terorganisir	S	Jumlah kematian akibat kekerasan terorganisir yang diakibatkan oleh terorisme, konflik SARA, separatisme, dan makar yang dihitung rata-rata bergerak 5 tahun
A.3	Kesehatan dan Higienis	A.3	Kesehatan dan Higienis	Pilar	
A.3.1	Rasio Dokter per 1.000 Populasi	A.3.1	Rasio Dokter per 1.000 Populasi	S	Indikator ini menghitung rasio jumlah kepadatan dokter di provinsi. Jumlah tersebut adalah penjumlahan dari Jumlah Dokter dan Dokter Spesialis.
A.3.2	Penggunaan Sanitasi Dasar	A.3.2	Penggunaan Sanitasi Dasar	S	Indikator ini menghitung persentase rumah tangga dengan sanitasi layak. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (septic tank) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/ SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Untuk daerah perdesaan, dikatakan memiliki akses sanitasi layak, jika kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja ke tangki septik atau lubang tanah dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Konsep sanitasi layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/ Dt.2.4/01/2019.

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
A.3.3	Penggunaan Air Minum Dasar (PDAM, Kemasan atau Sumur), % Rumah Tangga	A.3.3	Penggunaan Air Minum Dasar (PDAM, Kemasan atau Sumur), % Rumah Tangga	S	<p>Persentase Rumah Tangga menurut Kab/Kota dan Sumber Air Minum Layak .</p> <p>Sumber air minum layak yaitu sumber air minum utama yang digunakan meliputi leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.</p> <p>Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/ Dt.2.4/01/2019.</p>
A.3.4	Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 Populasi	A.3.4	Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 Populasi	S	Rasio tempat tidur rumah sakit per 1.000 populasi.
A.3.5	Kasus Penduduk Terkena Penyakit Menular per 100.000 Populasi	A.3.5	Kasus Penduduk Terkena Penyakit Menular per 100.000 Populasi	S	<p>Rasio penduduk yang terkena penyakit menular per 100.000 penduduk.</p> <p>Indikator jumlah kasus penduduk terkena penyakit menular dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk terkena penyakit menular dengan kategori penyakit yaitu HIV, AIDS, tetanus, diare, TBC, COVID 19 dan suspect campak, per 100.000 penduduk. Data didapatkan dari jumlah total penduduk yang terkena masing-masing penyakit menular dibagi jumlah penduduk.</p>
A.4	Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja	A.4	Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja	Pilar	
A.4.1	Angkatan Kerja dengan Pendidikan Minimal SMA/ sederajat	A.4.1	Angkatan Kerja dengan Pendidikan Minimal SMA/ sederajat	S	Pangsa angkatan kerja yang memiliki setidaknya pendidikan menengah Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan non-perguruan tinggi menengah atas atau pasca sekolah menengah menurut Klasifikasi Standar Internasional Pendidikan 2011 (ISCED 2011)
A.4.2	Angkatan Kerja dengan Pendidikan Minimal Perguruan Tinggi	A.4.2	Angkatan Kerja dengan Pendidikan Minimal Perguruan Tinggi	S	Pangsa angkatan kerja yang memiliki pendidikan lanjutan Pendidikan lanjutan meliputi pendidikan tinggi siklus pendek, jenjang pendidikan sarjana atau sederajat, jenjang pendidikan magister atau sederajat, atau jenjang pendidikan doktoral atau sederajat menurut Klasifikasi Standar Internasional Pendidikan 2011 (ISCE 2011).

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
A.4.3	Kualitas pendidikan menengah	A.4.3	Kualitas pendidikan menengah	P	Jawaban terhadap pertanyaan survei: “Di Kabupaten/Kota Anda, seberapa baik pendidikan menengah non-vokasi memenuhi kebutuhan perekonomian yang kompetitif?” [1 = Tidak sama sekali; 7 = Sebagian besar]
A.4.4	Kualitas pendidikan tinggi	A.4.4	Kualitas Pendidikan Tinggi	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survei: “Di Kabupaten/Kota Anda, seberapa baik sebagian sistem pendidikan perguruan tinggi memenuhi kebutuhan perekonomian yang kompetitif: ?” [1 = Tidak sama sekali; 7 = Sebagian besar]
A.4.5	Praktik perekrutan dan pemecatan	A.4.5	Praktik perekrutan dan pemecatan	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survei: “Di negara Anda, sejauh mana peraturan mengizinkan perekrutan dan pemecatan pekerja yang fleksibel?” [1 = Tidak sama sekali; 7 = Sangat fleksibel]
A.4.6	Kemudahan Mencari Karyawan Terampil di Pasar Tenaga Kerja Lokal	A.4.6	Kemudahan Mencari Karyawan Terampil di Pasar Tenaga Kerja Lokal	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di daerah Kabupaten/Kota, sejauh mana perusahaan dapat menemukan orang-orang dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan di pasar tenaga kerja lokal? [1 = Sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]”
A.4.7	Pengaturan Kerja yang Fleksibel	A.4.7	Pengaturan Kerja yang Fleksibel	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Kabupaten/Kota Anda, sejauh mana perusahaan menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel seperti kerja jarak jauh dan paruh waktu? [1 = Sangat sulit dan kompleks; 7 = Sangat efisien dan mudah]”
A.4.8	Partisipasi angkatan kerja	A.4.8	Partisipasi angkatan kerja	S	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi: yaitu seluruh orang yang memasok tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa selama periode tertentu.
A.4.9	Kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan kerja yang sama	A.4.9	Kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan kerja yang sama	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Kabupaten/Kota Anda, sejauh mana perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara untuk: a). Perempuan; b). Mereka yang berasal dari latar belakang agama, etnis atau ras minoritas c). Penyandang disabilitas; d). Kaum marjinal lainnya? [1 = Tidak sama sekali ; 7 = Sebagian besar]”
A.4.10	Hak Pekerja	A.4.10	Hak Pekerja	S	Jumlah pelanggaran hak pekerja yang tercatat
A.4.11	Partisipasi angkatan kerja perempuan	A.4.11	Partisipasi angkatan kerja perempuan	S	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi: mencakup semua orang yang memasok tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki dihitung dengan membagi partisipasi angkatan kerja perempuan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan dikalikan dengan 100.

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
A.4.12	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	A.4.12	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	S	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional (BPJS). Cakupan jaminan Kesehatan nasional didapatkan dari persentase jumlah penduduk di tiap provinsi yang memiliki BPJS, dengan menggunakan data yang berasal dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Kementerian Kesehatan.
A.5.	Tingkat Kesiapan ICT	A.5.	Tingkat Kesiapan ICT	Pilar	
A.5.1	Pengguna internet	A.5.1	Pengguna internet	S	Pengguna internet dihitung dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Statistik Telekomunikasi Indonesia, Tabel 34c. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut Provinsi. Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia
A.5.2	Pelanggan Internet Broadband	A.5.2	Pelanggan Internet Broadband	S	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga. Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga. Menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia.
A.5.3	Pelanggan Internet Smartphone	A.5.3	Pelanggan Internet Smartphone	S	Persentase pengguna internet menggunakan HP di Kabupaten/Kota. Menggunakan data 2023, atau data terakhir yang tersedia.
A.5.4	Cakupan Jaringan 4G	A.5.4	Cakupan Jaringan 4G	S	Dihitung menggunakan cakupan dari sinyal 4G Kabupaten/Kota.
A.5.5	Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan layanan keuangan	A.5.5	Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan layanan keuangan	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Kabupaten/Kota anda, bagaimana penggunaan platform digital pada layanan keuangan? [1- Tidak Menggunakan Sama Sekali s.d. 7- Digunakan pada Sebagian Besar Layanan]”
A.5.6	Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan transportasi dan pengiriman	A.5.6	Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan transportasi dan pengiriman	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Kabupaten/Kota anda, bagaimana penggunaan platform digital pada layanan Transportasi dan Pengiriman? [1- Tidak Menggunakan Sama Sekali s.d. 7- Digunakan pada Sebagian Besar Layanan]”

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
A.5.7	Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan layanan hotel, restoran, dan aktivitas rekreasi	A.5.7	Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan layanan hotel, restoran, dan aktivitas rekreasi	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Kabupaten/Kota anda, bagaimana penggunaan platform digital pada layanan Hotel, Restoran, dan Aktivitas rekreasi? [1- Tidak Menggunakan Sama Sekali s.d. 7- Digunakan pada Sebagian Besar Layanan]”
A.5.8	Susut Jaringan				
B.	T&T Policy an Enabling Conditions	B.	T&T Policy an Enabling Conditions	Dimensi	
B.1	Prioritas Pembangunan Kepariwisata	B.1	Prioritas Pembangunan Kepariwisata	Pilar	
B.1.1	Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah di Sektor Pariwisata	B.1.1	Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah di Sektor Pariwisata	S	Persentase jumlah anggaran sektor pariwisata dari total keseluruhan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.
B.1.2	Ketersediaan Data Pariwisata, 0-31 (Terbaik)				
B.1.3	Kebaruan Data Pariwisata, 0-24 (Terbaik)				
B.1.4	Investasi Sektor Pariwisata				
B.1.5	Rasio Desa Wisata	B.1.2	Rasio Desa Wisata	S	Rasio desa wisata yang terdaftar dalam JADESTA per 100 desa pada Kabupaten/Kota. Indikator desa wisata diperhitungkan berdasarkan kategori di seluruh provinsi yang bersumber data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibandingkan dengan keseluruhan jumlah desa yang ada. Perhitungan kategori pada jumlah desa wisata menggunakan sistem penjumlahan pada pembobotan masing-masing kategori, yaitu: Rintisan (Bobot 1.5), Berkembang (Bobot 2), Maju (Bobot 2.5), Mandiri (3). Sebaran Desa Wisata per Provinsi, Jejaring Desa Wisata (JADESTA),

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
					https://jadesta.kemendparekrif.go.id/sebaran , menggunakan data 2023 atau data terakhir yang tersedia. Jumlah desa setiap provinsi diambil dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUYNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi--2022.html .
B.2.	Keterbukaan terhadap T&T	B.2.	Keterbukaan terhadap T&T	Pilar	
<i>B.2.1</i>	<i>Indeks Reputasi Perhotelan Travelsat</i>				
B.3.	Daya Saing Harga	B.2.	Daya Saing Harga	Pilar	
B.3.1	Indeks Harga Hotel Berbintang	B.2.1	Indeks Harga Hotel Berbintang	S	Indeks harga Hotel Bintang 3 Provinsi. Dihitung berdasarkan indeksasi harga rata-rata kamar yang dibayarkan. Indeks merupakan pembagian antara harga rata-rata hotel Provinsi dengan rata-rata nasional. Hotel bintang 3 dipilih karena ketersediaan sampel pada setiap Provinsi pada rujukan data. Indeks diperoleh dari jarak antara rata-rata harga Provinsi dengan Nasional. Semakin mendekati dengan rata-rata nasional, maka harga akan semakin kompetitif, dan berlaku sebaliknya.
B.3.2	Paritas Daya Beli, Rp. Ribu/Orang/Tahun	B.2.2	Paritas Daya Beli, Rp. Ribu/Orang/Tahun	S	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. • Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung PPP. • Pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP, dengan pertimbangan : Share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012 Cara Hitung : $EYS = \text{Sigma}(E/P)$ Interpretasi : Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda dengan rentang tertinggi 732.720 dan yang terendah 360.000. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
					memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa. Kegunaan : Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.
B.3.3	Indeks Harga Akomodasi Lainnya	B.2.3	Indeks Harga Akomodasi Lainnya	S	Indeks harga Hotel yang terklasifikasi Non Bintang di Kabupaten/Kota. Dihitung berdasarkan indeksasi harga rata-rata kamar yang dibayarkan. Indeks merupakan pembagian antara harga rata-rata hotel Provinsi dengan rata-rata nasional. Indeks diperoleh dari jarang antara rata-rata harga Provinsi dengan Nasional. Semakin mendekati dengan rata-rata nasional, maka harga akan semakin kompetitif, dan berlaku sebaliknya.
C.	Infrastructure and Services	C.	Infrastructure and Services	Dimensi	
C.1	Infrastruktur Transportasi Udara	C.1	Infrastruktur Transportasi Udara	Pilar	
C.1.1	Efisiensi pelayanan transportasi udara				
C.1.2	Ketersediaan Tempat Duduk Pesawat per Populasi				
C.1.3	Banyaknya Maskapai Penerbangan yang Beroperasi				
C.1.4	Jumlah Koneksi ke Bandara Lain di Luar Provinsi				
C.2	Infrastruktur Darat dan Pelabuhan	C.2	Infrastruktur Darat dan Pelabuhan	Pilar	
C.2.1	Kualitas jalan	C.2.1	Kualitas jalan Kabupaten/Kota	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey "Bagaimana Anda menilai jalan di Kabupaten/Kota Anda? [1 = Sangat terbelakang ; 7 = eksensif dan efisien dengan standar nasional]"
C.2.2	Rasio Panjang Jalan Beraspal	C.2.2	Rasio Panjang Jalan Beraspal	S	Indikator ini menghitung rasio panjang jalan beraspal di setiap Kabupaten/Kota.

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
C.2.3	Efisiensi pelayanan transportasi umum	C.2.3	Efisiensi pelayanan transportasi umum	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey “Di Kabupaten/Kota anda, bagaimana efisiensi (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga, ketersediaan konektivitas) pada layanan transportasi umum (seperti: bis, kereta api, kereta bawah tanah, taksi, angkutan umum, dll)? [1- Sangat Tidak Efisien s.d. 7- Sangat Efisien]”
		C.2.4	Banyaknya Armada Bus yang Beroperasi	S	Banyaknya Armada Bus yang beroperasi di semua Terminal dalam Kab/Kota
		C.2.5	Jumlah Koneksi transportasi Bus di Luar Kab/Kota	S	Jumlah koneksi transportasi bus ke terminal lain diluar Kab/Kota untuk mengukur tingkat integrasi transportasi
C.2.4	Densitas Rel Kereta Api				
C.2.5	Efisiensi pelayanan angkutan umum	C.2.6	Efisiensi pelayanan angkutan umum	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survei: “Di Kabupaten/Kota Anda, seberapa efisien (dalam hal frekuensi, ketepatan waktu, kecepatan, harga) layanan transportasi berikut: Transportasi umum (misalnya bus, kereta api, kereta bawah tanah, sepeda listrik, dan taksi)?” [1 = Sangat tidak efisien – termasuk yang terburuk di dunia; 7 = Sangat efisien – salah satu yang terbaik di dunia]
C.2.5	Efisiensi pelayanan Pelabuhan				
C.3	Infrastruktur Layanan Pariwisata	C.3	Infrastruktur Layanan Pariwisata	Pilar	
C.3.1	Densitas Kamar Hotel per 100 Populasi	C.3.1	Densitas Kamar Hotel per 100 Populasi	S	Rasio jumlah kamar hotel yang dimiliki di tiap provinsi per 100 populasi.
C.3.2	Densitas Kamar Akomodasi Lainnya per 100 Populasi	C.3.2	Densitas Kamar Akomodasi Lainnya per 100 Populasi	S	Rasio jumlah kamar akomodasi lainnya yang dimiliki di tiap provinsi per 100 populasi.

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
C.3.3	Produktivitas Tenaga Kerja di Bidang Perhotelan dan Restoran, dalam Rp. Juta				
C.3.4	Investasi Sektor Pariwisata				
Dimension D.	T&T Demand Drivers	D.	T&T Demand Drivers	Dimensi	
D.1	Sumber Daya Alam	D.1	Sumber Daya Alam	Pilar	
D.1.1	Jumlah Situs Alam Warisan Dunia (standar UNESCO)				
D.1.2	Jumlah Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Diketahui				
D.1.3.	Rasio Kawasan Hutan Lindung, km2	D.1.1	Jumlah taman hutan raya (Tahura). Km2	S	Rasio taman hutan raya dengan keseluruhan Kab/Kota
D.1.4	Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Alam Populer	D.1.2	Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Alam Populer	S	Keyword yang digunakan: Beach Accommodation, Beach Hotel, Beach, Beaches, Garden, Gardens, Natural Wonders, Natural Parks, Reserves, National Park, Theme Park, City Park, Geopark, Camping, Golf Accommodation, Golf Hotel, Golf Cottage, Rural Accommodation, Rural Hotel, Ski Accommodation, Diving, Dive, Snorkeling, Golf, Water Sports, Pool, Winter Sports, Adventure, Outdoor Adventure, Outdoor, Animal Watching, Boating, Fishing, Hunting, Hiking, dan Climbing. Keywords tersebut disandingkan dengan nama Provinsi beserta Ibu Kota Provinsi. Volume pencarian dihitung juga berdasarkan variasi antar keywords.
D.1.5.	Rasio Area Danau, Sungai dan Rawa	D.1.3	Rasio Area Danau, Sungai dan Rawa	S	Rasio Luas area danau, sungai dan rawa (jumlah luas daratan dan perairan kawasan hutan dalam Hektar) dengan luas keseluruhan Kabupaten/Kota.
D.2	Sumber Daya Budaya	D.2	Sumber Daya Budaya	Pilar	

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
D.2.1	Jumlah situs budaya warisan dunia (standar UNESCO)				
D.2.2	Jumlah Kekayaan Warisan Budaya Tak Benda				
D.2.3	Jumlah Stadion Olahraga Standar Nasional	D.2.1	Jumlah Stadion Olahraga Minimal Standar Liga 3	S	Jumlah stadion olah raga yang dimiliki oleh Provinsi dengan minimal standar liga 3.
D.2.4	Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Budaya dan Hiburan	D.2.2	Total Pencarian di Internet Terkait Daya Tarik Wisata Budaya dan Hiburan	S	Keyword yang digunakan: Gastro Activities, Restaurants, Café, Local Gastronomy, Historical Sites, Museums, UNESCO, History, Local Dances, Local People, Tribes, Local Traditions, Traditional Markets, Religious Sites, Pilgrimage, Church, Mosque, Temple, Performing Arts, Art, Concert, Urban Landmarks, Aquariums, Entertainment, Parks, Theme Park, Gambling, Nightlife, Night Club, Shopping, Special Events, Zoos, dan Events. Keywords tersebut disandingkan dengan nama Provinsi beserta Ibu Kota Provinsi. Volume pencarian dihitung juga berdasarkan variasi antar keywords.
D.2.5	Rasio Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	D.2.3	Rasio Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	S	Kabupaten/Kota Kreatif menjelaskan terciptanya ekosistem pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif yang kondusif di setiap Kabupaten/Kota.
D.2.6	Jumlah Penyelenggaraan Event	D.2.4	Jumlah Penyelenggaraan Event	S	Indikator Jumlah Penyelenggaraan Event yang berskala daerah, nasional maupun internasional yang diselenggarakan di suatu Kabupaten/Kota.
D.3	Sumber Daya Non-Rekreatif	D.3	Sumber Daya Non-Rekreatif	Pilar	
D.3.1	Rasio Universitas Unggulan	D.3.1	Rasio perguruan tinggi	S	Rasio jumlah universitas terakreditasi A, B, Unggul, dan Baik Sekali terhadap keseluruhan universitas yang terakreditasi di setiap Kabupaten/Kota.
D.3.2	Permintaan Digital Wisatawan untuk Kategori Daya Tarik Wisata Non-rekreasi	D.3.2	Permintaan Digital Wisatawan untuk Kategori Daya Tarik Wisata Non-rekreasi	S	Keyword yang digunakan: Business tourism, Business, Health tourism, Health, Entrepreneurship, Exchange Programs, Financial Aid, Aid, Degrees and Courses, Degrees, Courses, Voluntary Tourism, Medical Tourism, dan Medical. Keywords tersebut disandingkan dengan nama Provinsi beserta Ibu Kota Provinsi. Volume pencarian dihitung juga berdasarkan variasi antar keywords.
E.	T&T Sustainability	E.	T&T Sustainability	Dimensi	

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
E.1	Keberlanjutan Lingkungan	E.1	Keberlanjutan Lingkungan	Pilar	
E.1.1	Rasio Emisi Gas Rumah Kaca terhadap PDRB Pariwisata				
E.1.2	Intensitas energi Pariwisata				
E.1.3	Persentase Energi Terbarukan terhadap Total Penggunaan Energi dalam Sektor Pariwisata				
E.1.4	Konsentrasi materi partikulat (2,5).				
E.1.5	Tingkat waterstress				
E.1.6	Tutupan Lahan yang Berkurang (Laju Deforestasi), Ha/Tahun	E.1.1	Tutupan Lahan yang Berkurang (Laju Deforestasi), Ha/Tahun	S	Jumlah rata-rata tutupan lahan yang berkurang/hilang (deforestasi) setiap tahunnya (per kilometer persegi)
E.1.7	Indeks Kualitas Air Laut, 0-100 (Terbaik)				
E.1.8	Perlindungan yang memadai terhadap alam oleh pemerintah daerah	E.1.2	Perlindungan yang memadai terhadap alam oleh pemerintah daerah	P	Tanggapan terhadap pertanyaan survey "Di Kabupaten/Kota anda, sejauh mana perusahaan-perusahaan memperhitungkan dampak proses produksi terhadap lingkungan dan alam? [1- Tidak Ada Pengelolaan yang Jelas s.d. 7- Memiliki Pengelolaan yang Jelas]"
E.1.9	Rasio Cakupan Kawasan Hutan Lindung	E.1.3	Rasio Cakupan Kawasan Hutan Lindung	S	Persentase total cakupan kawasan lindung dibagi total wilayah di Kabupaten/Kota.

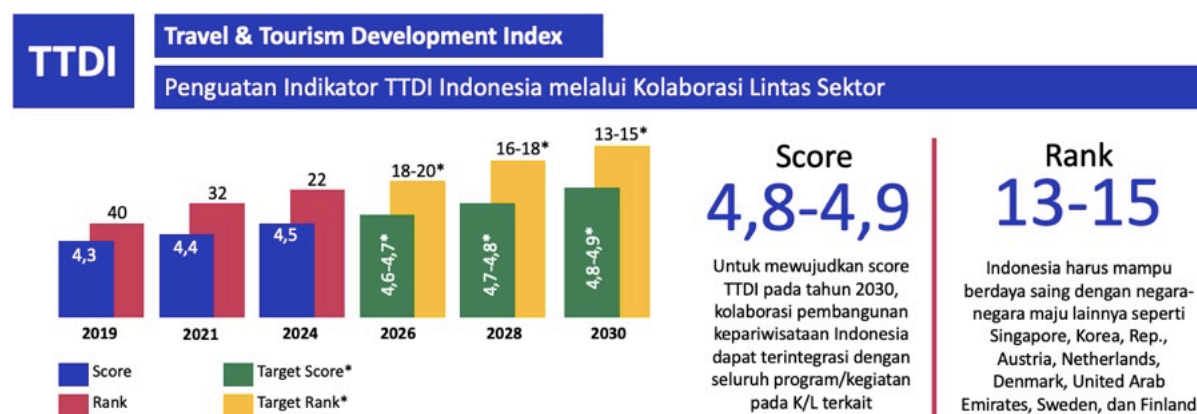
No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKN	Indikator IPKKN	Jenis Data	Rincian IPKKN
E.1.10	Proporsi Rata-rata Keanekaragaman Hayati Kunci yang Tercakup dalam Kawasan Konservasi per km ²				
E.2	Dampak Sosioekonomi Kepariwisata	E.2	Dampak Sosioekonomi Kepariwisata	Pilar	
E.2.1	PDRB Sektor Perjalanan dan Pariwisata	E.2.1	PDRB Sektor Perjalanan dan Pariwisata	S	Pangsa dari setiap sektor didasarkan pada Penyediaan Akomodasi (94.25), Penyediaan Makan dan Minum (50.21), Jasa angkutan Rel untuk Penumpang (60.51), Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang (25.36), Jasa Angkutan Air untuk Penumpang (40.79), Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang (98.22), Jasa Persewaan Kendaraan (51.94), Jasa Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya (88.50), Jasa Kebudayaan, Olahraga, dan Rekreasi (36.39), Jasa Olahraga dan Rekreasi (11.45), Barang-Barang Pariwisata (23.14), dan Jasa Pariwisata Lainnya (0.22)
E.2.2	Upah Tenaga Kerja Provinsi	E.2.2	Upah tenaga kerja tingkat Kab/Kota	S	
E.3	Kebutuhan untuk keberlanjutan	E.3	Kebutuhan untuk keberlanjutan	Pilar	
E.3.1	Lama Perjalanan Wisatawan Nusantara				
E.3.2	Musim Kedatangan Wisatawan Nusantara				

No. Indikator IPKN	Indikator IPKN 2025	No. Indikator IPKKK	Indikator IPKKK	Jenis Data	Rincian IPKKK
E.3.3	Rasio Pengunjung Daya Tarik Wisata Budaya	E.3.1	Rasio Pengunjung Daya Tarik Wisata Budaya	S	<p>Rasio jumlah pengunjung daya tarik wisata budaya terhadap keseluruhan wisatawan nusantara ke Kab/Kota.</p> <p>Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke daya tarik wisata budaya dihitung berdasarkan persentase jumlah kunjungan ke daya tarik wisata budaya dibagi total kunjungan wisatawan nusantara di provinsi. Daya tarik wisata budaya yang dikategorikan dalam indikator ini termasuk didalamnya "Wisata Sejarah/ Religi/Historical/ Religious Tourism", "Wisata Kesenian/Cultural Tourism", "Wisata Kuliner/Culinary Tourism", "Wisata Kota & Pedesaan/ City/ Rural Tourism"</p>
E.3.4	Rasio Pengunjung Daya Tarik Wisata Alam (Bahari, Ekowisata, dan Adventure)	E.3.2	Rasio Pengunjung Daya Tarik Wisata Alam (Bahari, Ekowisata, dan Adventure)	S	<p>Rasio jumlah pengunjung daya tarik wisata alam terhadap keseluruhan jumlah wisatawan nusantara ke Kab/Kota.</p> <p>Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke daya tarik wisata alam dihitung berdasarkan persentase jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke daya tarik wisata alam dibagi total kunjungan wisatawan nusantara di provinsi tersebut. Daya tarik wisata alam yang dikategorikan dalam indikator ini termasuk di dalamnya "Wisata Bahari/Marine Tourism", "Eko Wisata/Eco Tourism", "Wisata Petualangan/Adventure Tour", "Wisata Terintegrasi/Integrated Tourism".</p>
E.3.6	Persebaran wisatawan pada Daya Tarik Wisata Setempat				

ROADMAP STRATEGI KEPARIWISATAAN INDONESIA

TTDI yang dipublikasi oleh World Economic Forum (WEF) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, namun TTDI terakhir baru saja dipublikasikan pada tahun 2024, yang secara otomatis nantinya akan dipublish Kembali pada tahun genap atau 2026 dan 2028 begitu juga seterusnya. TTDI ini diwujudkan untuk mengukur daya saing seluruh negara yang terdiri dari berbagai sektor seperti keamanan, Kesehatan, transportasi, infrastruktur, keuangan, dll. Pada tahun 2024 ini, Indonesia berhasil masuk kedalam peringkat 22 dunia yang naik sebanyak 10 peringkat dari TTDI 2021. Namun demikian, masih banyak hal yang harus menjadi perhatian Indonesia, khususnya terkait penguatan indikator dan pilar yang masih dianggap perlu untuk ditingkatkan.

Salah satu strategi yang digunakan adalah memperkuat kolaborasi dengan berbagai K/L maupun berbagai stakeholder terkait. Kolaborasi tersebut dalam rangka memperkuat data-data capaian kepariwisataan Indonesia agar mampu memberikan dampak positif pada perhitungan berikutnya. Selain itu, untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global, dibutuhkan juga suatu langkah strategis terkait pengukuran daya saing kepariwisataan di tingkat nasional. Pengukuran tersebut dilakukan untuk menilai seluruh daya saing Provinsi, agar dapat sejalan dengan pembangunan kepariwisataan Indonesia. Melalui pembangunan kepariwisataan tingkat provinsi, maka perlu juga untuk di sinergikan dengan lintas Kabupaten/Kota agar dapat menghasilkan capaian yang sejalan dengan program pemerintah daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu disusun suatu roadmap yang dapat membantu para pemangku kepentingan agar dapat memahami target pembangunan kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.



Strategi Penguatan TTDI Indonesia

- Menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif. Fokus terhadap perijinan usaha dan mampu memberikan kepercayaan bagi investor pada sektor pariwisata agar terwujudnya inklusivitas dan produktivitas yang tinggi.
- Meningkatkan Infrastruktur Pariwisata. Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar di destinasi-destinasi wisata baru, termasuk jalan, bandara, serta fasilitas kesehatan dan keselamatan.

- c. Meningkatkan Kualitas Layanan. Melakukan pelatihan tenaga kerja di sektor pariwisata, sehingga dapat memberikan pelayanan berkualitas tinggi dan memenuhi ekspektasi wisatawan internasional.
- d. Memperkuat Promosi Digital. Meningkatkan pemasaran pariwisata melalui platform digital dan media sosial untuk menjangkau pasar global yang lebih luas.
- e. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Mendorong pembangunan destinasi wisata berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
- f. Peningkatan Aksesibilitas dan Keterbukaan. Mempermudah akses visa bagi wisatawan mancanegara, meningkatkan konektivitas penerbangan, dan membangun lebih banyak kemitraan internasional.
- g. Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas yang tinggi. Keamanan dan persepsi stabilitas di Indonesia masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Indonesia perlu terus meningkatkan keamanan, memberikan jaminan kepada wisatawan, dan mengelola persepsi melalui komunikasi yang efektif agar wisatawan merasa nyaman dan aman.
- h. Memperkuat kondisi Health & Hygiene. Kondisi ini mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur kesehatan, kebersihan lingkungan, akses ke layanan kesehatan, serta persepsi keamanan terkait kesehatan di suatu destinasi.
- i. Mempererat kolaborasi dengan mitra internasional. Melakukan komunikasi secara intens dengan mitra internasional terkait capaian data kepariwisataan Indonesia agar terus update secara real time dan mampu memberikan hasil positif pada perhitungan metodologinya.
- j. Menerapkan indikator TTDI sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama pada K/L. Indikator-indikator TTDI sejatinya di ampu oleh beberapa K/L, namun saat ini TTDI menjadi salah satu IKU dari Kemenparekraf saja, padahal $\pm 70\%$ capaian data pada TTDI dihasilkan oleh K/L terkait.

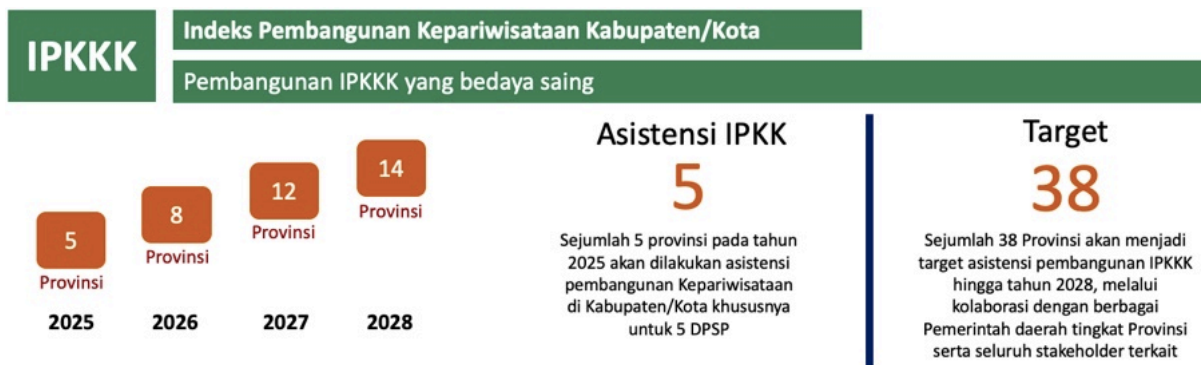


Strategi Pengembangan IPKN

- a. Menyusun Kembali kerangka perhitungan IPKN berbasis TTDI 2024. Pada IPKN 2024 yang telah diselenggarakan menggunakan basis indikator pada TTDI 2021, sehingga Re-

design IPKN dibutuhkan untuk memperkuat keselarasan capaian kepariwisataan pada tingkat Provinsi.

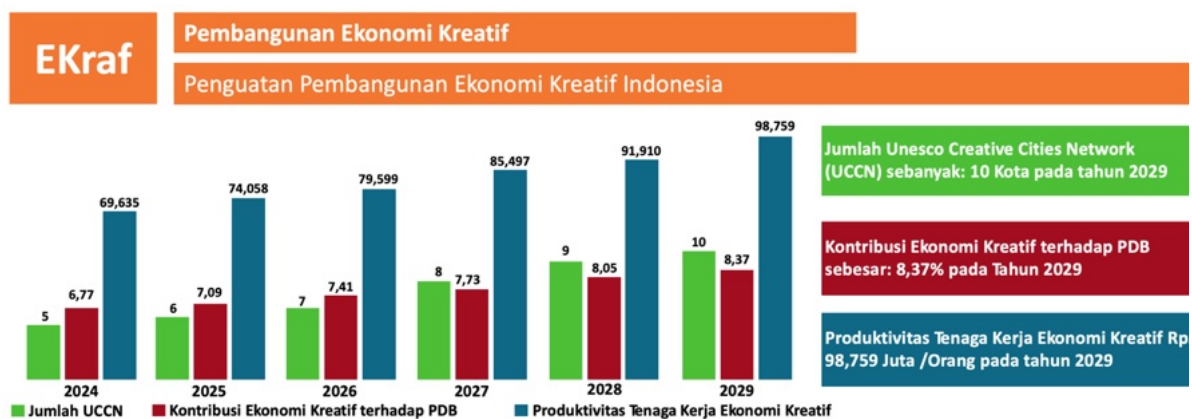
- b. **Menyusun Kebijakan dan Regulasi Pendukung di setiap daerah.** Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi IPKN, termasuk regulasi terkait pengelolaan dampak lingkungan, perlindungan budaya lokal, dan keterlibatan masyarakat.
- c. **Memperkuat Peran Pemerintah Daerah.** Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pemantauan IPKN untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas kebijakan.
- d. **Menerapkan Indikator IPKN di Tingkat Daerah.** Menerapkan IPKN sebagai IKU dari Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Indikator-indikator didalamnya menjadi indikator Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah.
- e. **Meningkatkan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga.** Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik serta kementerian lainnya untuk mencapai sinergi dalam penerapan dan capaian data IPKN.
- f. Pemanfaatan Teknologi Digital sebagai Platform Digital untuk Pemantauan. Membangun dashboard digital yang dapat diakses publik untuk menampilkan kinerja IPKN, tren perkembangan, aplikasi pengumpulan data, laporan kinerja secara berkala, dan platform daring untuk memantau indikator kinerja IPKN secara real-time.
- g. **Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Evaluasi Berkala.** Mengadakan evaluasi kinerja IPKN setiap tahun untuk mengidentifikasi pencapaian dan tantangan serta menyesuaikan strategi sesuai perkembangan dan kebutuhan atas hasil perhitungan IPKN.



Strategi Pembangunan IPKKK


- a. Membangun Dimensi, Pilar, dan indikator IPKKK. Design kerangka perhitungan IPKKK berdasarkan turunan dan adaptasi dari Dimensi, Pilar, dan indikator IPKN. Hal tersebut disesuaikan dengan kerangka perhitungan pada TTDI 2024, dengan artian akan memiliki keselarasan terkait data capaian Indonesia, dari level daerah, ke level nasional, menuju level global.

- b. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemda Provinsi. Menyusun agenda kebijakan terkait pengukuran IPKKK melalui serangkaian kebijakan dan regulasi yang disusun berdasarkan NSPK terkait IPKKK yang telah disusun oleh Kemenparekraf.
- c. Membangun kebijakan dan regulasi terkait IPKKK oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pengukuran IPKKK akan dilaksanakan oleh Pemda Tingkat Provinsi, hal ini perlu diperkuat dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur terkait Penyelenggaraan IPKKK dimasing-masing Provinsi.
- d. **Pemanfaatan Teknologi Digital.** Menggunakan aplikasi digital dan platform daring untuk mempermudah pengumpulan data secara real-time dari berbagai pemangku kepentingan.
- e. Melaksanakan Asistensi, Pelatihan dan Bimbingan Teknis. Mengadakan pelatihan dan Bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dan stakeholder lainnya mengenai pengumpulan data, pemanfaatan IPKKK, dan strategi peningkatan daya saing, serta pemanfaatan data IPKKK.
- f. **Membentuk Forum Pariwisata Daerah.** Forum tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif, dan mampu menjadi pemicu dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- g. **Menerapkan Indikator IPKKK di Tingkat Daerah.** Menerapkan IPKKK sebagai IKU dari Pemerintah Daerah Tingkat Kab/Kota dan Indikator-indikator didalamnya menjadi indikator Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah.



Strategi Pembangunan IPKKK

- a. Menyusun program pembangunan KaTa Kreatif berbasis Potensi Lokal yang dapat ditumbuhkembangkan
- b. Memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pertumbuhan ekraf nasional
- c. Meningkatkan Investasi ekraf untuk menuju kemandirian nasional dalam rangka memperkuat jumlah tenaga kerja Ekraf
- d. Memperluas fasilitasi infrastruktur ekraf di berbagai daerah dengan tujuan meningkatkan kreativitas pelaku ekraf yang sejalan dengan menciptakan ekonomi tinggi

- 
- e. Memperkuat keterampilan SDM Ekraf
 - f. Menyusun *integrated marketing creative economy system* dalam memajukan Kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif
 - g. Mendorong keterlibatan *Anchor Industry* dalam proses hilirisasi produk ekraf yang unggul dan berdaya saing



5

Bagian Kelima

MENGUKUR TINGKAT KEBERHASILAN



BAGIAN LIMA – MENGUKUR TINGKAT KEBERHASILAN

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA

Pengembangan sektor kepariwisataan di Indonesia merupakan upaya yang kompleks dan multifaset yang memerlukan koordinasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat (Fatmawati et al., 2021; Lemy et al., 2019). Salah satu faktor kunci keberhasilan pengembangan ini adalah peningkatan fasilitas sistem pendukung dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan terkait. Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki beragam destinasi wisata potensial yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara, penciptaan lapangan kerja, dan perolehan devisa negara (Kabu & Tandilino, 2021; Tandilino & Kabu, 2021).

Untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, pemerintah harus merumuskan kebijakan dan regulasi yang menciptakan lingkungan yang ramah bagi untuk bisnis pada sektor pariwisata (Khan et al., 2020). Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur, seperti meningkatkan jaringan transportasi, aksesibilitas, dan fasilitas pariwisata. Untuk mempercepat pondasi tersebut, keterlibatan aktif sektor swasta merupakan faktor penting lainnya bagi keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Indonesia, khususnya dalam kontribusi pada investasi pariwisata (Rhama & Setiawan, 2020).

Pendekatan kolaboratif ini akan memastikan bahwa manfaat pariwisata di distribusikan secara luas, yang mengarah pada kemakmuran ekonomi yang lebih besar dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penduduk setempat (Karim & Suherry, 2017). Namun daripada itu, pelestarian dan promosi warisan budaya dan sumber daya alam Indonesia yang kaya sangat penting untuk keberhasilan jangka Panjang sektor pariwisata. Dengan sumber daya alam yang melimpah, budaya yang beragam, dan daya tarik yang unik, Indonesia berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan di dunia (Antara & Sumarniasih, 2017).

Untuk lebih mendukung pengembangan kepariwisataan di Indonesia, pemerintah juga harus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dalam sektor ini (Setiawan et al., 2020). Hal ini termasuk menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan keterampilan bagi para profesional pariwisata, seperti staf hotel dan restoran, pemandu wisata, dan manajer pariwisata. Dengan meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kerja pariwisata, Indonesia dapat memberikan layanan dan pengalaman berkualitas tinggi kepada pengunjung, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan pariwisata dalam jangka Panjang (Salihin, 2021).

Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan untuk menjalin kemitraan dengan organisasi dan lembaga internasional untuk berbagi praktik terbaik, mengakses sumber daya pemasaran dan promosi global, dan menarik lebih banyak pengunjung asing ke Indonesia. Dengan memanfaatkan koneksi dan keahlian global ini, Indonesia dapat lebih memperkuat

posisinya sebagai destinasi wisata terkemuka di kawasan ini dan memanfaatkan permintaan yang terus meningkat untuk pengalaman perjalanan dan rekreasi. Namun daripada itu, kolaborasi dengan pihak-pihak tersebut nantinya akan memberikan dampak positif dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia di kancah global.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Indonesia memerlukan pendekatan multi-aspek yang melibatkan kolaborasi aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal (Sakawati et al., 2022). Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan seperti pembangunan infrastruktur, keterlibatan sektor swasta, pariwisata berbasis masyarakat, pelestarian budaya dan lingkungan, serta investasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, Indonesia dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi industri pariwisatanya dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial untuk kepentingan masyarakat luas.

Faktor Kunci dan Indikator Kinerja Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan atau *Key Success Factors* (KSF) dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia mencakup elemen-elemen strategis yang menjadi pilar keberhasilan pengembangan sektor pariwisata nasional. Faktor-faktor ini dirancang untuk memastikan bahwa pariwisata berkembang dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Faktor tersebut melibatkan berbagai elemen yang saling terkait dan membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif yang memperhatikan sifat industri yang beraneka ragam. Dengan terus membangun faktor-faktor kunci keberhasilan dan membina kemitraan yang kuat di antara semua pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan dapat membangun dirinya sebagai tujuan wisata unggulan yang menawarkan pengalaman unik dan berkesan bagi pengunjung sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi penduduk setempat. Hal ini akan melibatkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan infrastruktur, memfasilitasi investasi sektor swasta, memberdayakan masyarakat setempat, melestarikan aset budaya dan alam, serta mengembangkan tenaga kerja pariwisata terampil, yang akan berdampak positif terhadap pembangunan kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Melalui komitmen berkelanjutan terhadap prioritas strategis ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi penuh sektor pariwisatanya dan memposisikan Indonesia sebagai tujuan global terkemuka. Namun demikian, diperlukan pengukuran nyata terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan melalui indikator nyata yang dapat terukur dengan jelas. Faktor dan indikator kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan Indonesia tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan pariwisata. Faktor-faktor ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperhatikan dan dioptimalkan, serta menyediakan kerangka kerja untuk menilai kinerja dan keberlanjutan kepariwisataan Indonesia yang terlihat dalam faktor-faktor kunci

keberhasilan pembangunan kepariwisataan Indonesia beserta indikator-indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilannya.

Tabel 8 *Key Success Factor & Key Performance Indicator* Pembangunan Kepariwisata Nasional

No.	Uraian	Key Success Factor	Key Performance Indicator
1.	Penguatan Tata Kelola dan Kolaborasi Lintas Sektor	Kolaborasi dengan berbagai stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Antar Daerah: Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait capaian data sektor terkait, serta kerja sama antar daerah dalam pengembangan destinasi pariwisata terpadu. • Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Komunitas Lokal: Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas lokal untuk pengembangan destinasi wisata, termasuk investasi di sektor pariwisata dan pengembangan produk wisata. • Pembentukan Forum Pariwisata Daerah: Membentuk forum pariwisata daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
2.	Data dukung capaian Indikator Kepariwisata	Publikasi data sekunder dihasilkan oleh K/L/D serta Mitra Internasional terupdate secara real-time	<ul style="list-style-type: none"> • Data Kementerian/Lembaga/Daerah. Publikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi yang menjadi rangkaian data dukung updating data kepariwisataan Indonesia. • Data Mitra Internasional. Publikasi data yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang berbasis data nasional, yang digunakan oleh WEF dalam perhitungan daya saing global.
3.	Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan	Pembangunan destinasi yang memperhatikan daya dukung lingkungan, keanekaragaman hayati, kelestarian budaya lokal, dan	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Daya Dukung Lingkungan: Persentase daya dukung lingkungan (carrying capacity) di destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik. • Pengelolaan Sampah dan Limbah: Rasio pengelolaan sampah dan limbah di destinasi wisata (misalnya, volume sampah

No.	Uraian	Key Success Factor	Key Performance Indicator
		keberlanjutan sosial-ekonomi.	<p>yang didaur ulang atau dikelola dengan baik).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keseimbangan Ekosistem: Tingkat kerusakan ekosistem dan upaya pemulihan lingkungan akibat aktivitas pariwisata. • Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal: Proporsi masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam industri pariwisata (misalnya, sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, atau penyedia jasa transportasi lokal).
4.	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pariwisata	Pengembangan kualitas SDM yang unggul dan berkompentensi tinggi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Pekerja Terlatih: Jumlah tenaga kerja pariwisata yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi. • Ketersediaan Tenaga Kerja Profesional: Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi profesional di sektor pariwisata (misalnya, lulusan sekolah tinggi pariwisata, pekerja dengan pengalaman kerja di bidang perhotelan atau agen perjalanan). • Kepuasan Wisatawan terhadap Layanan: Indeks kepuasan wisatawan terhadap layanan yang diberikan di destinasi wisata.
5.	Pengembangan Produk Wisata dan Inovasi	Diversifikasi dan inovasi dalam produk pariwisata yang sesuai dengan tren global serta pengembangan atraksi wisata yang menarik.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Produk Wisata Baru: Jumlah produk wisata baru yang dikembangkan setiap tahun (misalnya, pengembangan ekowisata, wisata petualangan, wisata wellness). • Tingkat Kunjungan ke Destinasi Baru: Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata baru atau kawasan yang dikembangkan. • Rasio Atraksi Berbasis Digital: Persentase atraksi wisata yang menggunakan teknologi digital (seperti augmented reality, virtual tours) untuk meningkatkan pengalaman wisata.
6.	Aksesibilitas dan Konektivitas Destinasi	Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata dengan memperbaiki infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Transportasi yang Memadai: Rasio ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi (jalan raya, bandara, pelabuhan) menuju destinasi wisata utama.

No.	Uraian	Key Success Factor	Key Performance Indicator
		transportasi dan konektivitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi Transportasi Publik: Frekuensi layanan transportasi umum (bus, kereta, penerbangan) menuju destinasi wisata. • Indeks Aksesibilitas Destinasi: Penilaian aksesibilitas destinasi berdasarkan waktu tempuh, ketersediaan moda transportasi, dan kenyamanan.
7.	Pengelolaan dan Tata Kelola Destinasi yang Baik	Tata kelola destinasi yang profesional dan berorientasi pada pelestarian serta pemberdayaan masyarakat setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Tata Kelola Pariwisata: Penilaian tata kelola destinasi berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas. • Jumlah Destinasi yang Tersertifikasi: Jumlah destinasi wisata yang telah mendapatkan sertifikasi sesuai standar internasional (misalnya, Green Destinations, Global Sustainable Tourism Council). • Penerapan Praktik Keberlanjutan: Persentase destinasi wisata yang menerapkan praktik keberlanjutan dalam pengelolaan (penggunaan energi terbarukan, konservasi air, pengelolaan limbah).
8.	Promosi dan Branding Pariwisata yang Efektif	Promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif serta pengembangan branding yang kuat dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan: Pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan internasional per tahun. • Tingkat Pengakuan Branding: Pengakuan brand pariwisata nasional (misalnya, "Wonderful Indonesia") di pasar internasional. • Indeks Kepuasan Promosi: Tingkat kepuasan wisatawan terhadap materi promosi dan pemasaran pariwisata.
9.	Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi terhadap PDB: Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. • Penciptaan Lapangan Kerja: Jumlah lapangan kerja baru yang tercipta dari sektor pariwisata (direct dan indirect employment). • Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Indeks kesejahteraan masyarakat lokal di

No.	Uraian	Key Success Factor	Key Performance Indicator
			daerah pariwisata (misalnya, peningkatan pendapatan per kapita, berkurangnya tingkat kemiskinan).
10.	Keamanan dan Keselamatan Wisatawan	Jaminan keamanan dan keselamatan wisatawan di destinasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Keamanan Destinasi: Tingkat keamanan destinasi berdasarkan laporan insiden, tindak kriminalitas, dan bencana. • Ketersediaan Layanan Darurat: Ketersediaan layanan kesehatan dan keamanan, seperti klinik kesehatan, pos polisi, serta sistem mitigasi bencana di destinasi wisata. • Kepuasan Wisatawan terhadap Keamanan: Indeks kepuasan wisatawan terkait rasa aman dan nyaman selama berkunjung ke destinasi wisata.
11.	Adaptasi terhadap Perubahan dan Manajemen Krisis	Kemampuan destinasi dan pelaku industri pariwisata dalam beradaptasi terhadap perubahan, krisis, atau tren baru dalam pariwisata global.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan Manajemen Krisis: Indeks kesiapan manajemen krisis destinasi dalam menghadapi bencana atau situasi darurat. • Strategi Adaptasi terhadap Perubahan Tren: Jumlah dan kualitas inovasi yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan tren pariwisata baru (misalnya, digitalisasi, pariwisata berbasis kesehatan). • Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengembangan pariwisata di Indonesia, memberikan arah bagi kebijakan yang perlu diterapkan, serta memastikan bahwa pembangunan pariwisata menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
12.	Pengembangan Infrastruktur Digital	Penyediaan akses internet dan teknologi digital di destinasi wisata untuk mendukung layanan pariwisata berbasis teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan platform digital untuk menyediakan transportasi dan pengiriman. Kebermanfaatan penggunaan layanan platform digital oleh masyarakat dan industry, yang dapat mendukung layanan cepat kepada konsumen transportasi dan jasa pengiriman. • Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan layanan hotel, restoran, dan aktivitas rekreasi. Kebermanfaatan penggunaan layanan platform digital oleh masyarakat dan industry, yang dapat

No.	Uraian	Key Success Factor	Key Performance Indicator
			<p>mendukung layanan cepat kepada konsumen hotel, restoran, dan aktivitas rekreasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umpan balik dalam penyelenggaraan pariwisata. Digunakan sebagai bahan review dari konsumen dalam memberikan signal layanan positif dengan review yang bagus sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen berikutnya.

Faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut memainkan peranan penting dalam memastikan pembangunan kepariwisataan Indonesia berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, memberikan dampak positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menciptakan pariwisata yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Namun demikian, penyusunan Indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengembangan kepariwisataan di Indonesia, memberikan arah bagi kebijakan yang perlu diterapkan, serta memastikan bahwa pembangunan kepariwisataan menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, faktor kunci dan indikator keberhasilan dapat menjadi *leverage* atau pengungkit pertumbuhan positif pembangunan kepariwisataan di kancah global.

STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA

Selama satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk mengembangkan industri pariwisata sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial (Yusuf et al., 2018). Untuk mendukung pertumbuhan ini, pemerintah telah banyak berinvestasi dalam infrastruktur, promosi, aksesibilitas, konektivitas, serta pengembangan fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Sektor pariwisata telah menjadi kontributor signifikan terhadap PDB Indonesia, yang diperkirakan mencapai 10,2% dari aktivitas ekonomi negara ini, atau sekitar \$7,6 triliun dalam transaksi, dan menyediakan sekitar 432 juta pekerjaan di seluruh dunia (Antara & Sumarniasih, 2017). Namun, seiring dengan terus berkembangnya sektor ini, semakin dibutuhkan strategi pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan manfaat sektor pariwisata Indonesia.

Pemerintah telah menyadari kebutuhan ini dan telah mulai menerapkan berbagai inisiatif pemantauan dan evaluasi, termasuk pengembangan indikator kinerja utama, pengumpulan data rutin, dan penilaian dampak. Upaya ini telah membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menginformasikan keputusan kebijakan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang mungkin akan dihadapi selama monitoring dan evaluasi (Reinman, 2015). Salah satu tantangan utama dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan kepariwisataan

Indonesia adalah kurangnya data yang komprehensif dan dapat diandalkan. Meskipun pemerintah telah berupaya mengumpulkan data tentang berbagai indikator terkait pariwisata, sering kali terdapat kesenjangan dalam data, khususnya di tingkat daerah. Selain itu, data yang dikumpulkan tidak selalu dibagikan secara efektif di antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga sulit untuk memperoleh pemahaman holistik tentang kinerja dan dampak sektor tersebut.

Tantangan lainnya adalah perlunya koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata, termasuk lembaga pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pariwisata, dan masyarakat setempat. Koordinasi yang lebih baik akan membantu menyelaraskan upaya pemantauan dan evaluasi, memfasilitasi pembagian data dan praktik terbaik, serta memastikan bahwa berbagai kebutuhan dan perspektif semua pemangku kepentingan diperhitungkan. Selain itu, ada kebutuhan untuk membangun kapasitas pemangku kepentingan tingkat daerah untuk terlibat dalam pemantauan dan evaluasi yang efektif. Banyak pemerintah daerah dan masyarakat tidak memiliki sumber daya, keahlian, dan perangkat teknis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara efektif.

Berinvestasi dalam pengembangan kapasitas dan memberikan dukungan kepada mitra lokal dapat membantu mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa upaya pemantauan dan evaluasi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Terlepas dari tantangan ini, ada juga peluang signifikan untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia. Komitmen pemerintah terhadap pengambilan keputusan berbasis bukti dan investasinya dalam penelitian dan pengembangan merupakan tanda-tanda menggembirakan bahwa pemerintah mengakui pentingnya pemantauan dan evaluasi yang efektif. Selain itu, semakin tersedianya teknologi digital dan alat analisis data dapat membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data pariwisata, sehingga memungkinkan upaya pemantauan dan evaluasi yang lebih kuat.

Menuju Kerangka Pemantauan dan Evaluasi yang Komprehensif

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, kerangka kerja pemantauan dan evaluasi perlu untuk dijelaskan dan disusun lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pembangunan kepariwisataan Indonesia. Proses monitoring dan evaluasi akan dilakukan minimal sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi berdasarkan kerangka kerja yang disusun. Kerangka kerja ini harus mencakup komponen-komponen utama berikut:

- 1) **Pengumpulan dan Pengelolaan Data yang Komprehensif.** Mengembangkan sistem yang kuat dan terstandarisasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan berbagi data terkait pariwisata di tingkat nasional, regional, dan lokal.
- 2) **Kolaborasi Multipihak.** Menetapkan mekanisme untuk mengoordinasikan dan berkolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, Asosiasi Pariwisata, dan masyarakat lokal.

- 3) **Peningkatan Kapasitas.** Berinvestasi dalam pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan tingkat lokal untuk terlibat dalam pemantauan dan evaluasi yang efektif, termasuk penggunaan perangkat digital dan analisis data.
- 4) **Evaluasi Terpadu.** Melakukan evaluasi rutin dan komprehensif yang menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan kepariwisataan, serta efektivitas kebijakan dan program pemerintah.
- 5) **Manajemen Adaptif.** Memanfaatkan wawasan yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi untuk menginformasikan keputusan kebijakan dan penyesuaian program, memastikan bahwa pengembangan pariwisata tetap responsif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Dengan menerapkan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi yang komprehensif ini, pemerintah Indonesia dapat memperkuat pemahamannya tentang sektor kepariwisataan dan memastikan bahwa strategi pembangunannya berbasis bukti, inklusif, dan berkelanjutan (Ayu & Diswandi, 2023; Gutierrez et al., 2021; Haryana, 2020). Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan menangani berbagai kebutuhan dan perhatian semua pemangku kepentingan, mulai dari lembaga nasional hingga masyarakat lokal. Pada akhirnya, sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat dapat mendukung pertumbuhan dan ketahanan jangka panjang industri pariwisata Indonesia, yang berkontribusi pada tujuan pembangunan ekonomi dan sosial negara yang lebih luas.

Strategi Pemantauan dan Evaluasi

Salah satu komponen utama keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Indonesia adalah penerapan strategi pemantauan dan evaluasi yang aktif dan efektif. Hal ini melibatkan penilaian yang sistematis dan objektif terhadap pelaksanaan berdasarkan hasil program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan. Evaluasi harus secara tepat dan terukur selaras dengan kerangka logis intervensi pembangunan, baik dalam bentuk kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan tertentu.


- 1) Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
 - a. Menyusun kerangka logis yang mencakup input, output, outcome, dan impact dari setiap program pembangunan pariwisata. Kerangka logis ini harus selaras dengan tujuan pembangunan kepariwisataan Indonesia.
 - b. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) atau indikator kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Indikator ini mencakup seluruh aspek yang terdapat pada pilar-pilar pembangunan kepariwisataan nasional dan global.
- 2) Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi
 - a. Menentukan sasaran spesifik yang akan dipantau dan dievaluasi, baik pada tingkat kegiatan, program, maupun kebijakan. Setiap target harus terukur dengan menggunakan baseline data yang memadai.

- b. Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, sesuai dengan kompleksitas program dan kebijakan yang dijalankan.
 - c. Menentukan peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pariwisata, dan komunitas lokal dalam pelaksanaan Monev.
- 3) Pengumpulan Data dan Analisis
- a. Mengumpulkan data yang relevan melalui survei, wawancara, observasi langsung, serta data sekunder dari Kementerian/Lembaga/Insitusi terkait serta Pemerintah Daerah.
 - b. Menggunakan teknologi digital dalam rangka pengumpulan data dan hasil analisis sesuai dengan metodologi perhitungan.
 - c. Mengevaluasi efektivitas kegiatan/program/kebijakan berdasarkan outcome yang dicapai terkait dengan indikator pembangunan kepariwisataan.
- 4) Pelaporan dan Umpan Balik
- a. Menyusun laporan Monev secara rinci yang mencakup hasil pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini harus disampaikan secara berkala kepada pemangku kepentingan terkait.
 - b. Mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada semua pihak yang terlibat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan strategi pengembangan selanjutnya.
 - c. Mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut hasil evaluasi harus diimplementasikan dalam bentuk penyesuaian kebijakan atau pengembangan program baru.

KESIMPULAN DAN MASA DEPAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA

Pembangunan kepariwisataan Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta promosi budaya dan kekayaan alam Indonesia di kancah internasional. Pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ke 22 dari 119 negara, yang dimana mengalami peningkatan sebanyak +48 peringkat dari peringkat 70 pada tahun 2013, atau mengalami kenaikan +14 peringkat dari tahun 2019. Pada Kawasan Asia-Pasifik, Indonesia masuk dalam kelompok 6 besar, atau naik 1 peringkat dari TTDI 2021, yang dimana Indonesia mampu menggeser Selandia Baru dari peringkat ke-6.

Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia di kancah global dalam menjawab tantangan dan isu global, ada baiknya Indonesia harus belajar dari negara-negara di Kawasan Asia Pasifik yang berhasil menjadi yang terbaik pada indikator pembangunan kepariwisataan global. Seperti halnya negara Singapore yang memiliki peran strategis dalam kemajuan pembangunan kepariwisataan di Kawasan asia pasifik yang mampu menjadi peringkat 1 (satu) di dunia dan peringkat 1 (satu) di Kawasan asia pasifik pada dimensi *infrastructure & services*. Selain itu, negara china yang berhasil menjadi yang terbaik di dunia pada dimensi *T&T Resources*. Indonesia harus menyadari bahwa kebijakan yang dibangun negara-negara



tersebut dapat membantu mereka unggul dalam capaian data kepariwisataan global, oleh karena itu perlu diperdalam Kembali terkait program dan kegiatan apa yang dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia kedepan.

Menuju 15 besar dunia di akhir periode jangka menengah, Indonesia harus mampu memperkuat daya saing kepariwisataan yang dimiliki, karena negara-negara pesaing tidak akan tidur dan akan melakukan perbaikan secara terstruktur dan terintegrasi dengan baik, seperti halnya yang dilakukan oleh Singapore, Korea Rep., New Zealand, Thailand, Malaysia, dan bahkan India. Melalui perbaikan indikator-indikator pembangunan kepariwisataan, diharapkan Indonesia akan mengalami peningkatan daya saing setiap periode perhitungan. Hal ini telah sesuai dengan kerangka program pembangunan dalam Rancangan RPJMN 2025-2029, yang dimana Indeks Pembangunan Pariwisata (*Travel & Tourism Development Index/TTDI*) menjadi salah satu program prioritas setor pariwisata yang ditopang dengan kegiatan pembangunan berupa penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional/IPKN di seluruh Provinsi.

Penyelenggaraan IPKN dalam mendukung Peningkatan peringkat TTDI Indonesia telah sesuai dengan arah kebijakan *Grand Design Travel & Tourism Strategies* (GDTTS). Hal ini selaras dengan strategi penguatan kepariwisataan di tingkat provinsi melalui pengembangan Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (IPKKK). Kerangka *Grand Design* tersebut dibangun untuk memberikan dampak positif atas capaian kepariwisataan Indonesia pada tingkat global yang diintegrasikan atas capaian kepariwisataan di tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi, sehingga akan memberikan konteks baru berupa Tujuan Pembangunan Kepariwisata yang Terintegrasi (*Integrated Tourism Development Goals/ITDGs*).

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan strategi kolaborasi lintas sektor yang mampu memberikan hasil positif dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia baik tingkat nasional maupun global. Strategi tersebut dapat dimuat dalam penyusunan Roadmap strategis yang bertujuan untuk menggapai tujuan besar Indonesia yakni Peringkat 15 Besar Dunia pada TTDI. Hal tersebut perlu didukung dengan pertumbuhan positif melalui peningkatan rerata Indonesia pada capaian pembangunan IPKN, yang diharapkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mendukung capaian tersebut, perlu didorong penguatan daya saing pembangunan kepariwisataan pada tingkat kabupaten/kota dengan target Asistensi pembangunan IPKK pada 38 Provinsi di tahun 2028.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi kreatif nasional menjadi satu rangkaian penting dalam pencapaian ekonomi tinggi Indonesia. Pada roadmap yang telah dibangun diharapkan terjadi peningkatan dalam beberapa aspek untuk memperkuat daya saing kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Indonesia di kancah global, seperti Jumlah Unesco Creative Cities Network (UCCN) sebanyak: 10 Kota pada tahun 2029; Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB sebesar: 8,37% pada Tahun 2029; dan Produktivitas Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Rp. 98,759 Juta /Orang pada tahun 2029. Berbagai tolak ukur tersebut diharapkan dapat disusun program-program yang dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi kreatif dimasa mendatang dan juga capaian daya saing Indonesia di kancah global.

Melihat situasi pembangunan kepariwisataan Indonesia saat ini, diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan kepariwisataan di tingkat

nasional dan daerah. Kerangka kerja tersebut dapat didukung dengan *Key Success Factor* dan *Key Performance Indicator* yang dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi atas capaian pembangunan kepariwisataan Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa kesimpulan utama dari seluruh pembahasan dalam naskah ini untuk mendukung penguatan pembangunan kepariwisataan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan, yakni sebagai berikut:

- 1) **Pentingnya Pariwisata Sebagai Motor Penggerak Ekonomi.** Pariwisata telah menjadi kontributor utama bagi perekonomian Indonesia dengan meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor jasa, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru, khususnya di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata unggulan.
- 2) **Peningkatan Daya Saing Kepariwisata Indonesia.** Melalui peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas, daya dukung lingkungan, dan sumber daya pariwisata lainnya, serta kualitas sumber daya manusia, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat global. Program pengembangan destinasi prioritas dan strategi branding “Wonderful Indonesia” telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
- 3) **Tantangan dalam Keberlanjutan.** Meski perkembangan pesat telah dicapai, terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti dampak lingkungan, pengelolaan daya dukung destinasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus memastikan bahwa pertumbuhan ini tidak merusak lingkungan dan budaya setempat.
- 4) **Peluang Kolabora(k)si dan Inklusivitas.** Pembangunan kepariwisataan Indonesia melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha, pemerintah, dan wisatawan dalam pengembangan pariwisata. Melalui kolaborasi yang terjalin dengan baik, kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan strategi yang diterapkan.
- 5) **Kebutuhan Akan Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Efektif.** Keberhasilan pembangunan kepariwisataan sangat dipengaruhi oleh proses monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan target, berdampak positif, dan dapat terus disesuaikan dengan perubahan kondisi global.

Masa Depan Pembangunan Kepariwisata Indonesia

Ke depan, pembangunan kepariwisataan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dan adaptif untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan Indonesia di masa depan. Dengan target peringkat 15 besar dunia di akhir rencana pembangunan jangka menengah, diharapkan kolaborasi lintas sektor dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk mendukung hal tersebut, arah masa depan pembangunan kepariwisataan Indonesia diantaranya meliputi:

a. Penguatan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Pengembangan pariwisata berkelanjutan harus menjadi prioritas utama. Ini mencakup pelestarian lingkungan, pengelolaan daya dukung, serta pemanfaatan sumber daya alam

dan budaya yang bertanggung jawab. Penerapan sertifikasi destinasi wisata berkelanjutan dan penerapan praktik ramah lingkungan akan menjadi bagian integral dari pembangunan pariwisata di masa depan.

b. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi

Pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kunci dalam pengembangan pariwisata, baik dalam pemasaran, pemantauan, maupun peningkatan pengalaman wisatawan. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan destinasi, memantau arus kunjungan wisatawan, dan menyediakan informasi secara real-time dalam mendukung capaian data kepariwisataan Indonesia. Penggunaan teknologi seperti augmented reality (AR), virtual reality (VR), dan big data dapat meningkatkan daya tarik dan efisiensi pengelolaan kepariwisataan di masa depan.

c. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata harus ditingkatkan agar mampu bersaing di tingkat global. Program pelatihan dan sertifikasi harus dilakukan secara masif untuk memastikan SDM pariwisata Indonesia memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, peningkatan penguasaan bahasa asing, pemahaman terhadap budaya global, serta kemampuan dalam menghadapi wisatawan dari berbagai negara perlu ditingkatkan. Namun daripada itu, penguatan daya saing SDM juga dapat membantu dalam proses pembangunan data kepariwisataan yang terintegrasi, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap capaian kepariwisataan Indonesia di kancah global.

d. Penguatan Citra, Branding, dan Promosi


Citra positif kondisi kepariwisataan Indonesia akan memberikan daya Tarik tersendiri bagi para investor, sehingga akan menjadi *leverage* dalam penguatan ekonomi nasional. Selain itu, Penguatan branding nasional “Wonderful Indonesia” perlu dilanjutkan dengan strategi promosi yang lebih terfokus pada segmen pasar yang dituju. Penggunaan media digital, influencer, dan promosi di berbagai pameran internasional harus diintensifkan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara.

e. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur

Infrastruktur yang dibahas dalam hal ini tidak hanya infrastruktur jalan, melainkan infrastruktur pembangunan yang mendukung sektor kepariwisataan Indonesia seperti infrastruktur digital, Kesehatan, transportasi, dll. Peningkatan konektivitas dan infrastruktur pariwisata akan mendukung aksesibilitas ke seluruh Kawasan pariwisata utama melainkan hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, Kesehatan, serta infrastruktur telekomunikasi menjadi kunci untuk membuka akses dan mempercepat pengembangan pariwisata di daerah-daerah tersebut. Hal ini juga sejalan dengan target Indonesia dalam meningkatkan performansi atas capaian infrastruktur. Oleh sebab itu, dukungan dari berbagai stakeholder dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas dapat memperkuat posisi Indonesia kedepan.

f. Menjaga keterbukaan pariwisata Indonesia.

Indonesia masih harus banyak belajar dari negara-negara unggulan sektor pariwisata. Melalui percepatan kebijakan khususnya kebijakan visa diharapkan dapat membuat



Indonesia menjadi destinasi unggulan pariwisata di Kawasan Asia Pasifik. Melalui langkah kolaborasi lintas sektor, akan menjadikan kebijakan ini dapat di implementasikan dengan baik yang didukung oleh elemen pariwisata pada umumnya, sehingga dapat memberikan daya Tarik tersendiri dalam berkunjung ke Indonesia.






DAFTAR PUSTAKA

- Abo El Nile, M. S. (2022). Towards Activating an Integrated Digital Platform for Egyptian Tourism Sector: A new E-model of Tourism Management. *International Academic Journal Faculty of Tourism and Hotel Management*, 8(2), 73–101. <https://doi.org/10.21608/ijaf.2022.302811>
- Achmad, F., Prambudia, Y., & Rumanti, A. A. (2023). Improving Tourism Industry Performance through Support System Facilities and Stakeholders: The Role of Environmental Dynamism. In *Sustainability* (Vol. 15, Issue 5). <https://doi.org/10.3390/su15054103>
- Alam, J., Alam, Q. N., & Kalam, A. (2022). *Prospects and Challenges for Sustainable Tourism: Evidence from South Asian Countries*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253384222>
- Alonso-Muñoz, S., Torrejón-Ramos, M., Medina-Salgado, M.-S., & González-Sánchez, R. (2023). Sustainability as a building block for tourism – future research: Tourism Agenda 2030. *Tourism Review*, 78(2), 461–474. <https://doi.org/10.1108/TR-12-2021-0568>
- Antara, M., & Sumarniasih, M. (2017). Role of Tourism in Economy of Bali and Indonesia. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 5. <https://doi.org/10.15640/jthm.v5n2a4>
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. (2018). IMPLEMENTASI KOLABORASI MODEL PENTAHELIX DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN POTENSI PARIWISATA DI JAWA TIMUR SERTA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DOMESTIK. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21>
- Ayu, D. A. S., & Diswandi. (2023). Analysis Of The Central Role Of Beach Tourism Objects In Village Economic Development: A Case Study Of Tanjung Bias Beach, West Lombok. *International Journal of Tourism Business Research*, 2(1 SE-Articles), 7–14. <https://doi.org/10.29303/intour.v2i1.630>
- Azhari, N. J., Abd Razak, A., Mohd Noor, M. S., & Mohd Aris, M. M. (2023). Assessing Sustainable Tourism in Kuala Kubu Bharu: A Qualitative Approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(5), 2309–2326. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i5/16899>
- Baloch, Q. B., Shah, S. N., Iqbal, N., Sheeraz, M., Asadullah, M., Mahar, S., & Khan, A. U. (2023). Impact of tourism development upon environmental sustainability: A suggested framework for sustainable ecotourism. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(3), 5917–5930.
- Bhuiyan, M. A. (2014). Integrated Tourism Sector in South-Eastern Asian (Mainland) Countries: A Pathway to Develop for Economic Betterment. *International Journal of Business Administration*, 6(1), 77–86. <https://doi.org/10.5430/ijba.v6n1p77>
- Camilleri, M. A. (2018). Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product: An Introduction to Theory and Practice. In *Tourism, Hospitality and Event Management*. <https://doi.org/10.1057/s41272-018-00173-3>
- Dwi W., H., & Subekti N., B. (2017). Upaya Indonesia Meningkatkan Pariwisata Maritim

- melalui Diplomasi Kebudayaan di Asia Tenggara. *Indonesian Perspective*, 2(1), 51–63. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/15554>
- Fatmawati, I., Bestari, S. A., & Rostiani, R. (2021). Key Success Factors' Identification of Farm Tourism: A Case from Indonesia. *E3S Web Conf.*, 232. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123202020>
- Frost, W., Laing, J., & Beeton, S. (2014). The Future of Nature-Based Tourism in the Asia-Pacific Region. *Journal of Travel Research*, 53(6), 721–732. <https://doi.org/10.1177/0047287513517421>
- Graci, S. (2013). Collaboration and Partnership Development for Sustainable Tourism. *Tourism Geographies*, 15(1), 25–42. <https://doi.org/10.1080/14616688.2012.675513>
- Gutierrez, E. L. M., Rivera, J. P. R., & Soler, A. C. D. (2021). Creating local sustainability indicators towards evidence-based policymaking for tourism in developing economies: Evidence from the Philippines. *Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism*, 22(5), 561–590. <https://doi.org/10.1080/1528008X.2020.1818356>
- Haryana, A. (2020). Economic and Welfare Impacts of Indonesia's Tourism Sector. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(3 SE-Articles), 300–311. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i3.127>
- He, T. T., & Li, W. X. B. (2021). Revisiting tourism's additional impact on income. *Tourism Economics*, 27(1), 149–167. <https://doi.org/10.1177/1354816619887022>
- Hughes, E., & Scheyvens, R. (2018). Development Alternatives in the Pacific: How Tourism Corporates Can Work More Effectively with Local Communities. *Tourism Planning & Development*, 15(5), 516–534. <https://doi.org/10.1080/21568316.2018.1478881>
- Ikasari, H., & Farida, I. (2020). Tourism Industry Competitiveness of Semarang Municipality. *Economics Development Analysis Journal*, 9(2), 169–179. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i2.28938>
- Jiang, C., & Phoong, S. W. (2023). A ten-year review analysis of the impact of digitization on tourism development (2012–2022). *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 665. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02150-7>
- Kabu, M., & Tandilino, S. B. (2021). Sustainable Community-Based Tourism Village Development Strategy in Fatumnasi Village of South Central Timor Regency East Nusa Tenggara. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 91–97. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.019>
- Karim, Z. A., & Suherry, M. (2017). Strategic Plan of Development of Tourism in Bintan Regency. *Proceedings of the International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)*, 261–268. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.51>
- Kememparekraf. (2023). *Indonesia Tourist Profile 23/24*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Khaksar, M. R., & Amir, E. (2023). The Contribution of Tourism to the Economic Growth of a Country. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(07), 4917–4921. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i7-107>
- Khan, A., Bibi, S., Lorenzo, A., Lyu, J., & Babar, Z. U. (2020). Tourism and Development in Developing Economies: A Policy Implication Perspective. In *Sustainability* (Vol. 12, Issue 4). <https://doi.org/10.3390/su12041618>

- Kusumawardhana, I., Lemy, D. M., Nathalia, T. C., & Kristiana, Y. (2021). Towards a common goal for a sustainable tourism destination: Case study of Biak Numfor, Papua, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 729(1), 12097. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/729/1/012097>
- Lemy, D. M., Teguh, F., & Pramezwary, A. (2019). Tourism Development in Indonesia. In *Delivering Tourism Intelligence* (Vol. 11, pp. 91–108). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2042-144320190000011009>
- Liu, Y.-L., Chiang, J.-T., & Ko, P.-F. (2023). The benefits of tourism for rural community development. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 137. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01610-4>
- McCarroll, M. J., LaVanchy, G. T., & Kerwin, M. W. (2024). Tourism resilience to drought and climate shocks: The role of tourist water literacy in hotel management. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 5(2), 100147. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annale.2024.100147>
- McNamara, M. (2012). Starting to Untangle the Web of Cooperation, Coordination, and Collaboration: A Framework for Public Managers. *International Journal of Public Administration*, 35(6), 389–401. <https://doi.org/10.1080/01900692.2012.655527>
- Moh. Fadli, Edi Susilo, Dhiana Puspitawati, Abraham Mohammad Ridjal, Diah Pawestri Maharani, & Airin Liemanto. (2022). Sustainable Tourism as a Development Strategy in Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 10(1), 23–33. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2022.010.01.04>
- Moli, G. P. (2011). Community Based Eco Cultural Heritage Tourism for Sustainable Development in the Asian Region: A Conceptual Framework. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD)*, 2(2), 66–80. <https://doi.org/http://doi.org/10.4018/jsestd.2011040106>
- Muhammad Fahrizal, Rio Sundari, Arsy Ash Shiddiqi, M., & Rani, F. (2022). The Strategy of the Indonesian Government in Implementing the Wonderful Indonesia Digital Diplomacy Program. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1 SE-Articles), 47–65. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v7i1.4814>
- Nie, K., & Tang, X. (2022). Study on Ecological Value Co-Creation of Tourism Enterprises in Protected Areas: Scale Development and Test. In *Sustainability* (Vol. 14, Issue 16). <https://doi.org/10.3390/su141610151>
- Nunkoo, R., & Seetanah, B. (2018). *Foreign Direct Investment and Tourism Development: A Theoretical and Empirical Review*. 1–49.
- Ramesh, D. (2010). Tourism and economic growth: The case of Mauritius. *Tourism Economics*, 15(2), 63–68.
- Reinman, S. L. (2015). Open Knowledge Repository. *Reference Reviews*, 29(5), 21–22. <https://doi.org/10.1108/RR-05-2015-0113>
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2020). Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism. *Policy & Governance Review*, 4(3), 197–209.
- Richardson, R. B. (2010). The Contribution of Tourism to Economic Growth and Food Security. *AgEcon Search*, 1–26.
- Rodrigues, V., Eusébio, C., & Breda, Z. (2023). Enhancing sustainable development through tourism digitalisation: a systematic literature review. *Information Technology &*

- Tourism*, 25(1), 13–45. <https://doi.org/10.1007/s40558-022-00241-w>
- Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders' roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 45(September), 387–398. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.09.005>
- Sakawati, H., Akib, H., Sulmiah, & Widyawati. (2022). Tourism Development in Gowa Regency, South Sulawesi: Analysis of Government, Community, and Private Support. *SHS Web Conf.*, 149. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902040>
- Salihin, A. (2021). THE IMPACT OF THE TOURISM SECTOR ON ECONOMIC GROWTH AND LABOR ABSORPTION IN THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam Volume*, 7(2), 177–185.
- Setiawan, B., Santoso, A. B., Widoyoko, S. E. P., & Widiyantono, D. (2020). *Human Resource Policy: A Strategic Research for Sustainable Tourism Outcomes in Karimunjawa Tourism Village BT - Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*. 321–326. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.066>
- Sinclair, M. T. (1998). Tourism and economic development: a survey. *Journal of Development Studies*, 34(5), 1–51. <https://doi.org/10.1080/00220389808422535>
- Stacchini, A., Guizzardi, A., & Costa, M. (2022). The Value of Sustainable Tourism Destinations in the Eyes of Visitors. *Highlights of Sustainability*, 1(3), 202–223. <https://doi.org/10.54175/hsustain1030015>
- Tandilino, S. B., & Kabu, M. (2021). Design Village Tourism Package Model to Support the Application of Estate Tourism Program in East Nusa Tenggara. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 299–304. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.058>
- Telfer, D. J., & Sharpley, R. (2010). Tourism and Development in the Developing World. In *Tourism Management* (Vol. 31, Issue 2). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.03.018>
- UNWTO. (2010). *International Recommendations for Tourism Statistics 2008*. <https://doi.org/10.18356/05265168-en>
- UNWTO. (2021). The Economic Contribution of Tourism and the Impact of COVID-19. In *The Economic Contribution of Tourism and the Impact of COVID-19* (Issue November). <https://doi.org/10.18111/9789284423200>
- WEF. (2024). *Asia-Pacific Performance Overview*. <https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/interactive-data-and-economy-profiles-afaa00a59c/>.
- WEF, & University of Surrey. (2024). *Travel & Tourism Development Index 2024 - Insight Report*. <https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/in-full/>
- World Economic Forum. (2024). *Interactive data and economy profiles TTDI 2024*. <https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/interactive-data-and-economy-profiles-afaa00a59c/>.
- World Travel & Tourism Council (WTTTC). (2022). *Travel & Tourism Economic Impact*. <https://wtcc.org/research/economic-impact>.
- WTTC. (2024). *Report on World Tourism Economy Trends (2024)*.

- 
- https://media.wtcf.org.cn/M00/03/8C/rBFBUWanTK-AaP_hACoi6Trovjg089.pdf
- Yusuf, M., Samsura, D. A. A., & Yuwono, P. S. H. (2018). Toward a framework for an undergraduate academic tourism curriculum in Indonesian Universities: Some perspectives from stakeholders. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 22, 63–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2018.02.003>
- Zamora, C. R. (2020). Sustainability and Tourism in the Era of Asia Pacific. *J. of Tourism and Hospitality Management*, 8(5), 186–202. <https://doi.org/10.17265/2328-2169/2020.05.002>



DesaSATU

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF